



PERUBAHAN RPJMD

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

Jalan Jendral Ahmad Yani No. 100 Bayuwangi 68411

<http://banyuwangikab.go.id>

BANYUWANGI

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	4
1.3. Hubungan Antar Dokumen	8
1.3.1. Telaah Keselarasan Hubungan RPJMN Tahun 2015-2019, RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 dan Perubahan RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021	9
1.3.2. Telaah Keselarasan Hubungan RPJPD Kabupaten Banyuwangi 2005-2025 dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021	12
1.3.3. Telaah Keselarasan Hubungan RTRW Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032 dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021	14
1.3.4. Telaah Hubungan RPJMD Perubahan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021 dengan KLHS	20
1.3.5. Telaah Hubungan Dokumen RPJMD Daerah Sekitar Kabupaten Banyuwangi dengan RPJMD Perubahan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021	21
1.4. Maksud dan Tujuan	27
1.5. Sistematika Penulisan	29
BAB II: GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	31
2.1. Aspek Geografi dan Demografi.....	31
2.1.1. Luas Wilayah dan Batas Wilayah	31
2.1.2. Topografi.....	32
2.1.3. Geologi.....	33
2.1.4. Klimatologi	34
2.1.5. Penggunaan Lahan.....	35
2.1.6. Potensi Pengembangan Wilayah	36
2.1.7. Kawasan Rawan Bencana.....	39
2.1.8. Demografi	44
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	48
2.2.1. Capaian Indikator Kinerja Utama.....	50
2.2.2. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	52
2.2.3. Fokus Kesejahteraan Masyarakat.....	62
2.3. Aspek Pelayanan Umum.....	70
2.3.1. Urusan Wajib Layanan Dasar	70
2.3.2. Urusan Wajib Non Layanan Dasar	87

2.3.3	Urusan Pilihan	109
2.3.4	Urusan Penunjang Pemerintah	129
2.4.	Aspek Daya Saing Daerah	132
2.4.1.	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	132
2.4.2.	Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur.....	133
2.4.3.	Fokus Iklim Berinvestasi.....	136
BAB III:	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH.....	141
3.1	Kinerja Keuangan Masa Lalu	142
3.1.1.	Kinerja Pelaksana APBD	143
A.	Pendapatan.....	143
B.	Belanja	146
C.	Pembiayaan.....	148
3.1.2.	Neraca Daerah	151
3.2	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	153
3.2.1	Proporsi Penggunaan Anggaran	158
3.2.2	Analisis Pembiayaan	159
3.3	Kerangka Pendanaan	162
3.3.1	Proyeksi Pendapatan dan Belanja	162
3.3.2	Penghitungan Kerangka Pendanaan	165
BAB IV:	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH	169
4.1	Permasalahan Pembangunan	169
4.1.1.	Permasalahan Pembangunan Sumber Daya Manusia	170
4.1.2.	Permasalahan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan	171
4.1.3.	Permasalahan Kesejahteraan Masyarakat.....	172
4.1.4.	Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	172
4.2	Isu Strategis	173
4.2.1	Isu Internasional.....	173
4.2.2	Isu Regional.....	178
4.2.3	Isu Kebijakan Nasional.....	179
4.2.4	Isu Strategis Pembangunan Jawa Timur 2019-2024.....	181
4.2.5	Isu Strategis Kabupaten Banyuwangi 2016-2021.....	182
BAB V:	VISI, MISI, TUJUAN & SASARAN	187
5.1	Visi	187
5.2	Misi	189
5.2.1	Misi 1.....	192
5.2.2	Misi 2.....	192
5.2.3	Misi 3.....	193
5.3	Tujuan Dan Sasaran	195
5.3.1	Tujuan 1 dan Sasaran Misi I.....	196
5.3.2	Tujuan 2 dan Sasaran Misi II.....	198
5.3.3	Tujuan 2 dan Sasaran Misi II.....	200

5.3.4 Tujuan 3 dan Sasaran Misi III.....	202
BAB VI: STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	209
6.1 Strategi Pembangunan Daerah	209
6.2 Arah Kebijakan	227
6.3 Program Pembangunan Daerah.....	237
BAB VII: KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	257
BAB VIII: KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH	311
BAB IX: PENUTUP.....	315
9.1 Pedoman Transisi	316
9.2 Kaidah Pelaksanaan	317

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1: Keselarasan Hubungan RPJMN Tahun 2015-2019, RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 dan Perubahan RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021.....	10
Tabel 1.2: Keselarasan Hubungan RPJPD Kabupaten Banyuwangi 205-2025 dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021	13
Tabel 1. 3: Keselarasan Hubungan RTRW Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032 dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021.....	15
Tabel 1. 4: Telaah RPJMD Daerah Sekitar.....	21
Tabel 2. 1: Wilayah Administrasi Kabupaten Banyuwangi.....	32
Tabel 2. 2: Luas Tanah Berdasarkan Struktur Geologi Kabupaten Banyuwangi	33
Tabel 2. 3: Jenis Tanah Kabupaten Banyuwangi.....	34
Tabel 2. 4: Rekapitulasi Bencana Alam Kabupaten Banyuwangi 2014-2018.....	41
Tabel 2. 5: Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2018	46
Tabel 2. 6: Kinerja dan Target IKU Kabupaten Banyuwangi.....	51
Tabel 2. 7: Realisasi Indikator Kinerja Pada Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi..	53
Tabel 2. 8: Realisasi Indikator Kinerja Pada Fokus Kesejahteraan Masyarakat.....	63
Tabel 2. 9: Realisasi Indeks Pendidikan dan Presentase PAUD Formal Ber-akreditasi Tahun 2013-2018.....	71
Tabel 2. 10: Capaian Indikator Urusan Pendidikan.....	72
Tabel 2. 11: Realisasi Indikator Sasaran Pada Urusan Kesehatan.....	76
Tabel 2. 12: Realisasi Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil	79
Tabel 2. 13: Realisasi Indikator Sasaran Pada Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	82
Tabel 2. 14: Realisasi Indikator Sasaran Pada Urusan Perumahan Permukiman	84
Tabel 2. 15: Realisasi Indikator Sasaran Pada Urusan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Tahun 2013-2018	85
Tabel 2. 16: Realisasi Indikator Sasaran Pada Urusan Sosial	87
Tabel 2. 17: Realisasi Indikator Program Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigran Tahun 2018	89
Tabel 2. 18: Rekapitulasi Rasio Ketergantungan dan Rasio Angkatan Kerja Tahun 2017-2018	90
Tabel 2. 19: Realisasi Indikator Sasaran Pada Urusan Perempuan Dan Perlindungan Anak....	93

Tabel 2. 20: Realisasi Indikator Sasaran Urusan Pangan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017-2018	94
Tabel 2. 21: Realisasi Indikator Program Pada Urusan Lingkungan	96
Tabel 2. 22: Realisasi Indikator Sasaran Pada Urusan Lingkungan	97
Tabel 2. 23: Realisasi Indikator Sasaran Pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa	98
Tabel 2. 24: Indeks Angka Kecelakaan Lalu Lintas	100
Tabel 2. 25: Realisasi Indikator Sasaran Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018	100
Tabel 2. 26: Realisasi Indikator Program Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018	101
Tabel 2. 27: Realisasi Indikator Sasaran Pada Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	103
Tabel 2. 28: Realisasi Indikator Sasaran Pada Urusan Penanaman Modal (Dalam Trilyun)....	104
Tabel 2. 29: Realisasi Indikator Sasaran Pada Urusan Pemuda dan Olahraga	106
Tabel 2. 30: Realisasi Indikator Program Bidang Perpustakaan Tahun 2018.....	109
Tabel 2. 31: Data Budidaya Kelautan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018	109
Tabel 2. 32: Budidaya Tambak Kabupaten Banyuwangi 2018	110
Tabel 2. 33: Budidaya Air Tawar Kabupaten Banyuwangi 2018	110
Tabel 2. 34: Produksi Dan Nilai Produksi Tangkap Ikan Air Laut menurut Jenisnya di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018	111
Tabel 2. 35: Produksi Dan Nilai Produksi Ikan Perairan Umum Menurut Jenisnya Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018	112
Tabel 2. 36: Realisasi Indikator Sasaran Pada urusan Pariwisata	114
Tabel 2. 37: Jumlah Even B-Fest	114
Tabel 2. 38: Jumlah Kunjungan Wisatawan	115
Tabel 2. 39: Pendapatan Perkapita	115
Tabel 2. 40: Data Luas Panen, Produktifitas dan Produksi Tanaman Bahan Makanan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018	117
Tabel 2. 41: Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan	118
Tabel 2. 42: Data Luas Panen, Rata-rata Produksi dan Total Produksi Sayuran Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018	119
Tabel 2. 43: Produksi dan Produktivitas Sayuran	120

Tabel 2. 44: Data Luas Panen Rata-rata Produksi dan Total Produksi Buah-buahan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018	120
Tabel 2. 45: Produksi dan Produktivitas Buah	121
Tabel 2. 46: Luas Panen, Luas Tanaman dan Total Produksi Tanaman Perkebunan Swasta Nasional Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018	122
Tabel 2. 47: Produksi dan Produktivitas Perkebunan	123
Tabel 2. 48: Luas Panen, Luas Tanaman dan Total Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018	123
Tabel 2. 49: Produksi Daging, Susu dan Telur Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018	126
Tabel 2. 50: Produk Domestik Regional Bruto Sektor Perdagangan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015-2018	127
Tabel 2.51: Produk Domestik Regional Bruto Sektor Industri Kabupaten Banyuwangi tahun 2015-2018	129
Tabel 2.52: Realisasi Indikator Sasaran Pada Urusan Penunjang Pemerintah.....	131
Tabel 2.53: NTP Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2018	132
Tabel 2.54: Desa Swasembada di Kabupaten Banyuwangi	133
Tabel 2.55: Realisasi Indikator Pada Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur.....	134
Tabel 2.56: Realisasi Indikator Pada Fokus Fasilitas Air bersih	135
Tabel 2.57: Realisasi Indikator Pada Fokus Iklim Berinvestasi	136
Tabel 3. 1: Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi	143
Tabel 3. 2: Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011-218	146
Tabel 3. 3: Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011-2018	150
Tabel 3. 4: Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Tahun 2016-2018.....	151
Tabel 3. 5: Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	159
Tabel 3. 6: Defisit Riil Anggaran Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011-2018.....	160
Tabel 3. 7: Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011-2018	161
Tabel 3.8: Proyeksi Keuangan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019-2021 (Pendapatan)	163
Tabel 3.9: Proyeksi Keuangan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019-2021 (Belanja) .	164
Tabel 3.10:Proyeksi Keuangan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019-2021(Pembiayaan)	165

Tabel 3.11: Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah.....	166
Tabel 3.12: Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah.....	167
Tabel 5.1:Perwujudan Visi RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2016-2021.....	188
Tabel 5.2: Matriks Konsistensi Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	205
Tabel 6.1: Analisis SWOT dan Perumusan Strategi Misi 1	211
Tabel 6.2: Analisis SWOT dan Perumusan Strategi Misi 2	214
Tabel 6.3: Analisis SWOT dan Perumusan Strategi Misi 3	221
Tabel 6.4: Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan strategis	224
Tabel 6.5: Arah Kebijakan Pembangunan.....	228
Tabel 6.6: Arah Kebijakan Pembangunan Tahunan Kabupaten Banyuwangi	233
Tabel 6.7: Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Banyuwangi Misi 1 (Tujuan 1).....	238
Tabel 6.8: Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Banyuwangi Misi 2 (Tujuan 2).....	244
Tabel 6.9: Program Pembangunan Daerah Yang Disertai Pagu Indikatif Kabupaten Banyuwangi Misi 2 (Tujuan 3).....	249
Tabel 6.10: Program Pembangunan Daerah Yang Disertai Pagu Indikatif Kabupaten Banyuwangi Misi 3 (Tujuan 4)	252
Tabel 7.1: Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019-2021	259
Tabel 7.2: Indikasi Rencana Program Prioritas I yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019-2021	260
Tabel 7.3:Indikasi Rencana Program Prioritas II yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019-2021	276
Tabel 7.4: Indikasi Rencana Program Prioritas III yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019-2021	292
Tabel 8.1: Realisasi Capaian IKU Tahun 2016-2018 dan Proyeksi Capaian IKU Tahun 2019-2021 Pemerintah Kabupaten Banyuwangi	312
Tabel 8.2: Realisasi Capaian Indikator Sasaran Tahun 2016-2018 dan Proyeksi Capaian Indikator Sasaran Tahun 2019-2021 Pemerintah Kabupaten Banyuwangi	313

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1: Hubungan Antar Dokumen Perencanaan	9
Gambar 2. 1: Peta Kabupaten Banyuwangi	31
Gambar 2. 2: Proporsi Penggunaan Lahan di Kabupaten Banyuwangi.....	36
Gambar 2. 3: Peta Rawan Bencana Gunung Berapi Kabupaten Banyuwangi.....	42
Gambar 2. 4: Peta Rawan Bencana Tsunami Kabupaten Banyuwangi	43
Gambar 2. 5: Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Tahun 2015 – 2018.....	44
Gambar 2. 6: Jumlah Penduduk Kabupaten Banyuwangi Berdasarkan Usia Tahun 2018	45
Gambar 2. 7: Jumlah Penduduk Kabupaten Banyuwangi Berdasarkan Mata Pencaharian Tahun 2018	47
Gambar 2. 8: Klasifikasi Capaian Indikator Kinerja Pembangunan	48
Gambar 2. 9: Gap Expectations IKU Kabupaten Banyuwangi	50
Gambar 2. 10: Gap Expectations Indikator Pada Fokus Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi.....	52
Gambar 2. 11: Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Gini Tahun 2011-2018.....	54
Gambar 2. 12: Pendapatan Regional Bruto Kabupaten Banyuwangi 2018	56
Gambar 2. 13: Presentase Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Sektor di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 terhadap Tahun 2015.....	56
Gambar 2. 14: Gambar Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyuwangi 2010 – 2018	58
Gambar 2. 15: Realisasi Indikator Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyuwangi	59
Gambar 2. 16: Gini Rasio Kabupaten Banyuwangi dan Provinsi Jawa Timur 2012 – 2018.....	60
Gambar 2. 17: Capaian Indikator Indeks Gini Kabupaten Banyuwangi	61
Gambar 2. 18: Gap Expectations Capaian Indikator Pada Fokus Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2018 Terhadap Target Tahun 2020	62
Gambar 2. 19: Realisasi Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Manusia	64
Gambar 2. 20: Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018	64
Gambar 2. 21: Tingkat Pengangguran Tahun 2011-2018.....	66
Gambar 2. 22: Capaian Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Banyuwangi	67

Gambar 2. 23: Angka Kemiskinan Tahun 2011-2018	68
Gambar 2. 24: Capaian Indikator Tingkat kemiskinan Kabupaten Banyuwangi	69
Gambar 2. 25: Indeks Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013-2018.....	70
Gambar 2. 26: Gap Expectations Indikator pada Urusan Pendidikan Tahun 2018 Terhadap 2020	72
Gambar 2. 27: Cakupan KB Aktif Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013-2018.....	74
Gambar 2. 28: Indeks Kesehatan Keluarga Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013-2018.....	75
Gambar 2. 29: Gap Expectations Capaian Kinerja Tahun 2018 Terhadap Tahun 2020 Pada Urusan Kesehatan	75
Gambar 2. 30: Prevalensi Balita Stunting (%) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 - 2018	77
Gambar 2. 31: Persentase Panjang Jalan Kondisi Baik Dengan Kecepatan >20Km	80
Gambar 2. 32: Proporsi jaringan irigasi dalam kondisi baik dan teknis	81
Gambar 2. 33: Gap Expectations capaian kinerja tahun 2018 terhadap tahun 2020 pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	81
Gambar 2. 34: Gap Expectations Capaian Kinerja tahun 2018 Terhadap Tahun 2020 Pada Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman.....	84
Gambar 2. 35: Gap Expectations Urusan Indikator Kinerja Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Tahun 2018 Terhadap Target Tahun 2020	85
Gambar 2. 36: Gap Expectations Capaian Indikator Tahun 2018 Terhadap Tahun 2020 Pada Urusan Sosial	87
Gambar 2. 37: Realisasi Kinerja Indikator Program Bidang Tenaga KERJA dan Transmigrasi Tahun 2018	88
Gambar 2. 38: Gap Expectation Indikator Program Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2020	89
Gambar 2. 39: Gap Expectations Capaian Kinerja Tahun 2018 Terhadap Tahun 2020 Pada Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	92
Gambar 2. 40: Gap Expectation Indikator Program Bidang Pangan Tahun 2020	95
Gambar 2. 41: Gap Expectations Capaian Kinerja Tahun 2018 Terhadap Tahun 2020 Pada Urusan Lingkungan	97
Gambar 2. 42: Gap Expectations Capaian Kinerja tahun 2018 terhadap tahun 2020 Pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa	97
Gambar 2. 43: Capaian Kinerja Indikator Cakupan KB Aktif	98

Gambar 2. 44: Gap Expectation Indikator Indeks Angka Kecelakaan Lalu Lintas	99
Gambar 2. 45: Gap Realisasi Indikator Program Bidang Komunikasi dan Informasi tahun 2018.....	101
Gambar 2. 46: Gap Expectation Indikator Program Bidang Komunikasi dan Informasi Tahun 2020	102
Gambar 2. 47: Gap Expectations Capaian Kinerja tahun 2018 terhadap tahun 2020 Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	103
Gambar 2. 48: Gap Expectations Capaian Kinerja Tahun 2018 Terhadap Tahun 2020 Urusan Penanaman Modal	104
Gambar 2. 49: Gap Expetation Realisasi Kinerja Indikator Program Bidang Perpustakaan Kabupaten Banyuwangi tahun 2018	107
Gambar 2. 50: Gap Expectation Indikator Program Bidang Perpustakaan Tahun 2020.....	108
Gambar 2. 51: Gap Expectations Capaian Kinerja tahun 2018 terhadap tahun 2020 Urusan Pariwisata	113
Gambar 2. 52: Capaian Indikator % Pertumbuhan Sektor Pertanian Terhadap PDRB	116
Gambar 2. 53: Populasi Ternak Menurut Jenis Ternak Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018	124
Gambar 2. 54: Populasi Unggas Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018	125
Gambar 2. 55: Populasi Aneka Ternak Dan Hewan Peliharaan Tahun 2018	125
Gambar 2. 56: Capaian Indikator % Pertumbuhan Sektor Perdagangan dalam PDRB	127
Gambar 2. 57: Capaian Indikator % Pertumbuhan Sektor Industri Olahan dalam PDRB.....	128
Gambar 2. 58: Gap Expectations Capaian Kinerja Tahun 2018 Terhadap Tahun 2020 Pada Urusan Penunjang Pemerintah	130
Gambar 2. 59: Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2016-2021	137
Gambar 2. 60: Target dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2016-2020	138
Gambar 3. 1: Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2011 - 2018	145
Gambar 3. 2: Realisasi Belanja Daerah Tahun 2011 - 2018.....	148
Gambar 4. 1: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	174
Gambar 4. 2: Konektivitas Antar Pilar dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	176
Gambar 5. 1: Linieritas Misi dan Tujuan	190
Gambar 5. 2: Proses Bisnis Pencapaian Visi dan Misi	191
Gambar 5. 3: Logframe Perencanaan Terintegrasi Misi 1	192
Gambar 5. 4: Logframe Perencanaan Terintegrasi Misi 2	193

Gambar 5. 5: Logframe Perencanaan Terintegrasi Misi 3	194
Gambar 5. 6: Pilar Pembangunan Kabupaten Banyuwangi	195
Gambar 5. 7: Desain <i>Logical Framework</i> Pencapaian Misi 1 Tujuan 1	197
Gambar 5. 8: Desain <i>Logical Framework</i> Pencapaian Misi 2 Tujuan 2	199
Gambar 5. 9: Desain <i>Logical Framework</i> Pencapaian Misi 2 Tujuan 3	201
Gambar 5. 7: Desain <i>Logical Framework</i> Pencapaian Misi 3 Tujuan 4	203
Gambar 6. 1: Arsitektur Arah Kebijakan Kabupaten Banyuwangi	232
Gambar 6. 2: Desain <i>Logical Framework</i> Pencapaian Misi 1 Tujuan 1 (Program)	237
Gambar 6. 3: Desain <i>Logical Framework</i> Pencapaian Misi 2 Tujuan 2 (Program)	243
Gambar 6. 4: Desain <i>Logical Framework</i> Pencapaian Misi 2 Tujuan 3 (Program)	248
Gambar 6. 5: Desain <i>Logical Framework</i> Pencapaian Misi 3 Tujuan 4 (Program)	251



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN
BANYUWANGI TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan-Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965 Nomor 19 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbehandaraan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
8. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
11. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaran Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 4833);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
23. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 11);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 tahun 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
32. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;

33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Jawa Timur 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 71);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 15 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Banyuwangi tahun 2005-2025;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi tahun 2012-2032;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Menetapkan :

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2016-2021.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 12), diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada Tanggal 23 Agustus 2019

BUPATI BANYUWANGI,

H. ABDUEH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 23 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI



DJADJAT SUDRADJAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2019 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 235-
5/2019

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2016-2021

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Dalam konteks Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi, terdapat 3 alasan utama Perubahan RPJMD Kabupaten Banyuwangi yang meliputi: 1) Penyesuaian regulasi dalam penyusunan RPJMD, dari Permendagri 54 tahun 2010 menjadi Permendagri 86 Tahun 2017; 2) Hasil evaluasi RPJMD yang menunjukkan terdapat isu-isu yang telah selesai dan isu-isu baru yang penting untuk memperoleh tindak lanjut dalam penyelesaiannya; dan 3) Peningkatan efektifitas dan efisiensi pembangunan daerah seiring dengan perubahan dinamika situasi dan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menjalankan urusannya.

Pertama, payung hukum penyusunan RPJMD telah berubah dimana landasan hukum yang sebelumnya diatur dalam Permendagri 54 tahun 2010, berganti ke Permendagri 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Merujuk Bab VII regulasi tersebut tentang Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah, dijelaskan tepatnya pada pasal 342 tentang 3 syarat perubahan RPJPD dan RPJMD yang meliputi: 1) Ketidaksesuaian proses perumusan yang tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini; 2) Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan 3) Terjadi perubahan yang mendasar.

Kedua hal utama yang menjadi pertimbangan mendasar selanjutnya adalah hasil pengendalian dan evaluasi yang menunjukkan beberapa isu yang ditemukan pada saat penyusunan RPJMD tahun 2016-2021 yang semula urgen untuk diselesaikan, telah tuntas pada tahun 2017. Namun ada pula temuan dari hasil evaluasi yang menunjukkan munculnya isu-isu baru yang urgen untuk dituntaskan hingga akhir periode RPJMD 2021.

Ketiga hasil evaluasi kinerja menunjukkan munculnya prioritas dan arah pembangunan baru berimplikasi terhadap penyesuaian design kelembagaan. Arah Pembangunan baru yang merupakan hasil dari rekonstruksi berdasarkan evaluasi capaian kinerja pembangunan Kabupaten Banyuwangi harus dipastikan fit dengan bentuk kelembagaan. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Banyuwangi akan menajamkan lagi perencanaan dengan Perubahan RPJMD, menata ulang organisasi, meningkatkan efisiensi dan efektifitas prosedur, menata regulasi, SDM, meningkatkan pengawasan, akuntabilitas kinerja, pelayanan, pola pikir dan budaya kerja ASN.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Banyuwangi untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun sesuai dengan kewenangan kabupaten dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2005-2025 dan RTRW Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032 serta memperhatikan RPJMN 2015-2019.

RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2016-2021 merupakan arah kebijakan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Periode 2016-2021, Bapak H. Abdullah Azwar Anas, M.Si, dan Yusuf Widiatmoko, S.Sos, yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-563 tahun 2016 dan 132.35-564 tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Provinsi Jawa Timur yang dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada tanggal 12 Februari 2016. RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2016-2021 juga merupakan perumusan visi dan misi pembangunan yang menunjukkan apa yang menjadi cita-cita bersama masyarakat Kabupaten Banyuwangi atau stakeholder pembangunan daerah, yang merefleksikan kekuatan dan potensi khas daerah sekaligus menjawab permasalahan dan isu-isu strategis Kabupaten Banyuwangi.

RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2016-2021 selanjutnya diacu oleh seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Banyuwangi sesuai tugas Pokok dan Fungsinya yang dituangkan dalam dokumen RENSTRA Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan Perangkat Daerah. Dokumen RPJMD diharapkan secara umum mampu menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan pembangunan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Banyuwangi.

Dokumen RPJMD selanjutnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah. RKPD merupakan perencanaan tahunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya. Sebagaimana amanat Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 3 2004 dinyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Oleh karenanya RPJMD Kabupaten Banyuwangi dapat dikatakan sebagai muara seluruh pelaksanaan pembangunan lima tahun diwilayah Kabupaten Banyuwangi yang perlu diacu oleh seluruh

pemangku kepentingan pembangunan di Banyuwangi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang diharapkan.

Perubahan RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021 disusun dengan mengacu antara lain pada : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dijelaskan bahwa perubahan terhadap dokumen RPJMD dapat dilakukan. RPJMD dapat dirubah dalam hal : a) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; b) terjadi perubahan yang mendasar; atau c) merugikan kepentingan nasional. Yang dimaksud dengan “perubahan yang mendasar” adalah suatu pekerjaan yang tidak dapat dikerjakan, terjadi bencana alam, atau perubahan kebijakan nasional.

Dalam konteks Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi, terdapat 3 alasan utama Perubahan RPJMD Kabupaten Banyuwangi yang meliputi: 1) Penyesuaian regulasi dalam penyusunan RPJMD, dari Permendagri 54 tahun 2010 menjadi Permendagri 86 Tahun 2017; 2) Hasil evaluasi RPJMD yang menunjukkan terdapat isu-isu yang telah selesai dan mendesak untuk memperoleh perlakuan dalam penyelesaiannya; dan 3) Peningkatan efektifitas dan efisiensi pembangunan daerah seiring dengan perubahan dinamika situasi dan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menjalankan urusannya.

Uraian terhadap alasan perubahan RPJMD sebagaimana diatas, dapat dijabarkan dan dijelaskan sebagai berikut, **Pertama** payung hukum penyusunan RPJMD telah berubah dimana landasan hukum yang sebelumnya diatur dalam Permendagri 54 tahun 2010, berganti ke Permendagri 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Merujuk Bab VII regulasi tersebut tentang Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah, dijelaskan tepatnya pada pasal 342 tentang 3 syarat perubahan RPJPD dan RPJMD yang meliputi: 1) Ketidak sesuaian proses perumusan yang tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini; 2) Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan 3) Terjadi perubahan yang mendasar.

Kedua hal utama yang menjadi pertimbangan mendasar selanjutnya adalah hasil pengendalian dan evaluasi yang menunjukkan beberapa isu yang ditemukan pada saat penyusunan RPJMD tahun 2016-2021 yang semula mendesak untuk diselesaikan, telah tuntas pada tahun 2017. Namun ada pula temuan dari hasil evaluasi yang menunjukkan munculnya isu-isu baru yang mendesak untuk dituntaskan hingga akhir periode RPJMD 2021.

Secara keseluruhan hasil evaluasi RPJMD, dari 8 IKU Kabupaten Banyuwangi tahun 2016-2021 terdapat 3 klasifikasi capaian kinerja. Klasifikasi pertama yakni, IKU dengan capaian normal yang meliputi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan 49,03% kinerja dan Tingkat Kemiskinan dengan capaian 53,36% kinerja. Klasifikasi kedua adalah capaian IKU dengan yang melampaui kinerja, dalam arti kinerja pada tahun 2017 telah melebihi target pada tahun 2021. Sebagai contoh adalah Indeks Pembangunan Gender. Sedangkan klasifikasi ketiga yakni IKU dengan capaian kontra produktif dengan defisit capaian kinerja. Sebagai contoh adalah Tingkat Pengangguran Terbuka yang mengalami defisit kinerja mencapai -43,33%.

Ketiga hasil evaluasi kinerja menunjukkan munculnya prioritas dan arah pembangunan baru berimplikasi terhadap penyesuaian design kelembagaan. Arah Pembangunan baru yang merupakan hasil dari rekonstruksi berdasarkan evaluasi capaian kinerja pembangunan Kabupaten Banyuwangi harus dipastikan sesuai dengan bentuk kelembagaan. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Banyuwangi perlu menajamkan lagi perencanaan dengan Perubahan RPJMD, menata ulang organisasi, meningkatkan efisiensi dan efektifitas prosedur, menata regulasi, SDM, meningkatkan pengawasan, akuntabilitas kinerja, pelayanan, pola pikir dan budaya kerja ASN.

Sedangkan Tahapan penyusunan RPJMD sebagaimana tertuang pada pasal 41 sampai pasal 70 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, berlaku mutatis dan mutandis terhadap penyusunan perubahan RPJMD. Sehingga proses penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021 ini berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 86 tahun 2017, disusun melalui enam tahapan, yaitu:

- a. Persiapan penyusunan RPJMD;
- b. Penyusunan rancangan awal RPJMD;
- c. Penyusunan rancangan RPJMD;
- d. Pelaksanaan Musrenbang RPJMD;
- e. Perumusan rancangan akhir RPJMD; dan
- f. Penetapan RPJMD.

Berbagai poin-poin sebagaimana uraian di atas, mendasari penyusunan dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2016-2021 yang dianggap penting untuk segera ditindak lanjuti diantaranya, menjadi pedoman/acuan Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) PD tahun 2016-2021. Perubahan Renstra PD menjabarkan rencana teknis operasional setiap urusan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu lima tahun. Dalam rangka pelaksanaan Perubahan RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2016-2021, selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan pembangunan tahunan dan disusun setiap tahun. Dokumen RKPD memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja PD. Dengan berpedoman pada Renstra PD dan RKPD, setiap PD menyusun rencana kerja tahunan berupa Rencana Kerja (Renja) PD. Renja PD inilah yang menjadi acuan teknis pelaksanaan program/kegiatan tahunan PD.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dalam penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Banyuwangi ini, sejumlah peraturan yang digunakan sebagai rujukan, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan-Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Nomor 19. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4833);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 / PMK.07 / 2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa ; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
29. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025; (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2014-2019. (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 71);

31. Peraturan daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Banyuwangi tahun 2005-2025;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032; (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 9/E);
34. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuwangi 2016-2021;

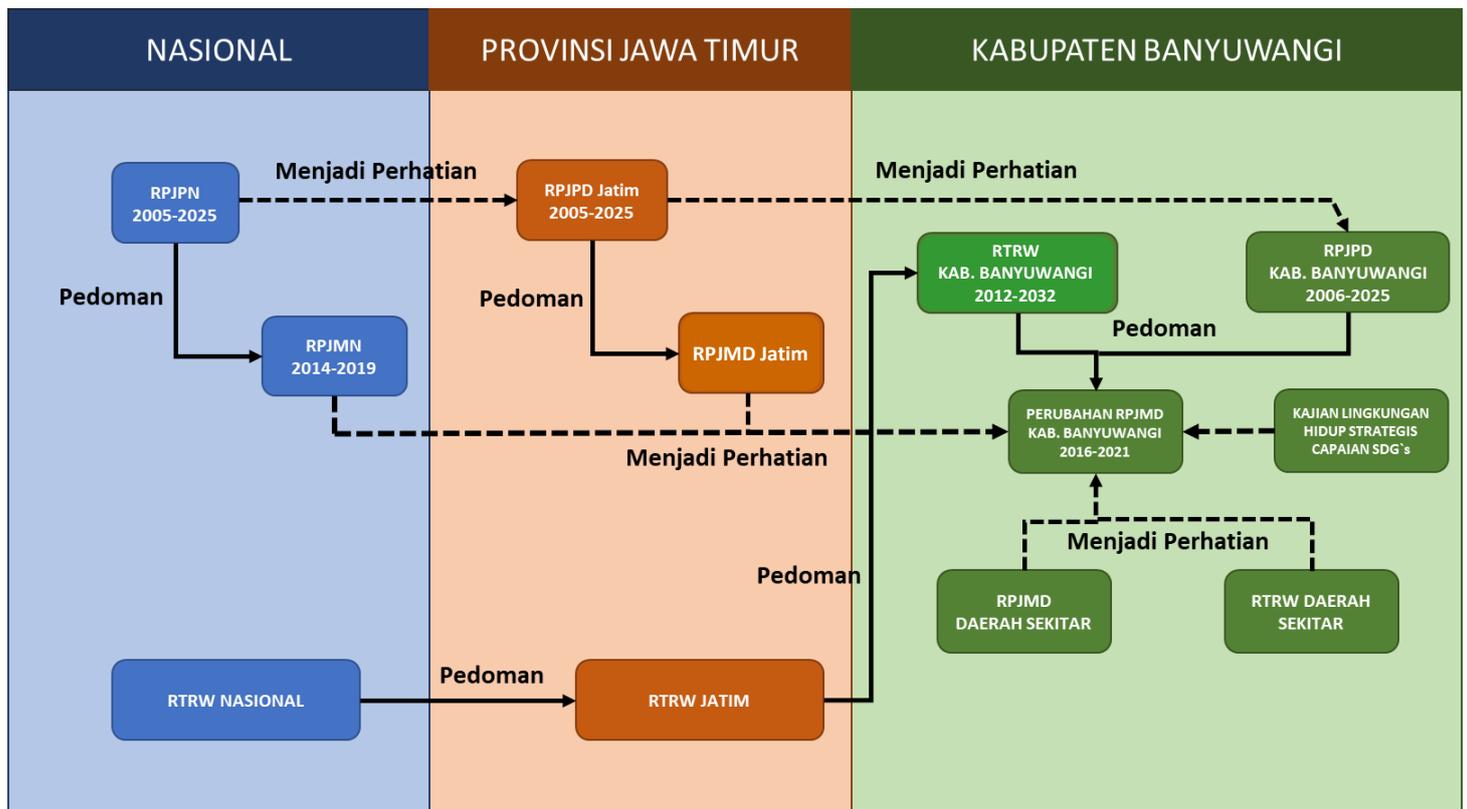
1.3 Hubungan Antar Dokumen

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, RPJMD merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Untuk itu RPJMD harus sinkron dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

RPJMD merupakan dokumen perencanaan lima tahunan sebagai penjabaran RPJPD yang memiliki kurun waktu 20 tahun yang mencakup RPJPN Tahun 2005-2025, RPJPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2005-2025, dan RPJP Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025. Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2016-2021 juga mengacu terhadap dokumen KLHS yang menunjukkan capaian *Sustainable Development Goals* di Kabupaten Banyuwangi.

Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2016-2021 juga berpedoman pada RTRW Nasional, RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 serta RTRW Kabupaten Banyuwangi 2012-2032. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah Kabupaten Banyuwangi dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang. Lebih lanjut, informasi dalam RTRW Nasional, RTRW Provinsi Jawa Timur dan RTRW Kabupaten Banyuwangi digunakan sebagai acuan dalam penataan ruang dalam rangka mewujudkan target pembangunan jangka

menengah periode 2016-2021. Hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat melalui gambar berikut:



Gambar 1.1. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Sumber: Permendagri 86 tahun 2017 (Diolah dari berbagai Sumber)

Secara substansi, berikut adalah keselarasan Perubahan RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2016-2021 dengan RPJPD Provinsi Jawa Timur 2005-2025, RPJMN 2015-2019 dan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1.3.1 Telaah Keselarasan Hubungan RPJMN Tahun 2015-2019, RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 dan Perubahan RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021

RPJMN tahun 2015-2019 dan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang dipedomani dalam penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021. Keselarasan RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Timur dan RPJMD Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat pada misi daerah yang mendukung misi pada

dokumen RPJMN 2015-2019 dan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2023 sebagaimana tertuang dalam Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Keselarasan Hubungan RPJMN Tahun 2015-2019, RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 dan Perubahan RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021

NO	RPJMN Tahun 2015-2019	RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024	Perubahan RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021
	VISI	VISI	VISI
1	Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong	Terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang sejahtera, seimbang, unggul dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan partisipatoris, inklusif dan menghargai nilai-nilai manusia	Terwujudnya Masyarakat Banyuwangi Yang Semakin Sejahtera, Mandiri, dan Berakhlak Mulia Melalui Peningkatan Perekonomian Dan Kualitas Sumber Daya Manusia
	MISI	MISI	MISI
1	Misi 1 : Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan	Misi 3: Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka dan par-tisipatif sehingga terwujud kebijakan yang inklusif di atas landasan kepemimpinan yang meritokratik, inovatif, tegas dan mengayomi Misi 5: Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan untuk menjamin keselarasan ruang ekologi, ruang sosial, ruang ekonomi dan ruang budaya	Misi 3: Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih (<i>Good And Clean Governance</i>) Serta Layanan Publik Yang Berkualitas Berbis Teknologi Informasi Misi 2: Optimalisasi Sumber Daya Untuk Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah Yang Berkelanjutan
2	Misi 3 : Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan	Misi 3: Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka dan par-tisipatif sehingga terwujud	Misi 3: Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik dan Bersih (<i>Good And Clean</i>

NO	RPJMN Tahun 2015-2019	RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024	Perubahan RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021
	memperkuat jati diri sebagai negara maritim	kebijakan yang inklusif di atas landasan kepemimpinan yang meritokratik, inovatif, tegas dan me-ngayomi Misi 5: Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan untuk menjamin keselarasan ruang ekologi, ruang sosial, ruang ekonomi dan ruang budaya	<i>Governance</i>) Serta Layanan Publik Yang Berkualitas Berbis Teknologi Informasi Misi 2: Optimalisasi Sumber Daya Untuk Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah Yang Berkelanjutan
	MISI	MISI	MISI
3	Misi 4 : Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera	Misi 1: Membangun insan Jawa Timur secara utuh dengan mendayagunakan se-luruh potensi melalui pembangunan sektor kebudayaan, pendidikan dan kesehatan dengan dilandasi oleh kearifan local yang berbasis pada nilai-nilai kesantunan, keagamaan dan kebudayaan Misi 5: Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan untuk menjamin keselarasan ruang ekologi, ruang sosial, ruang ekonomi dan ruang budaya	Misi 1: Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kebutuhan Dasar Lainnya. Misi 2: Optimalisasi Sumber Daya Untuk Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah Yang Berkelanjutan
4	Misi 5 : Mewujudkan bangsa yang berdaya saing	Misi 2: Membangun ekonomi berbasis gotong royog sehingga tercapai keadilan dan kesejahteraan yang menjangkau se-mua lapisan serta mendorong	Misi 2: Optimalisasi sumber daya untuk mewujudkan daya saing ekonomi daerah yang berkelanjutan

NO	RPJMN Tahun 2015-2019	RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024	Perubahan RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021
		keberpihakan terhadap sektor ekonomi kecil dan menengah yang sinergi dengan kekuatan ekonomi yang lebih besar	
5	Misi 6 : Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional	Misi 5 : Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan untuk menjamin keselarasan ruang ekologi, ruang Social, ruang ekonomi dan ruang budaya	Misi 2: Optimalisasi Sumber Daya Untuk Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah Yang Berkelanjutan
6	Misi 7 : Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan	Misi 1: Membangun insan Jawa Timur se-cara utuh dengan mendayagunakan seluruh potensi melalui pembangunan sektor kebudayaan, pendidikan dan kesehatan dengan dilandasi oleh kearifan local yang berbasis pada nilai-nilai kesantunan, keagamaan dan kebudayaan	Misi 1: Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kebutuhan Dasar Lainnya

1.3.2 Telaah Keselarasan Hubungan RPJPD Kabupaten Banyuwangi 2005-2025 dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021

Perubahan RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021 tidak terlepas dari tahapan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2005-2025. Keterkaitan tersebut dapat dilihat dari visi dan misi pembangunan Perubahan RPJMD yang mendukung pada visi dan misi pembangunan RPJPD, sebagaimana tertuang dalam Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Keselarasan Hubungan RPJPD Kabupaten Banyuwangi 2005-2025 dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021

No	RPJPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2005-2025	Perubahan RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021
VISI		
	Kabupaten Banyuwangi yang Religius, Sejahtera dan Mandiri Berbasis Agrobisnis dan Ekowisata Terpadu	Terwujudnya Masyarakat Banyuwangi Yang Semakin Sejahtera, Mandiri, Dan Berakhlak Mulia Melalui Peningkatan Perekonomian Dan Kualitas Sumber Daya Manusia
MISI		
1	<p>Misi I.1: Mewujudkan masyarakat Kabupaten Banyuwangi yang religius, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal</p> <p>Misi I.2 : Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat</p> <p>Misi II.1: Mewujudkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan SDM berasas pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan</p>	<p>Misi 1: Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya</p>
2	<p>Misi II.2: Mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi yang berkelanjutan</p> <p>Misi III.1: Mewujudkan Kabupaten Banyuwangi yang Mandiri berbasis agrobisnis terpadu</p> <p>Misi III.2: Mewujudkan Kabupaten Banyuwangi yang Mandiri berbasis Ekowisata terpadu</p>	<p>Misi 2: Optimalisasi sumber daya untuk mewujudkan daya saing ekonomi daerah yang berkelanjutan</p>

No	RPJPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2005-2025	Perubahan RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021
3	Misi II.3: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, profesional, dan tanggung jawab	Misi 3: Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih (<i>Good And Clean Governance</i>) Serta Layanan Publik Yang Berkualitas Berbis Teknologi Informasi

1.3.3 Telaah Keselarasan Hubungan RTRW Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032 dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021

Perubahan RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021 juga memperhatikan dan mempertimbangkan tujuan dan kebijakan penataan ruang wilayah, struktur ruang, rencana pola ruang serta arahan pemanfaatan ruang, sesuai dengan RTRW Kabupaten Banyuwangi. RTRW Kabupaten Banyuwangi periode 2012-2032 akan menjadi pertimbangan dan acuan dalam penentuan strategi pembangunan daerah, khususnya yang terkait dengan kebijakan program kewilayahan.

Dalam proses penyusunan RPJMD ini juga selain berpedoman pada RTRW daerah sendiri, juga perlu memperhatikan RTRW Provinsi Jawa Timur, guna tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah antar kabupaten/kota serta keterpaduan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lainnya, Keterkaitan pembangunan antar Kota/Kabupaten tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencanan Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031. Hubungan ini berfokus kepada daerah yang memiliki wilayah geografis saling berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan kabupaten/kota, serta memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah terutama dalam lingkup pembangunan wilayah Provinsi.

Dengan memperhatikan segala potensi sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Banyuwangi serta resiko dampak lingkungan yang akan ditimbulkannya tentunya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi perlu lebih meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang dan mensinergikan arah kebijakan dan strategi pembangunan sebagaimana dituangkan visi, misi dan tujuan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banyuwangi 2012 – 2032.

Tabel 1.3 Keselarasan Hubungan RTRW Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032 dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021

NO	RTRW Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032	Perubahan RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021
VISI		
1	Terwujudnya pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi kabupaten berbasis pada potensi sumberdaya alam daerah yang didukung oleh pembangunan sarana dan prasarana yang memadai dengan memperhatikan harmonisasi antara pengelolaan kawasan budidaya, kawasan lindung, dan pengendalian kawasan rawan bencana	Terwujudnya Masyarakat Banyuwangi Yang Semakin Sejahtera, Mandiri, Dan Berakhlak Mulia Melalui Peningkatan Perekonomian Dan Kualitas Sumber Daya Manusia
MISI		
1	Misi 5: Mewujudkan pengembangan pendidikan yang berbasis sumberdaya lokal dalam rangka mendukung peningkatan sumber daya manusia	Misi 1: Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya
MISI		
2	<p>Misi 1: Mewujudkan pengelolaan kawasan lindung, kawasan budidaya, dan pengendalian kawasan rawan bencana secara harmonis dan berkelanjutan</p> <p>Misi 2: Mengembangkan sarana dan prasarana wilayah perkotaan dan perdesaan untuk mendukung pengembangan wilayah dan untuk mengurangi disparitas antar wilayah</p> <p>Misi 3: Mewujudkan pengembangan kawasan ekonomi unggulan yang berbasis sumber daya local berupa pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan,</p>	<p>Misi 2: Optimalisasi sumber daya untuk mewujudkan daya saing ekonomi daerah yang berkelanjutan</p>

NO	RTRW Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032	Perubahan RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021
	perikanan, dan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Misi 4: Mewujudkan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa, industri kecil dan menengah serta industri besar untuk memacu pertumbuhan ekonomi Misi 7: Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam secara optimal untuk mendorong kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat	
3	Misi 6: Meningkatkan kerjasama investasi antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat	Misi 3: Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih (<i>Good And Clean Governance</i>) Serta Layanan Publik Yang Berkualitas Berbis Teknologi Informasi

Selain berpedoman terhadap visi dan misi RTRW Kabupaten Banyuwangi, Perubahan RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2016-2021 juga berpedoman pada tujuan, arah kebijakan dan strategi pembangunan tata ruang wilayah Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan azas dan tujuan penataan ruang wilayah nasional serta isu pengembangan wilayah dan visi yang telah ditetapkan dalam RPJPD Kabupaten Banyuwangi, maka tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Banyuwangi yaitu:

“Mewujudkan ruang kabupaten berbasis pertanian bersinergi dengan pengembangan perikanan, pariwisata, industri, perdagangan dan jasa yang berdaya saing dan berkelanjutan.”
 Sedangkan, untuk arah kebijakan dan strategi pembangunan tata ruang wilayah Kabupaten Banyuwangi dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Arah Kebijakan Pembangunan

Arah kebijakan pembangunan ditinjau dari aspek Penataan Ruang di Kabupaten Banyuwangi, sebagai berikut:

- 1) Pengembangan kawasan pertanian dan kawasan pertanian;
- 2) Pengembangan kawasan pariwisata terpadu berbasis potensi wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan;

- 3) Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi perdesaan dan perkotaan yang menunjang sistem pemasaran hasil pertanian, perikanan, pariwisata, industri, perdagangan, dan jasa;
- 4) Pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah yang mendukung kawasan pertanian, perikanan, pariwisata, industri, perdagangan dan jasa, kawasan pemerintahan, dan pelayanan dasar masyarakat;
- 5) Pengembangan kawasan strategis kabupaten;
- 6) Penataan sektor informal;
- 7) Pengelolaan wilayah yang memperhatikan daya dukung lahan, daya tampung kawasan dan aspek konservasi sumber daya alam;
- 8) Pengembangan kawasan budidaya dengan menumbuhkan kearifan lokal dan memperhatikan aspek ekologis;
- 9) Pengendalian dan pelestarian kawasan lindung, dan
- 10) Pengendalian kawasan rawan bencana alam.

b. Strategi Pembangunan

Dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan di Kabupaten Banyuwangi dimaksud, beberapa strategi pembangunan yang harus diperhatikan, antara lain sebagai berikut:

1) Pengembangan kawasan pertanian, meliputi:

- a. Mempertahankan kawasan pertanian produktif dan mengendalikan alih fungsi lahan pertanian dan mengembangkan lahan pertanian baru;
- b. Menetapkan kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan atau lahan pertanian abadi, guna tercapainya pengelolaan lahan pertanian teknis secara optimal;
- c. Mengembangkan dan mengoptimalkan kawasan agropolitan, untuk terwujudnya pengembangan agroindustri dan agrobisnis di kawasan agropolitan;
- d. Mengembangkan produk-produk unggulan budidaya pertanian dan hortikultura;
- e. Mengembangkan kawasan budidaya peternakan, perkebunan dan kehutanan;
- f. Mengembangkan dan meningkatkan infrastruktur sumberdaya air dan infrastruktur penunjang pertanian lainnya;

2) Pengembangan kawasan perikanan, meliputi:

- a. Mengembangkan dan mengoptimalkan kawasan perikanan tangkap, kawasan perikanan budidaya air laut, budidaya air payau, dan budidaya air tawar;
- b. Mengoptimalkan pengembangan dan pengelolaan kawasan minapolitan;
- c. Mengembangkan sentra-sentra produksi perikanan yang mendukung industri pengolahan perikanan di kawasan minapolitan;
- d. Mengendalikan pencemaran lingkungan pada sentra-sentra produksi perikanan dengan meningkatkan pengelolaan limbah industri perikanan yang bersih, sehat, dan ramah lingkungan;
- e. Mengembangkan dan meningkatkan infrastruktur penunjang kawasan perikanan;
- f. Meningkatkan kelembagaan pengelolaan kawasan perikanan;
- g. Mengawasi dan mengendalikan eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya perikanan dan kelautan; dan
- h. Mengembangkan dan mengendalikan kawasan hutan bakau dan kawasan terumbu karang bagi keberlanjutan ekosistem kawasan perikanan.

3) Pengembangan kawasan pariwisata, meliputi:

- a. Mengembangkan potensi daya tarik wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan sesuai dengan Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPP);
- b. Mengembangkan kawasan obyek wisata unggulan pada setiap WPP;
- c. Mengembangkan jalur pariwisata terpadu yang terintegrasi dengan pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah;
- d. Mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan;
- e. Melestarikan nilai-nilai tradisi atau kearifan budaya masyarakat lokal beserta lingkungannya sebagai daya tarik wisata budaya;
- f. Melestarikan kawasan peninggalan sejarah dan situs budaya sebagai aset budaya daerah dan pariwisata;
- g. Meningkatkan kerjasama dalam pengelolaan pariwisata pada kawasan konservasi, kawasan lindung, cagar alam, hutan produksi, dan perkebunan melalui pengembangan ekowisata; dan

- h. Meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha pariwisata dengan pembinaan, penyuluhan, pelatihan, dan promosi bagi pengembangan pariwisata.

4) Pengembangan sarana dan prasarana wilayah, meliputi:

- a. Meningkatkan dan mengoptimalkan jaringan jalan bagi pengembangan kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan pariwisata, kawasan industri, kawasan perdagangan dan jasa;
- b. Meningkatkan dan mengoptimalkan jaringan jalan menuju pusat kegiatan pelayanan dasar masyarakat;
- c. Meningkatkan dan mengoptimalkan prasarana sumber daya air dan jaringan irigasi;
- d. Mengembangkan pembangunan jalan baru menuju kawasan pertumbuhan ekonomi wilayah;
- e. Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan di kawasan perkotaan dan perdesaan;
- f. Mengoptimalkan fungsi bandara udara, pelabuhan dan angkutan laut sebagai pintu gerbang pertumbuhan ekonomi;

5) Pengembangan kawasan yang memiliki fungsi ekologis lingkungan, meliputi:

- a. Mengendalikan perubahan fungsi kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan cagar budaya dan kawasan lindung geologi;
- b. Meningkatkan kerjasama antara pemerintah, pemangku wilayah kawasan, masyarakat, dan swasta dalam pengembangan kawasan hutan yang memiliki nilai ekonomis, untuk menunjang pengembangan pariwisata, pendidikan, penelitian dengan tetap mempertahankan fungsi lindung dan berkelanjutan;
- c. Mengembangkan dan mengendalikan ruang terbuka hijau pada kawasan perkotaan, sempadan jalan, sempadan sungai, sempadan pantai, ruang evakuasi bencana alam, dan kawasan perlindungan bawahhan;
- d. Melestarikan dan mengendalikan daerah tangkapan air dan sumber-sumber air untuk mencegah bencana banjir/longsor dan kekeringan;

- e. Mengembangkan manajemen perencanaan, pencegahan, kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana pada kawasan rawan bencana alam;

6) Pengembangan kawasan perkotaan dan kawasan strategis kabupaten, meliputi:

- a. Menyusun rencana rinci tata ruang kawasan perkotaan dan kawasan strategis kabupaten sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. Penyediaan sarana, prasarana dan utilitas perkotaan melalui penataan ruang terbuka hijau, pedestrian, drainase yang memadai;
- c. Pengembangan sarana, prasarana, utilitas perumahan dan permukiman guna mewujudkan lingkungan perumahan dan permukiman perkotaan/perdesaan yang sehat.
- d. Mengoptimalkan percepatan pengembangan kawasan strategis melalui kerjasama investasi pemerintah, swasta dan masyarakat

1.3.4 Telaah hubungan Perubahan RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021 dengan KLHS

Millenium Development Goals (MDGs) merupakan komitmen dari 189 negara untuk tujuan pembangunan yang lebih baik, yang dicanangkan mulai September 2000 hingga 2015 telah dianggap gagal. Melalui deklarasi MDGs, isu yang dibangun dan harus dicapai pada tahun 2015 adalah kesejahteraan masyarakat dan pembangunan masyarakat. Menindaklanjuti hal tersebut, kemudian dilanjutkan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang merupakan komitmen baru oleh berbagai negara dengan menargetkan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang bisa dirangkum menjadi 3 tujuan mulia yang dicapai di tahun 2030 yakni mengakhiri kemiskinan, mengatasi dan menekan kesenjangan, serta mengatasi perubahan iklim.

Sebagai upaya dalam mencapai 17 tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut, maka selayaknya SDGs harus diintegrasikan terhadap setiap arah pembangunan baik Kabupaten / Kota, Provinsi, dan Nasional. Untuk itu diamanatkan dalam Permendagri 86 Tahun 2017, bahwa sebagai upaya untuk memastikan SDGs telah menjadi dasar dan isu yang harus diperhatikan dalam pembangunan, maka penelaahan KLHS sebagai bagian penting dalam tahapan penyusunan isu-isu strategis dalam Perubahan RPJMD ini.

1.3.5 Telaah hubungan Dokumen RPJMD Daerah Sekitar Kabupaten Banyuwangi dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021

Telaah dokumen RPJMD daerah sekitar Kabupaten Banyuwangi bertujuan sebagai pertimbangan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Banyuwangi terkait dengan sinergitas antar daerah dalam pembangunan dan sebagai upaya dalam meningkatkan daya saing daerah terhadap daerah sekitarnya. Adapun telaah RPJMD daerah sekitar Kabupaten Banyuwangi antara lain Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Jember. Berikut adalah tabel telaah RPJMD daerah sekitar:

Tabel 1.4. Telaah RPJMD Daerah Sekitar

Daerah Lain	Periode RPJMD	Kebijakan Terkait	Keterangan
Kabupaten Situbondo	2016-2021	Revitalisasi penguatan nilai-nilai agama kepada masyarakat untuk mendukung pembangunan;	Secara substantif tidak berkaitan dengan Kabupaten Banyuwangi
		Peningkatan kualitas derajat kesehatan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat miskin;	Secara substantif tidak berkaitan dengan Kabupaten Banyuwangi
		Pemantapan kualitas sumber daya masyarakat melalui pendidikan agama, pendidikan formal, dan pendidikan tinggi;	Secara substantif tidak berkaitan dengan Kabupaten Banyuwangi
		Pemantapan kualitas infrastruktur jalan, energi, dan komunikasi.	Untuk mendukung kesuksesan kebijakan ini maka diperlukan sinergitas pembangunan infrastruktur antar wilayah kabupaten Situbondo dengan Kabupaten Banyuwangi. Kebijakan ini dikhususkan (yang berkenaan dengan wilayah Banyuwangi)

Daerah Lain	Periode RPJMD	Kebijakan Terkait	Keterangan
			<p>untuk meningkatkan kualitas akses dari Kabupaten Situbondo menuju Bandara Blimbingsari, dan akses menuju pelabuhan Ketapang. Selain itu, kebijakan ini juga akan difokuskan untuk membangun sektor kawasan se-trategis cepat tumbuh di kawasan yang menjadi akses menuju wisata kawah gunung ijen dengan meningkatkan kualitas akses pada kawasan Wisata Segi Tiga Emas (akses menuju Kawasan wisata di Kecamatan Licin)</p>
		<p>Penguatan penerapan teknologi informasi dalam sektor pemerintahan dan pelayanan dasar;</p>	<p>Secara substantif tidak berkaitan dengan Kabupaten Banyuwangi</p>
		<p>Penguatan fungsi kawasan penyangga second city untuk memperluas pemerataan pembangunan daerah;</p>	<p>Secara substantif tidak berkaitan dengan Kabupaten Banyuwangi</p>
		<p>Pemantapan perekonomian dan kemandirian daerah melalui pengembangan potensi dan produk-produk unggulan daerah;</p>	<p>Secara substantif tidak berkaitan dengan Kabupaten Banyuwangi</p>

Daerah Lain	Periode RPJMD	Kebijakan Terkait	Keterangan
		Percepatan reformasi birokrasi melalui penerapan teknologi informasi;	Secara substantif tidak berkaitan dengan Kabupaten Banyuwangi
		Peningkatan cakupan area pelayanan publik bagi masyarakat.	Secara substantif tidak berkaitan dengan Kabupaten Banyuwangi
Kabupaten Bondowoso	2019-2023	Masih Dalam Proses Penyusunan	Masih Dalam Proses Penyusunan
Kabupaten Jember	2016-2021	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>), dan bersih (<i>clean government</i>), serta profesionalitas pelayanan publik dalam rangka mewujudkan Jember Kuat dan Bersih	Secara substantif tidak berkaitan dengan Kabupaten Banyuwangi
		Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam rangka mewujudkan Jember Sehat	Secara substantif tidak berkaitan dengan Kabupaten Banyuwangi
		Meningkatkan pemerataan, perluasan dan mutu terhadap akses pendidikan dan menurunnya angka buta huruf secara signifikan dalam rangka mewujudkan Jember yang maju dalam ilmu pengetahuan dan teknologi (JEMBER MAJU IPTEK)	Secara substantif tidak berkaitan dengan Kabupaten Banyuwangi

Daerah Lain	Periode RPJMD	Kebijakan Terkait	Keterangan
		Meningkatkan perluasan lapangan kerja dalam rangka mewujudkan Jember Mandiri	Secara substantif tidak berkaitan dengan Kabupaten Banyuwangi
		Mempercepat dan memperluas penanggulangan kemiskinan dalam rangka Mewujudkan Jember Mandiri	Secara substantif tidak berkaitan dengan Kabupaten Banyuwangi
		Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama dalam rangka mewujudkan Jember yang beriman dan bertakwa (JEMBER IMTAK)	Secara substantif tidak berkaitan dengan Kabupaten Banyuwangi
		Meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib dalam rangka mewujudkan Jember Kuat dan Bersih	Secara substantif tidak berkaitan dengan Kabupaten Banyuwangi
		Meningkatkan penguatan kearifan lokal (<i>Local Wisdom</i>)	Secara substantif tidak berkaitan dengan Kabupaten Banyuwangi
		Meningkatkan penegakan supremasi hukum dan penghormatan hak azasi manusia (HAM) yang berkeadilan dalam rangka mewujudkan Jember Kuat dan Bersih	Secara substantif tidak berkaitan dengan Kabupaten Banyuwangi
		Meningkatkan pendapatan para pedagang dan UMKM serta Koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dalam	Secara substantif tidak berkaitan dengan Kabupaten Banyuwangi

Daerah Lain	Periode RPJMD	Kebijakan Terkait	Keterangan
		rangka mewujudkan Jember Mandiri;	
		Mewujudkan kedaulatan pangan; Dalam rangka mewujudkan Jember Mandiri	Secara substantif tidak berkaitan dengan Kabupaten Banyuwangi
		Menata dan merevitalisasi industri tembakau dengan meningkatkan produktivitas sektor ini untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan buruh tembakau dalam rangka	Secara substantif tidak berkaitan dengan Kabupaten Banyuwangi
		Meningkatkan potensi suberdaya kelautan dan meningkatkan perlindungan bagi masyarakat pesisir dalam rangka mewujudkan Jember Mandiri	Secara substantif tidak berkaitan dengan Kabupaten Banyuwangi
		Meningkatkan percepatan kinerja sector industri Dalam rangka mewujudkan Jember Mandiri	Secara substantif tidak berkaitan dengan Kabupaten Banyuwangi
		Meningkatkan kontibusi sektor pariwisata dalam rangka mewujudkan Jember Kota sebagai salah satu destinasi Wisata Utama di Jawa Timur	Pada kebijakan ini Kabupaten Jember ingin mengembangkan sektor pariwisata daerah dengan menggandeng daerah sekitar yang berbatasan dengan daerahnya. Secara lebih khusus, kerjasama yang ingin dilakukan adalah terkait pemasaran di sektor pariwisata

Daerah Lain	Periode RPJMD	Kebijakan Terkait	Keterangan
		Meningkatkan kinerja penanaman modal dalam dan luar negeri serta investasi daerah dalam rangka mewujudkan Jember Mandiri	Secara substantif tidak berkaitan dengan Kabupaten Banyuwangi
		Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mengembangkan daya saing ekonomi dan kesejahteraan rakyat dalam rangka mewujudkan Jember Kota Wisata Berbudaya	Pada kebijakan ini, kabupaten Jember ingin mengembangkan Bandar Udara Notohadji Negoro dari kelas IV menjadi kelas III Embarkasi haji antara dan bandar udara komersial. Mengingat di Kabupaten Banyuwangi juga sudah terdapat Bandara Udara Blimbingsari yang bersifat komersial, maka perlu kiranya diperhatikan beberapa kerjasama antar daerah yang dapat saling menguntungkan antar kedua daerah
		Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pemeliharaan kelestariannya dalam rangka mewujudkan Jember Kota Wisata Berbudaya	Secara substantif tidak berkaitan dengan Kabupaten Banyuwangi
		Meningkatkan penataan ruang wilayah Kabupaten yang berkelanjutan dalam rangka	Secara substantif tidak berkaitan dengan Kabupaten Banyuwangi

Daerah Lain	Periode RPJMD	Kebijakan Terkait	Keterangan
		mewujudkan Jember Kota Wisata Berbudaya	

Berdasarkan Tabel telaah RPJMD daerah sekitar Kabupaten Banyuwangi di atas maka dapat diketahui dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Banyuwangi maka hal yang perlu dipertimbangkan sehingga terciptanya sinergitas antar daerah antara lain:

- a. Menyiapkan dan memastikan infrastruktur penunjang konektivitas antar wilayah selalu dalam kondisi prima.
- b. Meningkatkan kualitas atau intensitas kerjasama antar daerah, khususnya untuk pembangunan sektor pariwisata dengan mengedepankan asas kolaborasi dibandingkan dengan asas kompetisi untuk menangkap peluang di era industry 4.0.
- c. Memperjelas kerjasama pembangunan pariwisata, khususnya dalam pengelolaan event-event besar, untuk saling mendukung sehingga terbangun kolaborasi antar wilayah. Hal tersebut sangat penting untuk segera dilakukan, mengingat Kabupaten Banyuwangi dikelilingi oleh kabupaten atau daerah yang sama-sama memiliki potensi pariwisata, serta daerah yang sudah mulai dikenal dengan daerah pelajar (Kabupaten Jember) yang dapat menjadi mitra untuk membantu menarik wisatawan.
- d. Meningkatkan kerjasama antar daerah di bidang akses antar daerah melalui jalur udara untuk menghindari kerugian pada kedua belah pihak, mengingat di Kabupaten Banyuwangi sudah terdapat Bandar Udara Blimbingsari.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud perubahan RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2016-2021 pada dasarnya dimaksudkan untuk memfokuskan pembangunan yang ingin dicapai hingga akhir periode RPJMD. Perubahan RPJMD Kabupaten Banyuwangi juga memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja Perangkat Daerah, lintas satuan kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan dalam

rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang (*sustainability development*) dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Banyuwangi. Selain itu maksud dilakukan perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021 adalah menjabarkan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati, sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bagi seluruh pihak baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Banyuwangi 2016-2021 dengan menyesuaikan kondisi terkini dan perkembangan serta kebijakan nasional.

Dengan demikian, semua dokumen operasional dalam perencanaan hingga akhir periode RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2021 di lingkungan pemerintahan Kabupaten Banyuwangi harus mengacu pada Perubahan RPJMD ini.

Tujuan dari disusunnya dokumen RPJMD Kabupaten Banyuwangi ini antara lain:

1. Sebagai dokumen perubahan terhadap RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021 yang beberapa diantaranya adalah rekonstrukturisasi *logframe* pembangunan yang merupakan detail pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021
2. Sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan Pembangunan Daerah Tahun 2016-2021.
3. Sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam penyusunan perubahan rencana strategis hingga tahun 2021, termasuk dalam perubahan program-program prioritas;
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS, RAPBD dari perubahan RPJMD Kabupaten Banyuwangi ini disahkan hingga tahun 2021;
5. Sebagai tolak ukur dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dari perubahan RPJMD Kabupaten Banyuwangi ini disahkan hingga tahun 2021;
6. Sebagai instrumen untuk memudahkan seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
7. Sebagai instrumen untuk memahami secara utuh dan memudahkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam

mengimplementasikan kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan menuju masyarakat sejahtera dan berakhlak mulia.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuwangi adalah, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1. Aspek Geografi dan Demografi
- 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3. Aspek Pelayanan Umum
- 2.4. Aspek Daya Saing Daerah

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu
 - 3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD
 - 3.1.2. Neraca Daerah
- 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
 - 3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran
 - 3.2.2. Analisis Pembiayaan
- 3.3. Kerangka Pendanaan
 - 3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja
 - 3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

- 4.1. Permasalahan Pembangunan
- 4.2. Isu Strategis

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

5.1 Visi

5.2 Misi

5.3 Tujuan dan Sasaran

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

6.1 Strategi Pembangunan Daerah

6.2 Arah Kebijakan

6.3 Program Pembangunan Daerah

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB IX PENUTUP

BAB II: GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Luas Wilayah dan Batas Wilayah

Banyuwangi merupakan salah satu kabupaten dalam Provinsi Jawa Timur yang terletak di bagian timur Pulau Jawa. Kabupaten Banyuwangi terletak diujung timur Provinsi Jawa Timur. Secara geografis, Kabupaten Banyuwangi terletak di Ujung Timur Pulau Jawa pada koordinat antara 7° 43' - 8° 46' Lintang Selatan dan 113° 53' - 114° 38' Bujur Timur. Secara geografis Kabupaten Banyuwangi berbatasan dengan Kabupaten Situbondo di sebelah Utara, Samudera Indonesia di sebelah Selatan, Kabupaten Bondowoso disebelah Barat, dan Selat Bali disebelah Timur. Secara geografis Kabupaten Banyuwangi terletak di ujung timur Pulau Jawa. Wilayah daratannya terdiri atas dataran tinggi berupa pegunungan yang merupakan daerah penghasil produk perkebunan; dan dataran rendah dengan berbagai potensi produk hasil pertanian serta daerah sekitar garis pantai yang membujur dari arah utara ke selatan yang merupakan daerah penghasil berbagai biota laut. Luas wilayah Kabupaten Banyuwangi sekitar 5.782,50 km² yang merupakan kabupaten terluas di Provinsi Jawa Timur.



Gambar 2.1. Peta Kabupaten Banyuwangi

Tabel 2.1. Wilayah Administrasi Kabupaten Banyuwangi

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan	No	Kecamatan	Desa	Kelurahan
1	Pesanggaran	5	-	14	Rogojampi	10	-
2	Siliragung	5	-	15	Kabat	14	-
3	Bangorejo	7	-	16	Singojuruh	11	-
4	Purwoharjo	8	-	17	Sempu	7	-
5	Tegaldlimo	9	-	18	Songgon	9	-
6	Muncar	10	-	19	Glagah	8	2
7	Cluring	9	-	20	Licin	8	-
8	Gambiran	6	-	21	Banyuwangi	-	18
9	Tegalsari	6	-	22	Giri	2	4
10	Glenmore	7	-	23	Kalipuro	5	4
11	Kalibaru	6	-	24	Wongsorejo	12	-
12	Genteng	5	-	25	Blimbingsari	10	-
13	Srono	10	-	Jumlah		189	28

Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Banyuwangi Akhir Tahun 2018

Kabupaten Banyuwangi secara administratif terbagi menjadi 25 kecamatan dan 217 desa/ kelurahan. Dari 25 kecamatan yang ada, terdapat satu kecamatan yang memiliki jumlah kelurahan terbanyak yaitu Kecamatan Banyuwangi dengan 18 kelurahan. Tiga kecamatan lain dengan jumlah desa terbanyak antara lain Kecamatan Kabat terdiri dari 14 Desa, Kecamatan Wongsorejo terdiri dari 12 Desa, dan Kecamatan Singojuruh terdiri dari 11 Desa.

2.1.2. Topografi

Topografi wilayah daratan Kabupaten Banyuwangi bagian barat dan utara pada umumnya pegunungan dan bagian selatan sebagian besar dataran rendah. Tingkat kemiringan rata-rata pada wilayah bagian barat dan utara 40°, dengan rata-rata curah hujan lebih tinggi bila dibanding dengan bagian wilayah lainnya. Dataran rendah sebagian besar mempunyai tingkat kemiringan kurang dari 15°, dengan rata-rata curah hujan cukup memadai. Ketinggian tanah di Kabupaten Banyuwangi mencapai 0–2.500 meter dari permukaan laut dan berdasarkan klasifikasi Wilayah Tanah Usaha (WTU) ketinggian tersebut dibedakan atas:

- a. Ketinggian 0-50 meter diatas permukaan laut (mdpl), merupakan wilayah dengan dataran rendah, ataupun wilayah yang berada di sekitar kawasan pantai. Wilayah yang berada pada ketinggian tersebut meliputi sebagian dari Kecamatan Wongsorejo, Kalipuro, Giri, Banyuwangi, Kabat, Blimbingsari, Rogojampi, Muncar, Purwoharjo, Tegaldlimo, Bangorejo, Siliragung, Pesanggaran;
- b. Ketinggian 50-100 meter diatas permukaan laut (mdpl) meliputi sebagian dari Kecamatan Wongsorejo, Kalipuro, Giri, Glagah, Licin, Kabat, Rogojampi, Srono, Cluring, Purwoharjo, Bangorejo, Siliragung dan Pesanggaran;
- c. Ketinggian 100-500 meter diatas permukaan laut (mdpl), meliputi sebagian dari Kecamatan Wongsorejo, Kalipuro, Giri, Glagah Licin, Kabat, Cluring, Singojuruh, Rogojampi, Genteng, Sempu, Songgon, Glenmore, Kalibaru, Tegaldlimo, Siliragung, Pesanggaran, Bangorejo, Purwoharjo, Gambiran, Tegalsari;
- d. Ketinggian 500-1000 meter diatas permukaan laut (mdpl) merupakan wilayah berbukit yang meliputi sebagian Kecamatan Wongsorejo, Kalipuro, Glagah, Licin, Songgon, Sempu, Glenmore, Kalibaru, Siliragung, Pesanggaran;
- e. Ketinggian 1000-2000 meter diatas permukaan laut (mdpl) merupakan daerah pegunungan terletak di sebagian Kecamatan Wongsorejo, Kalipuro, Licin, Songgon, Glenmore, dan Kalibaru;
- f. Ketinggian diatas 2000 meter diatas permukaan laut (mdpl) meliputi sebagian Kecamatan Wongsorejo, Kalipuro, Licin, Songgon, Glenmore dan Kalibaru.

2.1.3. Geologi

Kondisi geologi setiap wilayah bervariasi memiliki peran bagi terbentuknya suatu bentukan lahan di wilayah tersebut. Jenis Tanah di Kabupaten Banyuwangi berdasarkan struktur geologi terdapat berbagai susunan/struktur geologi seperti pada tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2. Luas Tanah Berdasarkan Struktur Geologi Kabupaten Banyuwangi

Struktur Geologi	Luas	
	Ha	%
Aluvium	134.525,00	23,27
Hasil Gunung Api kwarter muda	170.310,50	29,43
Hasil Gunung Api kwarter tua	59.283,00	10,26
Andesit	47.417,75	8,20

Struktur Geologi	Luas	
	Ha	%
Miosen falses semen	89.177,25	15,43
Miosen falsen batu gamping	77.536,50	13,41

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032

Adapun keadaan jenis tanah di Kabupaten Banyuwangi dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3. Jenis Tanah Kabupaten Banyuwangi

No.	Jenis Tanah	Luas		Letak
		Ha	%	
1	Regosol	138.490,87	23,96	Wongsorejo, Kalipuro, Glagah, Songgon, Glenmore, Gambiran, Bangorejo, Cluring, Muncar, Purwoharjo, Tegaldlimo
2	Lithosol	39.031,88	6,75	Kalibaru, Glenmore, Pesanggaran
3	Lathosol	14.109,30	2,44	Purwoharjo, Tegaldlimo.
4	Podsolik	384.684,75	60,3	hampir terdapat diseluruh wilayah.
5	Gambut	37.433,70	6,55	Pesanggaran, Bangorejo.

Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Banyuwangi Akhir Tahun 2017

Tanah regosol terdapat pada wilayah Kecamatan Wongsorejo, Kalipuro, Glagah, Songgon, Glenmore, Gambiran, Bangorejo, Cluring, Muncar, Purwoharjo dan Tegaldlimo. Tanah lithosol terdapat pada wilayah Kecamatan Kalibaru, Glenmore dan Pesanggaran. Tanah lathosol terdapat pada wilayah Kecamatan Purwoharjo dan Tegaldlimo. Tanah podsolik hampir terdapat pada seluruh wilayah Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi kecuali wilayah Kecamatan Cluring, Purwoharjo dan Muncar hanya sebagian kecil terdapat tanah podsolik.

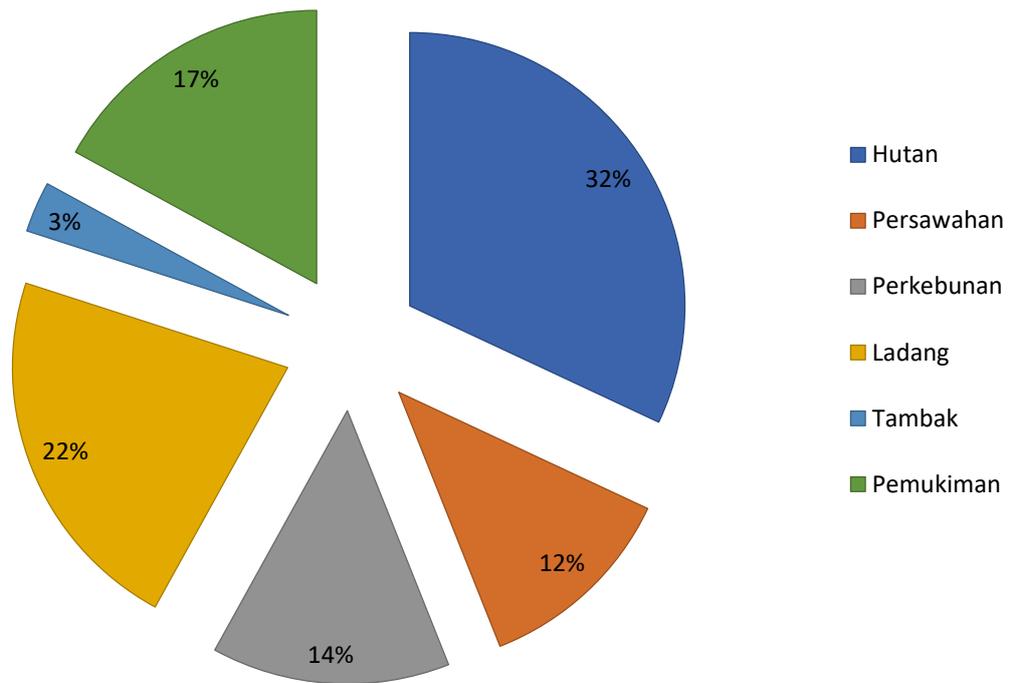
2.1.4. Klimatologi

Kabupaten Banyuwangi terletak di selatan ekuator yang dikelilingi oleh Laut Jawa, Selat Bali dan Samudera Indonesia dengan iklim tropis yang terbagi menjadi 2 musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau.

1. Rata-rata curah hujan selama tahun 2017 mencapai 146,33 mm. Curah hujan terendah terjadi pada Bulan September sebesar 9,30 mm, sedangkan curah hujan tertinggi terjadi pada Bulan Desember sebesar 276,60 mm;
2. Persentase rata-rata penyinaran matahari pada tahun 2017 mencapai 68,08 %, terendah pada Bulan Desember sebesar 42 % dan tertinggi pada Bulan September sebesar 91 %;
3. Rata-rata kelembaban udara pada tahun 2017 diperkirakan mendekati 79,08 %. Kelembaban terendah terjadi pada Bulan April dengan rata-rata kelembaban udara sebesar 75 %. Sebaliknya kelembaban tertinggi terjadi pada Bulan Juni dengan besaran 83 %;
4. Rata-rata suhu udara terendah terjadi pada Bulan Juli 2017 sebesar 26,10 derajat celcius. Sedang tertinggi pada Bulan April sebesar 28,60 derajat celcius.

2.1.5. Penggunaan Lahan

Luas wilayah Kabupaten Banyuwangi sekitar 5.782,50 km² yang merupakan kabupaten terluas di Provinsi Jawa Timur. Sebagian besar wilayah Kabupaten Banyuwangi merupakan daerah kawasan hutan. Area hutan ini mencapai sekitar 32%, persawahan mencapai 12%, perkebunan sebesar 14%, 22% dimanfaatkan sebagai daerah pemukiman, ladang sebesar 3% dan 17% untuk Tambak.



Gambar 2.2. Proporsi Penggunaan Lahan di Kabupaten Banyuwangi

2.1.6. Potensi Pengembangan Wilayah

Sebagaimana karakteristik wilayah yang dimiliki Kabupaten Banyuwangi yang telah tertuang dalam rencana tata ruang kabupaten, potensi wilayah yang dapat dikembangkan di Kabupaten Banyuwangi adalah pengembangan kawasan pertanian, kawasan perikanan, dan kawasan pariwisata

A. Pertanian

Pengembangan Kawasan pertanian dilakukan melalui beberapa upaya meliputi:

1. mengembangkan lahan pertanian baru;
2. mempertahankan kawasan pertanian produktif;
3. mengendalikan alih fungsi lahan pertanian;
4. menetapkan kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan atau lahan pertanian abadi;
5. mengoptimalkan pengelolaan lahan pertanian basah dan lahan pertanian kering;
6. mengembangkan dan mengoptimalkan kawasan agropolitan;
7. mengembangkan agroindustri dan agrobisnis di kawasan agropolitan;

8. mengembangkan produk-produk unggulan budidaya pertanian dan hortikultura;
9. mengembangkan kawasan budidaya peternakan, perkebunan dan kehutanan;
10. mengembangkan dan meningkatkan infrastruktur sumberdaya air;
11. meningkatkan infrastruktur penunjang kawasan pertanian;
12. mengembangkan budidaya pertanian dan hortikultura yang ramah lingkungan; dan
13. meningkatkan kelembagaan pengelolaan kawasan pertanian.

Pengembangan Kawasan pertanian di Kabupaten Banyuwangi tersebar di seluruh kecamatan. Dengan membagi menjadi 4 kategori yaitu kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan, kawasan peruntukan hortikultura, kawasan peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan peternakan.

B. Perikanan

Pengembangan Kawasan perikanan dilakukan melalui beberapa upaya meliputi:

1. mengembangkan dan mengoptimalkan kawasan perikanan tangkap;
2. mengembangkan dan mengoptimalkan kawasan perikanan budidaya air laut, budidaya air payau, dan budidaya air tawar;
3. mengoptimalkan kawasan pertambakan;
4. mengoptimalkan pengembangan dan pengelolaan kawasan minapolitan;
5. mengembangkan sentra-sentra produksi perikanan yang mendukung pengoptimalan industri pengolahan perikanan di kawasan minapolitan;
6. mengendalikan pencemaran lingkungan pada sentra-sentra produksi perikanan dengan meningkatkan pengelolaan limbah industri perikanan yang bersih, sehat, dan ramah lingkungan;
7. mengembangkan dan meningkatkan infrastruktur penunjang kawasan perikanan;
8. meningkatkan kelembagaan pengelolaan kawasan perikanan;
9. mengawasi dan mengendalikan eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya perikanan dan kelautan; dan
10. mengembangkan dan mengendalikan kawasan hutan bakau dan kawasan terumbu karang bagi keberlanjutan ekosistem kawasan perikanan.

Pengembangan Kawasan perikanan dibagi menjadi 4 kategori, yaitu kawasan peruntukan perikanan tangkap, kawasan peruntukan budidaya perikanan, kawasan peruntukan pengolahan ikan dan yang terakhir pengembangan fungsi pelabuhan perikanan.

Pengembangan Kawasan perikanan dilakukan di seluruh kecamatan di Kabupaten Banyuwangi.

Adapun untuk pengembangan perikanan tangkap dilakukan di kecamatan berikut :

1. Kecamatan Banyuwangi
2. Kecamatan Kabat
3. Kecamatan Kalipuro
4. Kecamatan Muncar
5. Kecamatan Pesanggaran
6. Kecamatan Purwoharjo
7. Kecamatan Rogojampi
8. Kecamatan Tegaldlimo
9. Kecamatan Wongsorejo
10. Kecamatan Blimbingsari

C. Pariwisata

Pengembangan Kawasan pariwisata dilakukan melalui beberapa upaya meliputi:

1. Mengembangkan potensi daya tarik wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan sesuai dengan Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPP);
2. Mengembangkan kawasan obyek wisata unggulan pada setiap WPP;
3. Mengembangkan jalur pariwisata terpadu yang terintegrasi dengan pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah;
4. Mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan;
5. Melestarikan nilai-nilai tradisi atau kearifan budaya masyarakat lokal beserta lingkungannya sebagai daya tarik wisata budaya;
6. Melestarikan kawasan peninggalan sejarah dan situs budaya sebagai aset budaya daerah dan pariwisata;
7. Meningkatkan kerjasama dalam pengelolaan pariwisata pada kawasan konservasi, kawasan lindung, cagar alam, hutan produksi, dan perkebunan melalui pengembangan ekowisata; dan
8. Meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha pariwisata dengan pembinaan, penyuluhan, pelatihan, dan promosi bagi pengembangan pariwisata.

Pengembangan Kawasan pariwisata di Kabupaten Banyuwangi tersebar di seluruh kecamatan. Dengan membagi menjadi 3 kategori menurut daya tariknya meliputi daya tarik

wisata budaya, wisata alam, dan wisata buatan. Namun dalam pengembangan pariwisata, Kabupaten Banyuwangi membentuk tiga wilayah pengembangan pariwisata (WPP) yang lebih spesifik yaitu WPP I Kawah Ijen, WPP II Pantai Plengkung, dan WPP III Pantai Sukamade.

2.1.7. Kawasan Rawan Bencana

Indonesia merupakan negara yang rawan bencana secara geologis, geografis dan demografis karena:

1. Terletak di atas pertemuan 3 lempeng tektonik besar, Lempeng Indo-Australia, Eurasia dan Lempeng Pasifik;
2. Terdapat dua jalur gunung api/sabuk api (ring of fire), sirkum pasifik dan sirkum mediterania. Pada bagian selatan dan timur Indonesia terdapat sabuk vulkanik (volcanic arc) yang memanjang dari Pulau Sumatera - Jawa - Nusa Tenggara - Sulawesi, yang sisinya berupa pegunungan vulkanik tua dan dataran rendah yang sebagian didominasi oleh rawa-rawa. Kondisi tersebut sangat berpotensi sekaligus rawan bencana seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir dan tanah longsor. Data menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kegempaan yang tinggi di dunia, lebih dari 10 kali lipat tingkat kegempaan di Amerika Serikat (Arnold, 1986).;
3. Penduduk yang sangat padat terutama di Pulau Jawa; serta
4. Infrastruktur yang dibangun di Indonesia tidak didesain sesuai dengan kondisi alam yang rawan bencana.

Seperti halnya wilayah lain di Indonesia, secara geografis, geologis dan demografis Kabupaten Banyuwangi merupakan daerah rawan bencana karena: a) berbatasan langsung dengan Samudra Hindia yang dilalui oleh lempeng Indo Australia dan Eurasia sehingga rawan terhadap bencana tsunami dan kekeringan akibat El Nino; b) terdapat dua gunung berapi yang masih aktif yakni Gunung Raung dan Gunung Ijen sehingga rawan terhadap bencana letusan gunung berapi; c) tingginya intensitas air hujan dan perusakan hutan mengakibatkan bencana banjir dan longsor.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Tata Ruang mengamanatkan perencanaan daerah rawan bencana pada setiap kabupaten atau kota sebagai akibat meningkatnya kejadian bencana sepuluh tahun terakhir. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Banyuwangi tahun 2012-2032 telah diidentifikasi beberapa wilayah di Kabupaten Banyuwangi rawan terhadap tsunami, letusan gunung berapi, banjir, dan tanah longsor. Terdapat 11 (sebelas) kecamatan rawan tsunami, 8 (delapan) kecamatan letusan gunung berapi, 5 (lima) kecamatan di Kabupaten Banyuwangi rawan bencana banjir, 11 (sebelas) kecamatan kawasan rawan longsor, dan berdasarkan data BPBD Kabupaten Banyuwangi terdapat 14 (empat belas) kecamatan sebagai kawasan rawan kekeringan.

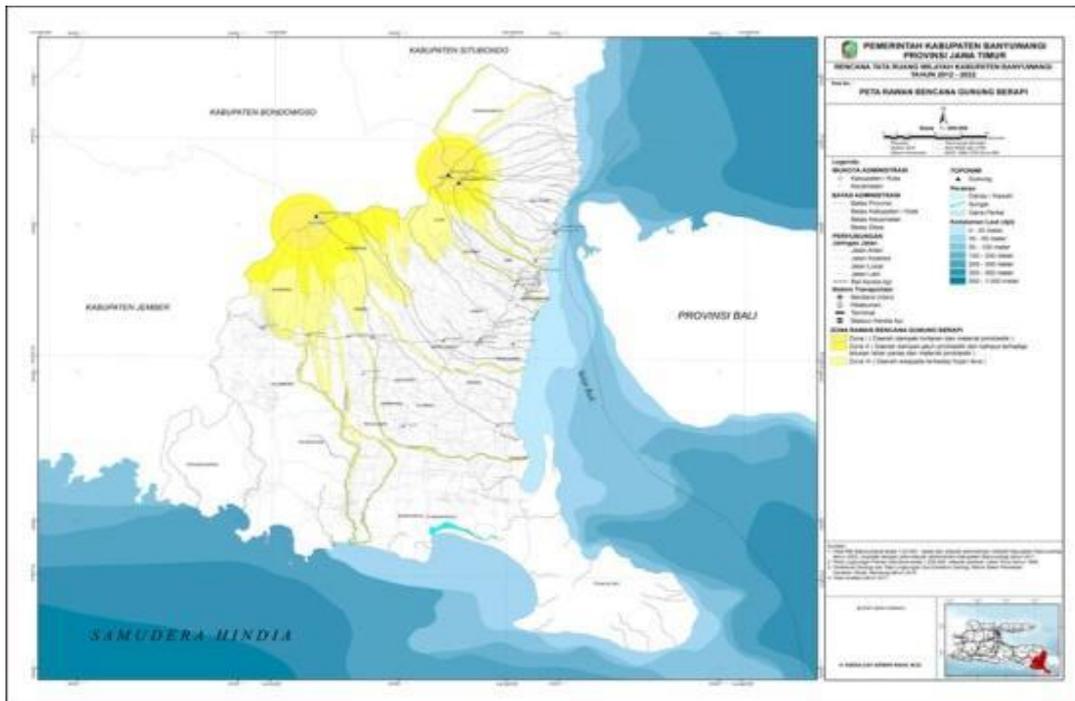
Kabupaten Banyuwangi menjadi salah satu daerah dengan potensi bencana yang cukup tinggi. Kawasan rawan bencana merupakan kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Berikut hasil rekapitulasi kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi dari tahun 2014 – 2018:

Tabel 2.4. Rekapitulasi Bencana Alam Kabupaten Banyuwangi 2014-2018

No	Jenis Bencana	2014			2015			2016			2017			2018		
		Kejadian	Korban	Kerugian	Kejadian	Korban	Kerugian	Kejadian	Korban	Kerugian	Kejadian	Korban	Kerugian	Kejadian	Korban	Kerugian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Tsunami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Gunung Meletus	-	-	-	1	-	6.150 juta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Banjir	3	-	252 juta	5	-	521 juta	13	-	684 juta	15	-	727 juta	12	-	17.991 juta
4	Longsor	3	-	95,5 juta	2	1	87 juta	5	1	643,5 juta	6	3	735 juta	3	-	91 juta
5	Kekeringan	63 desa	-	836 juta	48 desa	-	648 juta	29 desa	-	385,5 juta	21 desa	5	289 juta	17 desa	-	229 juta
6	Angin Kencang/Puting Beliung	14	-	1.180 juta	16	-	384 juta	11	-	643 juta	19	-	935 juta	12	-	351 juta

Data tersebut menunjukkan bahwa daerah yang rawan terhadap ancaman bencana letusan gunung api pada Gunung Ijen dan Gunung Raung terjadi di 22 kecamatan yang diantaranya adalah Kecamatan Wongsorejo, Kecamatan Kalipuro, Kecamatan Glagah, Kecamatan Giri, Kecamatan Licin, Kecamatan Songgon, Kecamatan Glenmore, Kecamatan Kalibaru.

Berikut ini gambaran peta rawan bencana gunung berapi Kabupaten Banyuwangi :

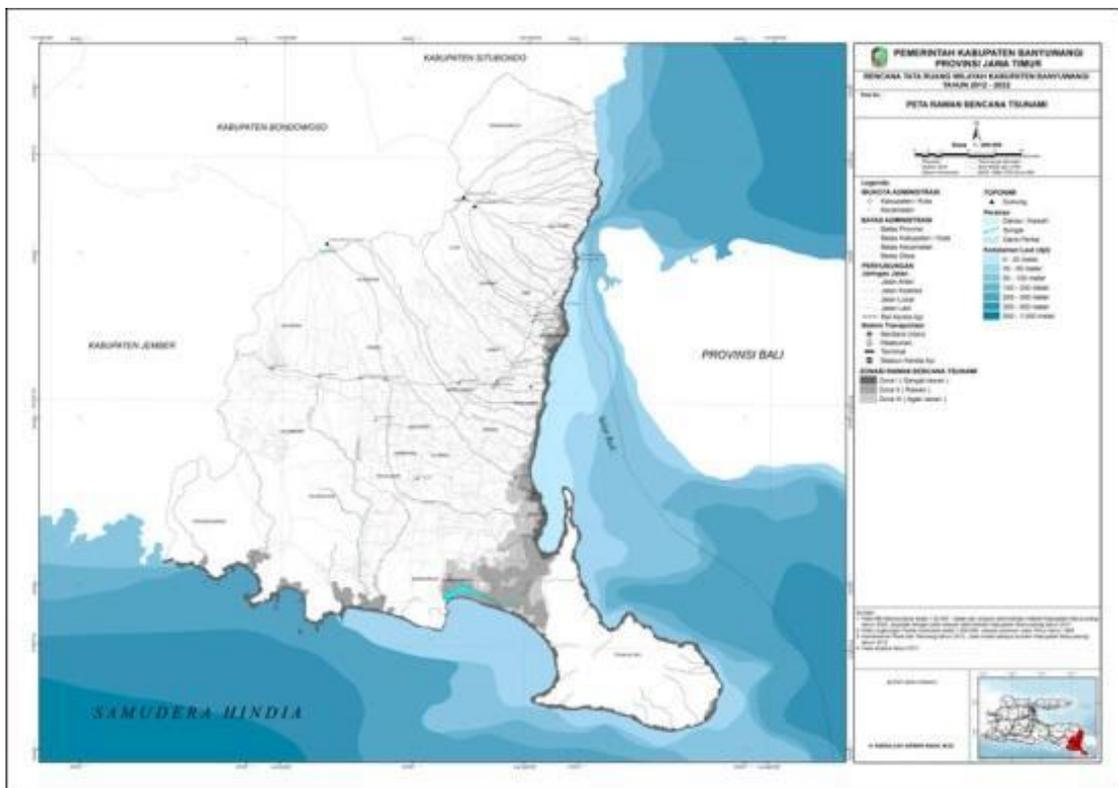


Gambar 2.3. Peta Rawan Bencana Gunung Berapi Kabupaten Banyuwangi

Gempa bumi yang disebabkan interaksi lempeng tektonik dapat menimbulkan gelombang pasang apabila terjadi di samudera. Dengan wilayah yang sangat dipengaruhi oleh pergerakan lempeng tektonik ini, Indonesia sering mengalami tsunami. Tsunami yang terjadi di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh gempa-gempa tektonik di sepanjang daerah subduksi dan daerah seismik aktif lainnya (Puspito, 1994). Selama kurun waktu 1600-2000 terdapat 105 kejadian tsunami yang 90 persen di antaranya disebabkan oleh gempa tektonik, 9 persen oleh letusan gunung berapi dan 1 persen oleh tanah longsor (Latief dkk., 2000). Wilayah pantai di Indonesia merupakan wilayah yang rawan terjadi bencana tsunami terutama pantai barat Sumatera, pantai selatan Pulau Jawa, pantai utara dan selatan pulau-pulau Nusa Tenggara, pulau-pulau di Maluku, pantai utara Irian Jaya dan hampir seluruh pantai di Sulawesi.

Tsunami di Kabupaten Banyuwangi terjadi akibat dari gempa bumi di lautan lepas di dekat perairan Pantai Pancer yang telah terjadi beberapa kali, pada tahun 2007 gempa bumi sebesar 4,9 Skala Richter. Ditinjau dari tinggi gelombang, di kawasan Grajagan sebesar 6,9 m dengan jarak jangkau ke pantai mencapai 300 m. Di kawasan pesisir Pancer tinggi gelombang mencapai 11m dengan jarak jangkau sepanjang 300 m ke arah daratan. Daerah rawan tsunami hampir terdapat diseluruh wilayah pesisir Kabupaten Banyuwangi dengan rata-rata ketinggian genangan tsunami > 3 m sehingga potensi tsunami di Kabupaten Banyuwangi digolongkan sebagai kelas tinggi.

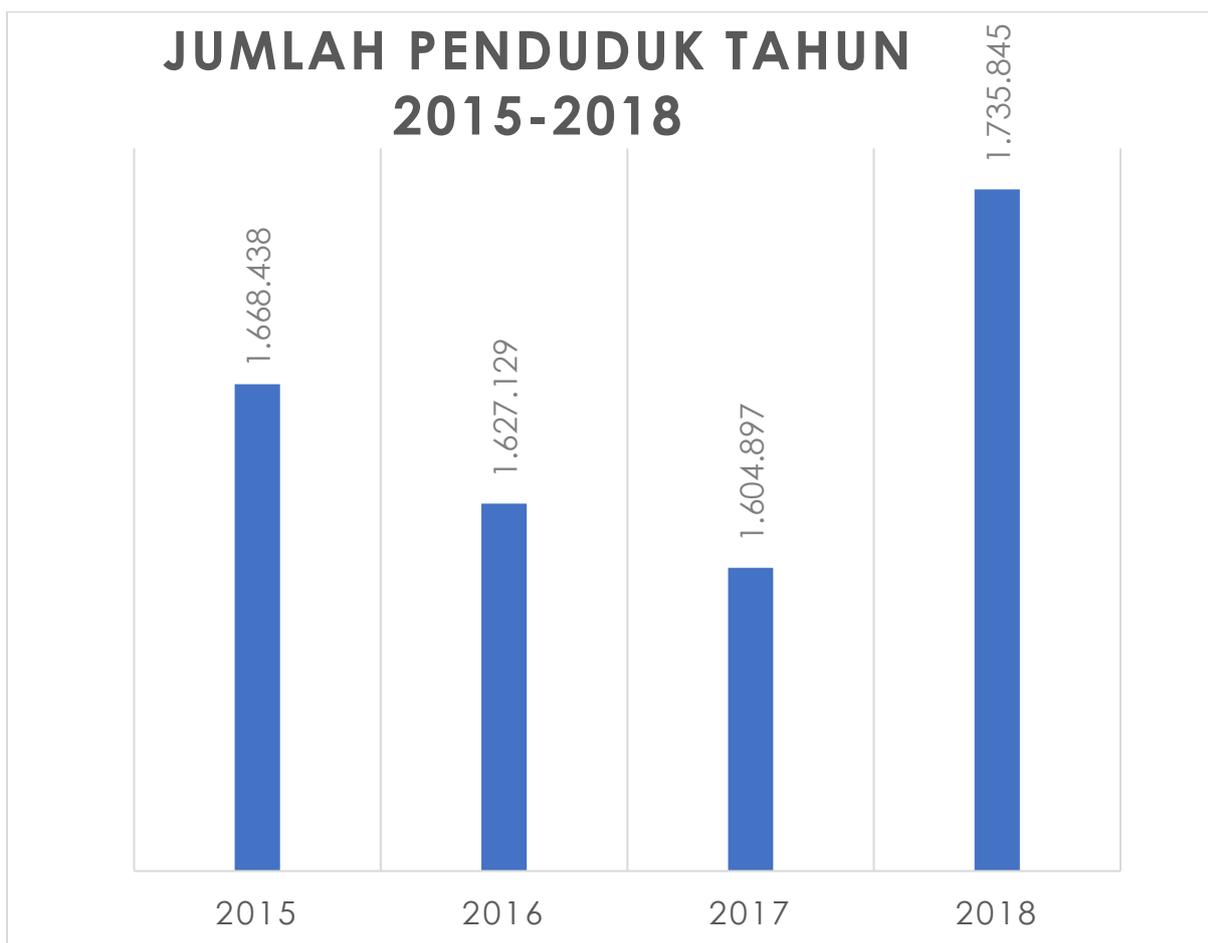
Daerah di Kabupaten Banyuwangi yang memiliki ancaman bencana tsunami adalah Kecamatan Pesanggaran, Siliragung, Purwoharjo, Tegaldlimo, Kabat, Muncar, Rogojampi, Wongsorejo, Bangorejo, Kalipuro, dan Kecamatan Banyuwangi. Kecamatan Banyuwangi merupakan Kota Kabupaten yang berpotensi tsunami dengan resiko tinggi. Berikut merupakan peta rawan bencana tsunami Kabupaten Banyuwangi.



Gambar 2.4. Peta Rawan Bencana Tsunami Kabupaten Banyuwangi

2.1.8. Demografi

Jumlah Penduduk Kabupaten Banyuwangi tahun 2017 sebanyak 1,693,630 jiwa. Jumlah penduduk Banyuwangi pada tahun 2017 meningkat sebanyak 8,645 jiwa atau 0,5 persen dari tahun 2016. Angka pertumbuhan ini masih lebih kecil dibandingkan tahun 2015 ke 2016 yang sebanyak 16.547 jiwa dalam setahun. Pertumbuhan penduduk yang menurun ini merupakan keberhasilan untuk mengendalikan laju pertumbuhan jumlah penduduk sebab jika laju pertumbuhan penduduk terlalu tinggi juga akan menjadi permasalahan bagi daerah di masa mendatang.

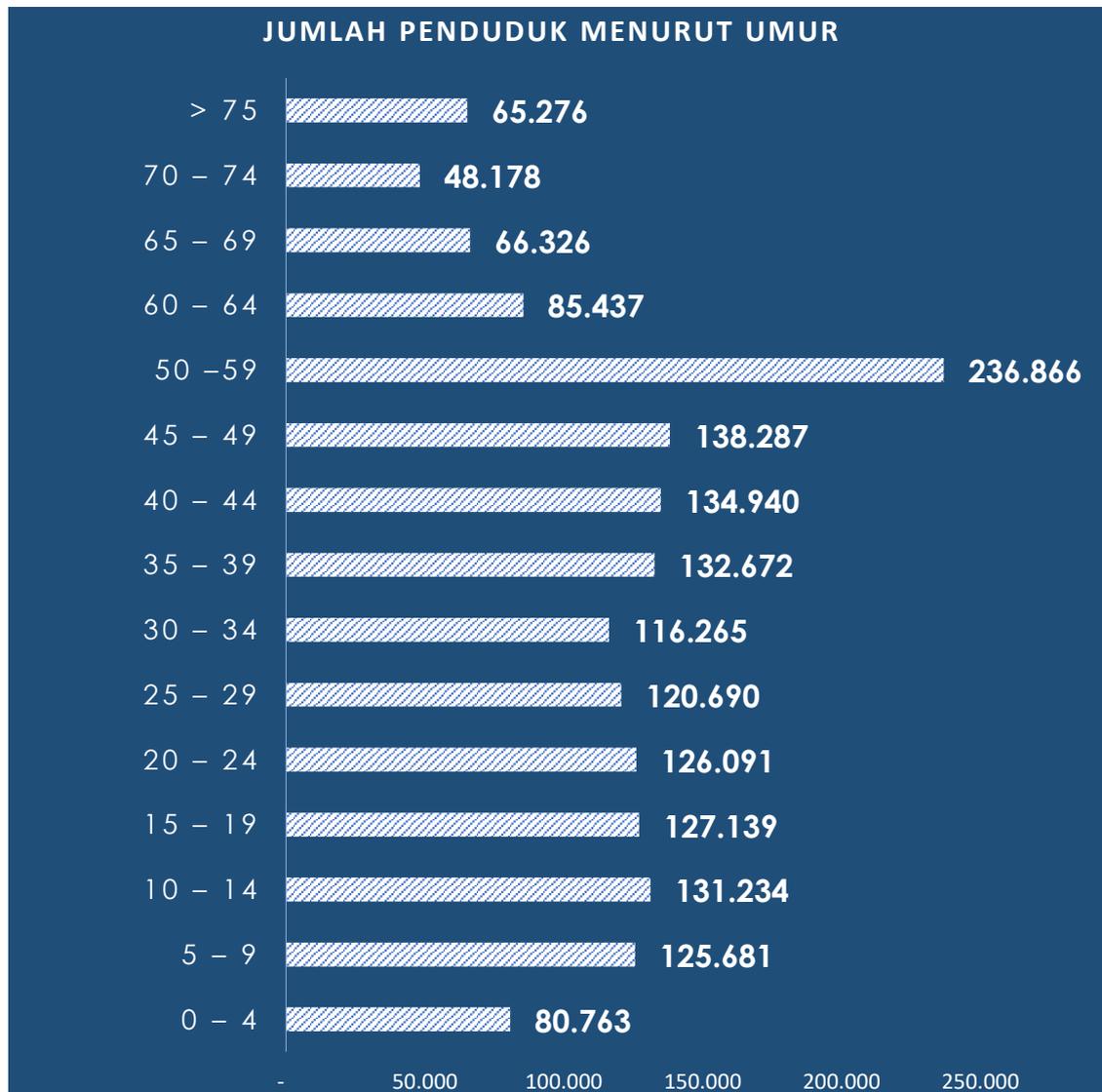


Gambar 2.5. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Tahun 2015 – 2018

Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Banyuwangi Akhir Tahun Anggaran 2018

Penduduk Kabupaten Banyuwangi berdasarkan usia masih didominasi oleh penduduk usia produktif yaitu antara usia 15 - 59 tahun dengan jumlah 1,132,950 jiwa atau sebesar 65.27%. Sisanya sebanyak 602,895 jiwa atau sebesar 34.73% merupakan penduduk tidak

produktif yaitu penduduk dengan usia 0-14 tahun dan penduduk usia lanjut 60-75 tahun. Kondisi tersebut memperlihatkan kondisi Kabupaten Banyuwangi yang masih memiliki bonus demografi yaitu proporsi penduduk usia produktif masih mendominasi dibandingkan dengan penduduk tidak produktif.



Gambar 2.6. Jumlah Penduduk Kabupaten Banyuwangi Berdasarkan Usia Tahun 2018

Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Banyuwangi Akhir Tahun Anggaran 2018

Jika jumlah penduduk dilihat menurut jenis kelamin, dapat dilihat bahwa perbandingan antara penduduk dengan jenis kelamin laki-laki dibandingkan dengan jenis kelamin perempuan, memiliki jumlah yang hampir sama. Perbedaan jumlah penduduk sangat kecil karena hanya memiliki selisih 0.44%. Jumlah penduduk dengan jenis kelamin laki-laki

sedikit lebih banyak yaitu memiliki persentase sebesar 50.22%. sedangkan penduduk dengan jenis kelamin perempuan memiliki persentase sebesar 49,78%. Berikut merupakan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin yang disajikan berdasarkan kecamatan.

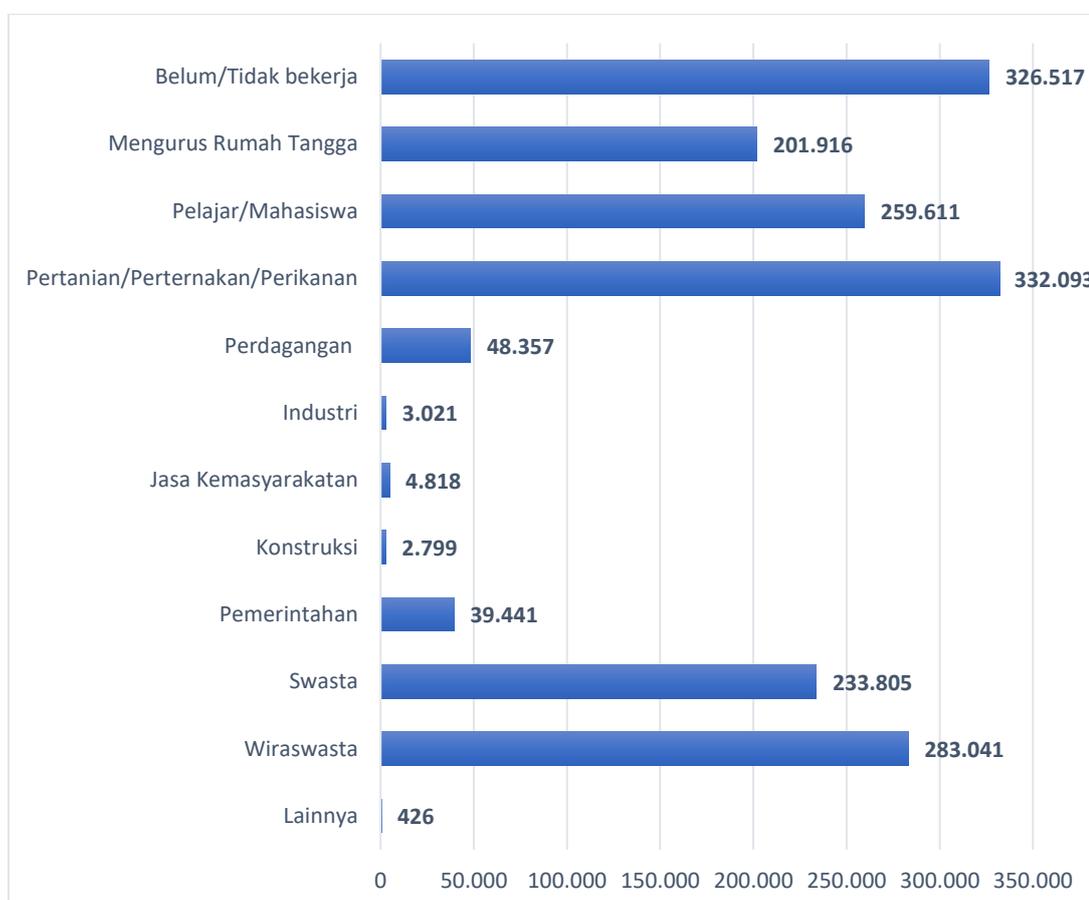
Tabel 2.5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2018

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk		Jumlah Penduduk
		L	P	L + P
1	Pesanggaran	26,756	26,154	52,910
2	Bangorejo	33,643	32,753	66,396
3	Purwoharjo	35,670	34,913	70,583
4	Tegaldlimo	34,716	33,977	68,693
5	Muncar	69,886	68,092	137,978
6	Cluring	40,319	39,746	80,065
7	Gambiran	33,831	33,863	67,694
8	Srono	50,028	48,926	98,954
9	Genteng	47,294	46,407	93,701
10	Glenmore	38,519	38,709	77,228
11	Kalibaru	32,887	32,858	65,745
12	Singojuruh	26,850	26,989	53,839
13	Rogojampi	28,474	29,068	57,542
14	Kabat	32,734	32,500	65,234
15	Glagah	18,247	18,676	36,923
16	Banyuwangi	59,041	60,438	119,479
17	Giri	15,489	15,620	31,109
18	Wongsorejo	38,335	37,894	76,229
19	Songgon	29,650	29,592	59,242
20	Sempu	42,931	42,487	85,418
21	Kalipuro	41,845	41,545	83,390
22	Siliragung	25,268	24,279	49,547

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk		Jumlah Penduduk
		L	P	L + P
23	Tegalsari	26,307	25,499	51,806
24	Licin	14,980	14,785	29,765
25	Blimbingsari	28,021	28,354	56,375
JUMLAH		871,721	864,124	1,735,845

Sumber: LKPJ Bupati Banyuwangi Akhir Tahun Anggaran 2018

Sedangkan jika dilihat dari sumber mata pencariannya, maka dapat dilihat bahwa proporsi terbesar adalah penduduk dengan mata pencaharian Pertanian/Peternakan/Perikanan dengan proporsi sebesar 19,13 persen. Proporsi terbesar selanjutnya adalah penduduk yang Belum/Tidak Bekerja dengan proporsi sebesar 18,81 persen. Kemudian mata pencaharian Wiraswasta dengan proporsi sebesar 16,31 persen. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian disajikan dalam gambar berikut:



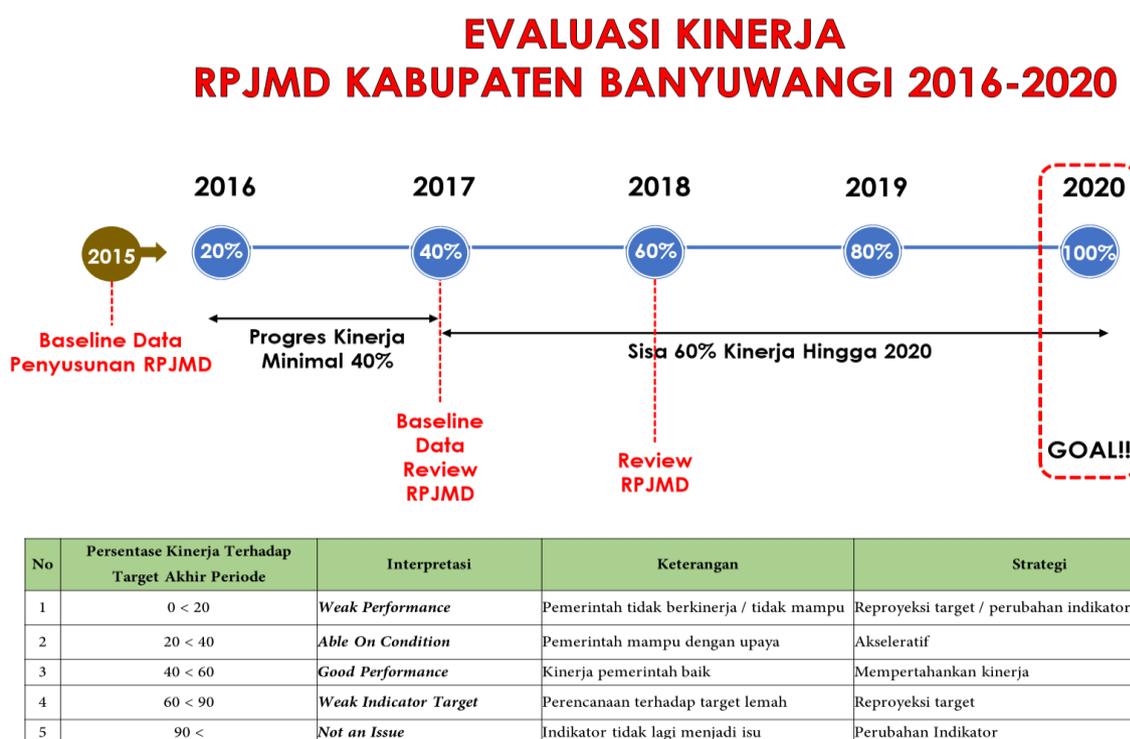
Gambar 2.7. Jumlah Penduduk Kabupaten Banyuwangi Berdasarkan Mata Pencaharian Tahun 2018

Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Banyuwangi Akhir Tahun Anggaran 2018

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Secara umum aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga. Pada dokumen RPJMD perubahan ini, analisis realisasi indikator aspek kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Banyuwangi bertujuan untuk melihat realisasi kinerja *midterm* RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021 pada tahun 2018.

Analisis yang dilakukan terhadap capaian IKU Kabupaten Banyuwangi pada perubahan RPJMD di tahun 2018 ini adalah menggunakan analisis *gap expectation*. Dimana hasil analisis yang diharapkan adalah melihat kinerja masing-masing IKU, yang sehingga dapat ditarik kesimpulan mana yang berjalan dengan baik sesuai target, mana yang cenderung berjalan lambat dan perlunya akselerasi, dan bahkan mana yang sudah tercapai di pertengahan periode RPJMD. Berikut merupakan gambaran analisis *gap expectation* IKU RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2016-2021.



Gambar 2.8. Klasifikasi Capaian Indikator Kinerja Pembangunan

Metode analisis diatas menggambarkan bahwa dengan masa periode RPJMD 5 tahun, dengan asumsi tahun 2020 adalah *goals* tercapainya target RPJMD maka idealnya setiap

tahun Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berkinerja 20 persen dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2020. Sedangkan dimana Review RPJMD ini dilakukan pada tahun 2018, dengan data review yang digunakan adalah tahun 2017 asumsinya pemerintah normal disaat tahun 2017 masih berkinerja 40 persen. Sedangkan kinerja di bawah 40 persen perlu dilakukan kebijakan akselerasi atau re-proyeksi target. Begitu juga dengan kinerja yang telah jauh terlampaui, dapat diasumsikan IKU tersebut telah tidak menjadi IKU kembali, atau pemerintah lemah dalam perencanaan targetnya.

Evaluasi kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja tahun berkenaan terhadap Periode efektif RPJMD. Capaian kinerja berkenaan yang digunakan dalam evaluasi adalah capaian kinerja pada tahun 2017. Sedangkan target kinerja efektif dalam RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021 adalah pada tahun 2020. Tahun 2020 dipilih karena pada tahun 2021 merupakan tahun peralihan pemerintahan sehingga dirasa kurang efektif jika ditetapkan sebagai tolak ukur akhir periode RPJMD. Untuk meningkatkan relevansi perhitungan, maka sebelum dibandingkan antara Realisasi tahun berkenaan dengan target tahun 2020, maka dilakukan pengurangan terlebih dahulu menggunakan realisasi pada tahun dasar RPJMD. Hal tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan nilai capaian kinerja pemerintah yang lebih murni dengan asumsi tahun dasar merupakan starting point atau merupakan titik nol pembangunan untuk periode RPJMD Tahun 2016-2021. Rumus perhitungan yang digunakan untuk melakukan evaluasi untuk indikator secara umum (Bersifat Positif) adalah sebagai berikut:

Rumus Indikator Positif:

$$Gap Expectations = \frac{(Realisasi Tahun Bersangkutan - Realisasi Tahun Dasar)}{(Target Tahun 2020 - Realisasi Tahun Dasar)} \times 100$$

Sedangkan untuk indikator yang bersifat negasi atau yang memiliki penafsiran secara terbalik seperti Tingkat kemiskinan dan Indeks Gini, dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Rumus Indikator Negasi:

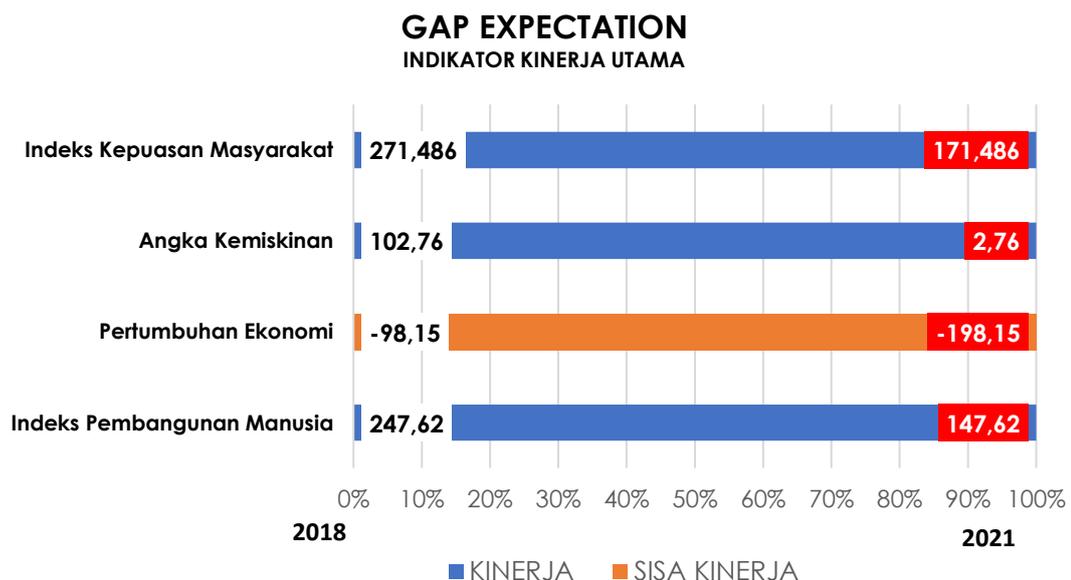
$$Gap Expectations = \frac{(Realisasi Tahun Dasar - Realisasi Tahun Bersangkutan)}{(Target Tahun Dasar - Realisasi Tahun 2020)} \times 100$$

Hasil perhitungan menggunakan rumus tersebut, menghasilkan besaran prosentase capaian nilai kinerja yang telah dicapai hingga tahun berkenaan. Dengan mengetahui persentase capaian kinerja maka dapat diketahui juga sisa beban kinerja pemerintah untuk mencapai target yang telah ditetapkan untuk tahun 2020.

2.2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama

Salah satu tolok ukur kinerja pemerintah khususnya yang dapat merepresentasikan kinerja RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2016-2021 dapat dilihat melalui capaian Indikator Kinerja Utama. Secara normatif, Indikator Kinerja Utama (IKU) atau indikator tujuan RPJMD berada di level impact, dimana capaian dari IKU Kabupaten Banyuwangi merupakan impact dari serangkaian aktivitas dan kegiatan yang dilakukan organisasi perangkat daerah.

Terdapat 4 IKU yang merepresentasikan kinerja pemerintah daerah dalam periode RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2016-2021. Dengan menggunakan pendekatan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dilihat Gambar gambaran kinerja dan sisa kinerja IKU Kabupaten Banyuwangi tahun 2016-2021.



Gambar 2.9. Gap Expectations IKU Kabupaten Banyuwangi

Data diatas menunjukkan bahwa dari total 4 IKU Kabupaten Banyuwangi, yang merupakan IKU setelah *Review Logframe / cascading* 3 IKU telah mencapai capaian lebih dari 100%. Hal tersebut memiliki arti bahwa kinerja yang dilaksanakan hingga 2018 telah melebihi

target yang seharusnya dicapai di tahun 2021. Sebagai contoh adalah Indeks Kepuasan Masyarakat yang memperoleh kinerja mencapai 271,486% atau 86,77 realisasi capaian di tahun 2018, sedangkan target yang ditetapkan tahun 2021 yang mencapai 80,44 telah jauh terlampaui. Begitu juga dengan Angka Kemiskinan yang memperoleh kinerja 102,76% atau 7,8% realisasi pada tahun 2018, sedangkan target yang ditetapkan hingga tahun 2021 sebesar 7,84%. Terakhir adalah Indeks Pembangunan Manusia yang mencapai 247,62% atau 70,06 kinerja di tahun 2018, sedangkan target yang ditetapkan di tahun 2021 hanya mencapai 68,75. Hal penting dari kondisi tiga indikator diatas adalah lemahnya penetapan target perencanaan. Tentunya yang harus dilakukan adalah review target, sehingga pemerintah tidak terkesan tanpa kinerja untuk mencapai tahun 2021.

Berbeda dengan 3 indikator sebelumnya, berbanding terbalik pertumbuhan ekonomi justru mengalami minus kinerja mencapai -98,15%. Adanya minus kinerja dalam analisis *gap expectation* memiliki arti bahwa, kinerja yang dilaksanakan hingga tahun 2018 oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi justru lebih buruk dari *baseline* data RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021 yakni di tahun 2015. Sehingga bukannya berkinerja, malah justru terkesan defisit kinerja. Sebagai contoh yakni Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyuwangi yang mencapai 6,01% pada tahun 2015 justru perlahan turun hingga tahun 2018 mencapai 5,84%, padahal ditargetkan tuntas di tahun 2021 mencapai 6,67%. Untuk itu hal yang perlu diperhatikan dengan IKU tersebut adalah menyiapkan strategi akseleratif dalam mengejar defisit kinerja hingga tahun 2021. Berikut merupakan tabel kinerja dan target IKU Kabupaten Banyuwangi.

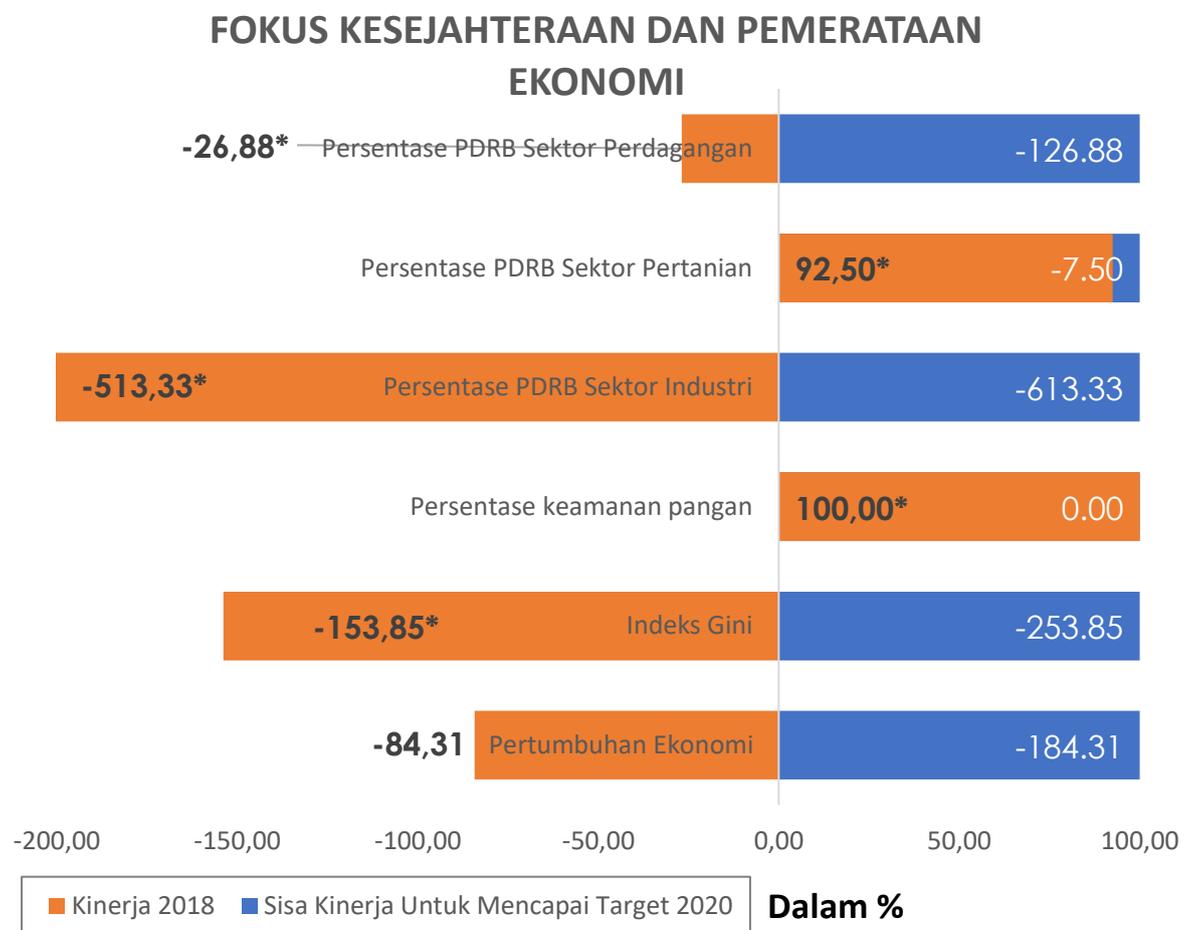
Tabel 2.6. Kinerja dan Target IKU Kabupaten Banyuwangi

No	Uraian	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja		
				2016	2017	2018
1	Indeks Pembangunan Manusia	skala	67,70	69,00	69,64	70,06
2	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,01	5,38	5,45	5,84
3	Angka Kemiskinan	%	9,29	8,79	8,64	7,80
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	77,95	82,05	84,71	86,77

2.2.2 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Sebagai upaya dalam melihat kinerja perekonomian sebuah daerah, dapat dilihat dalam dua perspektif yang berbeda yang meliputi pertumbuhan ekonomi yang direpresentasikan melalui pertumbuhan PDRB Kabupaten Banyuwangi dan perspektif pemerataan. Analisis capaian kinerja dilakukan melalui dua pendekatan, yakni membaca tren capaian masing-masing indikator dan analisis *gap expectation* yang melihat kinerja yang telah dilakukan hingga 2018 dengan gap sisa kinerja pada tahun 2020.

Gambar dibawah ini menjelaskan *gap expectation* dari kinerja fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi pada tahun 2018. Gambaran yang dapat dilihat dari Gambar tersebut adalah, berapa effort atau sisa kinerja yang harus diselesaikan pada tahun 2020.



Gambar 2.10. Gap Expectations Indikator Pada Fokus Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi

Dari total 6 indikator pada fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi Kabupaten Banyuwangi, setidaknya terdapat 1 indikator kinerja yang capaiannya melebihi kinerja pada tahun 2018 yang meliputi Persentase PDRB Sektor Pertanian. Hal yang perlu diperhatikan dari 1 indikator ini adalah, capaian kinerja yang telah jauh melampaui kinerja yang seharusnya di tahun 2018 yang normalnya akan tercapai angka kinerja 60 persen. Hal tersebut menimbulkan asumsi, apakah pemerintah berkinerja dengan sangat baik, ataukah lemahnya target yang ditetapkan oleh pemerintah. Berikut merupakan rekapitulasi kinerja dan sisa kinerja indikator Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.

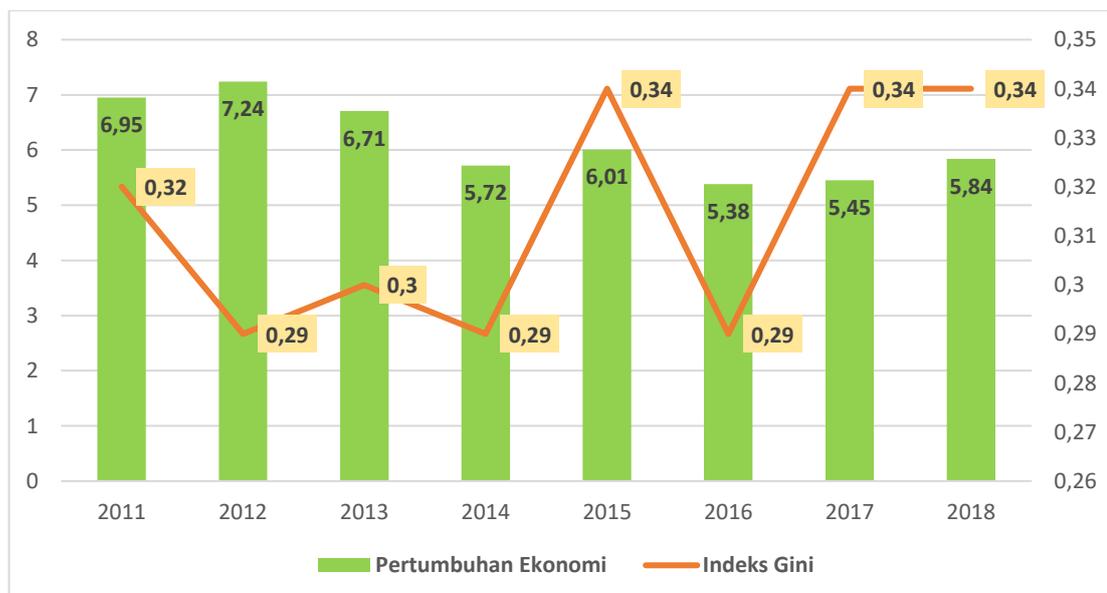
Tabel 2.7. Realisasi Indikator Kinerja Pada Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Indikator	Satuan	Baseline	2018	
			Target	Realisasi
Pertumbuhan Ekonomi	%	6,13	6,57	5,84
Indeks Gini	%	0,29	0,280	0,34
Persentase keamanan pangan	%	80	80	80
Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri	%	6,97	7,06	6,90
Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	%	3,17	3,41	-0,65
Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	7,13	7,84	11,3

Capaian indikator Persentase Keamanan Pangan tidak mengalami perubahan. Capaian indikator Indeks Gini yang harusnya lebih rendah dari posisi *baseline* tahun 2015 ternyata pada tahun 2018 realisasinya naik atau dengan kata lain kinerjanya mengalami penurunan. Indikator Indeks Gini mengalami stagnan pada tahun 2017 dan 2018, dengan memiliki sisa kinerja sebanyak 100 persen hingga tahun 2020. Demikian juga dengan tiga indikator yakni Pertumbuhan Ekonomi, Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, dan Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri yang justru mengalami penurunan kinerja pada tahun 2018. Penurunan kinerja yang dimaksud adalah, kinerja pada tahun 2018 justru lebih rendah dari pada tahun *baseline* data tahun 2015. Sedangkan untuk indikator Persentase

Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan mencapai nilai realisasi yang jauh di atas capaian 2015, dengan capaian sebesar 11,3 persen pada tahun 2018.

Selama kurun waktu 2016-2018 yakni dimana dimulai dari RPJMD Kabupaten Banyuwangi berlaku pada tahun 2016 dan tahun 2018 dimana perubahan RPJMD Kabupaten Banyuwangi dilakukan, Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyuwangi tumbuh, dengan kecenderungan melambat. Pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi tumbuh di angka 5,38 persen, namun capaian tersebut melambat jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang tumbuh mencapai 6,01 persen. Walaupun lambat tetapi ada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada tahun 2017 sampai dengan 2018.



Gambar 2.11. Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Gini Tahun 2011-2018

Melambatnya kinerja pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi juga diiringi dengan stagnerannya indeks gini sebagai tolok ukur ketimpangan antar kelas pendapatan di Kabupaten Banyuwangi. Skor indeks gini menunjukkan, semakin tingginya skor memberikan asumsi ketimpangan yang sempurna, sedangkan sebaliknya semakin kecil skor maka asumsinya adalah meratanya setiap kelas di Kabupaten Banyuwangi. Hal yang perlu diperhatikan dari capaian Indeks Gini Kabupaten Banyuwangi adalah capaian kinerja pada tahun 2016 yang meningkat pesat, dengan persepsi bahwa semakin meningkatnya antar kelas pendapatan pada tahun 2016. Pada tahun 2017, Indeks Gini meningkat pada angka 0,34 dari tahun sebelumnya 0,29. Oleh karena itu pada tahun 2018 dengan asumsi telah berjalan

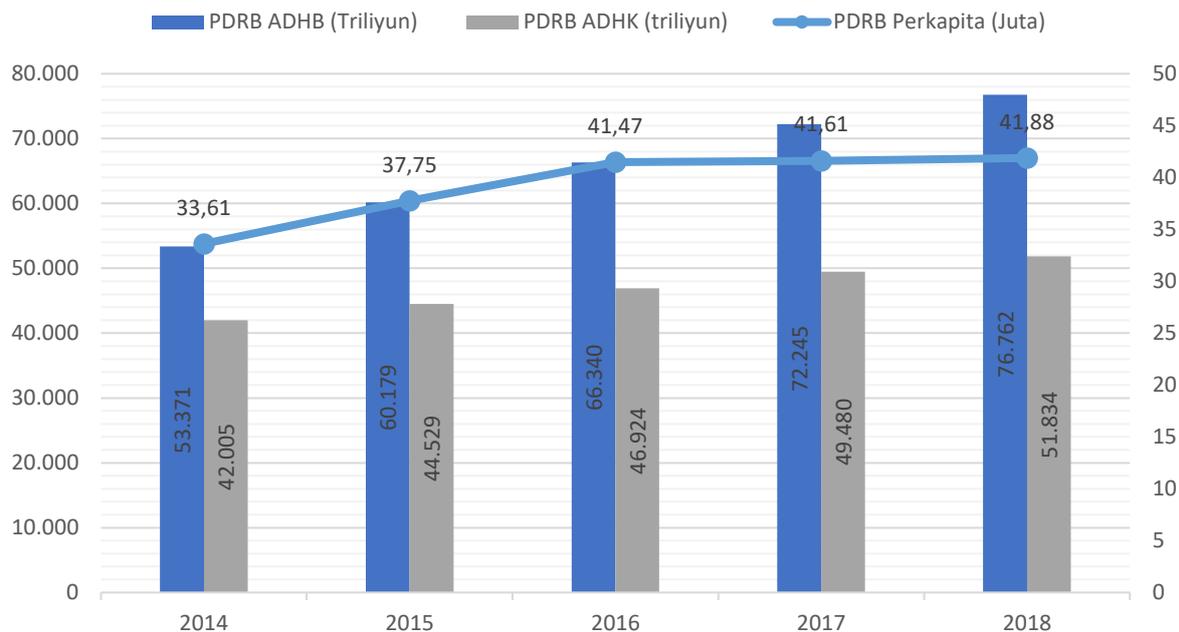
selama dua tahun RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2016-2021 dianggap belum berkinerja. Karena kinerja yang seharusnya menurunkan Indeks Gini secara berkala setiap tahunnya, namun masih stagnan (capaian 2017 dan 2018 masih dibawah baseline 2015). Sehingga upaya yang harus ditempuh untuk mencapai target tahun 2021 akseleratif capaian terhadap target yang ditetapkan.

Bila kita asumsikan *baseline data* pada tahun 2015 merupakan titik 0 kinerja RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021, maka idealnya kinerja setiap tahun selama 5 tahun periode RPJMD adalah 20 persen kinerja setiap tahun. Dengan asumsi, capaian kinerja pada tahun 2018 yang mencapai 60 persen akan sangat normal terjadi mengingat masih ada sisa tahun kinerja pada tahun 2018-2021.

A. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)

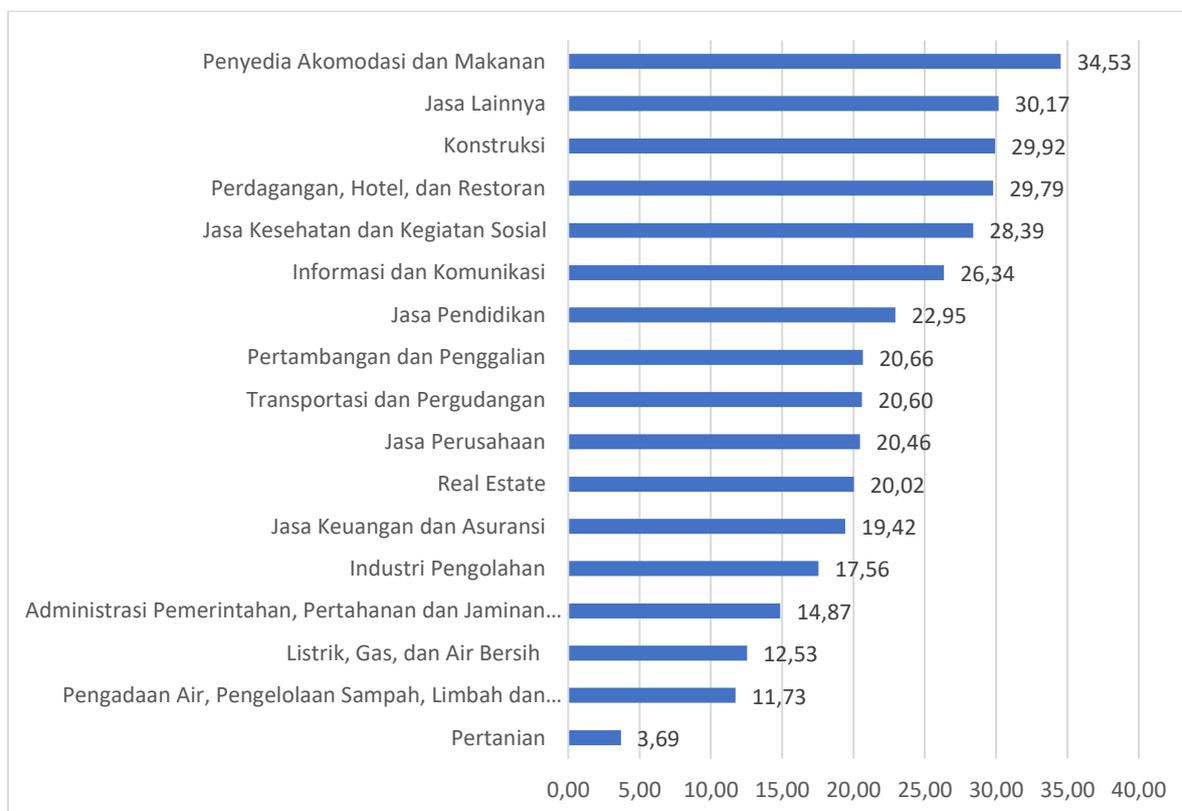
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu Negara / Daerah yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan (riil).

Kabupaten Banyuwangi memiliki beragam potensi yang mampu diolah sebagai sumber perekonomian daerah. Indikator pengukuran keberhasilan dalam perekonomian daerah yaitu melalui PDRB. Angka PDRB merupakan capaian sektoral yang mampu dihasilkan dalam perekonomian daerah. Suatu daerah mampu mengoptimalkan potensi perekonomian manakala tingkat laju pertumbuhannya tinggi. Pada tahun 2018 PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) menunjukkan nilai sebesar Rp 51,83 triliun sedangkan untuk PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai sebesar Rp 76,76 triliun. Jika diamati dari perkembangan PDRB kondisi perekonomian di Kabupaten Banyuwangi menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, Peningkatan PDRB ini juga turut meningkatkan kondisi PDRB perkapita di Kabupaten Banyuwangi meskipun secara terkonfirmasi pertumbuhan perkapita menunjukkan angka peningkatan perkapita yang kurang signifikan dikarenakan laju pertumbuhan penduduk yang meningkat dan tidak sebanding dengan laju pertumbuhan PDRB.



Gambar 2.12. Pendapatan Regional Bruto Kabupaten Banyuwangi 2018

Sumber: Banyuwangi dalam Angka 2018



Gambar 2.13. Persentase Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Sektor di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 terhadap Tahun 2015

Sumber: BPS Jawa Timur, 2019

Sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan tinggi pada tahun 2018 terhadap tahun dasar (2015) antara lain sektor Penyedia Akomodasi dan Makanan; Jasa Lainnya; Kontruksi; serta sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran. Hal ini tidak lain merupakan hasil upaya pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengembangkan sektor pariwisata dimana kunjungan wisatawan pada tahun 2018 mencapai lebih dari 5,1 juta wisatawan sedangkan pada tahun 2015 sebanyak 1,7 juta wisatawan, atau terjadi pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan sebesar 191,36 persen dari tahun 2015 ke tahun 2018. Hal tersebut tentu mendorong peningkatan sektor yang berkaitan dengan pariwisata seperti penginapan, dan rumah makan.

Adapun sektor yang mengalami pertumbuhan paling rendah adalah sektor Pertanian, dengan nilai pertumbuhan dari tahun 2015 ke tahun 2018 adalah sebesar 3,69 persen. Mengingat proporsi penduduk di Kabupaten Banyuwangi adalah bermatapencaharian dalam sektor pertanian yaitu sebesar 19,13 persen, dan kontribusi PDRB sektor Pertanian juga yang terbesar yaitu sebesar 29,61 persen maka sektor Pertanian menjadi sektor yang sangat strategis dan perlu mendapatkan perhatian lebih agar terjadi percepatan pencapaian kinerja pada sektor Pertanian.

Bila kita asumsikan *baseline data* pada tahun 2015 merupakan titik 0 kinerja RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021, maka idealnya kinerja setiap tahun selama 5 tahun periode RPJMD adalah 20 persen kinerja setiap tahun. Dengan asumsi, capaian kinerja pada tahun 2017 yang mencapai 40 persen akan sangat normal terjadi mengingat masih ada sisa tahun kinerja pada tahun 2018-2021.

B. Pertumbuhan Ekonomi

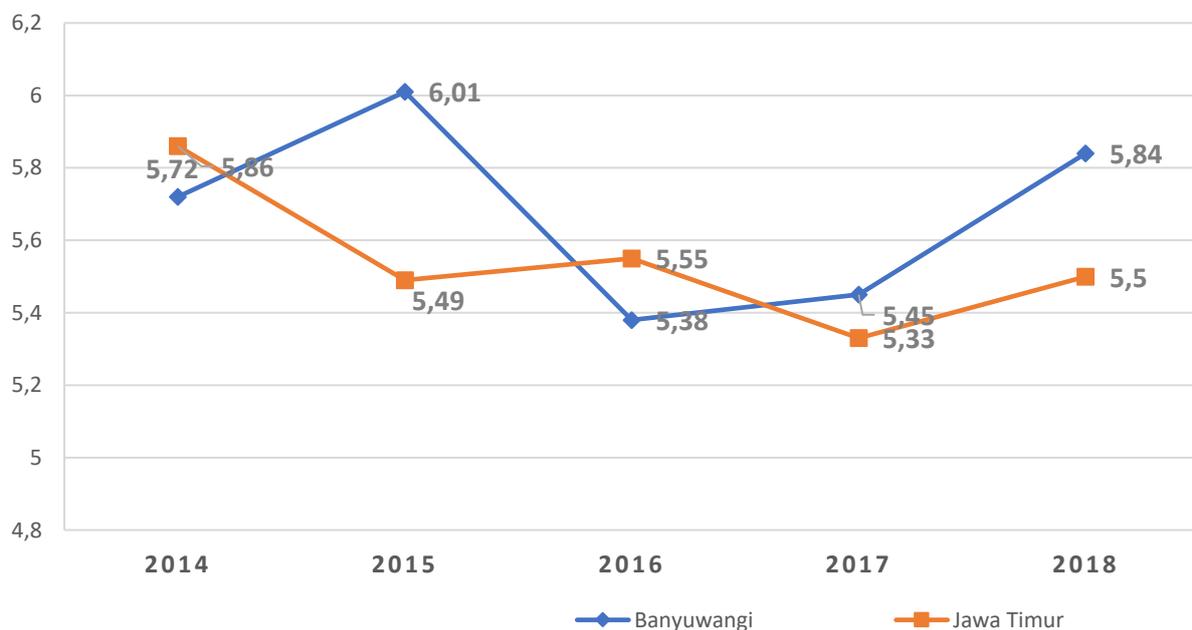
Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Pertumbuhan Ekonomi ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagai salah satu faktor kemandirian daerah. Pertumbuhan ekonomi menjadi ukuran penting dalam kinerja perekonomian daerah dan tujuan pembangunan daerah, dengan meningkatkan ekonomi, maka diharapkan akan meningkatkan juga kesejahteraan pada masyarakatnya. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Karena pada dasarnya aktivitas

perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan *output*, sehingga berdasarkan definisi tersebut Pertumbuhan Ekonomi dibentuk dan ditinjau dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan pendekatan produksi dengan perhitungan rumus yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Pertumbuhan Ekonomi yang dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{\text{PDRB}_{(t)} - \text{PDRB}_{(t-1)}}{\text{PDRB}_{(t-1)}} \times 100\%$$

PDRB menurut lapangan usaha mengalami perubahan klasifikasi dari 9 lapangan usaha menjadi 17 lapangan usaha. PDRB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi. Keberadaan pertumbuhan ekonomi memiliki keterkaitan dengan faktor lain yang berpengaruh terhadap PDRB diantaranya adalah variabel Inflasi, Investasi dan Jumlah Tenaga Kerja.

PERTUMBUHAN EKONOMI

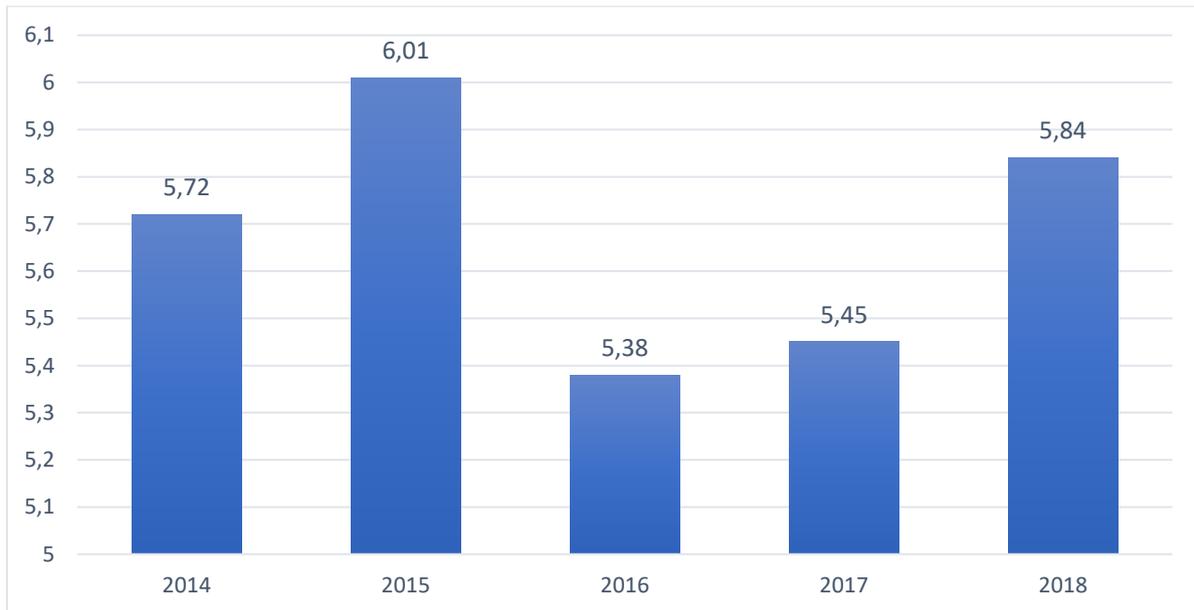


Gambar 2.14. Gambar Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyuwangi 2010 – 2018

Sumber: Diolah dari Profil Ekonomi Kabupaten Banyuwangi melalui banyuwangikab.go.id. 2018

Pada Gambar pertumbuhan ekonomi di atas, dari tahun 2014 sampai dengan 2018 rentan waktu selama lima tahun Kabupaten Banyuwangi memiliki rata-rata pertumbuhan

ekonomi lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Akan tetapi pada tahun 2016 angka rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi turun apabila dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Selanjutnya tahun 2017 dan 2018 kembali mengalami kenaikan, dalam hal ini Kabupaten Banyuwangi termasuk konsisten dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meskipun angka capaiannya tidak signifikan kenaikannya.



Gambar 2.15. Realisasi Indikator Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyuwangi

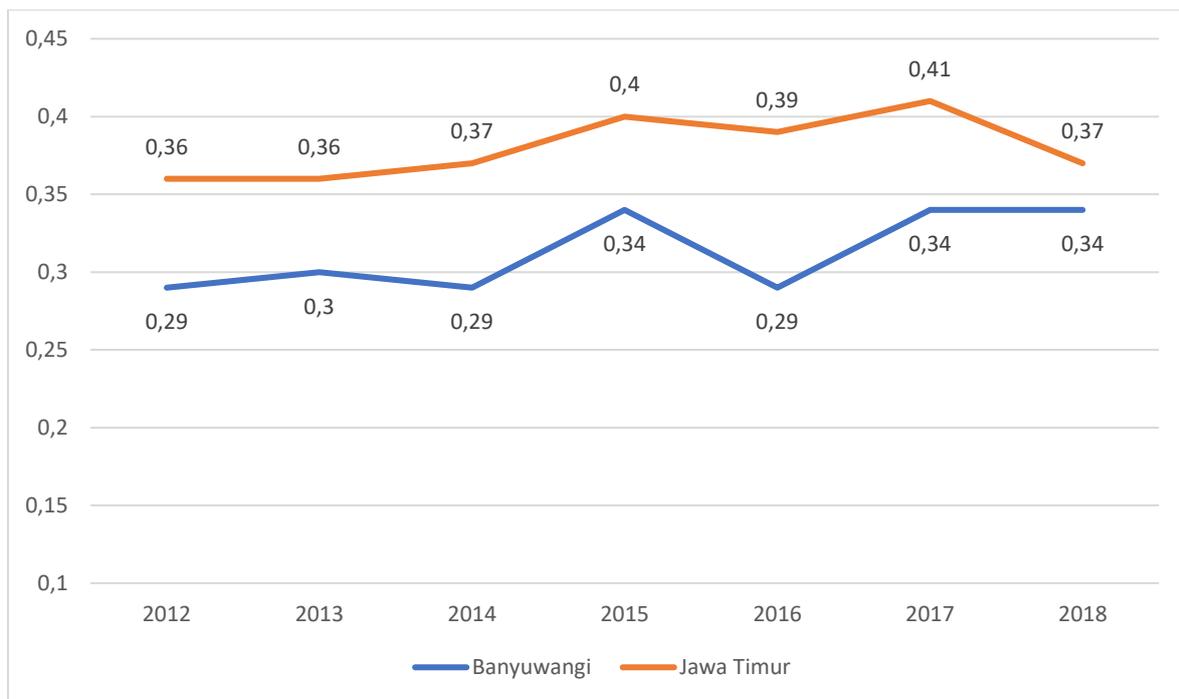
Sumber: Diolah dari BPS Kabupaten Banyuwangi dan Banyuwangikab.go.id, 2018

Kondisi sebagaimana gambar di atas tampak fluktuasi perekonomian di Kabupaten Banyuwangi dimana pada tahun 2018 mengalami perbaikan dan dengan kecenderungan bergerak naik. Yang patut dipertimbangkan dari kelajuan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi adalah pada sisi gap antara target yang hendak dicapai dengan realisasi dan yang kedua adalah prevalensi pergerakan perekonomian dibandingkan dengan Jawa Timur. Secara konsistensi Kabupaten Banyuwangi berhasil menjaga stabilitas perekonomian yang baik secara kontinyu, namun bila dibandingkan dengan harapan target yang diharapkan nampak bahwa posisi Kabupaten Banyuwangi cukup optimis dalam menentukan target sehingga menimbulkan ketidak tercapaian indikator.

Selama kurun waktu 2016-2018 yakni dimulai dari awal RPJMD Kabupaten Banyuwangi berlaku pada tahun 2016 dan tahun 2018 dimana perubahan RPJMD Kabupaten

Banyuwangi dilakukan. Pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi tumbuh di angka 5,38 persen, namun capaian tersebut melambat jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang tumbuh mencapai 6,01 persen. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi berangsur meningkat menuju tahun 2018 sebanding dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur.

C. Indeks Gini



Gambar 2.16. Gini Rasio Kabupaten Banyuwangi dan Provinsi Jawa Timur 2012 – 2018

Sumber: Paparan Musrenbang Gubernur Provinsi Jawa Timur 2019

Ketimpangan wilayah merupakan salah satu dalam permasalahan yang menjadi fokus dalam pembangunan daerah Kabupaten Banyuwangi. Ketimpangan yang tinggi mengindikasikan adanya distribusi ekonomi yang tidak merata. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan adalah dengan menggunakan penghitungan gini rasio. Pengukuran gini rasio menggunakan angka 0 – 1 dimana semakin angka gini rasio mendekati 0 maka tingkat ketimpangan akan semakin rendah begitu pula sebaliknya jika semakin mendekati 1 maka tingkat ketimpangan semakin tinggi. Gini rasio Kabupaten Banyuwangi tahun 2018 menunjukkan angka sebesar 0,34 angka ini lebih rendah dibandingkan dengan Jawa Timur sebesar 0,37. Indeks gini Kabupaten Banyuwangi dari tahun

ke tahun selalu di bawah Provinsi Jawa Timur yang menunjukkan bahwa pemerataan ekonomi di Banyuwangi lebih baik dibandingkan secara umum di Jawa Timur.



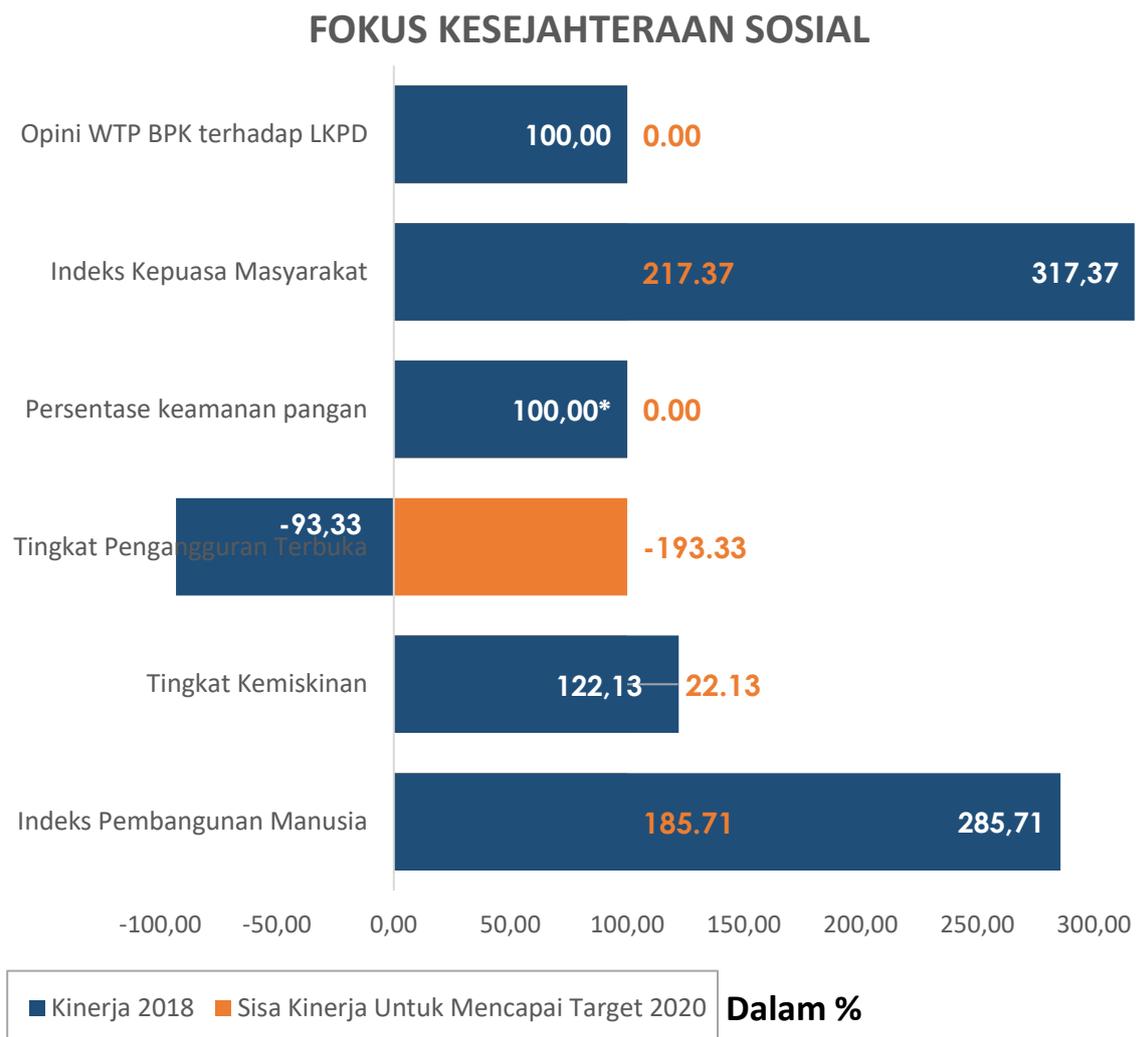
Gambar 2.17. Capaian Indikator Indeks Gini Kabupaten Banyuwangi

Sumber: diolah dari LKJIP Kabupaten Banyuwangi dan LKPJ Bupati Kabupaten Banyuwangi Akhir Tahun Anggaran 2018

Indeks gini Kabupaten Banyuwangi lebih rendah dibandingkan Jawa Timur, namun angka tersebut belum memenuhi target Kabupaten Banyuwangi sebesar 0,28. Jika dilihat dari capaian dan perbandingan dengan Jawa Timur, Kabupaten Banyuwangi masih terlalu tinggi mematok target sebesar 0,28. Sehingga sangat penting melakukan rasionalisasi target tahun 2019. Berdasarkan capaian kinerja tahun 2016, 2017, dan 2018 maka target indeks gini dapat dinaikkan menjadi sebesar 0,31 di tahun yang bersangkutan dapat tercapai.

2.2.3 Fokus Kesejahteraan Masyarakat

Selain kesejahteraan ekonomi, kesejahteraan sosial masyarakat juga harus menjadi prioritas terdepan dari segala bentuk pembangunan pemerintah. Beberapa catatan untuk melihat kinerja fokus kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat melalui beberapa indikator yang meliputi, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Persentase Keamanan Pangan, Indeks Kepuasan Masyarakat, dan Opini WTP BPK terhadap LKPD. Berikut merupakan capaian kinerja *gap expectation* Fokus Kesejahteraan Masyarakat.



Gambar 2.18. Gap Expectations Capaian Indikator Pada Fokus Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2018 Terhadap Target Tahun 2020

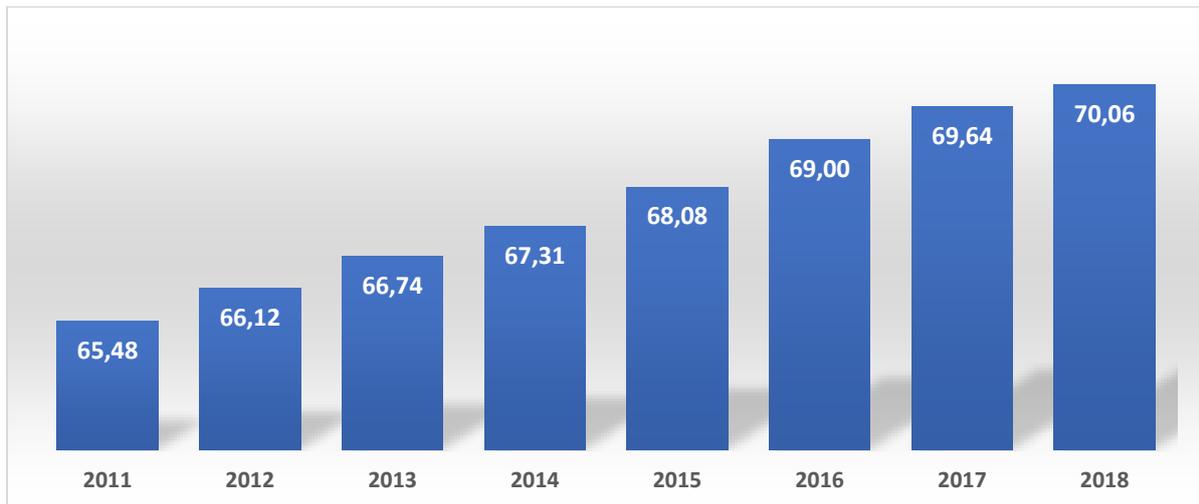
Dari total 6 indikator kinerja fokus kesejahteraan sosial, tampak bahwa terdapat 4 indikator dengan capaian yang sangat baik pada tahun 2018 yang meliputi Opini BPK dan

persentase keamanan pangan yang masing-masing telah mencapai 100% target tahun 2020 pada tahun 2018. Indeks Kepuasan Masyarakat yang mencapai kinerja 317,37% dari target yang ditetapkan pada tahun 2020. Begitu juga dengan Indeks Pembangunan Manusia yang mencapai 285.71% dari target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2020. Sedangkan untuk Tingkat Pengangguran Terbuka justru mengalami defisit kinerja mencapai -93,33% pada tahun 2018. Artinya adalah pada tahun 2018, kinerja Tingkat Pengangguran terbuka justru sangat jauh bila dibandingkan dengan *baseline* data tahun 2015. Sehingga dalam kurun waktu 2019-2020 untuk menekan Tingkat Pengangguran Terbuka supaya tercapai target pada tahun 2020 membutuhkan effort 193,33%. Berikut merupakan rekapitulasi kinerja dan sisa kinerja indikator Fokus Kesejahteraan Sosial.

Tabel 2.8. Realisasi Indikator Kinerja Pada Fokus Kesejahteraan Masyarakat

Indikator	Satuan	Baseline	2014	2015	2016	2017	2018
			R	R	R	R	R
Indeks Pembangunan Manusia	skala	67,7	67,31	68,08	69,00	69,64	70,06
Tingkat Kemiskinan	%	9,17	9,29	9,17	8,79	8,64	7,80
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,55	7,17	2,55	2,55	3,07	3,67
Persentase keamanan pangan	%	80	80	80	80	80	80
Indeks Kepuasan Masyarakat	Skala	77,95	77,67	77,95	82,05	84,71	86,77
Opini WTP BPK terhadap LKPD	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

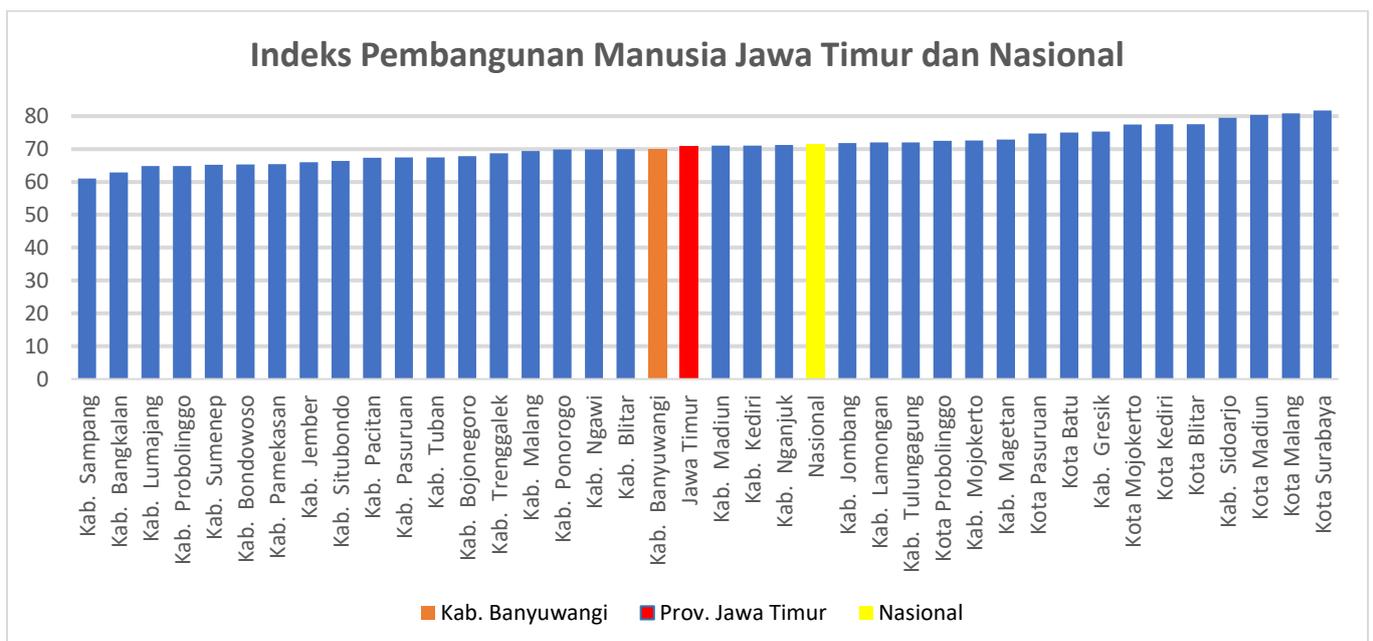
A. Indeks Pembangunan Manusia



Gambar 2.19. Realisasi Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Manusia

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur

Tren capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Banyuwangi cukup positif dalam kurun waktu 2011-2018. Pada data awal tahun 2011 IPM Kabupaten Banyuwangi mencapai nilai 65,48 meningkat hingga pada tahun 2018 mencapai 70,06.



Gambar 2.20. Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018

Sumber: Badan Pusat Statistik

IPM Kabupaten Banyuwangi menempati urutan 21 kabupaten dan kota di Jawa Timur, kondisi ini bukan berarti IPM Kabupaten Banyuwangi yang rendah, namun dikarenakan terdapat daerah lain yang lebih tinggi seperti Surabaya yang mencapai 81,74. Jika dibandingkan dengan IPM Jawa Timur dan Nasional, Kabupaten Banyuwangi masih berada di bawah Provinsi Jawa Timur dengan IPM sebesar 70,77 dan juga masih dibawah Nasional dengan IPM sebesar 71,39. Untuk itu, diperlukan peningkatan kinerja sekaligus target untuk dapat bersaing dengan daerah lain di Jawa Timur, terlebih capaian Provinsi dan Nasional.

B. Ketenagakerjaan

Tenaga kerja saat ini selalu mengalami peningkatan pada setiap tahunnya, hal ini disebabkan karena banyaknya usia-usia kerja yang mulai aktif, baik lulusan perguruan tinggi maupun lulusan Sekolah Menengah Atas. Oleh karena itu Kabupaten Banyuwangi memerlukan perluasan lapangan pekerjaan agar dapat menyeimbangkan pertumbuhan angkatan kerja akibat dari pertumbuhan penduduk yang tinggi. Pembangunan ketenagakerjaan juga dimaksudkan untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha dan juga antara pengusaha dengan serikat pekerja. Dengan adanya dampak positif dari timbulnya hubungan harmonis dalam lingkup industrial maka pencapaian program dan sasaran pada urusan wajib tenaga kerja sangat menentukan bagaimana kemajuan yang dapat dilakukan oleh pemerintahan Kabupaten Banyuwangi dalam memperhatikan tenaga kerja yang ada di lingkungannya beserta pada pengusaha yang memiliki kemampuan untuk membuka lapangan pekerjaan.

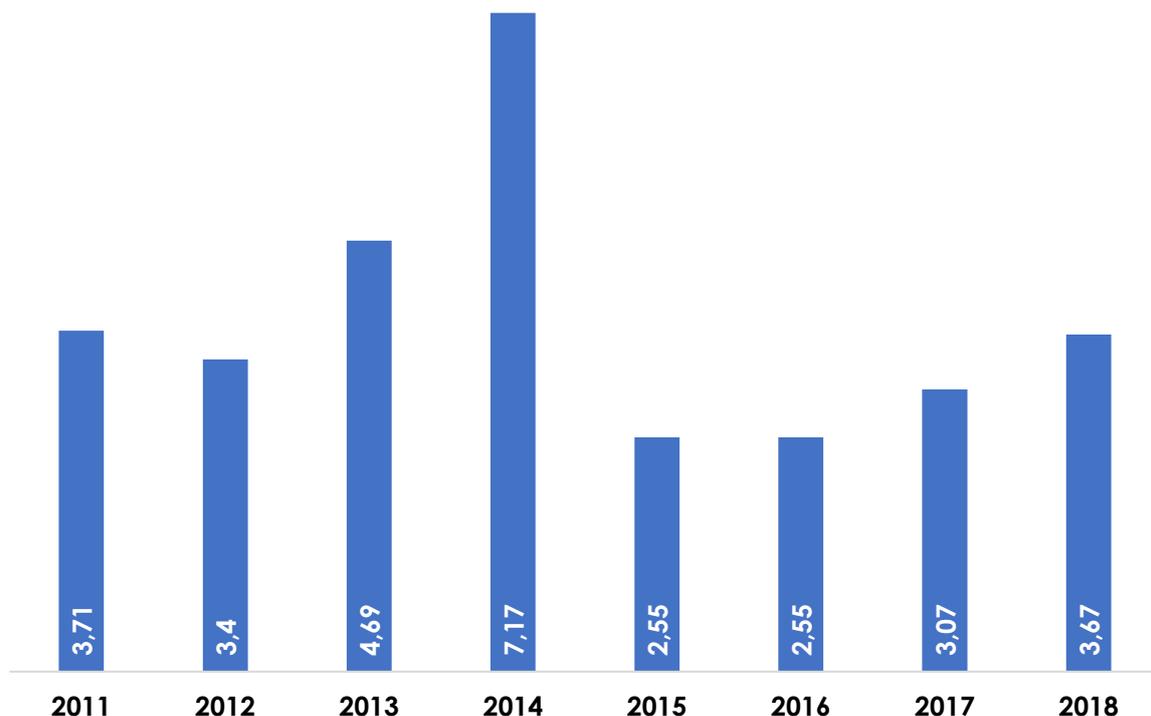
Pada tahun 2017 Rasio Penduduk yang bekerja di Kabupaten Banyuwangi sebesar 0,9693 sedangkan pada tahun 2018 turun menjadi 0,9633 disebabkan terjadi penurunan jumlah Penduduk yang Bekerja dan Angkatan Kerja pada tahun tersebut. Yakni Penduduk yang Bekerja pada tahun 2017 sejumlah 878.895 jiwa menjadi 870.242 jiwa pada tahun 2018 dan Angkatan Kerja tahun 2017 sejumlah 906.735 jiwa menjadi 903.356 jiwa pada tahun 2018.

Tingkat partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2017 sebesar 72,87 persen sedangkan pada tahun 2018 turun menjadi 72,12 persen dimana terjadi penurunan sebesar 0,75 persen yang diakibatkan oleh keterampilan yang dimiliki usia kerja tidak sesuai dengan kebutuhan pangsa kerja oleh karena itu saat ini pemerintah Kabupaten

Banyuwangi bersama dengan pihak-pihak terkait gencar melakukan pengembangan pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.

Menurut data dari dinas tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Banyuwangi terjadi kenaikan pencari kerja yang ditempatkan dari tahun 2017 sebesar 3.845 orang menjadi 5.146 orang di Tahun 2018. Tentunya disetiap perusahaan terdapat perselisihan, dan Kabupaten Banyuwangi perselisihan buruh/pekerja terjadi penurunan angka pada Tahun 2017 sebesar 44 kasus perselisihan menjadi 42 kasus perselisihan.

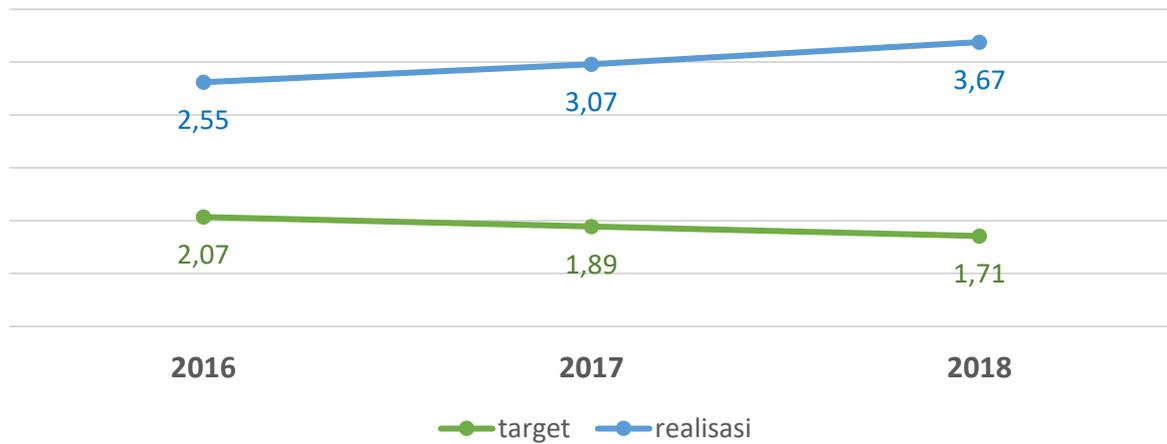
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA



Gambar 2.21. Tingkat Pengangguran Tahun 2011-2018

Berdasarkan hasil dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Banyuwangi diukur dari kondisi tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada tahun 2018 sebesar 3,67 dimana angka TPT tersebut lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2017. Namun 3 tahun terakhir tingkat pengangguran Kabupaten Banyuwangi lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur sebesar 4,00. Naiknya angka TPT bukan berarti karena kondisi perekonomian di Kabupaten Banyuwangi sedang lesu namun lebih akibatnya oleh naiknya jumlah angkatan kerja, transformasi struktur ekonomi serta korelasi investasi dengan penyerapan tenaga kerja

yang kurang optimal. Namun Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus berupaya memacu pertumbuhan industri kecil dengan harapan mampu menyerap tenaga kerja.

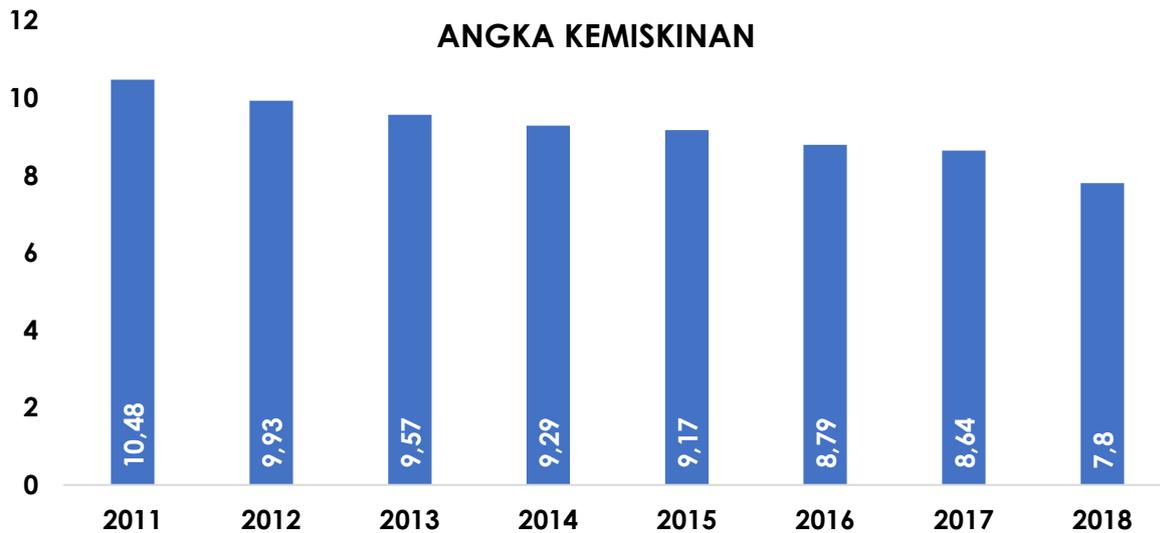


Gambar 2.22. Capaian Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Banyuwangi

Sumber: diolah dari Paparan Bappeda RKPD Provinsi Jawa Timur 2019 dan LKJIP Kabupaten Banyuwangi 2018

Tabel di atas menunjukkan adanya peningkatan tingkat pengangguran terbuka yang cukup signifikan pada tahun 2017, dimana pada tahun 2016 tingkat pengangguran terbuka sebesar 2,55 sedangkan 2017 sebesar 3,07. Capaian ini masih belum memenuhi target yang sebesar 2,07 pada tahun 2016 dan 1,89 pada tahun 2017. Dari Gambar terlihat bahwa kebijakan untuk merealisasikan capaian kinerja harus memperhatikan kinerja tahun sebelumnya, sehingga sangat penting untuk merasionalisasi target tahun 2019. Jika dianalisis berdasarkan capaian tahun 2016 dan 2017 serta capaian kinerja tahun 2017, diperoleh angka rasionalisasi target tahun 2019 sebesar 3,28.

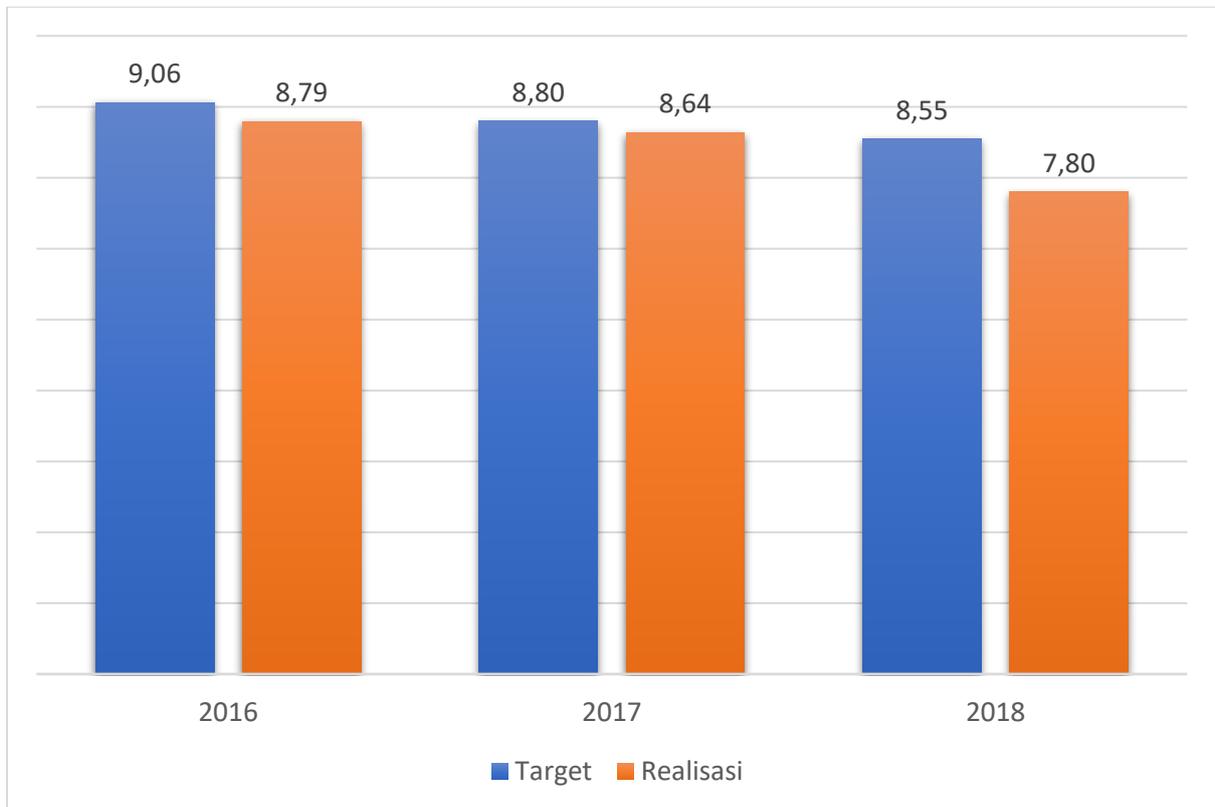
C. Kemiskinan



Gambar 2.23. Angka Kemiskinan Tahun 2011-2018

Tren capaian positif juga tampak pada penekanan angka kemiskinan Kabupaten Banyuwangi. Tren data mulai tahun 2011 dengan persentase kemiskinan mencapai 10,48% berhasil diturunkan secara perlahan hingga tahun 2017 yang mencapai 8,64%, dan terus mengalami penurunan hingga mencapai 7,8% pada tahun 2018.

Sedangkan berbanding terbalik dengan IPM dan Angka Kemiskinan Tingkat Pengangguran Terbuka justru mencapai kinerja yang cukup buruk. Capaian TPT pada tahun 2011 yang mencapai 3,71% justru mengalami tren peningkatan pada tahun 2014 yang merupakan titik tertinggi pada interval tahun 2011-2018 yang mencapai 7,17%. Anomalinnya adalah pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dapat menurunkan secara drastis TPT pada angka 2,55% atau turun lebih dari 4% pada tahun sebelumnya. Namun pada tahun 2016 cenderung stagnan di angka 2,55% atau sama sekali tidak berkinerja dari tahun 2015. Sedangkan pada tahun 2018 justru mengalami peningkatan TPT hingga mencapai 3,67%.



Gambar 2.24. Capaian Indikator Tingkat kemiskinan Kabupaten Banyuwangi

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur 2018

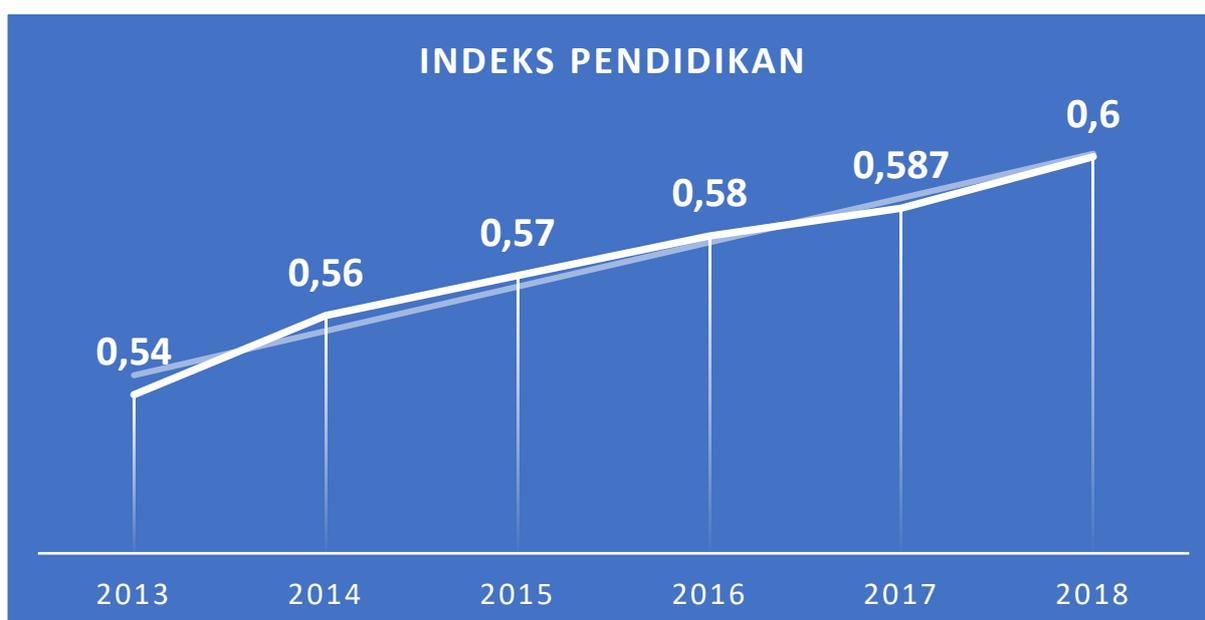
Jika disajikan dalam bentuk Gambar, maka terlihat bahwa tingkat kemiskinan Kabupaten Banyuwangi menunjukkan tren positif. Tingkat kemiskinan menurun di tahun 2018, dari 8,64 di tahun 2017 menjadi 7,80. Bahkan angka ini sudah melampaui target tahun 2018 sebesar 8,55. Kondisi ini menunjukkan keseriusan Kabupaten Banyuwangi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan menggunakan strategi keroyokan antar pemangku kepentingan dan berbasis data terpadu maka dirasakan menjadi cara yang efektif dan efisien dalam hal penanggulangan kemiskinan. Selain itu program inovasi di masing-masing SKPD dalam hal penanggulangan kemiskinan juga terus didorong seperti Siswa Asuh Sebaya (SAS) dimana siswa kaya mensubsidi siswa miskin dengan memberikan sebagian uang saku yang dikelola oleh siswa dan untuk siswa; Rantang Kasih yang merupakan pemberian makanan bergizi bagi lansia miskin sebatang kara; Uang Saku Siswa Miskin yang merupakan pemberian uang saku kepada siswa miskin mulai dari tingkat sekolah dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA).

2.3 Aspek Pelayanan Umum

2.3.1 Urusan Wajib Layanan Dasar

A. Urusan Pendidikan

Urusan Pendidikan memiliki beberapa indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk melihat perkembangan kualitas Pendidikan di Kabupaten Banyuwangi. Diantaranya adalah Indeks Pendidikan dan Persentase PAUD Formal ber-akreditasi A. Perkembangan Indeks Pendidikan dari tahun 2013 hingga tahun 2017 terus mengalami kenaikan. Indeks Pendidikan pada tahun 2013 adalah sebesar 0.54, dan mencapai nilai 0.6 pada tahun 2018.



Gambar 2.25. Indeks Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013-2018

Jika dilihat dari postur perkembangan Gambar Indeks Pendidikan, maka dari 2013 sampai dengan 2018 kenaikannya cukup tajam, target yang telah ditetapkan untuk tahun 2018 telah dicapai dengan nilai capaian sebesar 0.6. Indikator kedua yaitu persentase PAUD Formal yang terakreditasi A juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 PAUD formal yang terakreditasi A adalah sebesar 15,1 dan mengalami peningkatan hingga mencapai 15,88 pada tahun 2017.

**Tabel 2.9. Realisasi Indeks Pendidikan dan Presentase PAUD Formal Ber-akreditasi
Tahun 2013-2018**

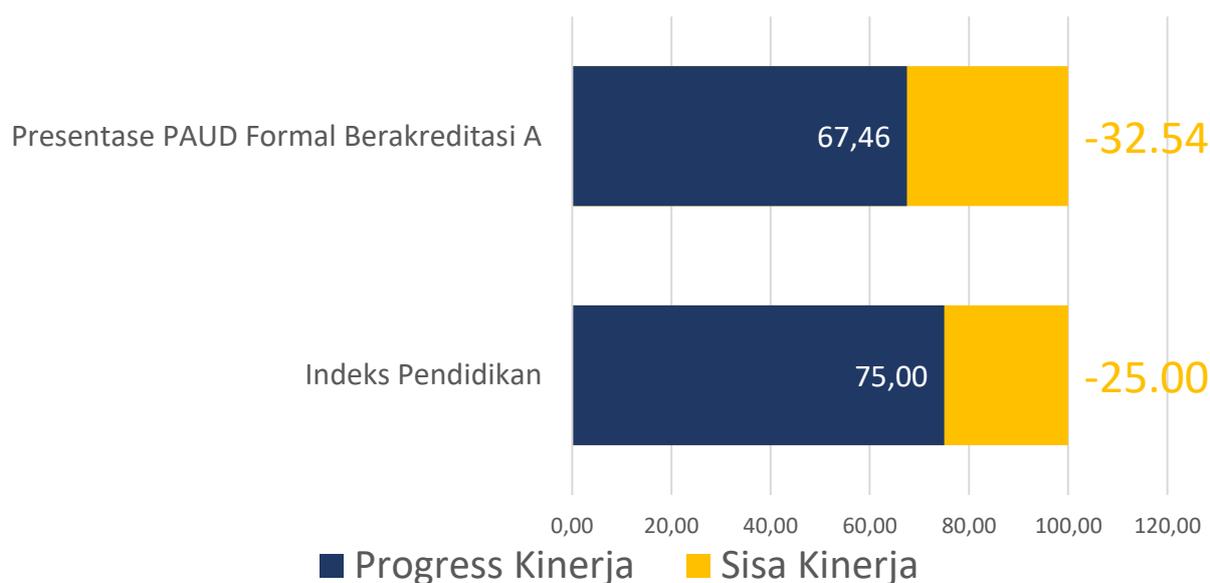
Indikator Sasaran	Satuan	Baseline	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Indeks Pendidikan	Indeks	0.54	0.54	0.56	0.57	0.58	0.587	0.6
- Harapan Lama Sekolah	tahun	11,39	11,39	11,81	12,20	12,55	12,68	12,69
- Rata - rata Lama Sekolah	tahun	6,84	6,84	6,87	6,88	6,93	7,11	7,12
Presentase PAUD Formal Ber-akreditasi A	%	n/a	n/a	n/a	n/a	15.51	16.18	16.18

Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Banyuwangi Akhir Tahun Anggaran 2018

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa pembentuk indeks pendidikan adalah harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Harapan lama sekolah Banyuwangi Tahun 2019 12,69 tahun setara D1 mengalami kenaikan 1,3 tahun selama 5 tahun dibandingkan tahun 2013 sebesar 11,39 (setara, dapat dikatakan kenaikan rata-rata per tahun sebesar 0,26 tahun. Akan tetapi kenaikan dari tahun 2017 ke 2018 cenderung melambat hal ini dikarenakan adanya faktor koreksi pesantren yang datanya cenderung tetap. Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 sebesar 7,12 tahun setara SMP kelas 2, meningkat 0,28 selama 5 tahun dari tahun 2013 sebesar 6,84 setara dengan SMP kelas 1. Kenaikan rata-rata lama sekolah per tahun berjalan lambat, sebesar 0,056 per tahun. Hal ini selaras dengan kondisi pendidikan penduduk Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Data per Januari 2019 Dispenduk Kabupaten Banyuwangi, penduduk usia 25 tahun keatas lulusan SLTP ke bawah sebanyak 864.955 jiwa atau 49,90 % penduduk Banyuwangi dimana 606.627 jiwa atau 70,13 % nya merupakan usia produktif (15-59 tahun). Paket A, B, C telah dilaksanakan oleh Kabupaten Banyuwangi untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah, namun upaya tersebut belum signifikan mendongkrak rata-rata lama tersebut.

Sedangkan jika dilihat dari progress capaiannya, Realisasi Kinerja dibandingkan dengan target capaian untuk tahun 2020, maka realisasi indikator kinerja dapat dikategorikan baik karena mampu melebihi setengah kinerja dari target yang ditetapkan pada tahun 2020. Namun terdapat anomali pada indikator Persentase PAUD Formal berakreditasi A. Terdapat indikasi bahwa proses penetapan target pada indikator tersebut cukup pesimis, sehingga capaian kinerja pada tahun 2018 dapat dikatakan sangat signifikan karena telah mencapai kinerja sebesar 67,46% jika dibandingkan target yang telah ditetapkan pada tahun 2020.

Urusan Pendidikan



Gambar 2.26. Gap Expectations Indikator pada Urusan Pendidikan Tahun 2018 Terhadap 2020

Berikut disajikan terkait data pendukung terkait dengan Urusan Pendidikan:

Tabel 2.10. Capaian Indikator Urusan Pendidikan

Indikator	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Angka Partisipasi Kasar SD	%	104,93	108,26	103,03	104	107,28	108,02
Angka Partisipasi Murni SD	%	98,48	99,65	99,38	99,21	97,19	99,11
Angka Partisipasi Kasar SMP	%	103,26	97,99	101,14	101,21	97,81	90,74
Angka Partisipasi Murni SMP	%	88,64	73,73	88,76	88,84	85,14	83,11

Indikator	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Angka melek aksara penduduk usia 15 tahun keatas	%	n/a	n/a	n/a	99,3	99,3	99,31
Lembaga Kursus dan Pelatihan berakreditasi	%	n/a	n/a	n/a	18,75	18,75	27,08
Persentase penduduk usia 7-21 tahun yang putus/tidak sekolah yang tertangani PNF	%	n/a	n/a	n/a	55,59	55,59	73,09
Perbedaan gender angka Melanjutkan (AM) Gender SMP/MTs/Paket B ke SMA/SMK/MA/Paket C	%	n/a	n/a	n/a	1,06	1,06	1,12
Guru berijazah S1/DIV	%	63,70	70,07	75,00	89,91	86,03	96,82

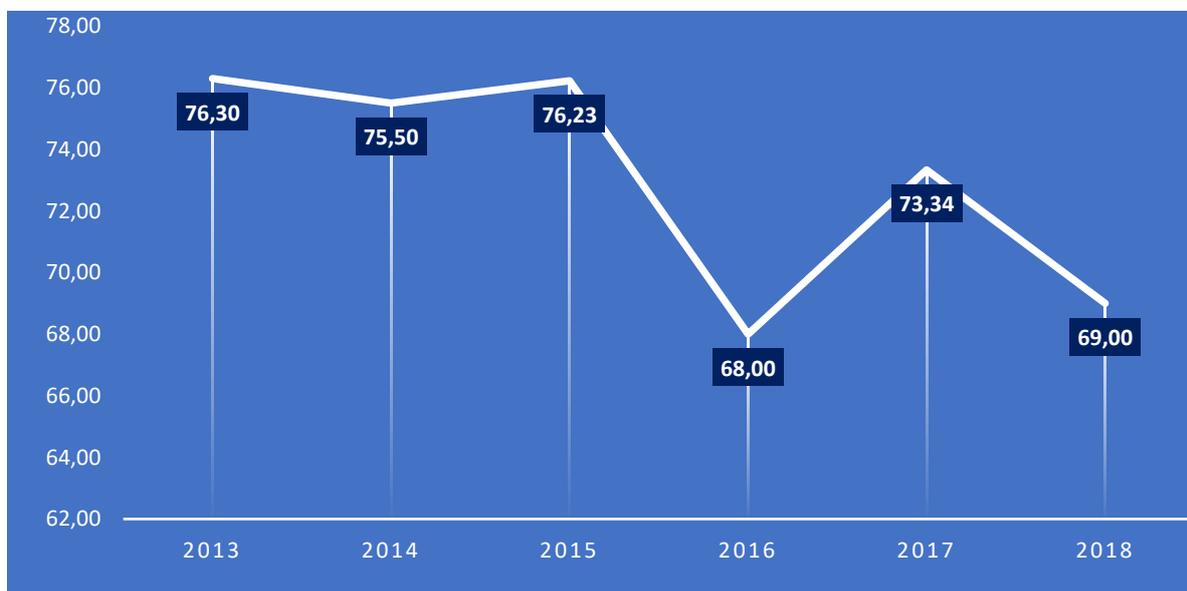
Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Banyuwangi Akhir Tahun Anggaran 2018

Jika dilihat dari data diatas pada Angka rata-rata lama sekolah dari tahun 2013-2018 mengalami kenaikan meskipun tidak begitu signifikan dari tahun ke tahunnya. Sedangkan pada Angka harapan lama Sekolah pada tahun 2013 adalah sebesar 11,39% mengalami kenaikan hingga sebesar 12,69 pada tahun 2018 setiap tahunnya. APK SD pada tahun 2013 adalah sebesar 104,93% dan mengalami peningkatan hingga mencapai 108,26% pada tahun 2014 sedangkan pada tahun 2015 Angka Partisipasi Kasar SD mengalami penurunan sebesar 103,03%. Sedangkan pada tahun 2016-2018 mengalami kenaikan meskipun tidak signifikan. Dan pada APM SD pada tahun 2014-2018 mengalami penurunan. Sedangkan pada APK SMP pada tahun 2013-2018 cenderung mengalami fluktuasi meskipun terdapat beberapa peningkatan namun tidak secara signifikan. Pada tahun 2013 dengan 2014 perbedaan dapat ditemukan dengan jelas karena ada penurunan dari 88,64% pada 2013 menjadi 73,73% pada 2014. Namun pada tahun berikutnya dari tahun 2015-2018 terdapat penurunan dari tahun ke tahunnya, namun tidak memberikan perbedaan yang signifikan. Pada tahun 2013 sampai dengan 2016 terjadi kenaikan secara signifikan persentase Pendidik berkualifikasi S1/D4 dari 63,70% menjadi 89,91% pada tahun 2016, sejak diterapkannya Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada tahun 2017 dan berpindahnya SMA/MA/SMK ke Provinsi mengakibatkan penurunan sebesar 3,88%. Dengan peraturan/ ketentuan bahwa pendidik harus berkualifikasi S1/D4 maka terjadi kenaikan kembali sebesar 10,79% pada tahun 2018.

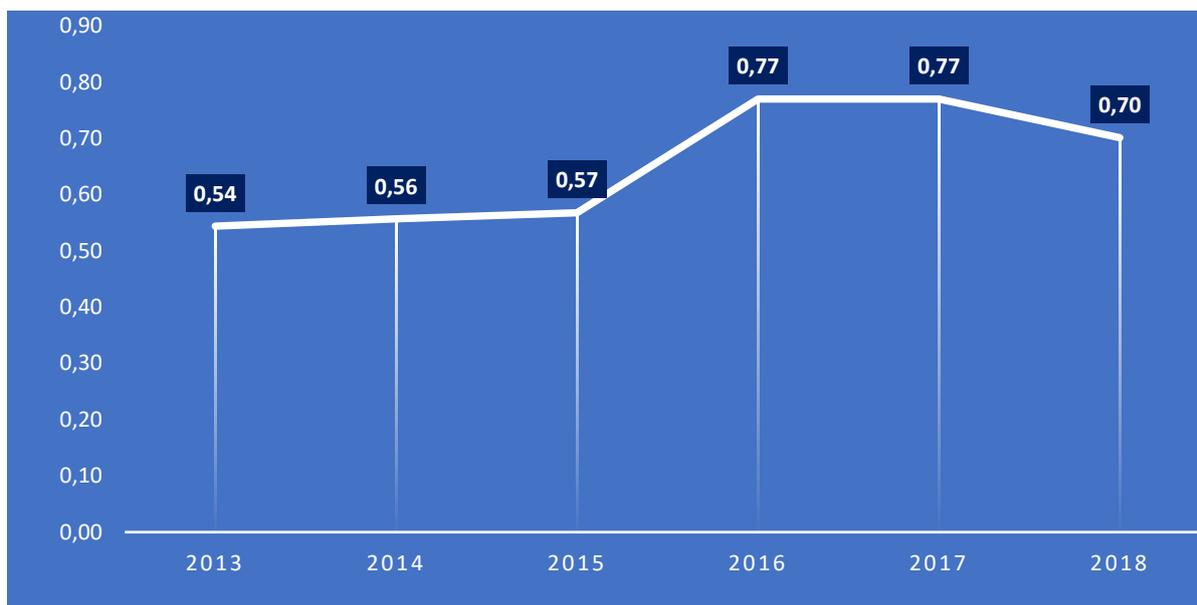
B. Urusan Kesehatan

Urusan kesehatan memiliki beberapa indikator yang ditetapkan sebagai parameter pengukuran keberhasilan pembangunan. Indikator yang telah ditetapkan meliputi Tingkat Kesehatan Rumah Sakit, Indeks Kesehatan Keluarga Banyuwangi, Persentase Fasilitas Kesehatan Terakreditasi, Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, Cakupan KB Aktif dan Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup. Secara trend terdapat potensi penurunan kinerja pada cakupan KB aktif, hal tersebut ditunjukkan dengan menurunnya cakupan KB aktif yang semula sebesar 76.3% pada tahun 2013 menjadi 69,00 pada tahun 2018.



Gambar 2.27. Cakupan KB Aktif Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013-2018

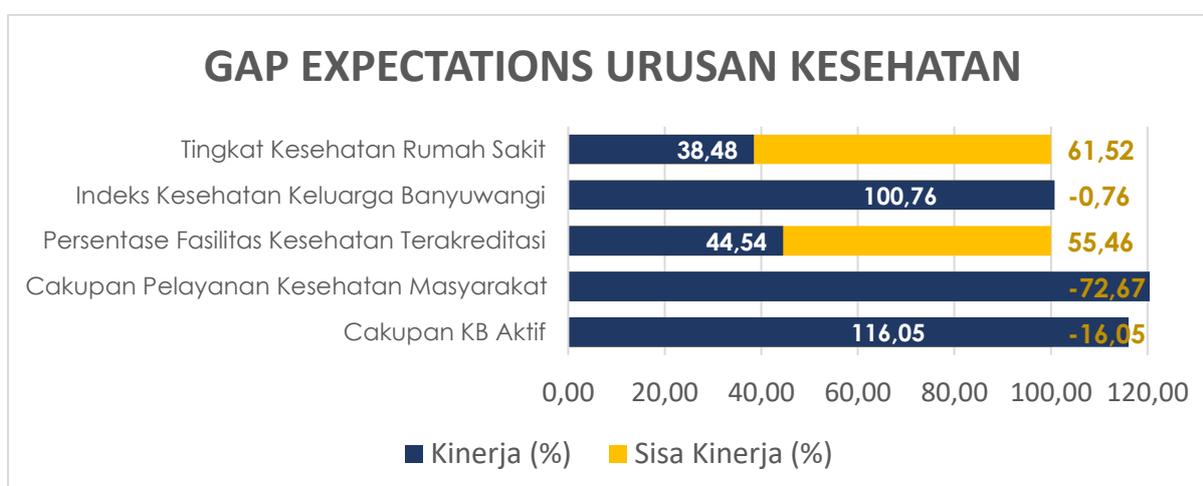
Berbeda dengan Cakupan KB aktif, untuk realisasi Indeks Kesehatan Keluarga Banyuwangi memiliki trend yang positif atau memiliki kecenderungan untuk terus naik, meskipun kenaikannya tidak terlalu signifikan. Capaian pada tahun 2013 sebesar 0.54, dan pada tahun 2018 naik menjadi 0.69.



Gambar 2.28. Indeks Kesehatan Keluarga Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013-2018

Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Banyuwangi Akhir Tahun Anggaran 2018

Jika dilihat dari gap expectation terhadap tahun 2020, dari 6 indikator yang telah ditetapkan terdapat 3 indikator kinerja yang telah melampaui target yang telah ditetapkan untuk tahun 2020. Ketiga indikator tersebut adalah Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, Cakupan KB Aktif dan yang terakhir adalah Indeks Kesehatan Keluarga Banyuwangi.



Gambar 2.29. Gap Expectations Capaian Kinerja Tahun 2018 Terhadap Tahun 2020 Pada Urusan Kesehatan

Indikator kinerja yang memiliki capaian sangat signifikan pada tahun 2018 adalah indikator Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat dengan nilai realisasi indikator sebesar

91,54 persen. Dimana target RPJMD pada tahun 2020 yaitu sebesar 85 persen sudah terlampaui di tahun 2018. Berikutnya adalah indikator Cakupan KB Aktif dengan realisasi pada tahun 2018 sebesar 69,00 persen dan Indeks Kesehatan Keluarga Banyuwangi dengan realisasi 0,701 persen.

Indikator Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup menunjukkan kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan, tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain (seperti kecelakaan, terjatuh dll) per 100.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2018 kinerja indikator ini mengalami penurunan dengan terjadinya peningkatan nilai realisasi dari 82 orang pada tahun 2017 menjadi 98 orang pada tahun 2018. Indikator ini harus mendapatkan perhatian khusus. Indikator kinerja lainnya yang harus mendapatkan perhatian khusus adalah Persentase Gizi Buruk dengan kenaikan 0,01 persen dan Angka Kematian Bayi yang meningkat 0,9 per 1.000 KH.

Tabel 2.11. Realisasi Indikator Sasaran Pada Urusan Kesehatan

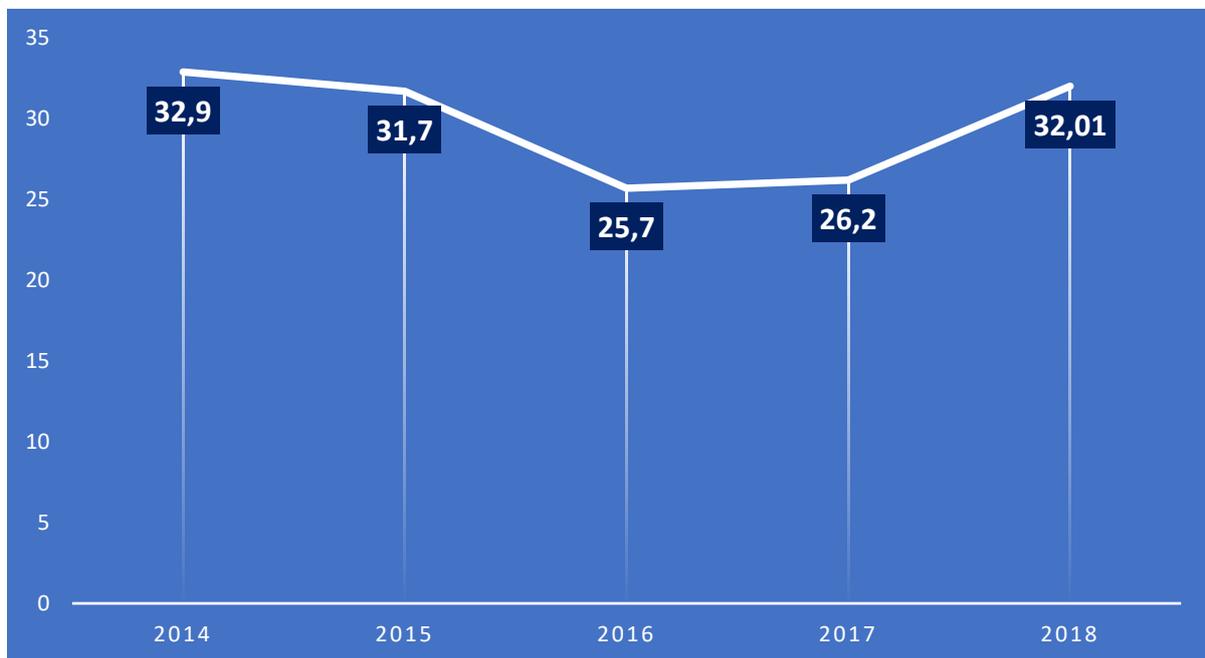
Indikator Sasaran	SATUAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	orang	142	93	96	87	82	98
Persentase Gizi Buruk	%	0,96	n/a	0,60	0,57	0,55	0,56
Cakupan KB Aktif	%	76,3	75,5	76,23	68,00	73,34	69,00
Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	%	n/a	n/a	n/a	76	90,91	91,54
Persentase Fasilitas Kesehatan Terakreditasi	%	n/a	n/a	n/a	13,13	36,36	51,82
Indeks Kesehatan Keluarga Banyuwangi	skala	0,544	0,557	0,568	0,770	0,770	0,701
Tingkat Kesehatan Rumah Sakit	Skala	n/a	n/a	n/a	74,88	77,1	76,85
Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 KH	8,20	6,00	6,82	5,50	5,00	5,90
Persentase bayi usia 6 bulan mendapat ASI Eksklusif	%	n/a	n/a	n/a	81,5	81,5	86
Persentase ibu hamil yang mendapatkan tablet	%	n/a	n/a	n/a	93,1	93,1	94,2

Indikator Sasaran	SATUAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan							
SPM (Standar Pelayanan Minimal)	%	n/a	71,42	73,97	73,96	85,87	86,23*
Angka Harapan Hidup	Tahun	69,88	69,93	70,03	70,11	70,19	70,34

Sumber: LKPI Bupati Kabupaten Banyuwangi Akhir Tahun Anggaran 2018

Stunting adalah gangguan pertumbuhan anak, yang jika tidak ditangani dengan baik tentu akan mempengaruhi pertumbuhannya hingga dewasa nanti. Tidak hanya dampak fisik saja yang mungkin timbul dari tubuh pendek pada anak. Bahkan, ketika sudah dewasa nanti, anak dengan tubuh pendek akan memiliki tingkat produktivitas yang rendah dan sulit bersaing di dalam dunia kerja. Bagi anak perempuan yang mengalami stunting, berisiko untuk mengalami masalah kesehatan dan perkembangan pada keturunannya saat sudah dewasa.

Gambar 2.30. Prevalensi Balita Stunting (%) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 - 2018



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi 2018

- Tahun 2017 *stunting* Kabupaten Banyuwangi sebesar 26,2%. Data ini hasil dari Survei Pemantauan Status Gizi (PSG) dengan jumlah sampel 300 Balita diambil dari 30 kluster (desa) terpilih (setiap kluster 10 balita).

Untuk target *stunting* tahun 2017 sebesar 26,2%.

- Sedangkan di tahun 2018 data *stunting* yang tersedia hasil dari survey Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar) sebesar 32,01%. Metodologi dan jumlah sampel berbeda dari PSG.

Selain data dari Riskesdas di tahun 2018 tersedia data *stunting* hasil Bulan Timbang/Operasi Timbang sebesar 9,8%. Data ini didapatkan dengan mengukur sebanyak 92.853 balita yang berkunjung ke posyandu.

Bila mengacu data tersebut, masih terdapat balita dengan *stunting* di Kabupaten Banyuwangi. Dengan demikian diperlukan upaya untuk menurunkan kasus *stunting*. Dalam rangka penurunan *stunting*, pemerintah telah meluncurkan Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* pada bulan Agustus 2017.

Salah satu pilar pada Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* menekankan pentingnya konvergensi intervensi Gizi Spesifik dan Gizi Sensitif di tingkat Pusat, Daerah, dan Desa. Penanganan *stunting* dilakukan melalui intervensi Gizi Spesifik dan Gizi Sensitif pada sasaran 1000 hari pertama kehidupan dari anak sejak di kandungan sampai berusia 23 bulan.

Intervensi Gizi spesifik yang dilakukan diantaranya :

1. Intervensi dengan sasaran ibu hamil
2. Intervensi dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 0 - 6 bulan
3. Intervensi dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 7 - 23 bulan

Intervensi Gizi Sensitif :

1. Menyediakan dan memastikan akses pada air bersih
2. Menyediakan dan memastikan akses pada sanitasi
3. Melakukan fortifikasi bahan pangan
4. Menyediakan akses pada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana
5. Menyediakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
6. Menyediakan Jaminan Persalinan Universal (Jampersal)
7. Memberikan pendidikan dan pengasuhan kepada orang tua
8. Memberikan pendidikan anak usia dini universal
9. Memberikan pendidikan gizi masyarakat
10. Memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi pada remaja
11. Menyediakn bantuan dan jaminan sosial pada keluarga miskin
12. Meningkatkan ketahanan pangan dan gizi

C. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik,

pemerintahan dan pembangunan. Penerbitan dokumen identitas penduduk (KK, KTP) harus dimiliki oleh semua warga negara karena untuk mempermudah perencanaan pembangunan di Kabupaten Banyuwangi. Indikator realisasi data kependudukan dan pencatatan sipil antara lain : rasio penduduk ber KTP, rasio pasangan berakte nikah, kepemilikan kelahiran per 1000 penduduk, ketersediaan database kependudukan skala kota dan penerapan KTP nasional berbasis NIK.

Tabel 2.12. Realisasi Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Indikator Sasaran	SATUAN	2017	2018
		Realisasi	Realisasi
Rasio penduduk ber KTP		0,999	0,995
Rasio pasangan berakte nikah	%	49,94	51,47
Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk	Per 1000 penduduk	909,92	940,95
Ketersediaan database kependudukan skala kota	Status	SUDAH	SUDAH
Penerapan KTP nasional berbasis NIK	Status	SUDAH	SUDAH

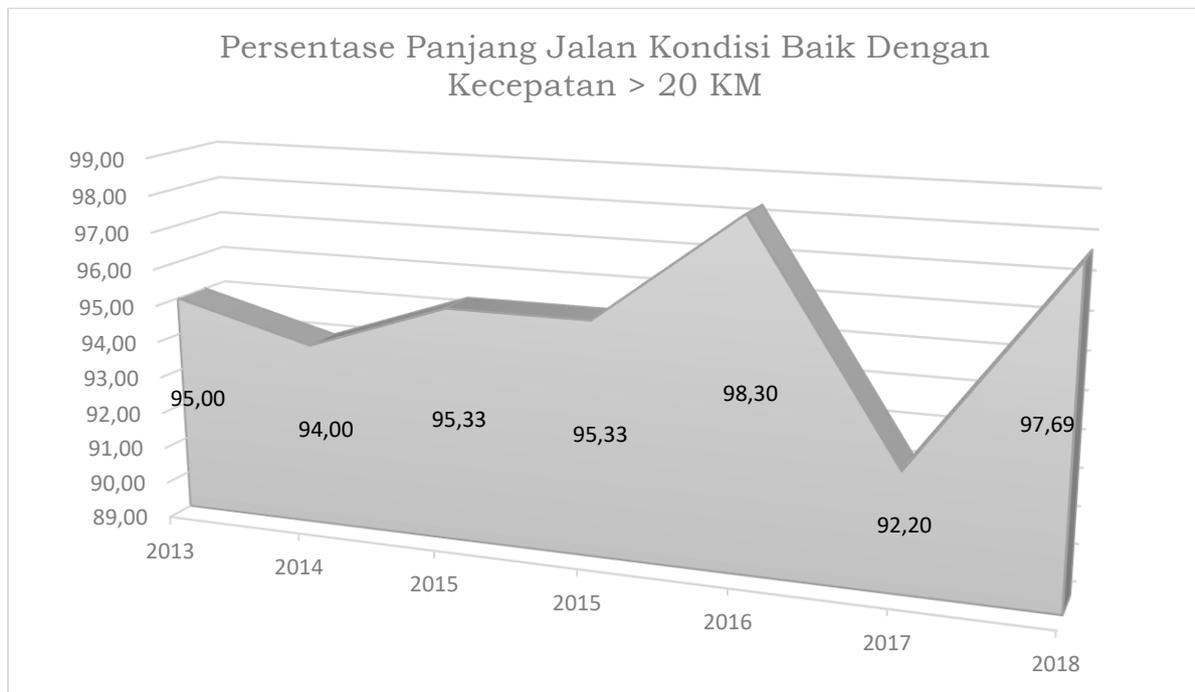
Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Banyuwangi Akhir Tahun Anggaran 2018

Terkait capaian indikator sasaran administrasi kependudukan dan catatan sipil tahun 2017-2018 dapat dijelaskan :

1. Rasio penduduk ber KTP pada tahun 2018 terjadi penurunan sebesar 0,004 karena jumlah penduduk semakin bertambah berbanding lurus dengan jumlah permintaan KTP;
2. Rasio pasangan berakte nikah meningkat karena kemudahan dan inovasi dalam mendapatkan akte nikah yaitu inovasi jemput bola dalam pengurusan akte nikah serta adanya pelayanan di mall pelayanan publik;
3. Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk meningkat karena kesadaran masyarakat semakin bertambah adanya kemudahan memperoleh dokumen 3 in 1 (akte lahir, KK dan KIA) dengan inovasi : “lahir procot pulang bawa akte” ;
4. Ketersediaan database kependudukan dan penerapan KTP nasional berbasis NIK sudah diterapkan mulai tahun 2010.

D. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

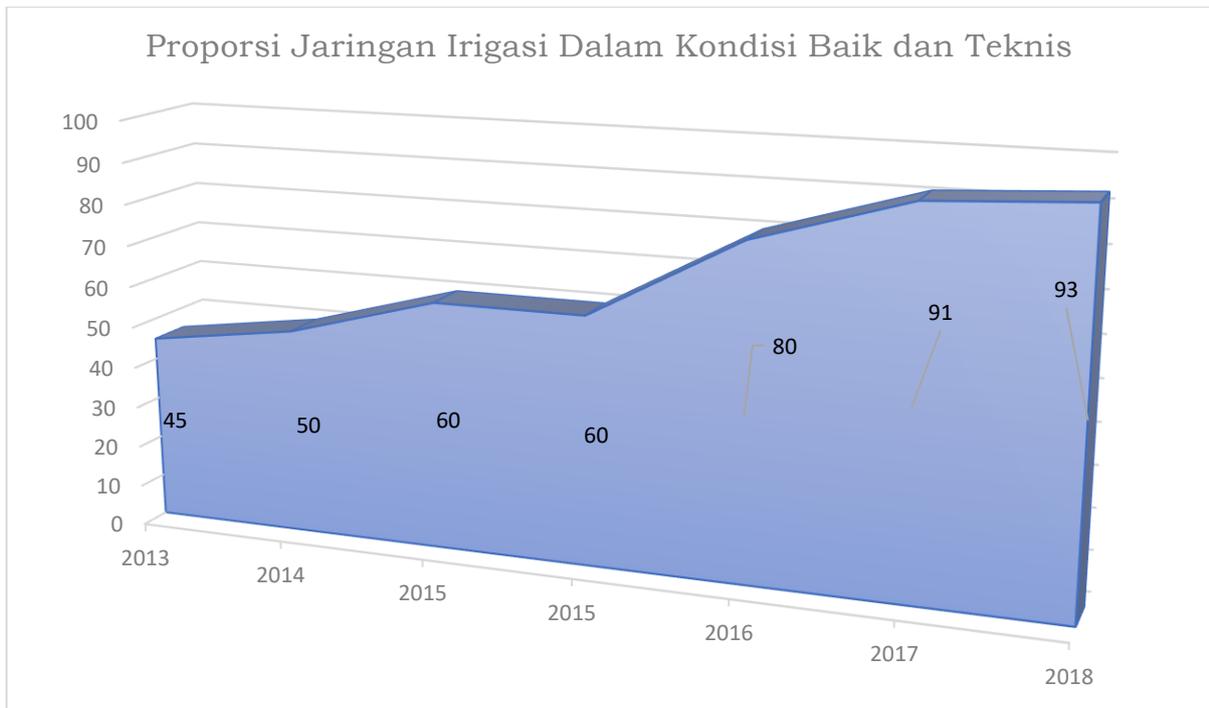
Pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang terdapat beberapa indikator yang ditetapkan menjadi indikator sasaran. Indikator tersebut adalah Persentase kecukupan luasan RTH Publik, Proporsi jaringan irigasi dalam kondisi baik dan teknis, prosentase ketersediaan air pada musim hujan dan musim kemarau (Degradasi DAS), Indeks angka kecelakaan lalu lintas, Persentase Panjang jalan kondisi baik dengan kecepatan >20km.



Gambar 2.31. Persentase Panjang Jalan Kondisi Baik Dengan Kecepatan >20Km

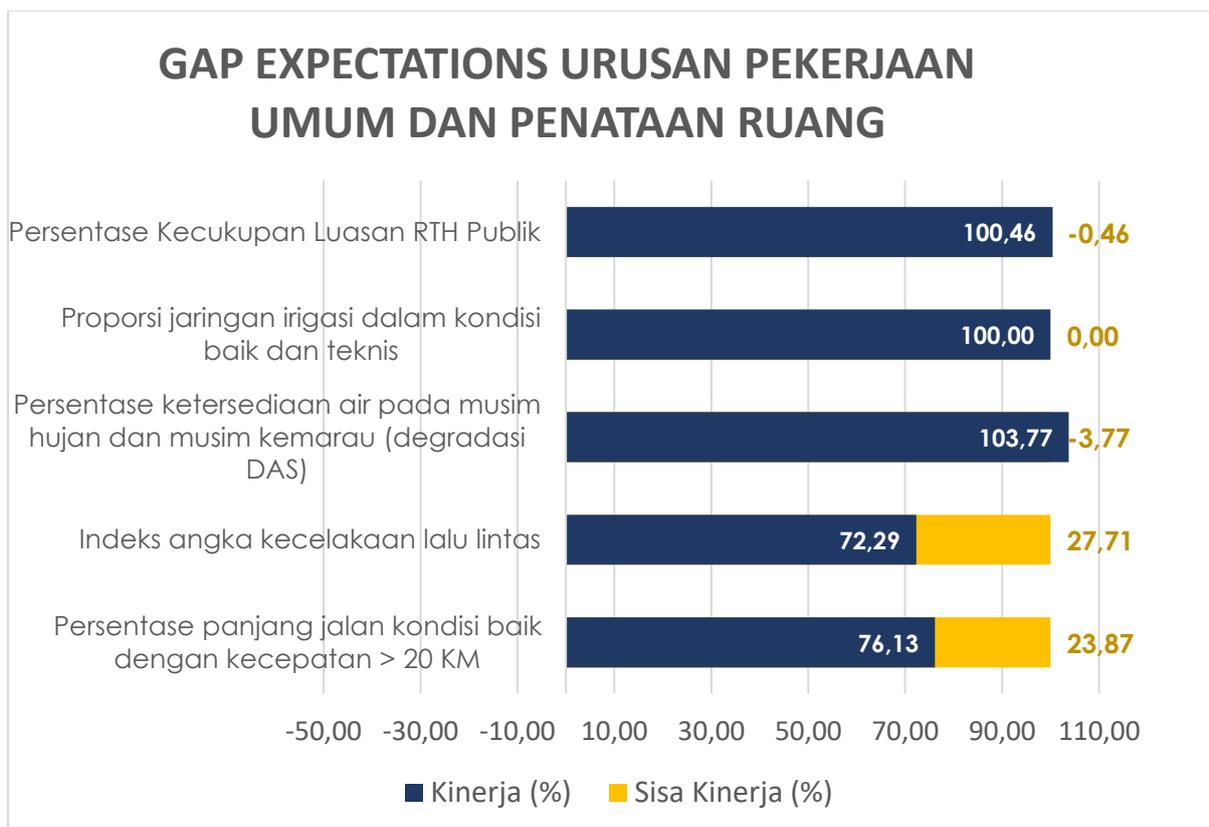
Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Banyuwangi Akhir Tahun Anggaran 2018

Jika dilihat dari trend capaian kinerja, indikator persentase Panjang jalan dalam kondisi baik dengan kecepatan >20 Km memiliki kecenderungan atau memiliki tren menurun. Pada tahun 2013, capaian pada indikator ini mencapai 95,00 persen. Pada tahun 2017, capaian kinerjanya hanya mencapai 92,20 persen, akan tetapi kembali meningkat pada tahun 2018 dengan proporsi 97,69 persen. Berbeda dengan indikator persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik Dengan Kecepatan > 20Km, indikator Proporsi Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik dan Teknis secara trend mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Besaran capaian kinerja pada indikator ini pada tahun 2018 mencapai dua kali lipat jika dibandingkan dengan capaian tahun 2013. Capaian kinerja pada tahun 2013 hanya mencapai 45 persen, sedangkan pada tahun 2018 capaian kinerjanya mampu mencapai 93 persen.



Gambar 2.32. Proporsi jaringan irigasi dalam kondisi baik dan teknis

Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Banyuwangi Akhir Tahun Anggaran 2018



Gambar 2.33: Gap Expectations capaian kinerja tahun 2018 terhadap tahun 2020 pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jika dilihat dari gap expectations capaian kinerja pada tahun 2018 terhadap tahun 2020, mayoritas indikator pada urusan ini memiliki kinerja cukup rendah. Dari 5 indikator kinerja yang ditetapkan sebagai indikator sasaran, hanya tiga yang memiliki progress dalam kategori normal, yaitu memiliki capaian kinerja lebih dari atau sama dengan 40 persen. Ketiga indikator tersebut adalah Persentase Kecukupan Luasan RTH Publik, dan Proporsi Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik dan Teknis, serta Persentase Ketersediaan Air Pada Musim Hujan dan Musim Kemarau (degradasi DAS). Sedangkan capaian kinerja dua indikator lainnya masih berada di bawah 40 persen, yaitu untuk indikator Persentase Panjang Jalan Kondisi Baik Dengan Kecepatan > 20 KM dan Indeks Angka Kecelakaan Lalu Lintas.

Pengelolaan Jalan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang tentang Jalan untuk Jalan di wilayah Kabupaten menjadi kewajiban pemerintah Kabupaten, sehingga Jalan yang berada di Pedesaan pun yang utamanya menghubungkan antar Kecamatan, antar desa akan dipelihara oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, sehingga pusat-pusat kegiatan masyarakat yang berada di desa bisa terlaksana dengan baik. Sedangkan APBDes diprogramkan untuk memelihara jalan desa yang menghubungkan antar lingkungan di dalam satu desa.

Tabel 2. 13. Realisasi Indikator Sasaran Pada Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

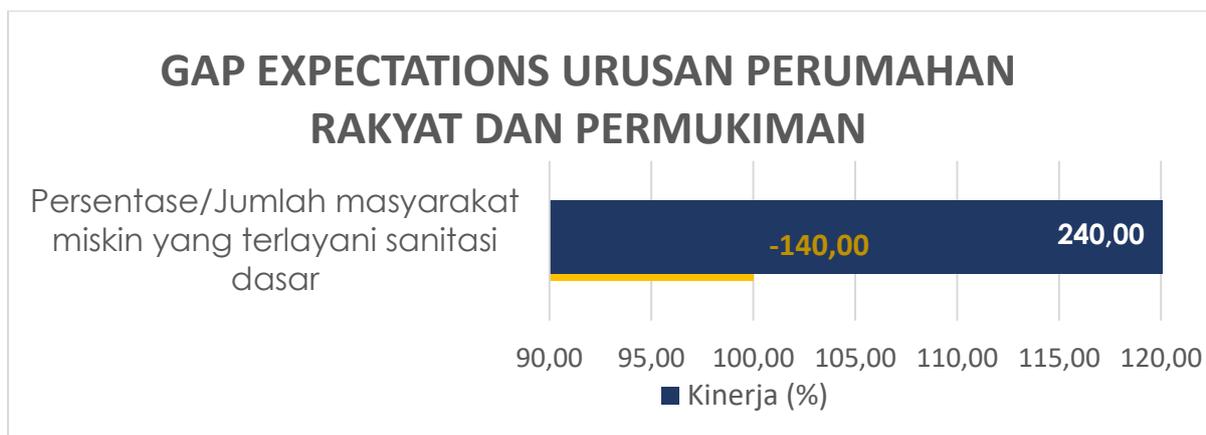
Indikator Sasaran	SATUAN	Realisasi					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
Persentase panjang jalan kondisi baik dengan kecepatan > 20 KM	%	95,00	94,00	95,33	98,3	92,2	97,69
Indeks angka kecelakaan lalu lintas	%	N/A	N/A	N/A	50,63	39,73	37,61
Persentase ketersediaan air pada musim hujan dan musim kemarau (degradasi DAS)	%	N/A	N/A	N/A	30	60	85
Proporsi jaringan irigasi dalam	%	45	50	60	80	91	93

Indikator Sasaran	SATUAN	Realisasi					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
kondisi baik dan teknis							
Persentase Kecukupan Luasan RTH Publik	%	45,50	60,00	67,30	12,53	40,00	0,17
Peningkatan Jumlah bangunan pelayanan publik berfungsi baik	unit	n/a	n/a	n/a	64	65	28
Persentase ketersediaan Air Baku	%	n/a	n/a	n/a	81	81	84
Persentase sumber air / mata Air yang dalam kondisi baik/kondisi debit air stabil	%	n/a	n/a	n/a	60,8	60,8	63,0

Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Banyuwangi Akhir Tahun Anggaran 2018

E. Urusan Perumahan dan Permukiman

Urusan perumahan rakyat dan permukiman memiliki satu indikator sasaran yaitu Persentase /Jumlah masyarakat miskin yang terlayani sanitasi dasar. Capaian kinerja pada indikator tersebut sangat bagus. Jika dilihat dari gap expectation antara capaian tahun 2018 terhadap target untuk tahun 2020 Capaian indikator persentase/jumlah masyarakat miskin yang terlayani sanitasi dasar sudah melewati target yang telah ditetapkan. Progres capaian kinerja indikator tersebut mencapai 140 persen. Hal tersebut mengindikasikan kinerja pemerintah yang memang baik atau penetapan target kinerja yang terlalu pesimis.



Gambar 2.34. Gap Expectations Capaian Kinerja tahun 2018 Terhadap Tahun 2020 Pada Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman

Tabel 2. 14. Realisasi Indikator Sasaran Pada Urusan Perumahan Permukiman

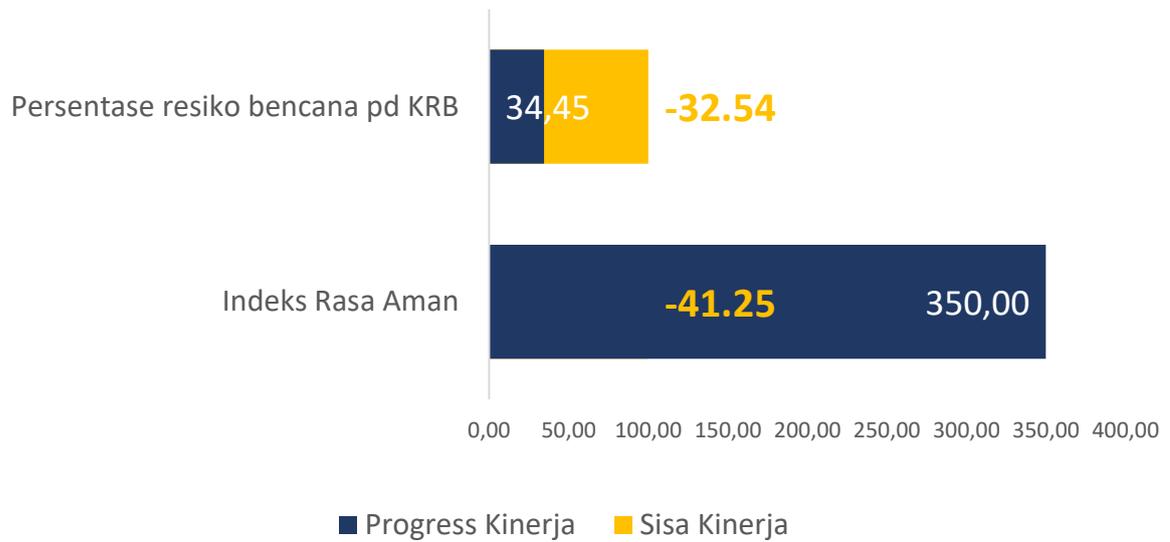
Indikator Sasaran	SATUAN	2014	2015	2016	2017	2018
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
Persentase/Jumlah masyarakat miskin yang terlayani sanitasi dasar	KK	n/a	n/a	500	800	1.200

Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Banyuwangi Akhir Tahun Anggaran 2018

F. Urusan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Pada urusan keamanan dan ketertiban masyarakat telah ditetapkan beberapa indikator kinerja, diantaranya adalah Presentase Resiko Bencana Pada KRB, dan yang kedua adalah Indeks Rasa Aman. Pada Urusan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, khususnya pada indikator Indeks Rasa Aman memiliki realisasi kinerja yang sangat signifikan dengan besaran kinerja hingga 350 persen, sehingga target yang ditetapkan untuk tahun 2020 sudah dapat jauh terlampaui pada tahun 2018. Sedangkan untuk indikator Presentase resiko bencana pada KRB masih memiliki beban kinerja sebesar 65,55 persen untuk mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2020. Indikator kinerja tersebut memiliki progress capaian yang relatif rendah karena masih berada dibawah 40 persen pada tahun 2018.

Urusan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat



Gambar 2.35. Gap Expectations Urusan Indikator Kinerja Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Tahun 2018 Terhadap Target Tahun 2020

Tabel 2.15. Ralisasi Indikator Sasaran Pada Urusan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Tahun 2013-2018

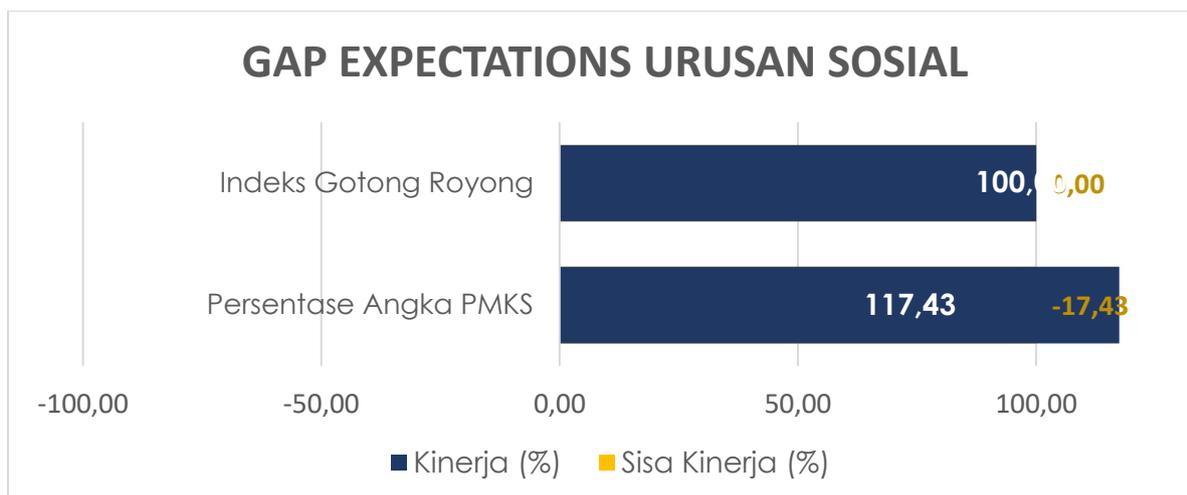
Indikator Sasaran	SATUAN	2014	2015	2016	2017	2018
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
Indeks Rasa Aman	skala	n/a	n/a	0,50	0,63	0,63
Persentase resiko bencana pd KRB	%	n/a	n/a	30,0	39,2	39,2
Persentase pelanggaran Perda yang tertangani	%	n/a	n/a	100	100	91
Persentase peningkatan	%	n/a	n/a	97,11	97,11	71,60

Indikator Sasaran	SATUAN	2014	2015	2016	2017	2018
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
ketangguhan masyarakat terhadap ancaman bencana						
Persentase penanganan darurat bencana	%	n/a	n/a	96,57	96,57	99,00

Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Banyuwangi Akhir Tahun Anggaran 2018

G. Urusan Sosial

Pada urusan sosial, terdapat dua indikator yang ditetapkan sebagai indikator sasaran, indikator yang pertama adalah Indeks Gotong Royong, dan yang kedua adalah Persentase Angka PMKS. Kedua indikator kinerja tersebut telah mencapai target yang telah ditetapkan untuk tahun 2020. Capaian tertinggi adalah pada indikator Persentase Angka PMKS dengan realisasi capaian kinerja sebesar 117,43 persen dari target yang telah ditetapkan untuk tahun 2020. Dengan terpenuhi capaian kinerja indikator persentase angka PMKS hal ini tak luput juga peran sarana prasarana sosial yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Jumlah Sarana dan prasarana sosial di Kabupaten Banyuwangi sejumlah 73 lembaga yang terdiri dari 64 Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA); 3 (tiga) Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKSLU); 1 (satu) Taman Anak Sejahtera (TAS); 1 (satu) Graha Resos; 3 (tiga) LKS NAPSA/IPWL; 1 (satu) LKS ODGJ. Capaian kinerja pada indikator Indeks Gotong Royong sudah mencapai 100 persen terhadap target yang ditetapkan untuk tahun 2020. Sementara untuk indikator Persentase Pelayanan Bagi PMKS dan Persentase Korban Bencana Yang Ditangani belum terlihat progress yang signifikan.



Gambar 2.36. Gap Expectations Capaian Indikator Tahun 2018 Terhadap Tahun 2020 Pada Urusan Sosial

Tabel 2.16. Realisasi Indikator Sasaran Pada Urusan Sosial

Indikator Sasaran	SATUAN	Realisasi					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
Persentase Angka PMKS	%	n/a	n/a	n/a	0,14	11,73	14,42
Indeks Gotong Royong	skala	n/a	n/a	n/a	0,55	0,63	0,63
Persentase pelayanan bagi PMKS	%	n/a	n/a	n/a	0,85	3,76	3,76
Persentase korban bencana yang ditangani	%	n/a	n/a	n/a	93,07	93,07	93,07

Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Banyuwangi Akhir Tahun Anggaran 2018

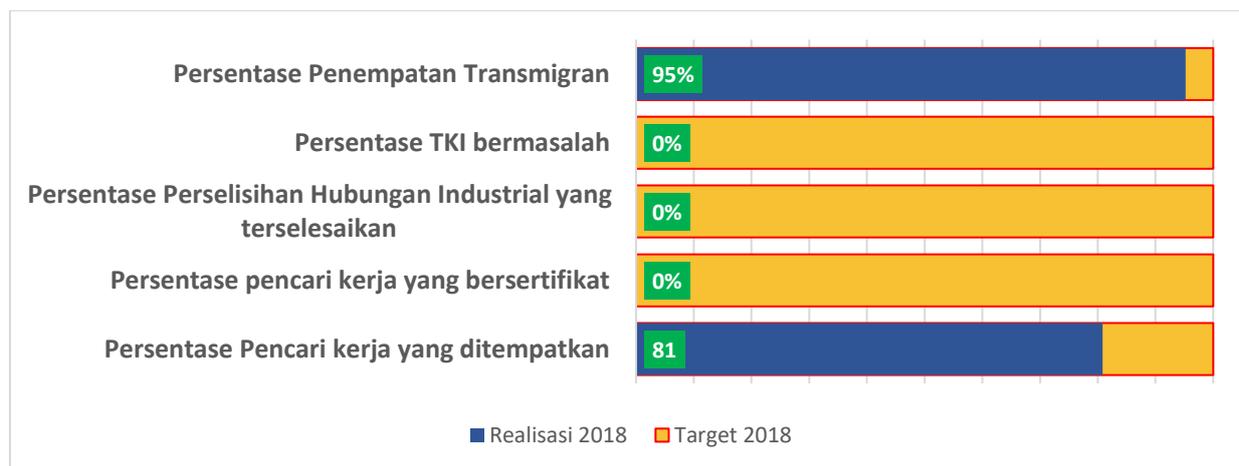
2.3.2 Urusan Wajib Non Layanan Dasar

A. Urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tenaga kerja saat ini selalu mengalami peningkatan pada setiap tahunnya, hal ini disebabkan karena banyaknya usia-usia kerja yang mulai aktif, baik lulusan perguruan tinggi maupun lulusan Sekolah Menengah Atas. Oleh karena itu Kabupaten Banyuwangi memerlukan perluasan lapangan pekerjaan agar dapat menyeimbangkan pertumbuhan angkatan kerja akibat dari pertumbuhan penduduk yang tinggi. Pembangunan ketenagakerjaan juga dimaksudkan untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis

antara pekerja dan pengusaha dan juga antara pengusaha dengan serikat pekerja. Dengan adanya dampak positif dari timbulnya hubungan harmonis dalam lingkup industrial maka pencapaian program dan sasaran pada urusan wajib tenaga kerja sangat menentukan bagaimana kemajuan yang dapat dilakukan oleh pemerintahan Kabupaten Banyuwangi dalam memperhatikan tenaga kerja yang ada di lingkungannya beserta pada pengusaha yang memiliki kemampuan untuk membuka lapangan pekerjaan. Adapun capaian urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2018 adalah sebagai berikut:

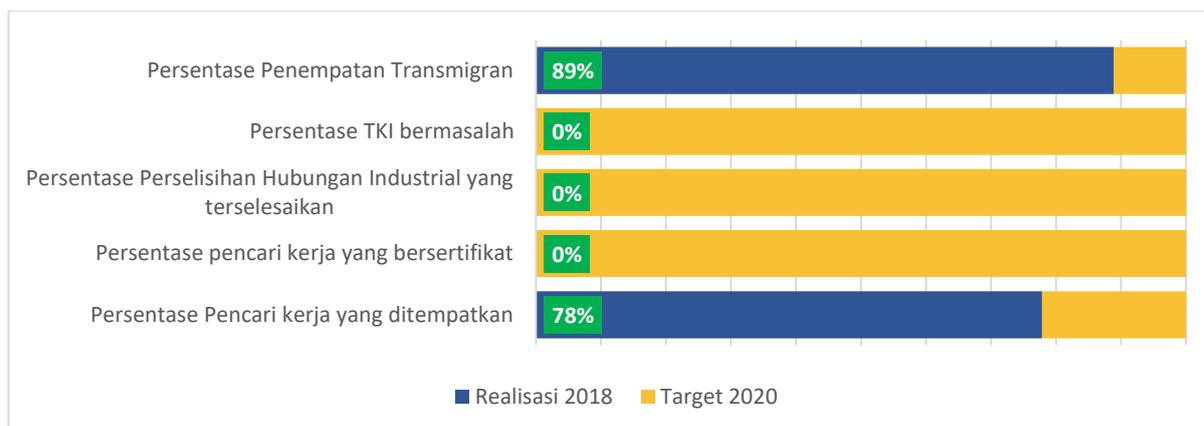
Selama tahun 2018 capaian indikator program Tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat pada Gambar berikut:



Gambar 2.37. Realisasi Kinerja Indikator Program Bidang Tenaga KERJA dan Transmigrasi Tahun 2018

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, 2018

Gambar di atas menggambarkan realisasi kinerja indikator program. Terdapat lima indikator program pada bidang tenaga kerja pada tahun 2018. Akan tetapi hanya terdapat dua indikator saja yang terdapat angka realisasinya sedangkan tiga indikator lainnya masih belum terdapat realisasi kinerjanya. Untuk indikator persentase penempatan transmigrasi telah mencapai angka 95,24% sedangkan untuk indikator persentase pencari kerja yang ditempatkan mencapai realisasi 80,33%. Angka realisasi tahun 2018 cukup baik pada bidang Tenaga Kerja, karena dua indikatornya telah mencapai angka 80% ke atas. Untuk menghitung *Gap Expectation* pada indikator program di Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi maka diperlukan perbandingan antara realisasi tahun 2018 dengan target 2020, adapun Gambar *Gap Expectation* indikator program tahun 2020 sebagai berikut:



Gambar 2.38. Gap Expectation Indikator Program Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2020
 Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, 2018

Pada Gambar gap expectation diatas yang dapat dihitung hanya dua indikator yakni persentase penempatan transmigran dan persentase pencari kerja yang ditempatkan. Pada indikator persentase penempatan transmigran persentase gap expectation tahun 2020 sebesar 11% angka ini cenderung kecil apabila dibandingkan dengan tahun 2020 serta masih terdapat dua tahun untuk mencapai angka 11% tersebut. Sedangkan persentase pencari kerja yang ditempatkan persentase gap expectation tahun 2020 sebesar 22%, untuk dua tahun kedepan angka ini cukup sulit apabila direalisasikan, akan tetapi apabila kinerja dari dinas terkait dapat ditingkatkan dan dapat difokuskan maka angka tersebut dapat terwujud pada tahun 2020. Realisasi kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi tahun 2018:

Tabel 2.17. Realisasi Indikator Program Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Tahun 2018

Indikator	Target	Realisasi
	2018	2018
Persentase Pencari kerja yang ditempatkan	77,45	90,29
Persentase pencari kerja yang bersertifikat	49,00	39,91
Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang terselesaikan	77,51	100
Persentase TKI bermasalah	0,96	2,28
Persentase Penempatan Transmigran	4,2	4,3

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, 2018

Berdasarkan capaian kinerja urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi diatas dijelaskan sebagai berikut:

1. Pencapaian target kinerja persentase pencari kerja yang ditempatkan merupakan bagian dari upaya Pemerintah Daerah dalam mengatasi permasalahan pengangguran dengan melaksanakan mekanisme antar kerja dan job fair sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Persentase pencari kerja yang bersertifikat pada tahun 2018 terealisasi 39,91%, dari target yang ditentukan sebesar 49%. Hal ini terjadi sebagai akibat dari terbatasnya pelatihan yang sesuai permintaan pasar kerja. Sedangkan upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah pelatihan bahasa asing saja.
3. Ketercapaian target kinerja persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang terselesaikan merupakan upaya kerja maksimal dari Tim Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kabupaten Banyuwangi.
4. Persentase Pekerja Migran Indonesia bermasalah mengalami kenaikan pada tahun 2018 yaitu sebesar 2.28% dari target yang seharusnya turun menjadi 0.96%. Hal tersebut sebagai dampak fenomena gunung es dalam permasalahan PMI dimana permasalahan terlihat sedikit namun sebenarnya lebih banyak dan kompleks dari yang terlihat. PMI saat ini lebih terlayani dan mendapat akses yang lebih mudah untuk menyampaikan pengaduan dan mendapat fasilitasi dari Pemerintah.
5. Penempatan transmigran telah melampaui target dari 4,2% menjadi 4,3%. Hal ini disebabkan karena Kabupaten Banyuwangi mendapatkan kuota penempatan transmigran dari daerah lain.

2.18. Rekapitulasi Rasio Ketergantungan dan Rasio Angkatan Kerja Tahun 2017-2018

No.	Indikator	Tahun	
		2017	2018
1	Rasio Ketergantungan	46.3	46.2
2	Rasio Angkatan Kerja S1, S2, S3	4.6	4.3

Sumber data : Kabupaten Banyuwangi Dalam Angka 2019 BPS (data diolah)

Rasio ketergantungan di Kabupaten Banyuwangi mengalami sedikit penurunan yaitu dari 46.3% di tahun 2017 menjadi 46.2% di tahun 2018. Hal tersebut merupakan perubahan yang positif karena semakin rendah tingkat ketergantungan, maka beban penduduk usia kerja dan dianggap produktif akan semakin ringan dalam menanggung penduduk yang belum produktif dan yang sudah

tidak produktif lagi. Jumlah penduduk Kabupaten Banyuwangi mengalami peningkatan dari 1.604.897 orang

di tahun 2017 menjadi 1.609.677 orang di tahun 2018, namun dari komposisi yang terlihat jumlah penduduk usia produktif (15-64 th) kenaikan, sedangkan penduduk yang belum memasuki usia produktif (0-14 th) mengalami penurunan dan penduduk usia yang sudah tidak produktif (+64 Th) mengalami kenaikan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa tingkat kelahiran (natalitas) berhasil ditekan melalui program-program Keluarga Berencana yang dicanangkan oleh Pemerintah dan kenaikan jumlah penduduk usia lanjut menunjukkan peningkatan angka harapan hidup di Kabupaten Banyuwangi yang ditunjang berbagai program peningkatan kesehatan masyarakat, sedangkan peningkatan penduduk usia produktif semakin mengarahkan Kabupaten Banyuwangi dalam kondisi bonus demografi yang sekaligus menjadi tantangan bagi Kabupaten Banyuwangi dalam memanfaatkan moment tersebut untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang diharapkan.

Rasio Angkatan Kerja dengan tingkat pendidikan Universitas (S1, S2, S3) mengalami penurunan dari 4,6% di tahun 2017 menjadi 4,3% di tahun 2018. Hal tersebut menunjukkan perubahan yang positif karena diketahui sebelumnya bahwa pada tahun 2017 setiap terdapat 1 (satu) orang Angkatan Kerja Lulusan Universitas, maka terdapat 5 (lima) Angkatan Kerja dengan tingkat pendidikan di bawah Universitas, sedangkan pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 1 (satu) dibanding 4 (empat). Namun demikian secara keseluruhan jumlah Angkatan Kerja mengalami penurunan dari 906.735 orang di tahun 2017 menjadi 903.356 orang di tahun 2018. Komposisi Angkatan Kerja dengan spesifikasi pendidikan dari Universitas mengalami penurunan, sedangkan peningkatan terjadi pada lulusan Diploma dan SMK. Peran Pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia terlihat dari program-program yang menunjang pendidikan, sehingga penduduk usia kerja masih dapat meningkatkan kualitasnya sebelum bersaing di dunia kerja.

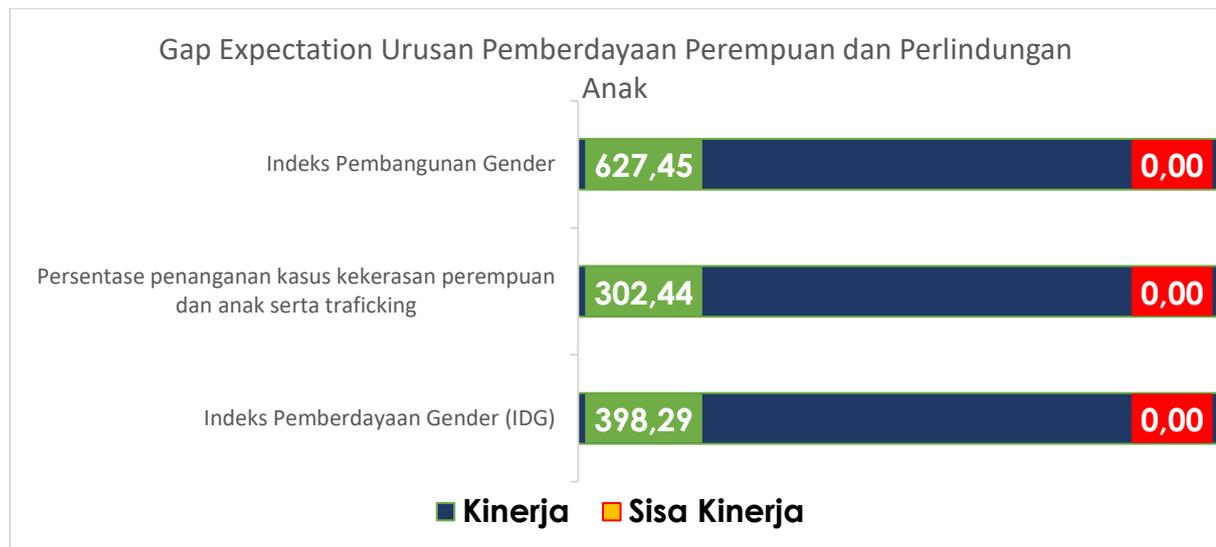
B. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kemudian Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terdapat tiga indikator yang menjadi IKD keberhasilan urusan ini, jika diperhatikan pada Gambar berikut realisasi capaian ketiga IKD tersebut pada tahun 2017 sudah sangat jauh melampaui target jika dibandingkan dengan capaian yang ingin dicapai pada akhir 2020, Gambar analisa GAP berikut menunjukkan persentase capaian realisasi target IKD indeks pembangunan gender hingga tahun 2020 sudah tercapai sebesar 627,45% atau sebesar 91,58% pada akhir tahun 2018 sehingga jika dibandingkan dengan target akhir tahun 2020 yaitu 86,2% maka capaian indikator ini sudah sangat jauh melampaui target, kemudian pada persentase capaian IKD

Jumlah Persentase penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak serta trafficking sudah mencapai 302,44% atau angka realisasinya senilai 97,22% pada akhir tahun 2018 sehingga jika dibandingkan dengan target 2020 dengan target angka realisasi sejumlah 79% dapat dikatakan bahwa indikator tersebut sudah sangat tercapai realisasinya.

Selanjutnya capaian indikator Indeks Pemberdayaan gender pada tahun 2018 sudah sangat jauh capaian realisasinya, berdasarkan analisa GAP berikut menunjukkan persentase capaian realisasi indikator Indeks Pemberdayaan gender hingga 2020 sudah tercapai sebesar 398,29 persen atau sebesar 73,45 pada akhir 2018 sehingga jika dibandingkan terhadap target 2020 yaitu target sebesar 68,25 maka IKD ini dapat diasumsikan sudah sangat tercapai dari target yang ditentukan. sehingga ketiga indikator dalam urusan ini dapat dikatakan sudah bukan merupakan isu pembangunan yang harus diprioritaskan lagi karena tingkat ketercapaian realisasinya sudah jauh melampaui target yang ditentukan.

Hal ini di sebabkan keterlibatan perempuan dalam partisipasi di bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian sudah cukup tinggi. Dapat di lihat dalam penyelenggaraan Banyuwangi Festival yang selalu melibatkan perempuan serta dalam proses perencanaan pembangunan tidak meninggalkan keterlibatan organisasi perempuan dalam setiap tahapan pelaksanaannya.



Gambar 2.39. Gap Expectations Capaian Kinerja Tahun 2018 Terhadap Tahun 2020 Pada Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Tabel 2.19. Realisasi Indikator Sasaran Pada Urusan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indikator	Satuan	Baseline	2017	2018		Kinerja	Sisa Kinerja
			Realisasi	Target	Realisasi		
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	skala	66,5	69,06	67,60	73,45	398,29%	0
Persentase penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak serta trafficking	%	70	91,84	75	97,22	302,44	0
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	skala	85,18	90,72	85,8	91,58	627,45	0

Berdasarkan capaian kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diatas dijelaskan sebagai berikut:

1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Banyuwangi : terealisasi 73,45 dari target 67,60. Hal ini dapat diartikan bahwa perempuan dapat memainkan peranan aktif di bidang ekonomi dan politik lebih tinggi dari target yang ditetapkan;
2. Dalam hal penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak serta trafficking di Kabupaten Banyuwangi, salah satu upaya pencegahan dan penyelesaian masalah melalui kegiatan Banyuwangi Children Center (BCC) yaitu solusi cepat dalam menangani berbagai permasalahan yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi. Persentase kasus kekerasan perempuan dan anak serta trafficking pada tahun 2018 mencapai 97,22% atau tercapai sekitar 302,44%.
3. Semakin besar angka Indeks Pembangunan Gender (IPG) maka semakin kecil kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Capaian Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Banyuwangi tahun 2018 : 91,58 yang dapat diartikan untuk ukuran tingkat

keberhasilan capaian pembangunan yang mengakomodasi gender di bidang pendidikan, kesehatan dan pemenuhan kebutuhan hidup sudah meminimalisir persoalan gender.

C. Urusan Pangan

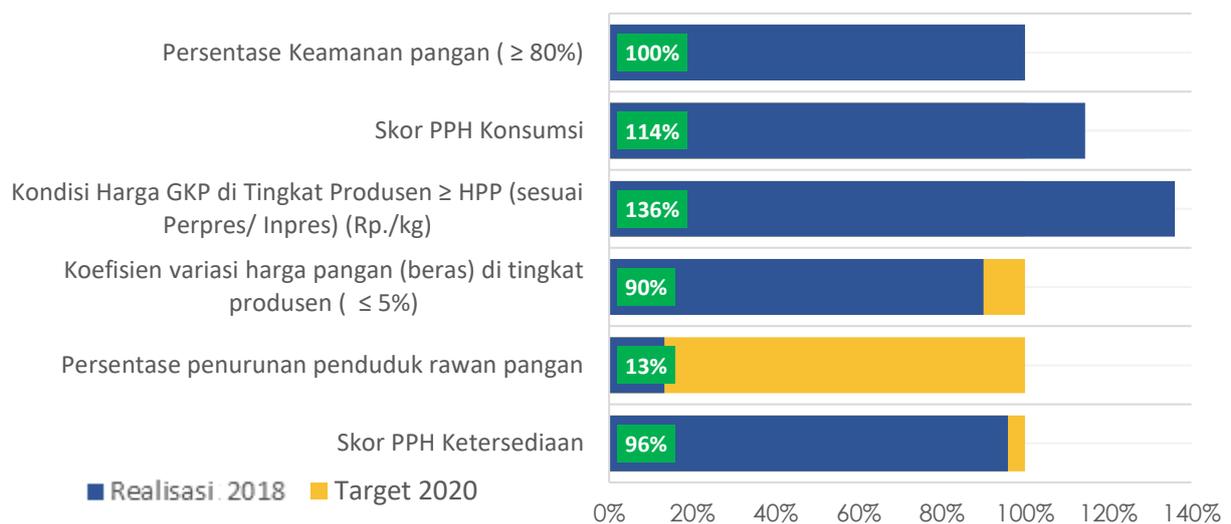
Urusan pangan memiliki 6 indikator program. Pelaksanaan kinerja pangan Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat pada data sebagai berikut:

Tabel 2.20 Tabel Realisasi Indikator Sasaran Urusan Pangan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017-2018

Indikator Program	Target		Realisasi	
	2017	2018	2017	2018
Skor PPH Ketersediaan	-	93	91,1	91,1
Persentase penurunan penduduk rawan pangan	-	0,3%	0,6%	0,20%
Koefisien variasi harga pangan (beras) di tingkat produsen ($\leq 5\%$)	-	5,0%	4,5%	4,50%
Kondisi Harga GKP di Tingkat Produsen \geq HPP (sesuai Perpres/ Inpres) (Rp./kg)	-	3750	3850	5100
Skor PPH Konsumsi	-	71	87	87
Persentase Keamanan pangan ($\geq 80\%$)	-	80%	80%	80%

Sumber: Dinas Perikanan dan Pangan, 2018

Berdasarkan data diatas terdapat tiga indikator yang telah mencapai target dalam urusan pangan yaitu Kondisi Harga GKP di Tingkat Produsen \geq HPP (sesuai Perpres/ Inpres) (Rp./kg), Skor PPH Konsumsi dan Persentase Keamanan pangan ($\geq 80\%$) sedangkan untuk tiga indikator lainnya belum mencapai target yang ditetapkan diantaranya adalah Skor PPH Ketersediaan, Persentase penurunan penduduk rawan pangan dan Koefisien variasi harga pangan (beras) di tingkat produsen ($\leq 5\%$).



Gambar 2.40. Gap Expectation Indikator Program Bidang Pangan Tahun 2020

Sumber: Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Banyuwangi, 2018

D. Urusan Lingkungan

Pada urusan lingkungan, penilaian kualitas lingkungan hidup diukur secara kuantitatif menggunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang diadopsi dari beberapa sumber diantaranya Environmental Performance Index (EPI). Tiga indikator yang menjadi dasar penilaian IKLH di Indonesia saat ini mencakup aspek udara, air sungai dan tutupan lahan. Semakin besar nilai IKLH suatu daerah maka kualitas lingkungan hidup daerah tersebut semakin baik. Indeks lingkungan hidup memiliki beberapa klasifikasi dengan skala 0 sampai dengan 100. Skala kurang dari 50 dengan kriteria “waspada”, 50 sampai dengan 58 kriteria “sangat kurang”, 58 sampai dengan 66 dengan kriteria “kurang”, 66 sampai dengan 74 dengan kriteria “cukup”, 74 sampai dengan 82 dengan kriteria “baik”, 82 sampai dengan 90 dengan kriteria “sangat baik”, dan lebih dari 90 dengan kriteria “unggul”.

Variabel dari IKLH terdiri dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Ketiga indeks ini disupport oleh program yang ada pada Urusan Lingkungan Hidup. Terkait dengan program pada Urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten Banyuwangi yang memberikan kontribusi pada capaian IKLH Kabupaten Banyuwangi bisa dilihat dari beberapa program pada Dinas Lingkungan Hidup yaitu diantaranya sebagai berikut:

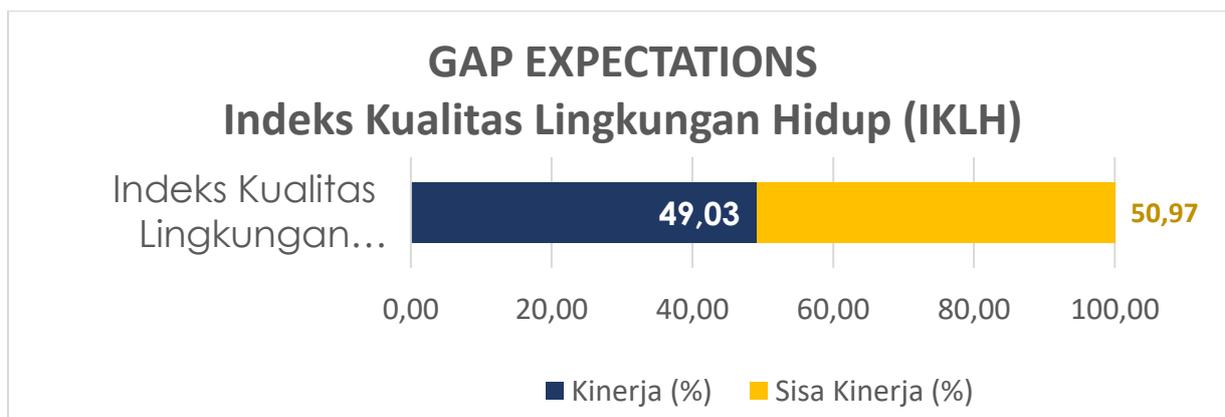
Tabel 2.21. Realisasi Indikator Program Pada Urusan Lingkungan

Indikator	Satuan	2016	2017	2018
		Realisasi	Realisasi	Realisasi
Persentase sampah yang dikelola	%	50	53	56
Indeks kualitas udara	Skala	86,46	86,51	86,46
Indeks kualitas air	Skala	54,17	54,17	54,17
Indeks tutupan hutan/ lahan	Skala	61,59	61,59	61,59

Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Banyuwangi Akhir Tahun Anggaran 2018

Dalam rangka implementasi pembangunan berkelanjutan, upaya perlindungan dan konservasi lingkungan serta rehabilitasi hutan/lahan, merupakan prioritas yang dilaksanakan dengan berbagai upaya pemberdayaan masyarakat. Sebagaimana capaian indikator program pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa pencapaian program pada indikator Indeks Tutupan Hutan/Lahan (IKTL) tidak ada perubahan, sedangkan pada Indeks Kualitas Udara tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 0,05. Hal ini terjadi dikarenakan: 1) penanganan sampah masih mencapai 56 persen. Sampah yang belum tertangani tersebar di wilayah perdesaan. Masyarakat banyak yang membakar sampah sehingga menjadi sumber pencemar udara. 2) kendaraan bermotor semakin taun semakin bertambah. Hal ini menyebabkan penambahan polutan udara di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Dalam perencanaan anggaran akan dititik beratkan pada program kegiatan penanganan persampahan supaya lebih besar dari 56 persen yaitu penambahan armada pengangkut sampah. Dalam hal stagnasi pencapaian IKTL, kegiatan sedekah oksigen yaitu penghijauan, akan lebih ditingkatkan kembali yaitu berkoordinasi dengan instansi terkait baik pusat, provinsi dan swasta mengingat kewenangan bidang kehutanan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hal ini agar kegiatan pada Urusan Lingkungan Hidup mencapai optimal sehingga tidak menyebabkan permasalahan, diantaranya pada penurunan persentase persediaan air baku maupun pada persentase sumber air/mata air (debit air) di Kabupaten Banyuwangi.

Analisa GAP berikut menunjukkan persentase capaian realisasi indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup hingga 2020 sudah tercapai sebesar 49,03 persen maka IKD ini dapat diasumsikan menyisakan target kinerja sebesar 50,97 persen terhadap target 2020 dengan angka target yaitu sebesar 68,39 dan terealisasi sebesar 66,82 pada tahun 2018.



Gambar 2. 41: Gap Expectations Capaian Kinerja Tahun 2018 Terhadap Tahun 2020 Pada Urusan Lingkungan

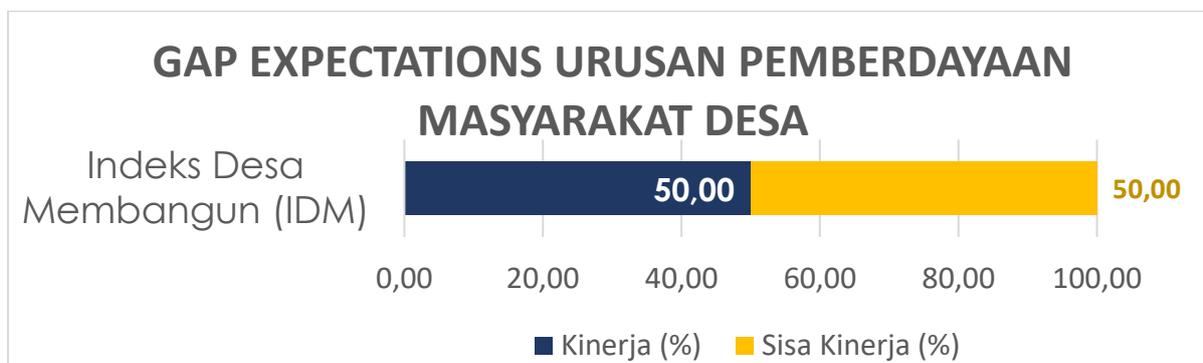
Tabel 2.22. Realisasi Indikator Sasaran Pada Urusan Lingkungan

Indikator	Satuan	Baseline	2016	2017	2018	2019	2020	Kinerja
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Target	
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	65,31	66,82	66,84	66,82	67,58	68,39	49,03

Sumber: DLH Kabupaten Banyuwangi tahun 2018

E. Urusan Pemberdayaan Masyarakat & Desa

Pada urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa, berdasarkan pada Gambar realisasi capaian indikator Indeks Desa Membangun pada tahun 2018 capaian realisasinya jika dibandingkan dengan target yang akan dicapai pada akhir 2020, Analisa GAP berikut menunjukkan persentase capaian realisasi indikator Indeks Desa Membangun hingga 2018 sudah tercapai sebesar 50 persen atau sebesar 0,72 pada akhir 2018 jika dibandingkan terhadap target 2020 yaitu target sebesar 0,75.



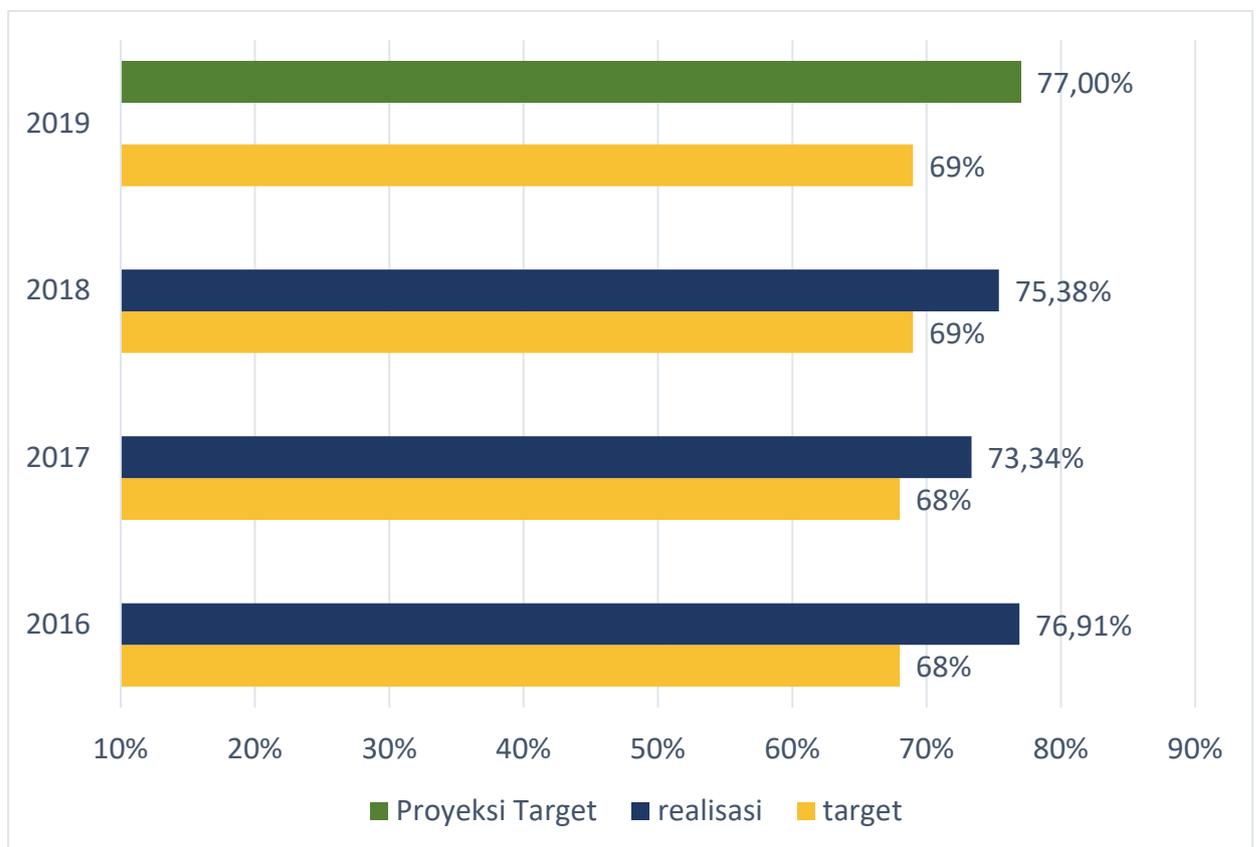
Gambar 2.42. Gap Expectations Capaian Kinerja tahun 2018 terhadap tahun 2020 Pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Tabel 2.23: Realisasi Indikator Sasaran Pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Indikator	Satuan	Baseline	2018		2020	Kinerja	Sisa Kinerja
			Target	Realisasi	Target		
Indeks Desa Membangun (IDM)	skala	0,69	0,7	0,72	0,75	97,3	2,70

F. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Sasaran yang ingin dicapai dalam urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera adalah Meningkatnya kesejahteraan keluarga melalui program keluarga berencana dengan indikator cakupan Keluarga Berencana aktif dengan capaian sebagai berikut:



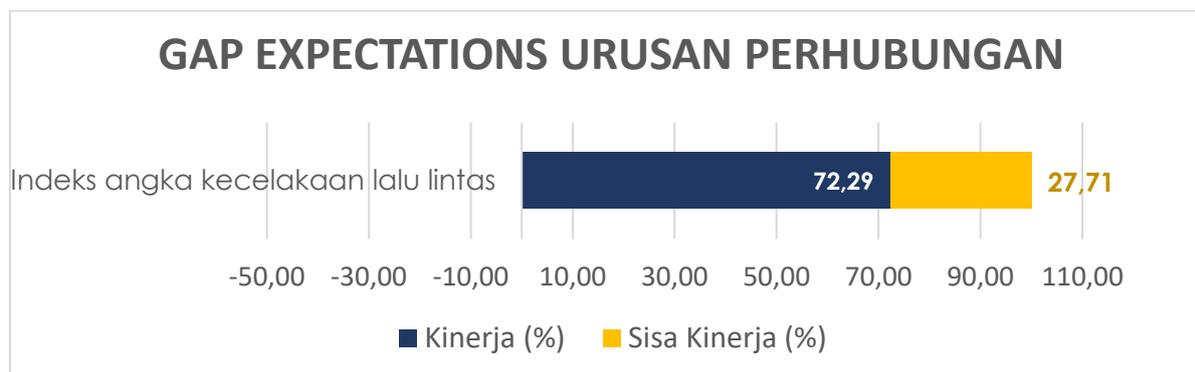
Gambar 2.4. Capaian Kinerja Indikator Cakupan KB Aktif

Sumber: LKJIP Kabupaten Banyuwangi 2018 dan LKPJ Bupati Kabupaten Banyuwangi Akhir Tahun Anggaran 2018

Indikator Keluarga Berencana berupa cakupan KB aktif mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016 sebesar 76,91 persen menjadi 73,34 persen. Meskipun begitu, capaian pada tahun 2016 sudah melebihi target yang sudah ditetapkan, dan capaian tahun 2018 sudah melebihi target yang sudah ditentukan di tahun 2018. Capaian sasaran dalam indikator Meningkatnya peserta KB aktif dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat yang semakin meningkat terutama Pasangan Usia Subur (PUS) dalam rangka mengatur dan mengendalikan jumlah anak dan jarak kelahiran, adanya pembinaan yang teratur dari segenap komponen seperti PLKB, PPKBD, Sub. PPKBD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Perangkat Desa dan lintas sektor terkait dalam membina dan memotivasi masyarakat untuk mengikuti KB guna meningkatkan kualitas hidup keluarga dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya, adanya dukungan dan kerjasama segenap jajaran Pemkab.

G. Urusan Perhubungan

Perhubungan Dalam penyelenggaraan urusan perhubungan, beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Infrastruktur Ekonomi Yang Berkualitas adalah indeks angka kecelakaan lalu lintas. Berikut merupakan Gambar dari realisasi indikator indeks angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Banyuwangi:



Gambar 2.44. Gap Expectation Indikator Indeks Angka Kecelakaan Lalu Lintas

Sumber: LKJIP Kabupaten Banyuwangi 2018

Tabel 2.24. Indeks Angka Kecelakaan Lalu Lintas

Indikator	Satuan	Baseline	2017		2018		2020		Kinerja	Sisa Kinerja
			Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target			
Indeks Angka Kecelakaan Lalu lintas	%	42,08	39,73	37,61	37,61	35,03	36,60	63,40		

Gambar di atas menunjukkan penurunan resiko kecelakaan lalu lintas dimana indeks angka kecelakaan lalu lintas mengalami penurunan pada tahun 2017 sebesar 39,73 persen yang sebelumnya 42,08 persen pada tahun 2016. Angka ini sudah memenuhi target pada tahun 2017 sebesar 40,38 persen. Target Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tiap tahun mengalami penurunan, pada tahun 2018 dengan realisasi sebesar 37,61 persen. Penurunan angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Banyuwangi ini menunjukkan hal yang positif. Hal tersebut mengartikan bahwa angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Banyuwangi mampu ditekan dengan baik.

H. Urusan Komunikasi dan Informatika

Urusan komunikasi dan informatika Kabupaten Banyuwangi memiliki 5 indikator program. Pelaksanaan kinerja urusan komunikasi dan informatika Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.25. Realisasi Indikator Sasaran Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018

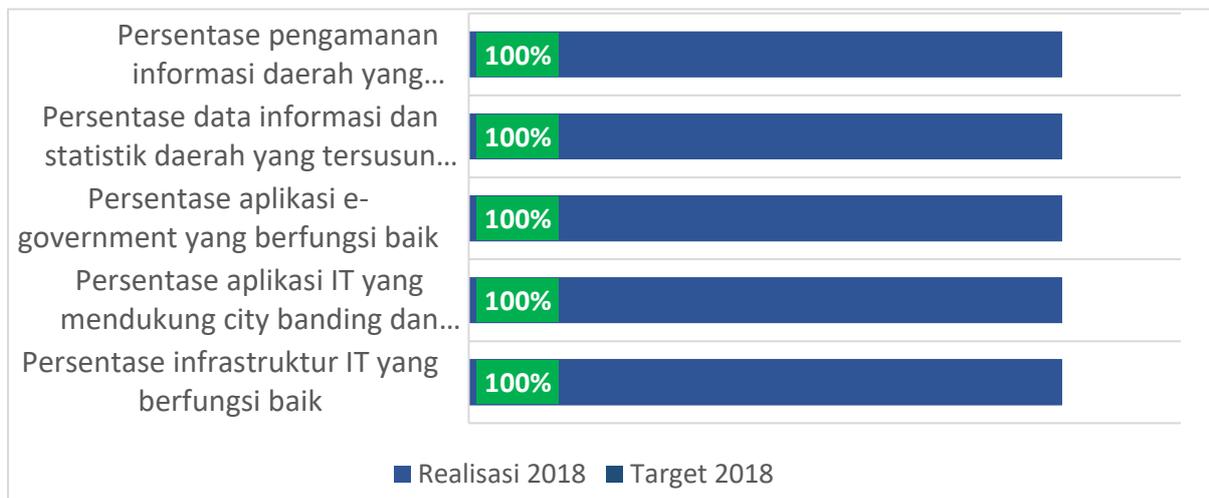
Indikator Sasaran	Target 2020	Realisasi 2018
% Cakupan Jangkauan TIK	80%	92%
% Persentase Perangkat Daerah dan Unit Kerja yang Mengimplementasikan IT Baik	80%	100%

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuwangi

Tabel 2.26. Realisasi Indikator Program Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018

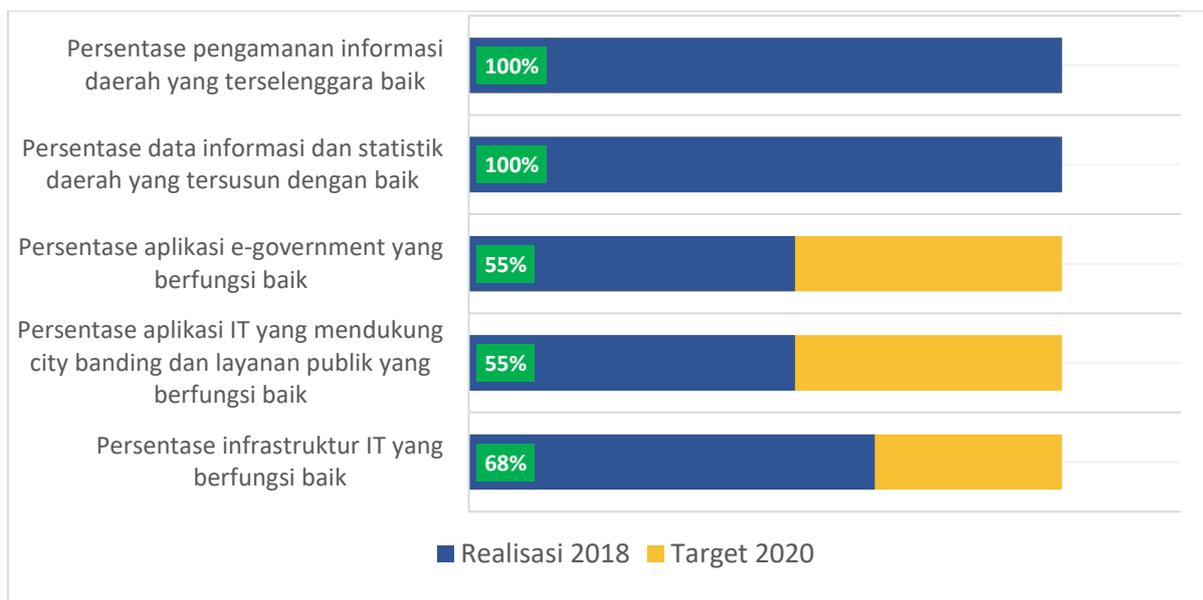
Indikator Program	Target 2018	Realisasi 2018
Persentase infrastruktur IT yang berfungsi baik	65	65
Persentase aplikasi IT yang mendukung city banding dan layanan publik yang berfungsi baik	55	55
Persentase aplikasi e-government yang berfungsi baik	55	55
Persentase data informasi dan statistik daerah yang tersusun dengan baik	100	100
Persentase pengamanan informasi daerah yang terselenggara baik	100	100

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuwangi



Gambar 2.45. Gap Realisasi Indikator Program Bidang Komunikasi dan Informasi tahun 2018

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuwangi, 2018



Gambar 2.46. Gap Expectation Indikator Program Bidang Komunikasi dan Informasi Tahun 2020

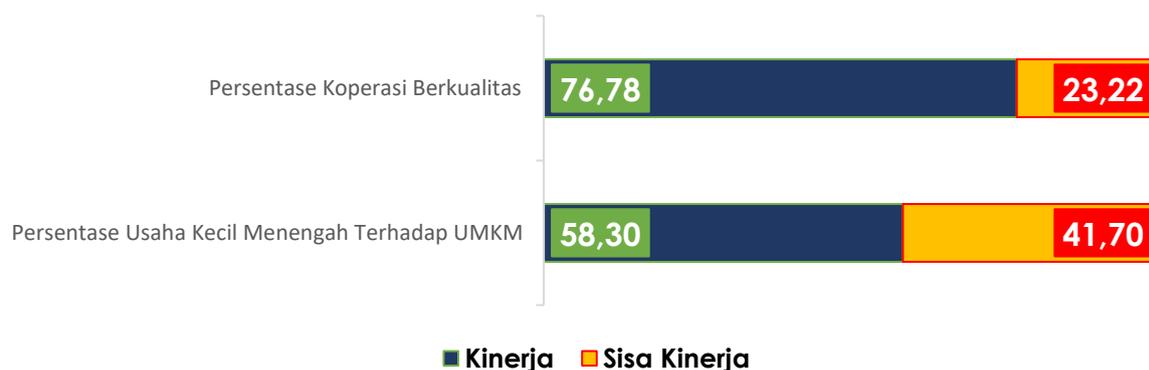
Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuwangi, 2018

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa seluruh indikator program urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuwangi tahun 2018 sudah mampu memenuhi target yang sudah ditetapkan. Capaian realisasi tersebut menunjukkan bahwa kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menjalankan program kerja sudah baik. Dan terdapat 3 indikator yang harus diberikan treatment untuk mencapai target tahun 2020.

I. Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Pada urusan koperasi, usaha kecil dan menengah terdapat dua indikator yang menjadi IKD keberhasilan urusan ini, jika diperhatikan pada Gambar di bawah realisasi capaian kedua IKD tersebut pada tahun 2018 telah sesuai dengan target jika dibandingkan dengan capaian pada akhir 2020, Analisa GAP dibawah menunjukkan persentase capaian realisasi target IKD Persentase Koperasi Berkualitas hingga 2020 sudah tercapai sebesar 76,78 persen atau sebesar 10,4 persen Koperasi Berkualitas pada akhir tahun 2018 dan menyisakan sekitar 23,22 persen kinerja yang harus dicapai sampai dengan akhir tahun 2020 yaitu 12,78 persen sebagai target akhir, sedangkan pada persentase capaian IKD Persentase usaha kecil menengah terhadap UMKM sudah mencapai 58,30 persen atau angka realisasinya sebesar 12,3 persen pada tahun 2018 dan menyisakan 41,70 persen terhadap target 2020 dengan target angka realisasi yaitu sebesar 14 persen.

Gap Expectation Urusan Koperasi & UMKM



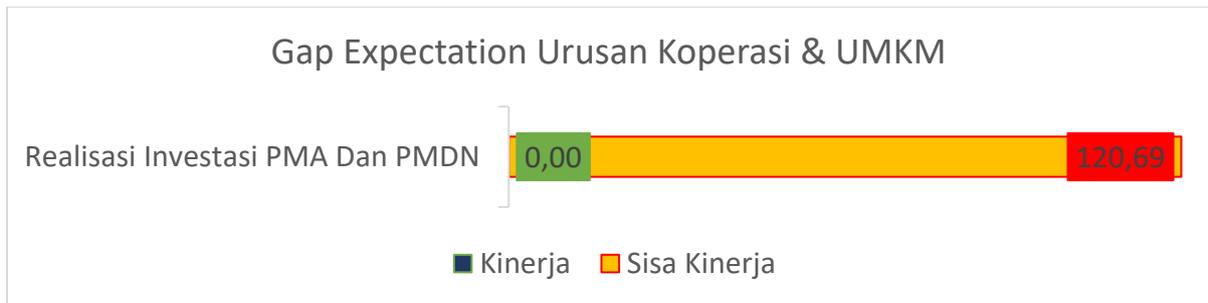
Gambar 2.47: Gap Expectations Capaian Kinerja tahun 2018 terhadap tahun 2020 Pada Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Tabel 2. 27 : Realisasi Indikator Sasaran Pada Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Indikator	Satuan	Baseline	2017	2018	2020	Kinerja	Sisa Kinerja
			Realisasi	Realisasi	Target		
Persentase Usaha Kecil Menengah Terhadap UMKM	%	9,92	12	12,3	14	58,30	41,70
Persentase Koperasi Berkualitas	%	5,77	9,13	10,4	11,8	76,78	23,22

J. Urusan Penanaman Modal

Selanjutnya yaitu urusan penanaman modal, jika diperhatikan pada Gambar realisasi capaian IKD tersebut sampai pada tahun 2017 sudah sangat tercapai pada angka 2,3 Triliun namun pada tahun 2018 terjadi penurunan yaitu menjadi 720 Miliar, sehingga Analisa GAP berikut menunjukkan persentase capaian realisasi investasi PMA dan PMDN hingga 2020 masih menyisakan kinerja sebesar 120 persen, sehingga urusan ini patut menjadi prioritas dalam melakukan perbaikan kinerja guna ketercapaian target investasi PMA dan PMDN pada tahun 2020 yaitu sebesar 2 Triliun.



Gambar 2.48. Gap Expectations Capaian Kinerja Tahun 2018 Terhadap Tahun 2020 Pada Urusan Penanaman Modal

Tabel 2.28. Realisasi Indikator Sasaran Pada Urusan Penanaman Modal (Dalam Trilyun)

Indikator	Satuan	Baseline	2016	2017	2018
			Realisasi	Realisasi	Realisasi
Realisasi Investasi PMA Dan PMDN	Rp.	1,42	3,16	2,48	5,63
	(Dalam Triliun)				

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Banyuwangi Th. 2018

Perkembangan investasi di Kabupaten Banyuwangi masih belum stabil dari tahun ke tahun, kondisi tersebut dipengaruhi berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Sebagai contoh turunnya nilai investasi pada tahun 2017 dikarenakan :

- a. Faktor eksternal yaitu pengaruh krisis ekonomi global dunia dimana pasar ekspor negara-negara berkembang (seperti Indonesia) turun dan turunnya barang ekspor di pasar, hal ini menyebabkan keinginan atau minat investor melakukan investasi berkurang.
- b. Faktor internal, untuk melindungi investasi yang ada di Kabupaten Banyuwangi agar tetap eksis berkelanjutan maka Pemerintah Daerah mengambil berbagai kebijakan diantaranya:
 1. Moratorium berdirinya hotel di Banyuwangi, dimana hotel bintang 3 kebawah dan tidak berjejer tidak diijinkan.
 2. Pembatasan pasar modern berjejer (Indomart / Alfamart) di Banyuwangi, hal ini untuk melindungi UKM mengingat dengan berdirinya pasar modern akan mematikan toko tradisional di sekitarnya.

3. Moratorium mal atau pusat perbelanjaan di Kabupaten Banyuwangi.

Kembali meningkatnya minat dan nilai investasi pada tahun 2018 ini karena kebijakan pemerintah daerah secara konsisten melindungi keberlanjutan investasi di Banyuwangi (kepercayaan investor untuk berinvestasi di Banyuwangi) misalnya dengan masuknya investasi besar seperti INKA, pabrik air mineral Danone, berdirinya Hotel Kokoon, dan investasi-investasi lainnya.

K. Urusan Pemuda dan Olahraga

Urusan Pemuda dan Olahraga terdapat dua indikator yang menjadi IKD keberhasilan urusan ini, jika diperhatikan pada Gambar berikut realisasi capaian kedua IKD tersebut pada tahun 2018 terdapat hasil yang beragam, ada satu indikator yang sudah jauh melampaui target dan ada indikator yang belum mencapai target jika dibandingkan dengan capaian yang ingin dicapai pada akhir 2020, Analisa GAP berikut menunjukkan persentase capaian realisasi target IKD jumlah pemuda terampil hingga tahun 2020 sudah tercapai sebesar 103% atau sebesar 5,78% pada akhir tahun 2018, sedangkan pada persentase capaian IKD Jumlah atlet berprestasi mengalami penurunan pada tahun 2018 yaitu hanya sejumlah 9 orang dari yang ditargetkan 400 orang pada tahun 2018 dengan capaian yang harus dicapai adalah sebanyak 145%, sehingga jika dibandingkan dengan target 2020 dengan target angka realisasi yaitu sebanyak 500 orang maka dapat dikatakan bahwa indikator tersebut sudah belum tercapai realisasinya, walaupun demikian angka realisasi pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2017 sudah sangat melampaui target akhir RPJMD yaitu sejumlah 588 orang dari target 500 orang pada akhir tahun 2020. Ketidaktercapaian target di tahun 2018 ini dikarenakan kegiatan olahraga prestasi penyelenggaraan multi event POR dan POPDA yang semula periode 2 tahunan sekali dirubah menjadi 4 tahun sekali, sesuai dengan surat Ka. Dispora Provinsi Jawa Timur tanggal 25 Juli 2017 no. 426/7747/117.3/2017 sehingga mempengaruhi jumlah atlet yang berprestasi.

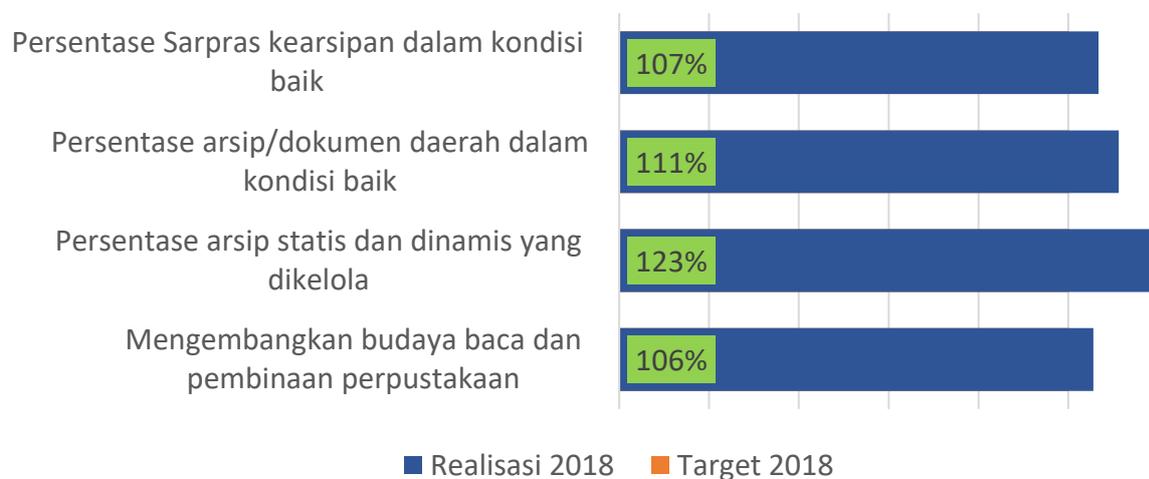
Tabel 2.29 Realisasi Indikator Sasaran Pada Urusan Pemuda dan Olahraga

Indikator	Satuan	Baseline	2017	2018		2020	Kinerja	Sisa Kinerja
			Realisasi	Target	Realisasi	Target		
Jumlah Atlet berprestasi tingkat Provinsi dan Nasional	orang	300	588	400	3	500	0%	145,5%
Jumlah pemuda terampil (Persentase pemuda mandiri)	%	5,20	6,35	5,60	5,78	6,2	180%	0%

L. Urusan Perpustakaan dan Kearsipan

Perpustakaan saat ini merupakan tempat yang disediakan pada setiap instansi pembelajaran hal ini didukung agar sistem pembelajaran lebih mudah terkait fokus-fokus pembelajaran. Adanya perpustakaan pada setiap daerah dianggap penting karena dapat menunjang berbagai aspek untuk sarana pembelajaran karena perpustakaan merupakan sarana belajar yang terdapat berbagai macam koleksi buku dan majalah. Berikut indikator yang masih belum tercapai dalam urusan perpustakaan yaitu:

Selama tahun 2018 capaian indikator program Perpustakaan Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat pada Gambar berikut:

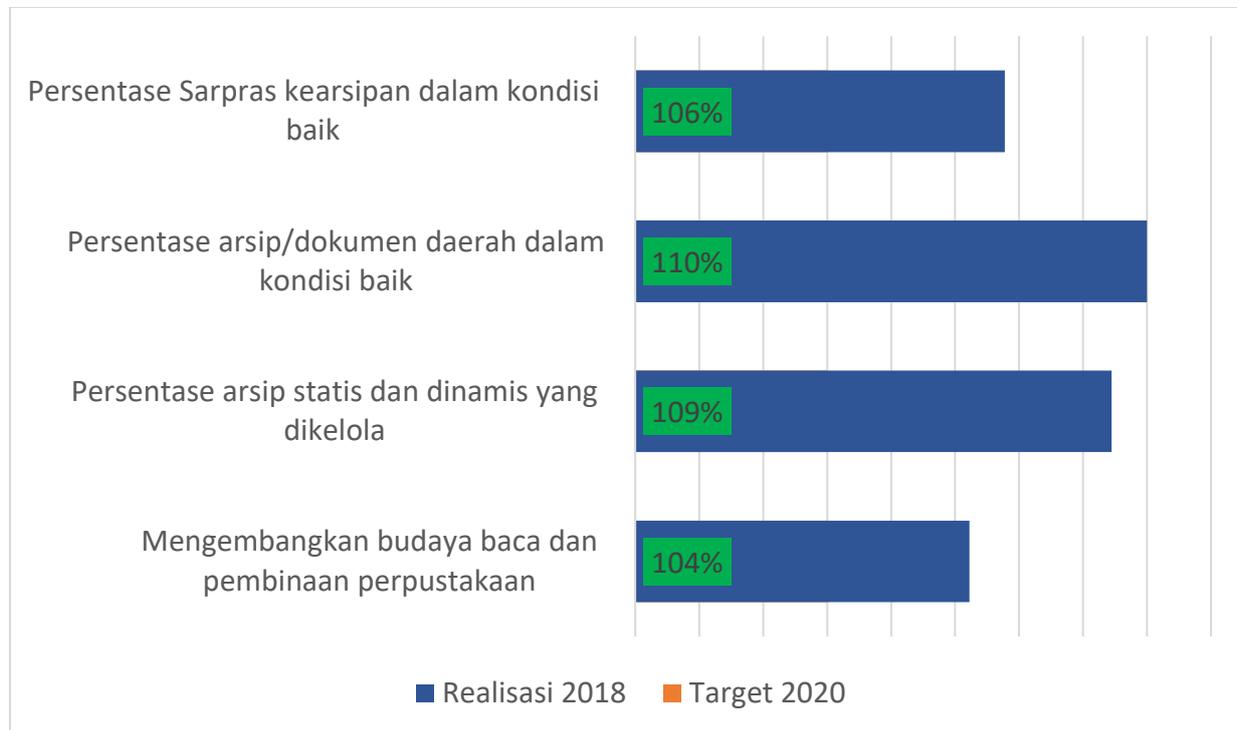


Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2018

Gambar 2.49. Gap Expetation Realisasi Kinerja Indikator Program Bidang Perpustakaan Kabupaten Banyuwangi tahun 2018

Pada Gambar diatas empat indikator pengusung urusan perpustakaan yakni persentase sarpras kearsipan dalam kondisi baik, persentase/ dokumen daerah dalam kondisi baik, persentase arsip statis dan dinamis yang dikelola, dan mengembangkan budaya baca dan pembinaan perpustakaan. Dari keempat indikator tersebut pada realisasi tahun 2018 telah mencapai target bahkan keempat indikator telah melampaui target dengan persentase realisasi sebagai berikut persentase sarpras kearsipan dalam kondisi baik sebesar 106,74%, persentase/ dokumen daerah dalam kondisi baik 111,24%, persentase arsip statis dan

dinamis yang dikelola 122,5%, dan mengembangkan budaya baca dan pembinaan perpustakaan 105,62%. Dengan capaian realisasi tersebut maka kinerja pada bidang perpustakaan sangat baik. Sedangkan gap expectation pada program bidang perpustakaan sebagai berikut:



Sumber: Dinas Perpustakaan dan kearsipan, 2018

Gambar 2.50. Gap Expectation Indikator Program Bidang Perpustakaan Tahun 2020

Pada Gambar gap expectation diatas bidang perpustakaan telah mencapai angka realisasi yang sangat baik hingga tahun 2020 realisasi tahun 2018 telah mencapai bahkan melampaui target tahun 2020. Untuk indikator persentase sarpras kearsipan dalam kondisi baik sebesar 106%, persentase/ dokumen daerah dalam kondisi baik 110%, persentase arsip statis dan dinamis yang dikelola 109%, serta mengembangkan budaya baca dan pembinaan perpustakaan 104%. Dengan ini dua target tahun 2020 telah tercapai pada tahun 2018, untuk kedepannya angka target pada tahun selanjutnya dapat ditingkatkan agar kinerja pada dinas terkait dapat terus meningkat. Tabel realisasi indikator program bidang Perpustakaan tahun 2018:

Tabel 2. 30 Realisasi Indikator Program Bidang Perpustakaan Tahun 2018

Indikator	2018	
	Target	Realisasi
Mengembangkan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	89,00	94,00
Persentase arsip statis dan dinamis yang dikelola	80,00	98,00
Persentase arsip/dokumen daerah dalam kondisi baik	89,00	99,00
Persentase Sarpras kearsipan dalam kondisi baik	89,00	95,00

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2018

2.3.3 Urusan Pilihan

A. Urusan Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Banyuwangi memiliki potensi perikanan budidaya baik budidaya laut maupun budidaya tambak, antara lain kerapu dan rumput laut. Produksi terbesar budidaya laut adalah rumput laut yang mampu menghasilkan produksi sebesar 2.250 Ton pada tahun 2018 dan mampu menghasilkan nilai produksi sebesar Rp 4.950.000.000,00. Sedangkan budidaya kerapu berhasil memproduksi 401 Ton dengan nilai produksi sebesar Rp. 19.751.000,00

Tabel 2.31. Data Budidaya Kelautan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018

No	Jenis Budidaya	Produksi (Ton)	Nilai Produksi (Rp.000)
1	Kerapu	401	19.751
2	Rumput laut	2.250	4.950.000

Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018

Pada Budidaya tambak produksi yang terbesar adalah udang vaname dengan produksi sebanyak 19.973.660 kg dan nilai produksi sebesar Rp. 1.097.543.400.000,00. Produksi budidaya tambak terbesar lainnya adalah budidaya ikan mujair, nila dan bandeng. Pada tahun 2018 produksi ikan mujair sebanyak 161.417 kg, ikan belanak sebanyak 236.200 kg dan ikan bandeng sebanyak 126.417 kg.

Tabel 2.32. Budidaya Tambak Kabupaten Banyuwangi 2018

No	Jenis Ikan	Produksi (Kg)	Nilai Produksi (Rp)
1	Nila	84.420	1.688.400.000
2	Mujair	161.417	1.811.236.000
4	Bandeng	126.707	2.348.220.000
5	Belanak	236.200	3.788.400.000
6	Kerapu	80.940	7.689.300.000
7	Kakap	53.566	3.748.950.000
8	Ikan lainnya	7000	27.850.000
9	Udang Vaname	19.973.660	1.097.543.400.000
10	Kepiting	72.487	3.824.100.000
	JUMLAH	20.796.397	1.122.469.856.000

Sumber: LKPI Bupati Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018

Potensi budidaya ikan air tawar, dengan nilai produksi terbesar adalah jenis ikan lele. Pada tahun 2018 produksi ikan lele sebanyak 4.628.881 kg dengan nilai produksi sebesar Rp. 68.638.002.000,00. Produksi ikan nila pada tahun 2018 adalah sebanyak 258.208 kg dengan nilai produksi sebesar Rp 5.164.160.000,00. Kemudian produksi ikan sidat sebanyak 99.827 kg dengan nilai produksi sebesar Rp. 13.745.850.000.

Tabel 2.33. Budidaya Air Tawar Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018

No	Jenis Ikan	Produksi (Kg)	Nilai Produksi (Rp)
1	Mas	162.115	5.000.064.000
2	Nila	258.208	5.164.160.000
3	Mujair	39.494	441.652.000
4	Gurami	90.494	2.400.592.000
5	Tawes	13.179	224.043.000
6	Patin	18.547	370.940.000
7	Lele	4.628.881	68.638.002.000
8	Sidat	99.827	13.745.850.000
9	Bawal	12.945	258.840.000
10	Gabus	510	20.250.000
	Jumlah	5.233.706	96.264.393.000

Sumber: LKPI Bupati Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018

Guna pengembangan produksi perikanan budidaya terutama perikanan darat Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mencanangkan Gerakan Sepuluh Ribu Kolam, Gerakan Mina Padi, Gerakan Masyarakat Pangan Mina Lestari (**Gema Pamili**). Kabupaten Banyuwangi memiliki sumber daya laut yang melimpah. Bila ditinjau dari hasil produksi dan nilai produksi tangkap ikan air laut, jenis ikan yang memiliki jumlah produksi tertinggi adalah ikan tongkol yaitu sebanyak 36.310 kg dengan nilai produksi sebesar Rp.654.593.900.000,00 sedangkan jenis ikan yang memiliki produksi terendah adalah ikan layur.

Tabel 2.34. Produksi Dan Nilai Produksi Tangkap Ikan Air Laut Menurut Jenisnya di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018

No	Jenis Ikan	Produksi (Ton)	Nilai Produksi (Rp.000)
1	Layang	5.616	118.032.400
2	Bawal	53	3.169.000
3	Kembung	14.959,00	235.169.000
4	Tembang	1.025	18.425.006
5	Udang lainnya	264	15.233.000
6	Teri	48	1.018.900
7	Tongkol	36.310	654.593.900
8	Lemuru	21	321.000
9	Cakalang	-	-
10	Tengiri	787	21.977.000
11	Layur	-	-
12	Ekor Kuning	14	810.000
13	Kuwe / Putihan	617	18.200.800
14	Pari	23	794.500
15	Kakap putih	18	1.440.000
16	Kakap merah / Bambang	37	2.009.400
17	Kerapu	401	19.751.000
18	Belanak	236	3.788.400
19	Cumi-cumi	1.060	34.725.500
20	Rajungan	289	17.815.000

No	Jenis Ikan	Produksi (Ton)	Nilai Produksi (Rp.000)
21	Kepiting	200	10.581.400
22	Kerang-kerangan	513	2.985.000
23	Lain-lain	11.371	189.699.500
	Jumlah	119.862	1.367.119.706

Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018

Pada perairan umum di Kabupaten Banyuwangi yang memiliki jumlah produksi tertinggi adalah jenis ikan Mujair sebanyak 13.196 kg dengan nilai produksi sebesar Rp. 115.069.100,00 sedangkan jenis ikan dengan jumlah produksi terendah adalah jenis ikan nilem sebanyak 461 kg dengan nilai produksi sebesar Rp. 3.929.700,00.

**Tabel 2.35. Produksi Dan Nilai Produksi Ikan Perairan Umum Menurut Jenisnya
Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018**

No	Jenis Ikan	Produksi (Kg)	Nilai Produksi (Rp)
1	Mas	9.159	88.204.400
2	Nila	10.698	98.894.750
3	Tawes	8.698	73.693.750
4	Mujair	13.196	115.069.100
5	Lele	11.522	104.377.900
7	Sepat Siam	1.383	12.200.550
8	Nilem	461	3.929.700
9	Gurami	4.946	50.962.650
10	Udang Tawar	1.680	25.617.000
11	Belut	1.986	29.129.000
12	Binatang Air lainnya	19.045	165.129.750
	Jumlah	82.774	767.208.550

Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018

Konsep Pengembangan Kawasan Minapolitan merupakan konsep yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah diciptakan dengan basis ekonomi sektor pertanian -

sub sektor perikanan, yang direncanakan mampu tumbuh dan berkembang sejalan dengan komoditas unggulan dan usaha agribisnis yang dikembangkan.

Pengembangan Kawasan Minapolitan (PKM) dipusatkan di Kecamatan Muncar yang merupakan kecamatan penghasil ikan dan pelabuhan pendaratan ikan terbesar di Kabupaten Banyuwangi. Tetapi bukan berarti di wilayah sekitarnya tidak berpotensi di sub sektor perikanan ini, sehingga wilayah sekitarnya merupakan wilayah penyangga.

Kegiatan pengembangan kawasan minapolitan perikanan tangkap di Kabupaten Banyuwangi dilakukan secara terintegrasi baik dengan pengembangan wilayah secara fisik maupun dengan koordinasi antar stakeholder yang dituangkan dalam program kegiatan yang diampu oleh perangkat daerah terkait.

B. Urusan Pariwisata

Berdasarkan pada Gambar realisasi capaian indikator *spending of money* pada tahun 2018 sudah sangat tercapai jika dibandingkan dengan target capaian pada akhir 2020, Analisa GAP dibawah menunjukkan persentase capaian realisasi indikator *spending of money* hingga 2020 sudah tercapai sebesar 450 persen atau sebesar 8,464 Triliun pada akhir 2018 sehingga jika dibandingkan terhadap target 2020 yaitu sebesar 400 Miliar maka IKD ini dapat diasumsikan sudah tidak lagi menjadi isu pembangunan.



Gambar 2.51. Gap Expectations Capaian Kinerja tahun 2018 terhadap tahun 2020 Pada Urusan Pariwisata

Tabel 2.36. Realisasi Indikator Sasaran Pada Urusan Pariwisata

Indikator	Satuan	Baseline	2014	2015	2016	2017	2018		2020	Kinerja	Sisa Kinerja
			R	R	R	R	Target	R	Target		
Spending Of Money	Rp (Dalam Milyar)	N/A	N/A	N/A	423	1.800	350	8.464	400	450 %	+ 350 %

Sumber: Dinas Pariwisata 2018

Banyuwangi menjadikan pariwisata sebagai program unggulan selain pertanian dan UMKM. Pengembangan pariwisata diantaranya berupa atraksi dan budaya yang dikemas ke dalam Banyuwangi Festival (B-Fest) dan alam (ecotourism). Pengembangan pariwisata bukan semata-mata mendatangkan uang tapi sebagai konsolidasi mengubah perilaku masyarakat. Sejak tahun 2012 Banyuwangi konsisten menyelenggarakan Banyuwangi Festival, dengan jumlah even sebagai berikut:

Tabel 2.37. Jumlah Even B-Fest

Tahun	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Even B-Fest	12	15	23	38	53	72	77	99

Sumber: Dinas Pariwisata

Pada awalnya penyelenggaraan B-Fest dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi. Dalam perkembangannya acara B-Fest banyak dilaksanakan di desa-desa. Bahkan sebagian besar penyelenggaraan B-Fest dibiayai dan dilaksanakan sendiri oleh masyarakat. Sedangkan pemerintah berperan dalam mengemas dan mempromosikan agar pelaksanaan B-Fest lebih menarik sehingga banyak dikunjungi wisatawan. Pelaksanaan B-Fest sebagai salah satu promosi pariwisata telah berkontribusi besar dalam peningkatan jumlah wisatawan. Hal ini ditunjukkan oleh data jumlah kunjungan wisatawan ke Banyuwangi yang terus meningkat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.38. Jumlah Kunjungan Wisatawan

Tahun	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Kunjungan Wisatawan	671 ribu	802 ribu	866 ribu	1,07 juta	1,5 juta	1,7 juta	4,1 juta	4,8 juta	5,2 juta

Sumber: Dinas Pariwisata 2018

Pelaksanaan B-Fest mencakup semua segmen, baik itu kebudayaan, pendidikan, kesehatan, lingkungan, olahraga, musik, kuliner, UMKM, dsb serta utk semua umur dan golongan. Dengan adanya penyelenggaraan B-Fest, masyarakat lebih kreatif dalam meningkatkan usahanya dan dapat meningkatkan pendapatan mereka. Hal ini terbukti dengan meningkatnya pendapatan perkapita Banyuwangi sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.39. Pendapatan Per Kapita

Tahun	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Pendapatan Per Kapita	20,86 juta	23,61 juta	26,84 juta	29,93 juta	33,61 juta	37,75 juta	41,47 juta	45,01 juta	48,75 juta

Sumber: Dinas Pariwisata 2018

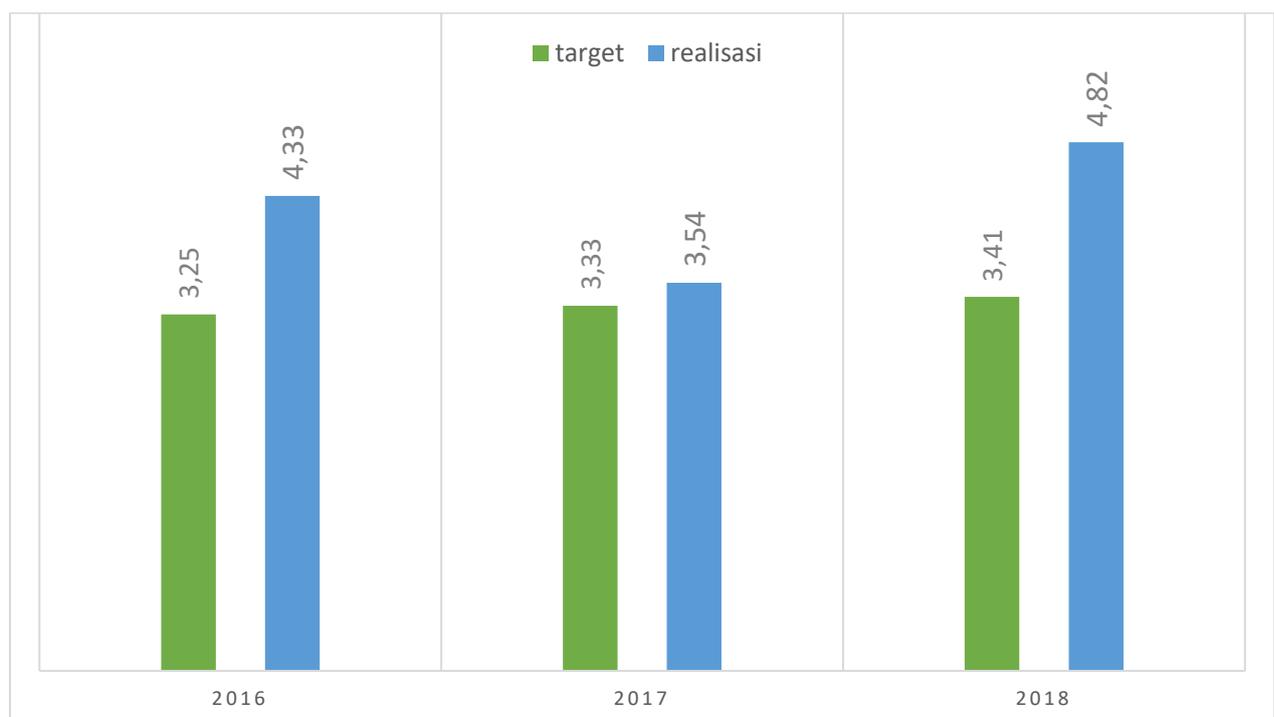
Selain B-Fest, Banyuwangi juga mengembangkan destinasi wisata berbasis alam (*ecotourism*). Beberapa destinasi wisata alam yang banyak dikunjungi para wisatawan antara lain : Gunung Ijen, Alas Purwo, Bangsring Underwater, Air Terjun Jagir, Pantai Cacalan, Pantai Cemara, Pulau Merah, Pantai Plengkung, Pantai Grajagan, Mangrove Bedul, Pantai Wedi Ireng, Teluk Biru, Teluk Hijau, Sukomade, Grand Watudodol, Djawatan, Perkebunan Coklat Glenmore, Perkebunan kopi Gombongsari, dan masih banyak yang lainnya.

Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan merupakan pemicu bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi di bidang pariwisata. Capaian nilai pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sejak tahun 2012 pertumbuhannya selalu di atas pertumbuhan ekonomi Banyuwangi. Pertumbuhan ekonomi sejak tahun 2012- 2018 berkisar antara 5-7%, sedangkan pertumbuhan ekonomi menurut

lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum antara 8-11%. Hal ini menjadikan pariwisata sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi.

C. Urusan Pertanian

Urusan Pertanian menjadi urusan pertama yang akan dipaparkan, dimana urusan ini mengemban sasaran meningkatnya daya saing daerah dan kemandirian ekonomi berbasis pertanian. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja dalam urusan pertanian adalah Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB.



Gambar 2.52. Capaian Indikator % Pertumbuhan Sektor Pertanian Terhadap PDRB

Sumber: diolah dari LKJIP Kabupaten Banyuwangi dan LKPJ Bupati Kabupaten Banyuwangi Akhir Tahun Anggaran 2018

Berdasarkan data diatas, pada tahun 2016 dan 2017 realisasi indikator % pertumbuhan sektor pertanian terhadap PDRB mengalami penurunan, akan tetapi keduanya telah mencapai target. Pada tahun 2016 target 3,25 tercapai sebesar 4,33. pada tahun 2017 target 3,33 tercapai dengan realisasi sebesar 3,54. Sedangkan tahun 2018 mengalami kenaikan 4,82 dan telah mencapai target sebesar 3,41.

Produktivitas Pertanian Sektor tanaman hortikultura Kabupaten Banyuwangi memiliki potensi yang cukup besar. Dengan lahan yang cukup luas untuk mengembangkan pertanian, Kabupaten Banyuwangi menempati peringkat pertama penyumbang PDRB sektor Pertanian, Perkebunan dan kehutanan, dengan kontribusi terhadap Kabupaten Banyuwangi sebesar 35,39% dan 9,41% terhadap Jawa Timur. Meskipun capaian di tahun 2017 sudah memenuhi target, namun di tahun 2017 kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB mengalami penurunan cukup signifikan, yang sebelumnya 4,33 turun di angka 3,54. Namun meskipun capaian turun, capaian tahun 2017 sudah memenuhi target 2018.

1. Pertanian

Potensi pertanian tanaman pangan terbesar di Banyuwangi adalah padi. Kabupaten Banyuwangi juga termasuk dalam lumbung padi di Provinsi Jawa Timur. Produksi padi Banyuwangi pada tahun 2018 adalah sebanyak 825.317 ton. Produksi tanaman pangan di Kabupaten Banyuwangi berikutnya yang dominan adalah jagung, dengan produksi sebanyak 209.165 ton pada tahun 2018. Potensi pertanian tanaman pangan di Kabupaten Banyuwangi sangat besar, namun perkembangan potensi tersebut saat ini dan ke depan menghadapi beberapa tantangan yaitu alih fungsi dan alih komoditas dari pertanian tanaman pangan ke pertanian hortikultura atau yang lain. Hal ini disebabkan faktor keuntungan yang diperoleh petani hortikultura dirasa lebih besar daripada pertanian tanaman pangan.

Tabel 2.40. Data Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Tanaman Bahan Makanan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018

No	Jenis Tanaman	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Kw/Ha)	Produksi (ton)
1	Padi	125.285	65,80	825.317
3	Jagung	30.873	67,75	209.165
4	Kedelai	17.872	18,20	32.531
5	Kacang tanah	384	14,27	548
6	Kacang hijau	505	13,65	689
7	Ubi Kayu	1.211	222,30	26.920
8	Ubi Jalar	410	210,20	8.618

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Banyuwangi

Sementara untuk perkembangan produktivitas dan produksi tanaman bahan makanan dalam lima tahun terakhir disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.41. Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan

No	Jenis Tanaman	Produktivitas (Kw/Ha)					Produksi (ton)				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	Padi	65,06	65,91	65,86	65,50	65,80	772.108	893.087	789.626	817.478	825.317
3	Jagung	62,53	62,55	66,44	67,73	67,75	142.915	194.166	209.193	224.078	209.165
4	Kedelai	18,32	18,35	17,16	18,14	18,20	51.021	47.313	40.760	45.737	32.531
5	Kacang Tanah	13,22	13,21	13,21	13,21	14,27	1.389	1.469	872	801	548
6	Kacang hijau	12,91	12,91	12,91	13	13,65	4.477	1.557	1.368	810	689
7	Ubi Kayu	191,70	191,64	191,64	222,27	222,30	32.358	31.908	26.570	27.762	26.920
8	Ubi Jalar	205,37	205,40	205,50	209,69	210,20	12.096	12.427	8.816	6.836	8.618

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Banyuwangi

Dalam lima tahun terakhir produktivitas Ubi Kayu dan Ubi Jalar adalah yang terbesar diantara tanaman pangan lainnya, namun nilai produksi masih di bawah padi, jagung dan kedelai. Produk Pertanian yang juga dihasilkan di Kabupaten Banyuwangi adalah berupa jenis sayur-sayuran dengan cabai kecil sebagai komoditas dengan produksi terbesar pada tahun 2018. Produksi cabai kecil di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2018 mencapai 28.691,18 ton. Selain cabai kecil, cabai (besar) juga merupakan komoditas dengan tingkat produksi yang besar dengan produksi sebanyak 17.415,23 ton pada tahun 2018.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tetap memiliki komitmen untuk mengembangkan, meningkatkan produktivitas sektor pertanian terutama penanganan “on farm” yang merupakan roh pengembangan pertanian hingga berkolaborasi lintas sektor dalam meningkatkan nilai tambah produk pertanian antara lain pariwisata.

Terkait dengan ketersediaan dan konsumsi pangan, Pemerintah Banyuwangi mendukung ketahanan pangan nasional melalui upaya mencukupi ketersediaan beras. Berdasarkan data hasil produksi pertanian produksi padi yang dikonversi ke beras Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2018 yaitu sebesar 519.000 ton, sedangkan kebutuhan konsumsi masyarakat Banyuwangi adalah sebesar 134.555 ton. Sehingga Kabupaten Banyuwangi mengalami “surplus” beras pada tahun 2018 sebesar 384.142 ton.

Komitmen Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terkait hal diatas dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yang didukung lintas sektor antara lain infrastruktur pengairan, infrastruktur jalan, hingga kegiatan yang mendukung secara langsung proses produksi.

Intervensi terkait dengan kejadian luar biasa / bencana alam, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sudah mengalokasikan anggaran dalam APBD sebagai antisipasi keadaan/kondisi tersebut, tetapi alokasi anggaran dimaksud bukan dalam bentuk cadangan bahan pangan berwujud beras.

Tabel 2.42. Data Luas Panen, Rata-Rata Produksi dan Total Produksi Sayuran Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018

No	Jenis Sayuran	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Kw / Ha)	Produksi (Ton)
1	Cabe	1.413	123,25	17.415,23
2	Cabe kecil	3.676	78,05	28.691,18
3	Bawang merah	322	113,70	3.661,14
4	Tomat	248	93,61	2.321,53
5	Kacang panjang	295	164,70	4.858,65
6	Kubis	87	114,34	994,76
7	Buncis	79	110,03	869,24
8	Terung	158	130,01	2.054,16

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Banyuwangi

Sementara untuk perkembangan produktivitas sayuran dalam lima tahun terakhir ditunjukkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. 43: Produksi dan Produktivitas Sayuran

No	Jenis Sayuran	Produktivitas (Kw / Ha)					Produksi (Ton)				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	Cabe	116,1	4938,71	162,33	135,45	123,25	12.678,10	14.384	472,8	402,3	17.415,23
2	Cabe kecil	70,5	2089,53	114,84	120,48	78,05	20.614,20	21.146	1162,15	1202,7	28.691,18
3	Bawang merah	103,4	1375,40	113,16	114,38	113,7	1.065	1.286	105,8	105,8	3.661,14
4	Tomat	96,68	1474,51	121,90	121,71	93,61	2.107,60	2.256	186,5	185	2.321,53
5	Kacang panjang	72,29	1461,11	134,92	133,73	164,7	1.879,50	1.841	170	168,5	4.858,65
6	Kubis	87,86	9080,00	1865,00	170,00	114,34	754,7	908	186,5	17	994,76
7	Buncis	87	67,93	101,67	101,59	110,03	765	915	1369,5	1369,5	869,24
8	Terung	123	526,88	112,57	128,63	130,01	1.525,20	1.823	389,5	451,5	2.054,16

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Banyuwangi

Tanaman buah-buahan unggulan yang memiliki produksi terbesar adalah komoditas buah naga, dengan tingkat produksi sebesar 906.511,61 ton di tahun 2018. Berikutnya adalah jeruk siam, dengan produksi sebanyak 381.910,21 ton. Buah naga dan jeruk siam merupakan produk buah andalan Kabupaten Banyuwangi dan telah mampu dipasarkan keluar daerah. Selain buah naga dan jeruk siam, komoditas unggulan Kabupaten Banyuwangi adalah buah pisang, semangka dan manggis. Komoditas buah-buahan di Kabupaten Banyuwangi selain mampu dipasarkan keluar daerah juga mampu dipasarkan sampai pasar ekspor.

Tabel 2.44. Data Luas Panen, Rata-Rata Produksi dan Total Produksi Buah-Buahan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018

No	Jenis Buah	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Kw / Ha)	Produksi (Ton)
1	Semangka	2.351	291,33	68.491,68
2	Melon	289	323,43	9.347,13
3	Manggis	3.973	134,21	53.321,63
4	Jeruk Siam	12.755	299,42	381.910,21
5	Durian	763	156,09	11.909,67
6	Mangga	2.759	90,74	25.035,17
7	Buah Naga	3.471,36	261,14	906.511,61
8	Rambutan	2.486	65,75	16.346,17

No	Jenis Buah	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Kw / Ha)	Produksi (Ton)
9	Pisang	4.332	225,46	97.669,27

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Banyuwangi

Sementara untuk perkembangan produktivitas buah-buahan dalam lima tahun terakhir ditunjukkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.45. Produksi dan Produktifitas Buah

No	Jenis Buah	Produktivitas (Kw / Ha)					Produksi (Ton)				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	Semangka	280,40	28.140,00	104,55	115,87	291,33	63.342,40	670.722,51	460	460	68.491,68
2	Melon	305,00	30.600,00	119,12	114,89	323,43	8.479,00	86.337,90	162	162	9.347,13
3	Manggis	130,00	13.100,00	101,69	101,92	134,21	49.632,70	541.294,62	2.227	2.227	53.321,63
4	Jeruk Siam	275,00	27.700,00	100,84	107,86	299,42	333.767,50	3.546.846,50	10.589	10.589	381.910,21
5	Durian	151,40	15.240,00	101,48	101,48	156,09	11.108,20	114.333,51	4.511	4.511	11.909,67
6	Mangga	86,05	8.635,00	101,22	101,50	90,74	22.815,30	222.503,23	23.520	23.520	25.035,17
7	Buah Naga	250,00	25.100,00	100,39	99,59	261,14	28.820,00	304.540,81	63.710	63.710	906.511,61
8	Rambutan	52,10	5.087,22	100,27	100,27	65,75	14.653,10	107.501,16	30.604	30.604	16.346,17
9	Pisang	225,05	22.725,86	100,05	100,05	225,46	93.692,80	1.248.929,43	159.556	159.556	97.669,27

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Banyuwangi

Pembangunan ekonomi berbasis pertanian di kawasan perdesaan, yang dirancang dan dilaksanakan dengan jalan mensinergikan berbagai potensi yang ada untuk mendorong berkembangnya sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berbasis kerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi yang digerakkan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah.

Pengembangan Kawasan Agropolitan (PKA) di Kabupaten Banyuwangi merupakan program yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dipusatkan pada salah satu Kecamatan yaitu Kecamatan Bangorejo dengan potensi dan sentra buah jeruk dan buah naga. Sedangkan wilayah di sekitar Kecamatan Bangorejo merupakan wilayah penyangga yang juga masih memiliki potensi besar sebagai produsen buah.

Pengembangan Kawasan Agropolitan memiliki sasaran :

- Diversifikasi aktivitas ekonomi;
- Mendorong ekspansi pasar regional (bahkan dengan substitusi impor);
- Mendorong perputaran modal (recirculation) di dalam masyarakat, dan;
- Mendorong proses pembelajaran masyarakat

Secara umum program / kegiatan di kawasan Agropolitan dilaksanakan sesuai sasaran dan diintervensi oleh beberapa kegiatan lintas Perangkat Daerah antara lain Dinas yang membidangi Pertanian, Dinas yang membidangi Perdagangan, UMKM, industri, dan Dinas yang membidangi Pekerjaan Umum.

2. Perkebunan

Tebu merupakan komoditas yang memiliki jumlah produksi tertinggi diantara komoditas perkebunan besar di Kabupaten Banyuwangi tahun 2018. Jumlah produksi tebu pada tahun 2018 adalah sebanyak 410.403 ton. Komoditas perkebunan besar yang memiliki produksi tertinggi kedua setelah komoditas tebu adalah kakao dengan produksi sebanyak 4.712 ton pada tahun 2018.

Tabel 2.46. Luas Panen, Luas Tanaman dan Total Produksi Tanaman Perkebunan Swasta Nasional Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018

No	Jenis Tanaman	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Kw / Ha)	Produksi (Ton)
1	Tebu	6.027	680,94	410.403
2	Kopi	3.995	10,62	4.200
3	Kakao	6.741	6,69	4.712
4	Cengkeh	1.820	2,21	402
5	Kelapa Kopra	1.031	10,89	1.123
6	Kelapa Deres	591	71,88	4.248
7	Kap Randu	1.591	4,85	772
8	Abaca	372	15,74	586
9	Karet	2.521	11,01	2.776

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Banyuwangi

Perkembangan produktivitas tanaman Perkebunan Swasta Nasional Kabupaten Banyuwangi dalam lima tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 2.47 Produksi dan Produktivitas Perkebunan

No	Jenis Tanaman	Produktivitas (Kw / Ha)					Produksi (Ton)				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	Tebu	3.124,33	6.291,67	140,95	76.643,24	680,94	11685	386749	148	28358	410.403
2	Kopi	62,70	143,03	106,01	1.402,15	10,62	1867,8	12072	4956	41307,3	4.200
3	Kakao	51,65	79,62	123,58	103,61	6,69	204	5505	414	295,3	4.712
4	Cengkeh	83,56	27,95	111,21	7.090,22	2,21	462,11	714	615	12833,3	402
5	Kelapa Kopra	184,01	143,97	107,77	3.987,34	10,89	34911,6	27587	21550	676771,1	1.123
6	Kelapa Deres	784,55	801,61	98,02	4.825,35	71,88	14961,4	19856	1781	65962,6	4.248
7	Kap Randu	111,99	82,05	91,05	400,00	4,85	106,39	1833	285	820	772

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Banyuwangi

Potensi perkebunan rakyat yang memiliki produksi terbesar adalah kelapa kopra dengan tingkat produksi sebanyak 33.273 ton di tahun 2018 dan potensi lainnya adalah kelapa deres dengan produksi sebanyak 20.662 ton. Hasil perkebunan berupa tebu rakyat juga memiliki produksi yang tinggi yaitu sebanyak 14.060 ton. Perkembangan produksi tebu baik perkebunan besar maupun rakyat ini ditunjang dengan beroperasinya pabrik gula baru di Kabupaten Banyuwangi sehingga merangsang pertumbuhan produksi tebu.

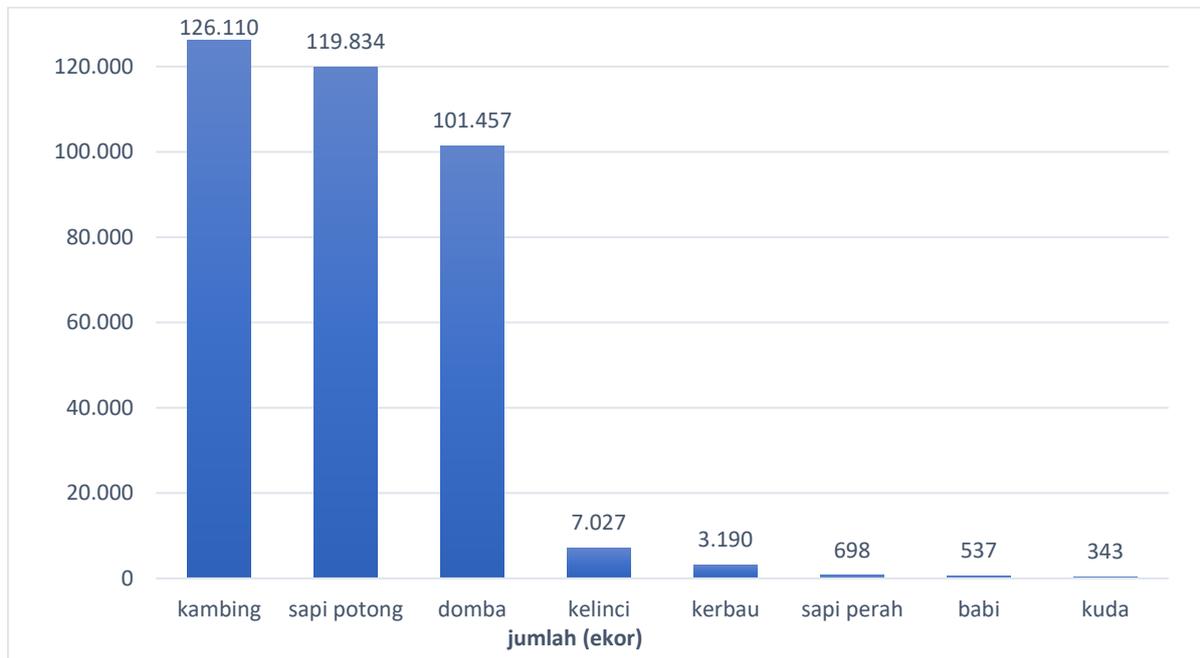
Tabel 2.48. Luas Panen, Luas Tanaman dan Total Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018

No	Jenis Tanaman	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Kw / Ha)	Produksi (Ton)
1	Tembakau	368,5	13,79	508
2	Tebu	237	593,26	14.060
3	Kelapa Kopra	22.421	14,84	33.273
4	Kelapa Deres	2.305	89,64	20.662
5	Kakao	489	5,91	289
6	Cengkih	656	2,62	172
7	Kapuk Randu	337	3,87	130
8	Kopi	9.721	10,72	10.421
9	Gula Aren	30	311,84	935

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Banyuwangi

3. Peternakan

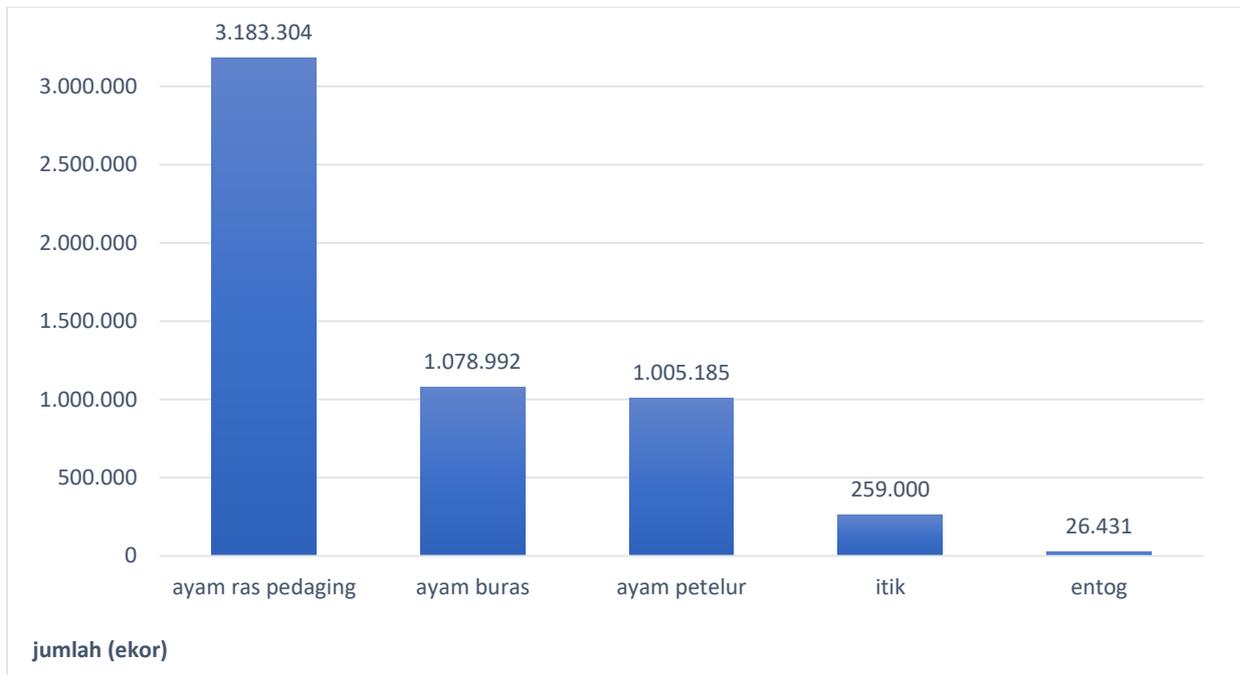
Potensi peternakan yang terbesar di Kabupaten Banyuwangi adalah kambing dan sapi potong. Jumlah populasi kambing di Kabupaten Banyuwangi adalah sebanyak 126.110 ekor pada tahun 2018 sedangkan sapi potong sebanyak 119.834 ekor. Sedangkan populasi ternak terkecil adalah kuda dan babi.



Gambar 2.53. Populasi Ternak Menurut Jenis Ternak Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018

Sumber: LKJP Bupati Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018

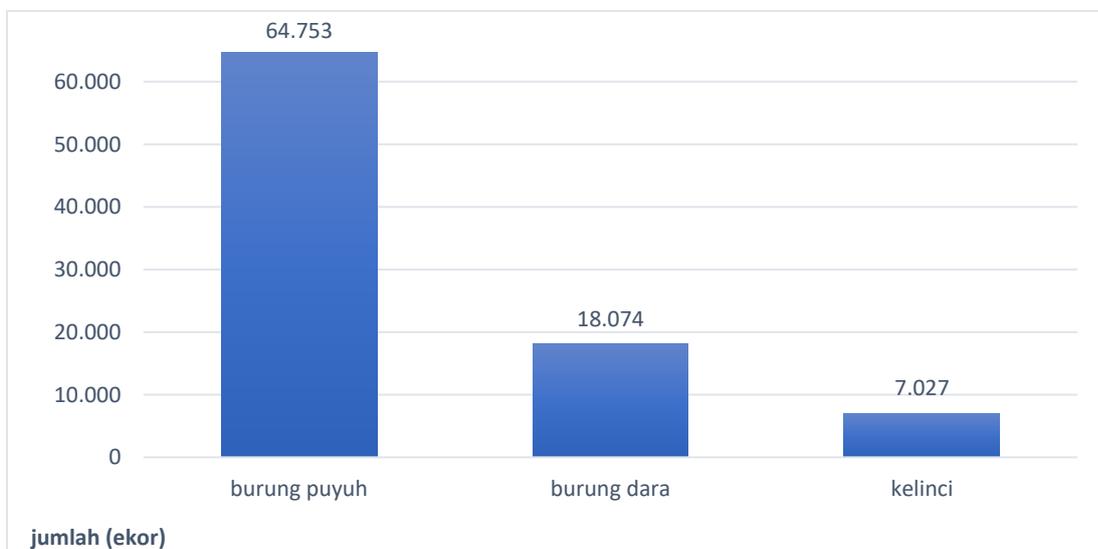
Kabupaten Banyuwangi memiliki potensi ternak unggas dengan populasi terbesar adalah ayam ras pedaging dengan jumlah 3.183.304 ekor pada tahun 2018. Berikutnya adalah ayam buras dan ayam petelur. Populasi ayam buras di Kabupaten Banyuwangi adalah sebanyak 1.101.142 ekor sedangkan untuk ayam petelur sebanyak 951.650 ekor. Populasi unggas yang paling sedikit adalah entok yang hanya sebanyak 26.431 ekor. Besarnya populasi unggas ayam ini dikarenakan kebutuhan konsumsi masyarakat semakin meningkat.



Gambar 2.54. Populasi Unggas Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018

Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018

Kabupaten Banyuwangi juga menghasilkan aneka ternak yaitu ternak burung puyuh, burung dara dan kelinci. Burung puyuh merupakan populasi terbanyak dengan jumlah populasi sebanyak 64.753 ekor. Kemudian terbanyak kedua adalah burung dara yakni sebanyak 18.074 ekor. sedangkan ternak terkecil adalah kelinci sejumlah 7.027 ekor.



Gambar 2.55. Populasi Aneka Ternak dan Hewan Peliharaan Tahun 2018

Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018

Tabel 2.49. Produksi Daging, Susu dan Telur Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018

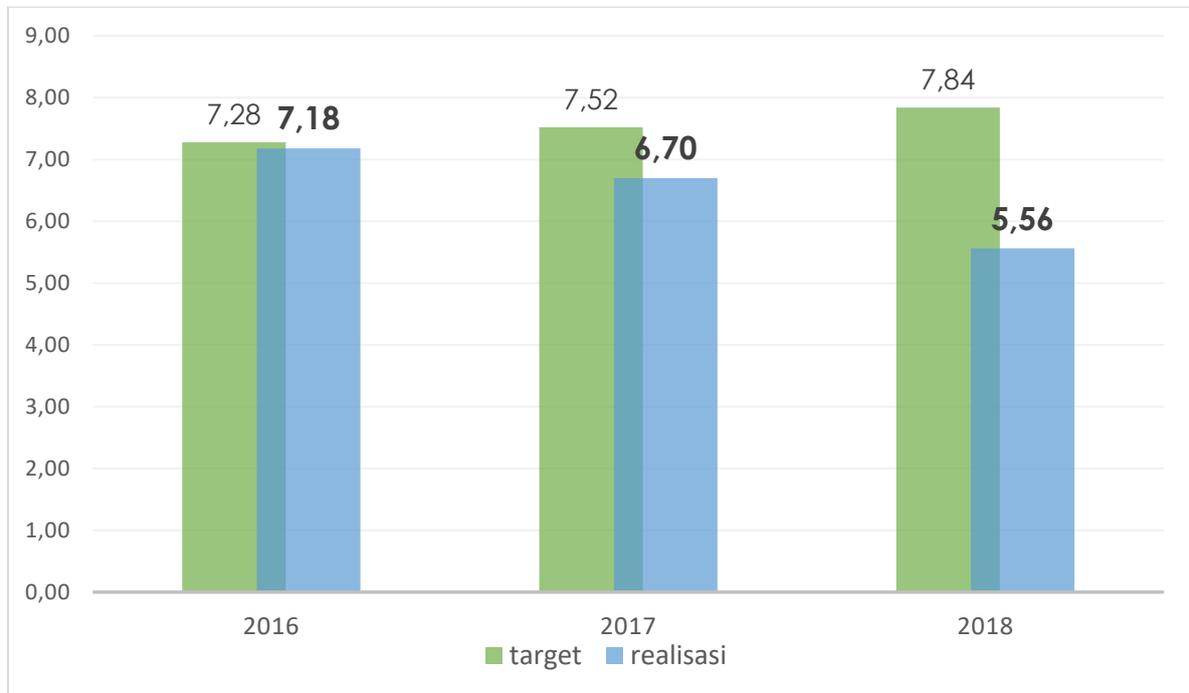
No	Jenis	Produksi
1	Daging (ton)	10.228,60
2	Susu (liter)	1.397,63
3	Telur (ton)	12.200,89

Sumber: LKPJ Bupati Banyuwangi Tahun 2018

Produksi telur di Kabupaten Banyuwangi tahun 2018 adalah sebesar 12.200,89 Ton, sedangkan untuk susu adalah sebanyak 1.397,63 liter dan daging sebanyak 10.228,60 ton pada tahun 2018. Pertumbuhan jumlah penduduk dan konsumsi diharapkan dapat merangsang pertumbuhan populasi ternak beserta hasil produksinya sehingga sektor peternakan di Kabupaten Banyuwangi dapat terus tumbuh. Upaya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk meningkatkan produksi pertanian dan membantu masyarakat di sektor pertanian salah satunya adalah pelayanan bergerak yakni Mobil Pelayanan Pertanian Terpadu (BILAPERDU). Pelayanan Bilaperdu ini meliputi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Dengan adanya layanan Bilaperdu ini permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan dapat dengan cepat segera dibantu penyelesaiannya.

D. Urusan Perdagangan

Capaian penyelenggaraan urusan perdagangan dapat diukur dengan indikator Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan dalam PDRB untuk mencapai sasaran Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan.



Gambar 2.56. Capaian Indikator % Pertumbuhan Sektor Perdagangan dalam PDRB

Sumber: LKJIP Kabupaten Banyuwangi dan LKPJ Bupati Kabupaten Banyuwangi 2018

Pertumbuhan Sektor Perdagangan Kabupaten Banyuwangi dalam PDRB melambat pada tahun 2017. Tahun 2016 pertumbuhan sektor perdagangan mencapai 7,18 sedangkan pada tahun 2017 turun menjadi 6,70. Namun jika dilihat keduanya belum dapat mencapai target yang ditentukan. Pada tahun 2016 memiliki realisasi sebesar 7,18 belum dapat mencapai target sebesar 7,28 sedangkan untuk tahun 2017 memiliki realisasi 6,70 dan belum mencapai target sebesar 7,52. Dan untuk tahun 2018 kembali menurun menjadi 5,56 dari target yang ditentukan sebesar 7,84. Hal ini menjadi tugas bagi pemerintah Kabupaten Banyuwangi agar dapat menciptakan strategi yang dapat meningkatkan pertumbuhan perdagangan dengan segala potensi yang dimiliki di Kabupaten Banyuwangi.

Tabel 2.50. Produk Domestik Regional Bruto Sektor Perdagangan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 - 2018

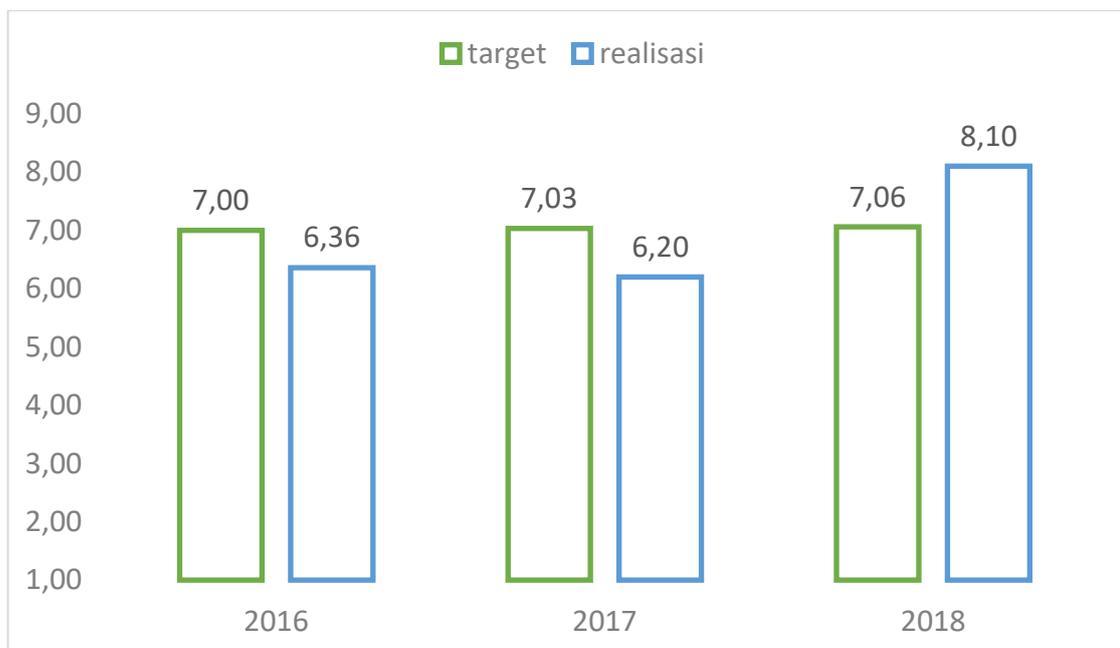
	2015	2016	2017	2018
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	8454,49	9618,55	10988,01	12544,56

	2015	2016	2017	2018
PDRB Atas Dasar Harga Konstan	6403,20	6842,62	7466,41	8310,47

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018

E. Urusan Perindustrian

Capaian penyelenggaraan urusan perindustrian dapat diukur dengan indikator Persentase Pertumbuhan Sektor Perindustrian dalam PDRB untuk mencapai sasaran Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan.



Gambar 2.57. Capaian Indikator % Pertumbuhan Sektor Industri Olahan dalam PDRB

Sumber: LKPJ Tahun 2018

Penurunan kontribusi terhadap PDRB sektor Pertanian dan Perdagangan nampaknya diikuti oleh sektor Industri yang mengalami penurunan. Pada tahun 2017 kontribusi sektor industri olahan terhadap PDRB sebesar 6,20 turun dari tahun 2016 yang sebesar 6,36. Keduanya belum mencapai target yang ditentukan. Pada tahun 2016 memiliki realisasi 6,36 dan belum dapat mencapai target sebesar 7,00. Tahun 2017 memiliki realisasi sebesar 6,20 dan belum mencapai target sebesar 7,03. Dan untuk tahun 2018 mengalami kenaikan yang

signifikan dan telah berhasil mencapai target yakni dengan realisasi sebesar 8,10 dari target yang ditentukan sebesar 7,06.

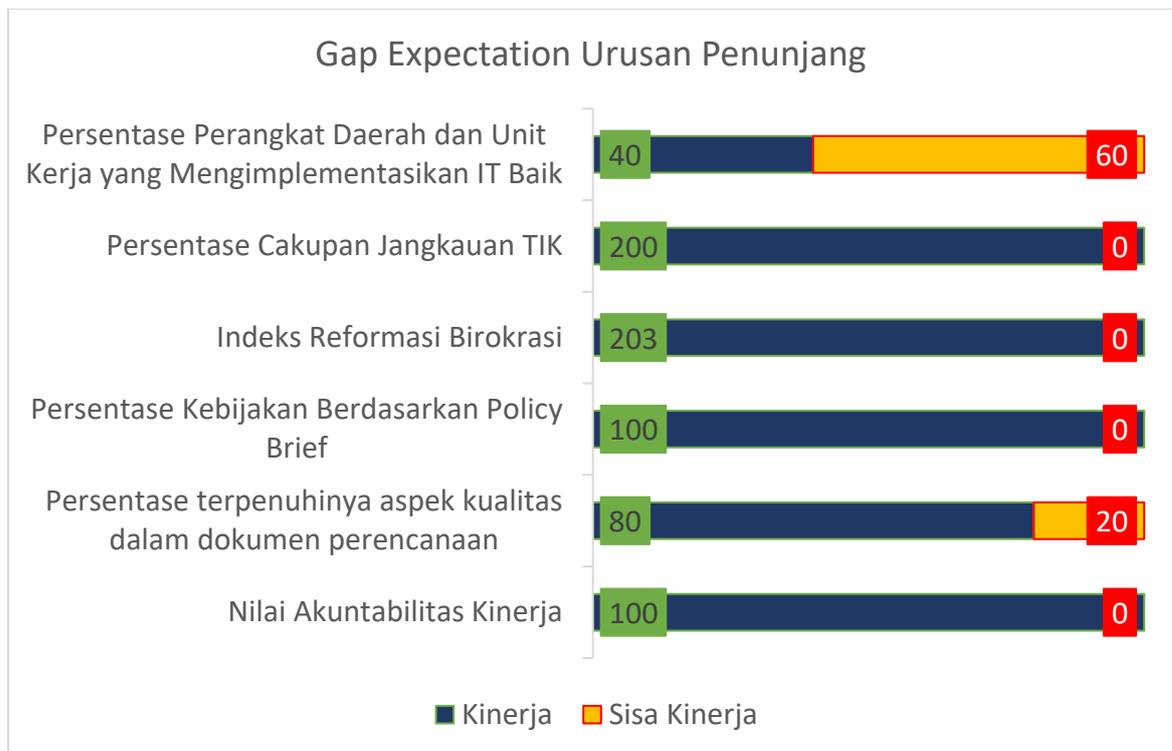
**Tabel 2.51. Produk Domestik Regional Bruto Sektor Industri Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2015 - 2018**

	2015	2016	2017	2018
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	6549,45	7264,44	7760,90	8494,85
PDRB Atas Dasar Harga Konstan	5133,73	5450,59	5645,45	6035,06

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018

2.3.4 Urusan Penunjang Pemerintah

Pada Urusan penunjang pemerintah terdapat enam indikator yang menjadi IKD keberhasilan urusan ini, jika diperhatikan pada Gambar berikut realisasi capaian dari ke enam IKD tersebut pada tahun 2018 terdapat empat indikator yang sudah sesuai target jika dibandingkan dengan capaian yang ingin dicapai pada akhir 2020. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mampu mempertahankan Nilai A AKIP pada tahun 2018 yang sudah dicapai pada tahun 2017 dan 2016 dengan nilai capaian 100%. kemudian Persentase terpenuhinya aspek kualitas dalam dokumen perencanaan dengan nilai 80% pada tahun 2018 dengan target nilai yang ingin dicapai yaitu 90% pada tahun 2020 sehingga menyisakan 20% kinerja yang harus dicapai.



Gambar 2.58. Gap Expectations Capaian Kinerja Tahun 2018 Terhadap Tahun 2020 Pada Urusan Penunjang Pemerintah

Persentase cakupan jangkauan TIK pada tahun 2017 sudah memenuhi target sebesar 65% dengan capaian 70% sedangkan untuk 2018 terjadi peningkatan yang signifikan yakni sebesar 92% dengan target yang ditetapkan 70% bahkan telah mencapai target tahun 2020 sejumlah 80%, sehingga memiliki nilai kinerja sebesar 140%. Indikator Persentase Perangkat Daerah dan Unit Kerja yang Mengimplementasikan IT sudah tercapai sebesar 100% pada tahun 2018 dan jika dibandingkan dengan target tahun 2020 sejumlah 80% maka tingkat ketercapaian kinerja sebesar 200%, sehingga dapat dikatakan indikator ini sudah memenuhi target akhir RPJMD.

Tahun 2017 sudah 50% kebijakan yang disusun berdasarkan Policy Brief, dan meningkat pada tahun 2018 sebesar 80%. Angka ini sudah memenuhi target yang ditentukan tahun 2017 dan 2018. Sedangkan untuk tahun 2018 realisasi telah mencapai target tahun 2020 yakni sebesar 80% atau dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Penyusunan kebijakan yang menggunakan dasar Policy Brief, didukung oleh peningkatan Indeks reformasi birokrasi yang pada tahun 2018 mencapai angka 70,32 melebihi target yang sebesar 33. Capaian tahun 2017 dan 2018 sudah jauh melebihi target 2020 sebesar 34,70% atau telah tercapai sebesar 203% terhadap target tahun 2020. Kondisi ini menunjukkan bahwa aparaturnya Kabupaten Banyuwangi

sudah memiliki kesadaran akan pelaksanaan tugas sebagai abdi negara untuk melayani masyarakat.

Tabel 2.52. Realisasi Indikator Sasaran Pada Urusan Penunjang Pemerintah

Indikator	Satuan	Baseline	2017	2018		2020	Kinerja	Sisa Kinerja
			Realisasi	Target	Realisasi	Target		
Aspek Kesejahteraan								
Layanan Urusan Penunjang Pemerintah								
Nilai Akuntabilitas Kinerja	nilai	B	A	A	A	A	100%	0
Persentase terpenuhinya aspek kualitas dalam dokumen perencanaan	%	80	80	80	80	90	80%	20%
Persentase Kebijakan Berdasarkan Policy Brief	%	40	50	60	80	80	100%	0
Indeks Reformasi Birokrasi	skala	70,32	84	33	70,32*	34 - 34,7	203%	0
Persentase Cakupan Jangkauan TIK	%	50	70	70	92	80	140%	0
Persentase Perangkat Daerah dan Unit Kerja yang Mengimplementasikan IT Baik	%	60	68	80	100	80	200%	0

Keterangan : * (Angka Proyeksi)

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

A. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) adalah sebuah indikator yang memberikan representasi terhadap kesejahteraan petani. Nilai Tukar Petani diukur melalui perbandingan indeks harga yang diterima petani dan indeks harga yang dibayar petani. NTP menunjukkan tingkat kemampuan/daya beli petani, selain itu NTP juga dapat melihat daya tukar dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan / daya beli petani.

NTP Kabupaten Banyuwangi diketahui dari tahun 2016 hingga tahun 2018 stagnan di angka 110,7. Fenomena tersebut menunjukkan tidak adanya peningkatan secara signifikan terhadap kesejahteraan petani dalam 3 tahun terakhir. Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi harus memperhatikan terhadap salah satu sektor unggulan yang menopang perekonomian Kabupaten Banyuwangi. Berikut merupakan realisasi NTP Kabupaten Banyuwangi tahun 2016-2018:

Tabel 2.53. NTP Kabupaten Banyuwangi tahun 2016-2018

ASPEK/INDIKATOR	2016	2017	2018
ASPEK DAYA SAING DAERAH	Capaian	Capaian	Capaian
Nilai Tukar Petani (%)	110,70	110,7	110,70

Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018

B. Desa Swasembada

Secara keseluruhan seperti yang kita tahu, terdapat 3 jenis atau tingkatan desa yang meliputi desa swakarya, desa swadaya, dan desa swasembada. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Desa Swadaya adalah desa yang masih terikat oleh tradisi yang sangat kuat, produksi yang masih diarahkan untuk kebutuhan primer keluarga, dan komunikasi dengan luar desa sangat terbatas. Sedangkan Swakarya adalah desa yang memiliki tingkatan lebih maju dari desa swadaya dimana adat dan tradisi beranjak transisi dan terbuka dengan masyarakat luas, lapangan pekerjaan yang mulai beragam, dan diikuti pula dengan berkembangnya infrastruktur desa. Sedangkan terakhir adalah desa Swasembada yang

merupakan tingkatan desa tertinggi, dengan tipologi sudah tidak terikat dengan tradisi, memiliki mata pencaharian yang beragam, berpenduduk amat padat, dan memiliki fasilitas yang paling maju dibandingkan dengan wilayah lainnya.

Semakin meningkatnya Desa Swasembada di Kabupaten Banyuwangi memiliki dampak positif dalam meningkatkan daya saing daerah. Dimana dengan semakin banyaknya swasembada di wilayah tersebut, maka investor akan semakin mudah untuk dapat melakukan intervensi dalam melakukan pembangunan di wilayah tersebut. Sehingga arus perputaran ekonomi tidak hanya berputar dari sistem yang berada di desa tersebut, namun juga banyaknya peluang yang masuk dari *stakeholder* yang berkaitan. Berikut merupakan Desa Swasembada di Kabupaten Banyuwangi:

Tabel 2.54. Desa Swasembada di Kabupaten Banyuwangi

ASPEK/INDIKATOR	2017	2018
ASPEK DAYA SAING DAERAH	Capaian	Capaian
Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	16,4	12,17
Jumlah Desa	39 desa	23 desa

Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018

Data diatas menunjukkan data desa swasembada tahun 2017 dan tahun 2018 yang cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2017 terdapat 39 jumlah desa atau 16,4 persen dari total desa di Kabupaten Banyuwangi. Sedangkan di tahun 2018 turun sebanyak 16 Desa yang menjadi 23 Desa Swasembada atau 12,17 persen dari total desa di Kabupaten Banyuwangi. Hal yang perlu diperhatikan adalah turunnya jumlah desa swasembada yang cukup drastis di tahun 2018, apakah memang tipologi masyarakatnya atau pengelolaan sumberdaya alam yang salah.

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur

A. Infrastruktur Jalan

Konteks ketersediaan infrastruktur sebuah wilayah terhadap Aspek Daya Saing Daerah adalah semakin terpenuhinya kebutuhan infrastruktur sebuah Kabupaten/Kota tentunya akan

meningkatkan daya saing daerah. Daya saing daerah yang meningkat tentunya akan menjadi daya tarik terhadap pelaku ekonomi dalam menginvestasikan di Kabupaten Banyuwangi. Berikut merupakan indikator fokus infrastruktur wilayah Kabupaten Banyuwangi:

Tabel 2.55. Realisasi Indikator Pada Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

ASPEK/INDIKATOR	2016	2017	2018
ASPEK DAYA SAING DAERAH	Capaian	Capaian	Capaian
Panjang Jalan Kabupaten (km)	2.771,25	2.771,25	2.771,25
Jumlah penumpang melalui Pelabuhan Ketapang (org)	n/a	6.505.148	6.505.148
Jenis, kelas dan jumlah restoran	251	251	251
Jenis, kelas dan jumlah penginapan/ hotel	75	82	82
Hotel Berbintang	4	6	6
Hotel Non Bintang	71	76	76

Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018

Secara umum terdapat 6 indikator fokus infrastruktur aspek daya saing daerah Kabupaten Banyuwangi. Seperti yang dapat dilihat diatas, Panjang Jalan Kabupaten Banyuwangi mencapai 2.771,25 Km pada tahun 2016 dan terus stagnan hingga tahun 2018. Data diatas mengasumsikan bahwa panjang jalan Kabupaten Banyuwangi yang merupakan kewenangan kabupaten untuk yang mengelola. Sehingga dengan tidak bertambahnya luas geografis dan pelimpahan jalan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat kepada Kabupaten Banyuwangi, maka realisasi Jalan Kabupaten akan tetap. Namun yang perlu diperhatikan dan tentunya ditelaah realisasi capaiannya adalah dari total Panjang jalan kabupaten tersebut, berapa persen jalan dengan kualitas baik dan buruk. Selain itu dalam konteks perhubungan dan konektivitas antar wilayah, tercatat pada tahun 2017 mencapai 6.505.148 penumpang di Pelabuhan Ketapang. Seperti yang kita tahu, Kabupaten Banyuwangi merupakan gerbang keluar masuknya wisatawan ke Pulau Bali dengan Pelabuhan Ketapang merupakan salah satu aksesnya.

Selain infrastruktur akses perhubungan kebutuhan mengenai infrastruktur akomodasi merupakan poin penting Kabupaten Banyuwangi sebagai kabupaten dengan potensi unggulan pariwisata. Secara umum jumlah restoran di Kabupaten Banyuwangi dari data yang

tersedia mencapai 251 dari tahun 2016 dan terus stagnan hingga tahun 2018. Capaian tersebut berbanding terbalik dengan fasilitas infrastruktur penginapan yang meliputi penginapan dan hotel. Pada kurun waktu tahun 2016-2017 jumlah penginapan / hotel meningkat dari 75 di tahun 2016 menjadi 82, atau meningkat 7 buah. Berdasarkan capaian tersebut rinciannya adalah sebagai berikut, peningkatan sebanyak 2 buah dari tahun 2016 yang mencapai 4 hotel ke tahun 2017 yang mencapai 6 hotel untuk hotel berbintang. Sedangkan meningkat sebanyak 5 buah untuk hotel tidak berbintang yang meningkat dari 71 di tahun 2016 menjadi 76 di tahun 2017.

B. Fasilitas Air Bersih

Selain fokus infrastruktur yang memiliki peran dalam aspek daya saing daerah, ketersediaan Air Bersih merupakan salah satu indikator yang mempengaruhi daya saing daerah. Hal tersebut dikarenakan adalah air yang merupakan sumber utama kehidupan manusia, dengan ketersediaan air bersih yang melimpah dan merata, secara tidak langsung akan meningkatkan daya saing daerah untuk masyarakat bersedia dan dengan nyaman dan aman menetap di Kabupaten Banyuwangi.

Data menunjukkan persentase rumah tangga di Kabupaten Banyuwangi yang menggunakan air bersih telah mencapai 93,39% pada tahun 2016. Capaian tersebut meningkat mendekati 100% di tahun 2017 yang mencapai 98,13%. Data tersebut menunjukkan capaian positif pemerintah daerah dalam memberikan fasilitas yang layak terhadap masyarakat mengenai akses air bersih. Hal yang perlu diperhatikan adalah sisanya yang mencapai 1,87% masyarakat yang masih belum mengakses atau terakses air bersih. Berikut merupakan capaian fasilitas air bersih Kabupaten Banyuwangi:

Tabel 2.56. Realisasi Indikator Pada Fokus Fasilitas Air Bersih

ASPEK/INDIKATOR	2016	2017
ASPEK DAYA SAING DAERAH	Capaian	Capaian
Persentase Rumah Tangga yang menggunakan air bersih	93,39	98,13

Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

A. Penerimaan Retribusi dan Pajak Daerah

Salah satu hal penting dengan meningkatnya daya saing sebuah daerah adalah meningkatnya daya tarik pelaku ekonomi untuk berinvestasi di daerah tersebut. Beberapa hal yang dapat merepresentasikan meningkatnya iklim investasi di sebuah daerah adalah meningkatnya penerimaan pajak dan retribusi sebuah daerah. Hubungan mengenai jumlah penerimaan pajak dan retribusi dengan iklim investasi di sebuah daerah adalah, daerah yang memiliki daya saing yang cukup tinggi akan menarik investor berinvestasi di daerah tersebut. Dengan semakin banyaknya investasi dan proses perputaran ekonomi di daerah tersebut akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak dan retribusi Kabupaten Banyuwangi. Berikut merupakan target dan realisasi penerimaan pajak dan retribusi di Kabupaten Banyuwangi

Tabel 2.57. Realisasi Indikator Pada Fokus Iklim Berinvestasi

ASPEK/INDIKATOR	2016		2017		2018	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Pajak Daerah (milyar Rp)	125,3	120,83	182,26	152,81	255,8	178,90
Retribusi Daerah (milyar Rp)	32,39	34,59	47,08	35,71	75,06	45,46
Macam Pajak Daerah	11	11,00	11,00	11	11	11,00
Macam Retribusi Daerah	3	3,00	3,00	3	3	3,00

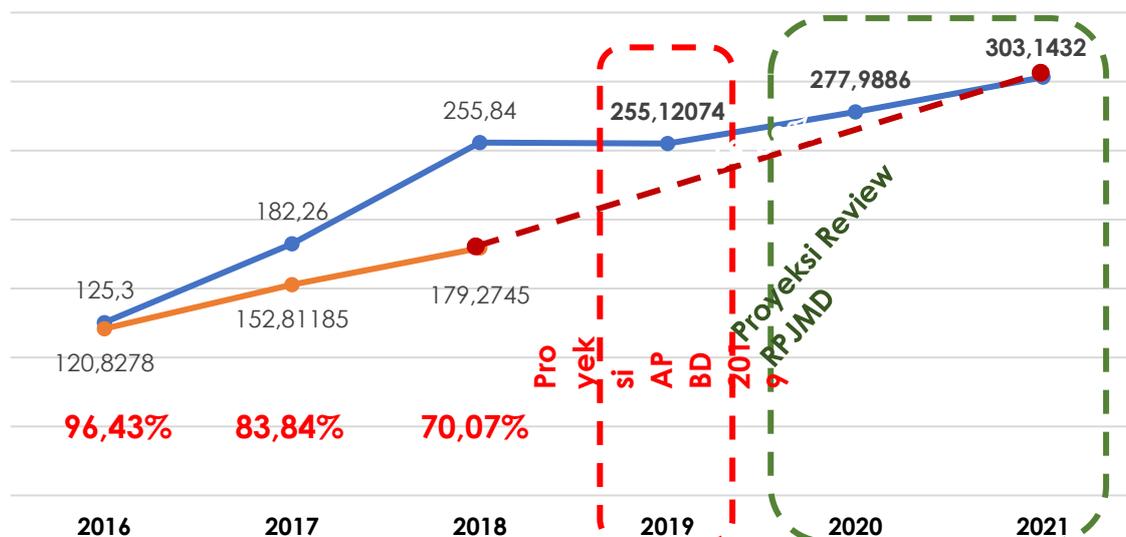
Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Banyuwangi Akhir Tahun Anggaran 2018

Sekilas memperhatikan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat 11 sumber pajak daerah, secara keseluruhan baik untuk penerimaan pajak maupun realisasi di Kabupaten Banyuwangi mulai tahun 2016 hingga tahun 2018 tidak tercapai target. Berikut digambarkan lebih detail terkait target penerimaan pajak daerah hingga tahun 2021 dengan realisasi pajak hingga tahun 2018 sebagai berikut:

PAJAK DAERAH

(Milyar Rupiah)

—●— Target RPJMD —●— Realisasi



Gambar 2.59. Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2016-2021

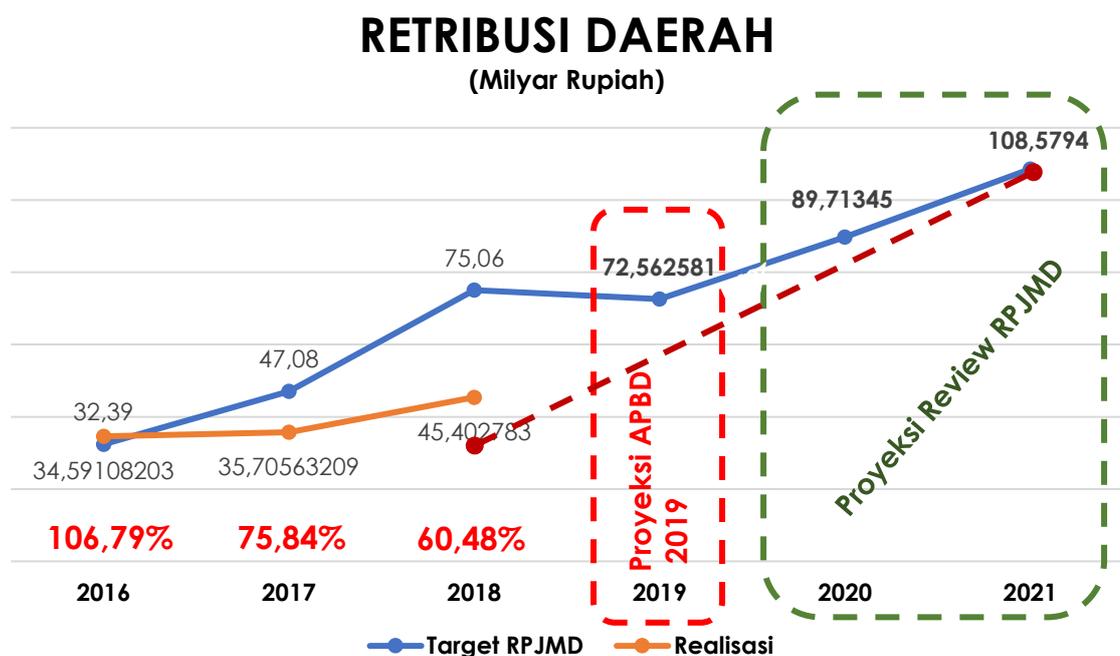
Gambar diatas menggambarkan realisasi terhadap target penerimaan pajak Kabupaten Banyuwangi tahun 2016-2021. Merujuk terhadap realisasi penerimaan pajak, dari tahun 2016 hingga tahun 2018 mengalami progresif yang cukup tinggi. Pada tahun 2016 realisasi penerimaan pajak mencapai 120,8278 Milyar, kemudian meningkat pada tahun 2017 sebesar 30 Milyar atau mencapai 152,8119 Milyar dengan persentase pertumbuhan sebesar 26,47 persen. Begitu juga di tahun 2018 yang meningkat mencapai 179,27 Milyar atau tumbuh 27 Milyar dari tahun 2017 atau mencapai 17,31 persen.

Merujuk terhadap capaian positif penerimaan pajak daerah Kabupaten Banyuwangi diatas, justru kontradiktif jika disandingkan dengan target capaian setiap tahunnya di tahun yang bersangkutan. Bahkan merujuk terhadap realisasi terhadap target cenderung menurun dari tahun 2016 hingga tahun 2018. Sebagai contoh di tahun 2016 dari realisasi yang mencapai 120,82 Milyar, hanya tercapai 96,43 persen dari target yang ditetapkan di tahun yang bersangkutan mencapai 125,3 Milyar. Sedangkan di tahun 2017 dengan realisasi yang meningkat mencapai 152,81 Milyar, tidak diikuti pula dengan meningkatnya realisasi terhadap target pada tahun yang sama. Bahkan di tahun 2017 realisasi terhadap target justru turun mencapai 83,84 persen dari target yang ditetapkan mencapai 182,26 persen. Begitu

juga di tahun 2018 dengan capaian realisasi mencapai 179,27 Milyar, hanya mencapai realisasi terhadap target sebesar 70,07 persen dari target di tahun tersebut yang mencapai 255,84 Milyar.

Capaian penerimaan pajak Kabupaten Banyuwangi hingga dengan realisasi tahun 2018 secara keseluruhan progresif meningkat, meskipun realisasi terhadap target justru sebaliknya menurun setiap tahun. Catatan tersebut tidak terlepas dari cukup progresifnya peningkatan target yang diharapkan, dimana pertumbuhan realisasi setiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 21,89 persen tidak sebanding dengan tuntutan target penerimaan pajak yang meningkat dengan rata-rata 42,91 persen setiap tahunnya. Pada tahun 2019, target penerimaan pajak justru turun dari target tahun 2018. Namun di tahun 2020 hingga tahun 2021 meningkat pesat yang mencapai 277,98 Milyar di tahun 2020 dan 303,143 Milyar di tahun 2021. Melihat realisasi terakhir pada tahun 2018 dan disandingkan dengan target di tahun 2021, maka *tax effort* yang diperlukan Kabupaten Banyuwangi untuk mencapai target di tahun 2021 adalah mencapai 69,09 persen realisasi kinerja tahun 2018.

Berikut merupakan gambaran realisasi penerimaan retribusi hingga tahun 2018 dan target hingga tahun 2021:



Gambar 2.60. Target dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2016-2020

Gambaran realisasi penerimaan retribusi Kabupaten Banyuwangi dari tahun 2016 hingga tahun 2018 konsisten mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 realisasi penerimaan retribusi daerah mencapai 34,59 Milyar, kemudian meningkat tipis pada tahun 2017 mencapai 35,7 Milyar atau meningkat 3,2 persen. Sedangkan pada tahun 2018, realisasi penerimaan retribusi meningkat cukup pesat dari tahun 2017 hampir mencapai 10 Milyar di angka 45,4 Milyar atau meningkat 27,15 persen dari tahun 2017. Secara keseluruhan, realisasi penerimaan retribusi dari tahun 2016 hingga tahun 2018 meningkat 15,19 persen setiap tahunnya.

Capaian yang cukup positif dari realisasi penerimaan retribusi diatas bila merujuk terhadap target yang ditetapkan hanya tercapai di tahun 2016. Dimana realisasi mencapai 34,59 Milyar melebihi target yang ditetapkan di tahun 2016 yakni 32,39 Milyar. Namun capaian positif dari realisasi terhadap target penerimaan retribusi Kabupaten Banyuwangi hanya berhenti di tahun 2016. Berbeda dengan peningkatan positif realisasi tahun 2016 ke tahun 2017, realisasi terhadap target di tahun 2017 justru mengalami penurunan yakni mencapai 75,84 persen dari target yang ditetapkan yakni mencapai 47,08 Milyar. Begitu juga dengan realisasi terhadap target pada tahun 2018 yang meskipun mengalami peningkatan cukup pesat, namun belum bisa mencapai target yang ditetapkan di tahun 2018 yang cukup tinggi mencapai 75,06 Milyar.

Hingga tahun 2021, retribusi merupakan bentuk Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi yang ditargetkan meningkat. Hal tersebut tampak dari target retribusi yang mencapai 108,57 Milyar, yang mana angka tersebut mencapai 139,14 persen dari realisasi penerimaan retribusi di tahun 2018. Pertumbuhan realisasi yang rata-rata meningkat mencapai 15,19 persen pertahun, tidak mampu melesat seperti tuntutan target yang memiliki rata-rata peningkatan mencapai 52,39 per tahun.



BAB III: GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Penyusunan Gambaran Pengelolaan Keuangan daerah dilakukan untuk menganalisis capaian dan memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata.

Peraturan yang mendasari pengelolaan keuangan daerah bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggung jawab, adil, patut, dan bermanfaat. Kerangka pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi secara garis besar terdiri dari penyusunan anggaran daerah, penatausahaan dan pertanggungjawaban. Kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi perlu kembali dianalisis kondisi kinerja keuangannya (2011-2018), baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya.

Berdasarkan payung hukum yang melandasi dokumen RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2016-2021, maka mempertimbangkan PP 8 Tahun 2008 dan Permendagri 86 Tahun 2016 telah kuat untuk menjadi alasan urgensitas dilakukannya perubahan RPJMD tahun 2016-2021.

Pertimbangan mendasar yaitu hasil pengendalian dan evaluasi yang menunjukkan beberapa target keuangan maupun dari pengelolaan keuangan daerah yang ditemukan pada saat penyusunan RPJMD tahun 2016-2021 sangat jauh dari target maupun sudah jauh melampaui target dari RPJMD Kabupaten Banyuwangi, sebagai contoh dana perimbangan serta pembiayaan, mengingat pada kondisi keuangan banyak penyesuaian dana perimbangan yang sangat dinamis yang dipengaruhi oleh kebijakan dari pusat. Sehingga pada tahun tertentu mengalami laju pertumbuhan pendapatan yang menurun.

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Hak dan kewajiban daerah sebagaimana dimaksud diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintah daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa ruang lingkup keuangan daerah meliputi:

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan daerah;
4. Pengeluaran daerah;
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; serta
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Berdasarkan pada data kinerja keuangan tahun 2011 sampai dengan tahun 2018 yang diperoleh dari beberapa Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Pada sub pembahasan ini diuraikan perkembangan pendapatan dan belanja tidak langsung, proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan, dan gambaran realisasi belanja daerah.

A. Pendapatan

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Kapasitas Keuangan Daerah akan menentukan kemampuan pemerintah Daerah dalam menjalankan pembangunan dan pembiayaan.

Tabel 3. 1: Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

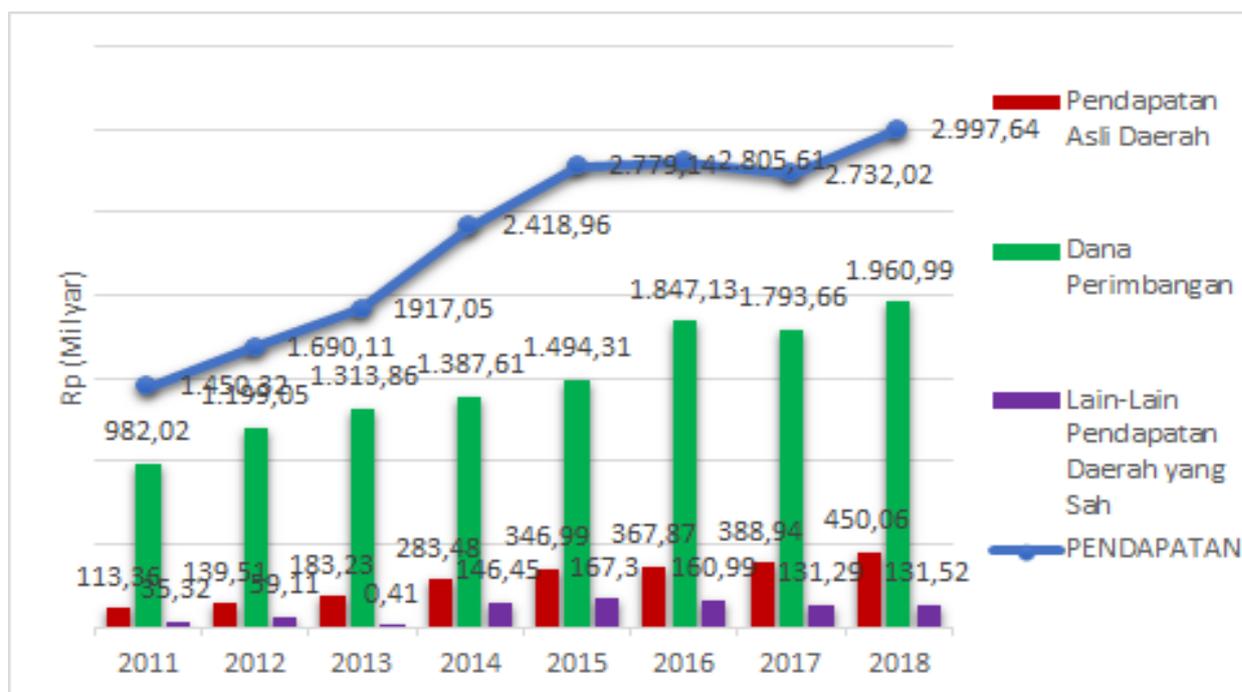
No	Uraian	2011 Rp dalam milyar	2012 Rp dalam milyar	2013 Rp dalam milyar	2014 Rp dalam milyar	2015 Rp dalam milyar	2016 Rp dalam milyar	2017 Rp dalam milyar	2018 Rp dalam milyar	Rata-rata Pertumbuhan 2011-2018
1	PENDAPATAN	1.450,32	1.690,11	1.917,05	2.418,96	2.779,14	2.805,61	2.732,02	2.997,64	11%
1,1	Pendapatan Asli Daerah	113,36	139,51	183,23	283,48	346,99	367,87	388,94	450,06	23%
1.1.1	Pajak daerah	32,44	40,28	65,93	94,13	115,90	120,82	152,81	178,91	29%
1.1.2	Retribusi daerah	21,62	24,81	28,65	67,27	31,29	34,59	35,70	45,46	22%
1.1.3	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	9,98	14,50	14,14	15,56	15,57	15,06	16,06	15,16	7%
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	49,31	59,90	74,50	106,51	184,21	197,38	184,32	210,51	10%
1,2	Dana Perimbangan	982,02	1.199,05	1.313,86	1.387,61	1.494,31	1.847,13	1.793,66	1.960,99	11%
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/bagi	84,95	101,18	82,37	85,07	78,91	89,41	73,02	161,49	16%

No	Uraian	2011 Rp dalam milyar	2012 Rp dalam milyar	2013 Rp dalam milyar	2014 Rp dalam milyar	2015 Rp dalam milyar	2016 Rp dalam milyar	2017 Rp dalam milyar	2018 Rp dalam milyar	Rata-rata Pertumbuhan 2011-2018
	hasil bukan pajak									
1.2.2	Dana alokasi umum	815,15	1.030,21	1.154,49	1.254,49	1.288,94	1.400,38	1.375,78	1.375,78	8%
1.2.3	Dana alokasi khusus	81,91	67,65	76,99	48,04	126,46	357,34	344,85	423,71	46%
1,3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	35,32	59,11	0,41	146,45	167,30	160,99	131,29	131,52	55%
1.3.1	Hibah	-	-	0,41	146,45	167,30	160,99	131,29	131,52	73%
1.3.2	Dana darurat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya ***)	87,62	82,42	95,56	161,29	157,87	169,19	207,35	203,20	15%
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus****)	231,98	210,00	293,36	304,28	451,40	174,38	179,68	242,20	8%
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	35,32	59,11	30,62	135,82	161,26	86,32	31,08	9,64	29%
1.3.6	Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Banyuwangi – LRA 2011-2018

Rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Banyuwangi selama kurun waktu 2011-2018 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun secara perilaku pertumbuhan pendapatan. Laju pertumbuhan pendapatan tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 pada rata-rata pertumbuhan 17.68%, sedangkan pada perilaku laju pertumbuhan 2016-2019 sebesar 3.45%. perkembangan pendapatan menurun hanya pada di tahun 2017. Dari Rp 2.805.619.073.707 di tahun 2016 turun menjadi Rp 2,732,022,666,956.37. Pada tahun 2018 meningkat kembali menjadi Rp 2.989.729.163.569,86.

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Banyuwangi setiap tahunnya mengalami kenaikan, tetapi pada tahun 2017 mengalami penurunan yang disebabkan dana transfer dari pusat menurun. Jika dilakukan analisis berdasarkan proporsi sumber pendapatan, sumber pendapatan yang paling dominan berasal dari dana perimbangan. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peringkat paling akhir. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan pembangunan di Kabupaten Banyuwangi masih bergantung pada pusat dan provinsi melalui bantuan dana perimbangan.



Gambar 3. 1: Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2011 - 2018

B. Belanja

Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Klasifikasi belanja menurut jenis belanja sebagaimana dimaksud terdiri dari:

1. Belanja pegawai;
2. Belanja bunga;
3. Belanja subsidi;
4. Belanja hibah;
5. Belanja bantuan sosial
6. Belanja bagi hasil kepada provinsi/ kabupaten/kota/ desa;
7. Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/ kota dan pemerintahan;
8. Belanja tidak terduga.

Sedangkan Belanja Langsung meliputi:

1. Belanja pegawai;
2. Belanja barang dan jasa;
3. Belanja modal.

Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran kinerja (*Performance budget*) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti belanja daerah harus berorientasi pada kepentingan publik.

Tabel 3. 2: Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011-2018

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-rata Pertumbuhan 2011- 2018
		Rp dalam milyar								
2	BELANJA	1.443,01	1.682,67	1.886,30	2.299,31	2.741,77	3.095,29	2.776,03	2.744,07	10%

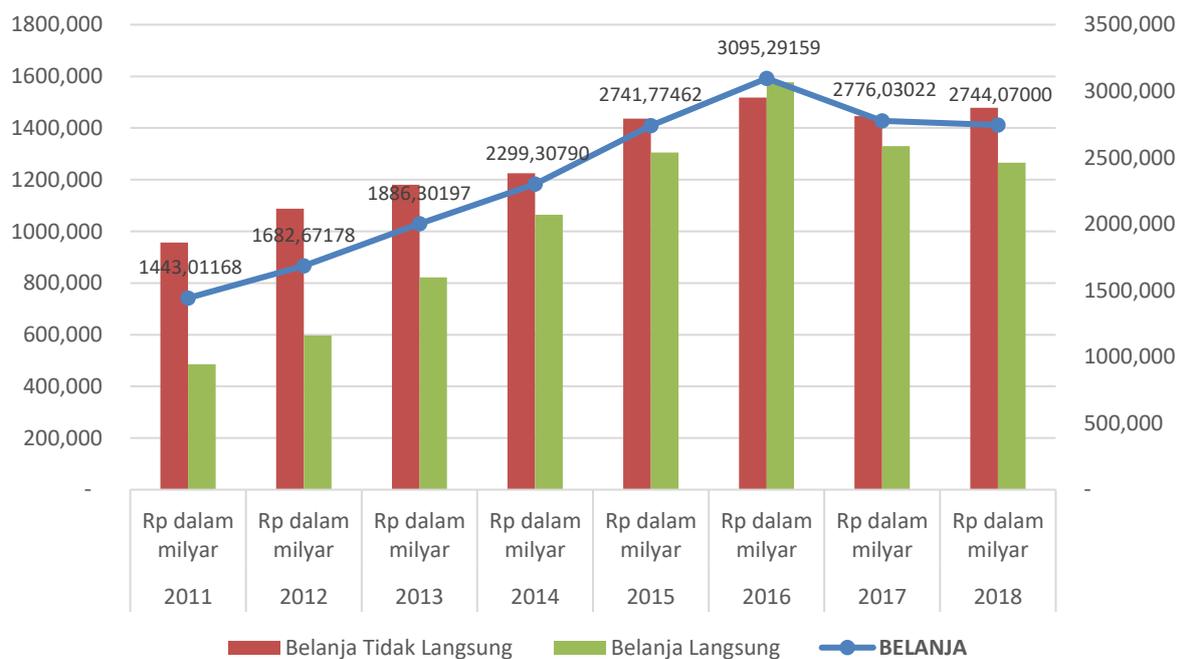
No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-rata Pertumbuhan 2011- 2018
		Rp dalam milyar								
02.01	Belanja Tidak Langsung	956,94	1.086,82	1.179,56	1.225,35	1.436,34	1.518,19	1.445,91	1.478,87	7%
02.01.01	Belanja Pegawai	791,46	919,88	1.005,72	1.078,91	1.167,83	1.209,91	1.017,87	1.067,56	5%
02.01.02	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-	-	14,83	-
02.01.03	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.04	Belanja Hibah	51,99	70,52	94,69	72,86	122,75	60,03	85,37	61,22	11%
02.01.05	Belanja Bantuan Sosial	64,72	22,83	11,27	-	6,13	8,06	3,95	7,39	6%
02.01.06	Belanja Bagi Hasil	0,04	1,78	1,02	3,17	2,32	2,44	7,32	11,42	61%
02.01.07	Belanja Bantuan Keuangan	47,13	71,80	66,85	70,41	137,29	236,80	328,45	316,43	36%
02.01.08	Belanja Tidak Terduga	1,60	-	-	-	-	0,94	2,95	-	-
										-
2,2	Belanja Langsung	486,08	595,85	706,74	1.063,93	1.305,43	1.577,10	1.330,12	1.265,19	16%
02.02.01	Belanja Pegawai	29,10	34,53	44,11	68,95	76,07	103,62	81,99	125,21	26%
02.02.02	Belanja Barang dan Jasa	206,13	205,83	257,77	436,43	529,94	561,90	591,05	672,7	20%
02.02.03	Belanja Modal	250,85	355,48	404,86	558,55	699,41	911,58	657,08	467,28	13%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Banyuwangi – LRA 2011-2018

Berdasarkan pada tabel 3.2 dapat dilihat bahwa selama periode 2011-2018 belanja tidak langsung lebih besar dibandingkan belanja langsung, setiap tahun mengalami peningkatan terutama pada komponen belanja pegawai. Peningkatan belanja daerah paling tinggi pada

tahun 2016. Tahun 2015 sebesar Rp 2.741.772.556.679,02, sedangkan pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp 3,095,291,585,672.53 Tahun 2017 belanja mengalami penurunan menjadi Rp 2,776,030,217,673.20. Penurunan ini diikuti dengan realisasi pendapatan daerah pada tahun 2017 juga menurun pada tahun 2018 naik menjadi Rp 2.744.070.679.505,27

Pengalokasian anggaran merupakan salah satu dukungan yang diberikan oleh pemerintah terhadap pembangunan yang dilaksanakan pada wilayahnya. Berdasarkan proporsi belanja pemerintah dapat dilihat apakah pengeluaran yang dilakukan pemerintah selama periode 2011-2018 lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan internal organisasi pemerintah atau pada kebutuhan diluar organisasi pemerintah.



Gambar 3. 2: Realisasi Belanja Daerah Tahun 2011 - 2018

C. Pembiayaan

Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Begitu pula dengan pengeluaran pembiayaan yaitu pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Sumber pembiayaan pemerintahan daerah dalam rangka perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diperoleh berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dengan

ditetapkannya kebijakan otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan di daerah dilaksanakan dengan lebih berorientasi kepada kepentingan daerah yang diimplementasikan dalam bentuk program kegiatan SKPD.

Tabel 3. 3: Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011-2018

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Rp dalam milyar							
PEMBIAYAAN								
Penerimaan Pembiayaan	221,23	228,54	201,93	227,69	334,49	371,77	82,11	255,35
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	221,23	228,54	201,93	227,69	334,49	371,77	82,11	38,10
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,20
Pengeluaran Pembiayaan	0,40	34,20	5,00	12,90	0,02	0,00	0,00	435,98
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	34,00	5,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank	0,40	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,98
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Banyuwangi – LRA 2011-2018

3.1.2 Neraca Daerah

Neraca Daerah menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada waktu tertentu. Laporan neraca daerah akan menggambarkan informasi penting kepada manajemen Pemerintah Daerah, Pihak Legislatif daerah maupun para kreditur/ pemberi pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada suatu tanggal tertentu. Pada setiap elemen utama dari neraca daerah akan diturunkan dalam beberapa sub-sub rekening yang lebih rinci. Perkembangan Neraca Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan rata-rata pertumbuhannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.4. Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Tahun 2016-2018

NO	URAIAN	Rata-Rata pertumbuhan
1	ASET	1%
2	ASET LANCAR	-7%
3	Kas di Kas Daerah	697%
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	144%
5	Kas di Bendahara Penerimaan	48%
6	Kas di BLUD	23%
7	Kas Lainnya	-27%
	Setara Kas	-35%
8	Investasi Jangka Pendek	0%
9	Piutang Pajak	19%
10	Piutang Retribusi	45%
11	Piutang Dana Bagi Hasil	-53%
12	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	39%
13	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0%

NO	URAIAN	Rata-Rata pertumbuhan
14	utang Pendapatan Lainnya	-1%
15	Piutang Lainnya	
16	Penyisihan Piutang	49%
17	Belanja Dibayar Dimuka	-1%
18	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0%
19	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	0%
20	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-4%
21	Persediaan	13%
20	Investasi Jangka Panjang	11%
21	Investasi Non permanen	-50%
22	Investasi Non permanen - Dana Bergulir	0%
23	Dana Bergulir Diragukan Tertagih	12%

NO	URAIAN	Rata-Rata pertumbuhan
24	Investasi Nonpermanen Lainnya	0%
26	Investasi Permanen	11%
27	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	11%
28	Investasi Permanen Lainnya	0%
31	ASET TETAP	3%
32	Tanah	0%
33	Peralatan dan Mesin	13%
34	Gedung dan Bangunan	9%
35	Jalan, Irigasi dan Jaringan	12%
36	Aset Tetap Lainnya	17%
37	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-30%
38	Akumulasi Penyusutan	14%
40	DANA CADANGAN	0%
43	ASET LAINNYA	-27%
44	Tagihan Penjualan Angsuran	0%
45	Tuntutan Ganti Rugi	0%
46	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	3%
47	Aset Tak Berwujud	16%
48	Aset Lain-Lain	-32%
49	Akun Amortisasi Aset Tak Berwujud	34%
52	KEWAJIBAN	388%
53	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	388%

NO	URAIAN	Rata-Rata pertumbuhan
54	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	-95%
55	Utang Bunga	0%
56	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0%
57	Pendapatan Diterima Dimuka	401%
58	Utang Belanja	1177%
59	Utang Jangka Pendek Lainnya	-47%
60	Utang Pajak	0%
62	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0%
63	Utang kepada Pemerintah Pusat	0%
64	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan	0%
65	Utang Dalam Negeri - Obligasi	0%
66	Premium (Diskonto) Obligasi	0%
67	Utang Jangka Panjang Lainnya	0%
70	EKUITAS	1%
72	KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1%

Sumber: Neraca Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2018

Aset memberikan memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dapat memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat maupun Pemerintah daerah dimasa yang akan datang. Aset terdiri atas aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya. Kewajiban merupakan dampak dari pelaksanaan tugas atau tanggung jawab yang terjadi dimasa lalu. Kewajiban memberikan informasi kepada pihak ketiga terhadap arus kas Pemerintah Daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas Dana meliputi Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi dan Ekuitas Dana Cadangan. Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana investasi merupakan selisih antara jumlah nilai investasi, aset tetap dan aset lainnya (tidak termasuk Dana cadangan) dengan jumlah nilai utang jangka panjang. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang diinvestasikan dalam dana cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang.

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah dalam perkembangannya dapat dianalisis berdasarkan tahun 2016-2018. Perubahan RPJMD ini juga dimaksudkan untuk melihat perilaku keuangan di pertengahan tahun RPJMD, untuk seberapa efektif perkembangan keuangan Kabupaten Banyuwangi. Kebijakan mulai dari pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pendapatan daerah – termasuk Pendapatan Asli Daerah – harus benar-benar mampu merespon perkembangan ekonomi yang diperkirakan akan terjadi. Upaya pengelolaan pendapatan daerah harus dilakukan dengan sebaik mungkin supaya dapat membawa perubahan yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan daerah, perlu adanya strategi koleksi dan pemetaan potensi penerimaan daerah baik yang bersumber dari pajak, retribusi maupun penerimaan lain-lain yang sah menurut perundang-undangan yang berlaku.

Aspek yang dapat mempengaruhi kebijakan pendapatan daerah antara lain adanya regulasi peraturan yang merupakan acuan yang dipakai dalam menggali penerimaan daerah dan struktur ekonomi/ sosial masyarakat yang sangat menentukan kemampuan masyarakat dalam membayar segala pungutan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Teknik yang digunakan untuk mengukur potensi harus lebih realistis yakni tidak hanya didasarkan pada keinginan untuk

senantiasa menaikkan pajak dan retribusi akan tetapi juga melihat aspek lain yang mempengaruhi kebijakan tersebut. Adapun kebijakan perencanaan pendapatan daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2016-2018 yang juga dipergunakan dalam penyusunan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2016-2018 antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja Perangkat Daerah bidang pendapatan (Dinas Pendapatan dan perangkat daerah terkait);
2. Perbaiki kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah antara lain peningkatan implementasi Sistem Informasi Online;
3. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi penggalan sumber-sumber pendapatan daerah, terutama melalui usaha daerah dan pendayagunaan aset daerah, termasuk pendapatan dari pihak ketiga;
4. Memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah;
5. Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah;
6. Meningkatkan pendataan terkait sumber daya alam sebagai salah satu komponen perhitungan dana perimbangan daerah;
7. Meningkatkan kualitas pelayanan dengan memberi kemudahan pada wajib pajak dan wajib retribusi melalui penyederhanaan prosedur dan kedekatan pelayanan;
8. Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran pajak dan retribusi daerah;
9. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam upaya peningkatan penerimaan dari Dana Perimbangan.

Sedangkan arah pengelolaan pendapatan Kabupaten Banyuwangi antara lain meliputi :

1. Kewenangan yang lebih luas dalam mengoptimalkan perolehan pendapatan daerah;
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi penggalan sumber-sumber pendapatan daerah, terutama melalui usaha daerah dan pendayagunaan aset daerah;
3. Peningkatan kemampuan dan optimalisasi organisasi di bidang pendapatan atau organisasi penghasil;
4. Perubahan manajemen keuangan dengan memberi peran lebih pada kas umum daerah;
5. Mendayagunakan dana melalui pola deposito.

Belanja daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja yang memihak kepentingan publik terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan ekonomis sesuai dengan prioritas, yang diharapkan

dapat memberikan dukungan program-program strategis. Namun lebih dari itu, belanja daerah diharapkan akan memprioritaskan terhadap belanja publik sebagai subyek dan obyek pembangunan daerah di Kabupaten Banyuwangi. Adapun kebijakan belanja daerah Kabupaten Banyuwangi pada Tahun Anggaran 2016-2018, antara lain adalah :

1. Mengalokasikan anggaran dana transfer ke daerah dan dana desa sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.
2. Mengalokasikan anggaran dana transfer ke daerah dan dana desa sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.
3. Mengupayakan alokasi anggaran untuk urusan kesehatan sebesar 10 persen sebagaimana amanat dari Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai salah satu wujud penyediaan kebutuhan dasar masyarakat dengan penyediaan alokasi anggaran untuk peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan yang dilaksanakan melalui pelayanan dasar di Puskesmas dan rujukan di RSUD Blambangan dan RSUD Genteng serta rujukan lanjutan pada RSUD milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
4. Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur yang meliputi infrastruktur di lingkup urusan pekerjaan umum, urusan perhubungan dan urusan lingkungan yang berfungsi sebagai daya dukung dalam pengembangan daerah, dan peningkatan perekonomian daerah.
5. Peningkatan program revitalisasi pertanian yang dilaksanakan dengan meningkatkan produktivitas per satuan hektar dengan diiringi peningkatan kesejahteraan petani. Revitalisasi pertanian dalam skala yang luas (komponen pendukung bidang pertanian) ini meliputi upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian dengan optimalisasi panca usaha pertanian dan pengolahan pasca panen.
6. Peningkatan aktivitas perekonomian melalui pemberdayaan koperasi dan UMKM sehingga memiliki daya saing, yang sekaligus seiring dengan upaya penyediaan lapangan pekerjaan dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
7. Pengembangan Pariwisata dan pelestarian budaya dengan tetap memegang teguh kearifan lokal dan berkelanjutan sehingga dapat tampil (exis) dan berkontribusi dalam pengembangan pariwisata dan pelestarian budaya di kancah nasional dan internasional yang tentunya akan berkontribusi dalam peningkatan perekonomian daerah.

8. Pengembangan Pariwisata dan pelestarian budaya dengan tetap memegang teguh kearifan lokal dan berkelanjutan difokuskan pada upaya terlaksananya *Destination Branding* dan *Integrated Marketing* untuk menguatkan peran dalam konstelasi nasional dan internasional untuk tetap menjaga komitmen sebagai lokomotif pertumbuhan perekonomian daerah.
9. Pengendalian Lingkungan Hidup dan Tata Ruang, dilaksanakan dalam kerangka pelaksanaan program Pro environment, yang diarahkan pada pengelolaan sumber daya alam yang mengikuti prinsip pengelolaan yang lestari terhadap lingkungan. Penyediaan Fasilitas Umum juga mendapatkan perhatian berupa Ruang Terbuka Hijau sebagaimana diamanatkan perundang-undangan yang berfungsi antara lain untuk estetika dan kelestarian lingkungan hidup serta edukasi.
10. Pengalokasian anggaran untuk dana desa, kesehatan, infrastruktur, pertanian, pemberdayaan koperasi dan UMKM, pariwisata dan kebudayaan, serta lingkungan hidup dan tata ruang menjadi arah kebijakan belanja daerah

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan penerimaan pembiayaan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan anggaran daerah sebagai balancing pendapatan daerah dan belanja daerah antara lain :

1. Penganggaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2016 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2016 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2016.
2. Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.
3. Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.
4. Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah.

Penghitungan cermat dan rasional dalam penganggaran SiLPA, penetapan anggaran pembiayaan serta pinjaman daerah berdasarkan peraturan daerah menjadi kebijakan penerimaan pembiayaan daerah.

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan tujuan untuk penyediaan anggaran untuk kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya dan untuk peningkatan pendapatan daerah melalui penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah serta untuk memenuhi pembayaran pokok utang yang telah sesuai dengan waktu dan besaran yang telah ditetapkan sehingga terdapat keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah.

Pengeluaran pembiayaan dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut:

1. Menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir sesuai Pasal 118 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penganggaran dana bergulir dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir kepada kelompok masyarakat penerima.
2. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal.
3. Pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang.
4. Dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Masyarakat Kecil dan Menengah (UMKM), pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal kepada bank perkreditan rakyat milik pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Bagian laba bersih PDAM harus diinvestasikan kembali untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, baik fisik maupun non fisik serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan.
6. Untuk menganggarkan dana cadangan, pemerintah daerah harus menetapkan terlebih dahulu peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan yang mengatur tujuan pembentukan

dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan.

7. Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Menurut Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD mempunyai fungsi berikut ini:

1. Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan;
2. Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan;
3. Fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
4. Fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian;
5. Fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
6. Fungsi stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaran Pemerintah Daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui suatu sistem yang terintegrasi dalam rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai pada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, Pemerintah Daerah telah menyampaikan pertanggungjawaban yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK). Namun dalam penyusunan

data yang digunakan terkait dengan APBD Tahun 2014-2018 adalah data APBD yang sudah diaudit oleh BPK, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Pertanggungjawaban APBD. Penggunaan anggaran adalah istilah yang digunakan pada peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah Indonesia yang merujuk pada pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran yang berada di kementerian, lembaga, bagian dari satuan kerja perangkat daerah atau pejabat yang disamakan pada institusi pengguna Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kondisi proporsi penggunaan anggaran di Kabupaten Banyuwangi terhitung dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 relatif mengalami penurunan, hal ini sepintas memperlihatkan bahwa APBD Kabupaten Banyuwangi masih belum memberikan pelayanan yang optimal bagi publik karena sebagian besar APBD Kabupaten Banyuwangi digunakan untuk belanja pegawai. Berikut tabel mengenai analisis proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Banyuwangi tahun 2016-2018:

Tabel 3.5. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase
		(a)	(b)	(a)/ (b) x 100%
1	Tahun anggaran 2016	1.313.530.781.769,91	3.095.291.585.672,53	42%
2	Tahun anggaran 2017	1.099.860.795.452,07	2.776.030.217.673,20	40%
3	Tahun anggaran 2018	1.185.271.560.490,67	2.753.665.811.332,60	43%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2016-2018

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Dalam menyalurkan surplus dan menutup defisit, dalam penganggaran dikenal adanya pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Begitu pula dengan pengeluaran pembiayaan yaitu pengeluaran yang

akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Berikut merupakan tabel berkenaan dengan defisit riil anggaran Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 sampai dengan tahun 2018:

Tabel 3.6. Defisit Riil Anggaran Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011-2018

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		(Rp) dalam milyar	(Rp) dalam milyar	(Rp) dalam milyar	(Rp) dalam milyar	(Rp) dalam milyar	(Rp) dalam milyar	(Rp) dalam milyar	(Rp) dalam milyar
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1.450,32	1.690,11	1.917,05	2.418,96	2.779,14	2.805,61	2.732,02	2.997,64
	Dikurangi realisasi:	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Belanja Daerah	1.443,01	1.682,67	1.886,30	2.299,31	2.741,77	3.095,29	2.776,03	2.744,07
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0,40	34,20	5,00	12,90	0,02	0,00	0,00	435,98
A	Defisit riil	6,91	-26,76	25,75	106,75	37,35	-289,68	-44,01	-182,41
	Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	221,23	228,54	201,93	227,69	334,49	371,77	82,11	38,10
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-	217,20
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	221,23	228,54	201,93	227,69	334,49	371,77	82,11	255,35
A-B	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	228,14	201,77	227,68	334,44	371,84	82,10	38,10	65,07

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Banyuwangi

Kondisi demikian menggambarkan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi cukup kuat untuk membiayai belanja langsung dan belanja tidak langsung. SILPA menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Berkaitan dengan

keberadaan SiLPA (sisa lebih pembiayaan anggaran) tersebut dapat bermakna positif ataupun negatif. Bermakna positif jika SiLPA tersebut merupakan hasil dari efektifnya penerimaan PAD sehingga terjadi *over target* dan dibarengi oleh efisiensi anggaran belanja pemerintah daerah. Sedangkan SiLPA bermakna negatif bila berasal dari tertundanya belanja langsung program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah. SiLPA yang terdapat pada APBD Kabupaten Banyuwangi sebagian besar berasal dari tertundanya belanja langsung program dan Kegiatan. Hasil evaluasi terhadap SiLPA tersebut diharapkan dapat menjadi rencana kedepan agar Kabupaten Banyuwangi dapat secara efektif menjalankan program yang telah direncanakan sehingga jumlah SiLPA Kabupaten Banyuwangi dapat diperkecil.

Tabel 3.7. Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011-2018

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
	Defisit Riil								
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	221,23	228,54	201,93	227,69	334,49	371,77	82,11	38,10
2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,20
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran 2011 – 2018 Kabupaten Banyuwangi, diolah

3.3 Kerangka Pendanaan

Kebijakan anggaran merupakan acuan umum dari Rencana Kerja Pembangunan dan merupakan bagian dari perencanaan operasional anggaran dan alokasi sumberdaya, sementara itu kebijakan keuangan daerah diarahkan pada kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatan pada pengelolaan pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan efisien. Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat ditujukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran. Kerangka pendanaan dirancang secara efisien untuk mencapai tujuan reformasi birokrasi secara umum baik dalam konteks efektifitas kinerja aparatur (birokrasi) maupun efisiensi anggaran pendanaan pemerintah daerah berupa pengurangan anggaran insentif.

3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Kapasitas kemampuan keuangan daerah Kabupaten Banyuwangi diharapkan semakin meningkat. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa laju pertumbuhan pendapatan daerah meningkat dan terjadi peningkatan efektivitas penggunaan belanja daerah. Proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Banyuwangi memberikan informasi mengenai pendapatan daerah yang diperkirakan dapat dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2021. Pertimbangan utama yang dijadikan sebagai dasar dalam melakukan proyeksi adalah analisis trend yang didasarkan pada data historis dalam 5 tahun terakhir pada masing-masing obyek pendapatan. Selain menggunakan pertimbangan hasil analisis trend, proyeksi dirumuskan dengan mempertimbangkan kecenderungan pencapaian dan pertumbuhan pendapatan di Kabupaten Banyuwangi, kebijakan terkait dengan pendapatan daerah, serta kondisi ekonomi makro yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi, sehingga diharapkan hasil dari proyeksi tersebut lebih realistis.

Tabel 3.8. Proyeksi Keuangan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019-2021 (Pendapatan)

No	Uraian	Proyeksi Tahun 2019	Proyeksi Tahun 2020	Proyeksi Tahun 2021
		RPJMD Perubahan Rp	RPJMD Perubahan Rp	RPJMD Perubahan Rp
1	PENDAPATAN	3,212,142,580,779.46	3.177.067.116.526,79	3.282.672.395.026,07
1.1	Pendapatan Asli Daerah	517,576,991,597.46	595.213.540.337,08	683.963.291.429,07
1.1.1	Pajak daerah	209,864,573,340.00	241.344.259.341,00	277.545.898.242,15
1.1.2	Retribusi daerah	55,846,898,733.00	64.223.933.542,95	73.857.523.574,39
1.1.3	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	15,602,369,000.00	17.942.724.350,00	20.101.853.043,93
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	236,263,150,524.46	271.702.623.103,13	312.458.016.568,60
1.2	Dana Perimbangan	2,104,898,406,660.00	2.092.750.760.000,00	2.092.750.760.000,00
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	193,598,999,660.00	181.451.353.000,00	181.451.353.000,00
1.2.2	Dana alokasi umum	1,438,046,053,000.00	1.438.046.053.000,00	1.438.046.053.000,00
1.2.3	Dana alokasi khusus	473,253,354,000.00	473.253.354.000,00	473.253.354.000,00
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	589,667,182,522.00	489.102.816.189,71	505.958.343.597,00
1.3.1	Hibah	124,614,160,000.00	107.758.632.592,71	107.758.632.592,71
1.3.2	Dana darurat	-	-	-
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya (***)	184,272,146,022.00	108.660.362.597,00	125.515.890.004,29
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus****)	272,683,821,000.00	272.683.821.000,00	272.683.821.000,00
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	8,097,055,500.00	-	-

Tabel 3.9. Proyeksi Keuangan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019-2021 (Belanja)

No	Uraian	Proyeksi Tahun 2019	Proyeksi Tahun 2020	Proyeksi Tahun 2021
		RPJMD Perubahan Rp	RPJMD Perubahan Rp	RPJMD Perubahan Rp
2	BELANJA	3.277.230.931.860,80	3.177.067.116.526,79	3.282.672.395.026,06
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.691.589.920.850,80	1.820.193.977.607,73	1.885.529.151.911,62
2.1.1	Belanja Pegawai	1.164.407.874.041,14	1.315.724.361.706,99	1.348.617.470.749,67
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	77.103.400.000,00	52.371.908.839,54	37.975.520.822,55
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	40.498.860.026,63	12.058.146.558,80	13.472.614.001,40
2.1.6	Belanja Bagi Hasil	26.438.110.953,03	17.805.642.517,40	21.189.181.858,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	378.141.675.830,00	417.738.154.085,00	458.872.386.880,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	4.495.763.900,00	5.401.977.600,00
2.2	Belanja Langsung	1.585.641.011.010,00	1.356.873.138.919,06	1.397.143.243.114,45
2.2.1	Belanja Pegawai	85.993.848.060,00	112.711.508.423,81	118.445.473.746,43
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	888.474.381.200,00	795.320.200.168,10	840.375.866.605,15
2.2.3	Belanja Modal	611.172.781.750,00	448.841.430.327,15	438.321.902.762,86

Tabel 3.10. Proyeksi Keuangan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019-2021 (Pembiayaan)

No	Uraian	Proyeksi Tahun 2019 RPJMD Perubahan	Proyeksi Tahun 2020 RPJMD Perubahan	Proyeksi Tahun 2021 RPJMD Perubahan
3	PEMBIAYAAN	65,088,351,081.34	-	-
3.1	Penerimaan Pembiayaan	65,088,351,081.34	-	-
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	65,077,851,081.34	-	-
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	10,500,000.00	-	-
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	-	-
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-

3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Penghitungan kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program sisa tahun pembangunan selama 3 tahun ke depan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan sebagaimana yang dihitung dan disajikan pada bagian awal sub bab ini. Kapasitas riil keuangan daerah merupakan

total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Tabel 3.11. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah

No	Uraian	Proyeksi		
		2019	2020	2021
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pendapatan	3,212,142,580,779.46	3.177.067.116.526,79	3.282.672.395.026,07
2	Pencairan Dana Cadangan (sesuai Perda)	-	-	-
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	65,088,351,081.34	-	-
	Total Penerimaan	3,277,230,931,860.80	3.177.067.116.526,79	3.282.672.395.026,07
	Dikurangi:			
1	Belanja Tidak Langsung	1.691.589.920.850,80	1.820.193.977.607,73	1.885.529.151.911,62
2	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	1.585.641.011.010,00	1.356.873.138.919,06	1.397.143.243.114,45

Sumber: Perhitungan dan Proyeksi Laporan Realisasi Anggaran Daerah Tahun 2019-2021

**Tabel 3.12. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai
Pembangunan Daerah**

No	Uraian	Proyeksi		
		2019	2020	2021
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Kapasitas riil kemampuan keuangan	1.585.641.011.010,00	1.356.873.138.919,06	1.397.143.243.114,45
1.1	Prioritas I	1.180.800.833.439,05	996.113.439.962,00	991.402.876.497,00
1.2	Prioritas II	164.385.121.243,90	142.201.856.905,00	163.364.021.377,00
1.3	Prioritas III	240.455.056.327,05	218.557.842.052,06	242.376.345.240,45

APBD merupakan salah satu komponen penting dalam meningkatkan pembangunan di daerah. Berdasar UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwasannya pemerintah daerah diberikan keleluasaan dan memiliki modal yang cukup besar dalam membangun daerahnya, termasuk mengelola aset, mengatur usaha daerah dan meningkatkan pendapatan di daerah yang lebih dikenal dengan desentralisasi.

Pada dasarnya adanya undang-undang tersebut tidaklah serta-merta mewajibkan daerah memenuhi kebutuhan secara mandiri. Namun setidaknya-tidaknya setiap daerah bisa memaksimalkan potensi melalui inovasi-inovasi kebijakan yang sekiranya tepat dan terarah ketika diterapkan di daerah.

Banyuwangi merupakan salah satu kabupaten dengan potensi SDM, SDA maupun potensi ekonomi cukup besar. Pada Tahun 2019, target pendapatan asli daerah (PAD) diproyeksikan Rp. 571,69 milyar, naik sebesar 125 Miliar atau 28% dari Tahun 2018 sebesar 446,065 Miliar. Dengan besaran penyerapan APBD tersebut, mengindikasikan bahwasannya pembiayaan untuk pembangunan di Kabupaten Banyuwangi berkembang dengan pesat. Namun, besaran penyerapan APBD ini harus diimbangi dengan visi yang jelas sehingga mampu mewujudkan pembangunan secara inklusif sehingga semua potensi yang ada di daerah mampu diberdayakan.

Namun pembangunan Kabupaten Banyuwangi tidak bisa maksimal kalau hanya mengandalkan APBD, apalagi Kabupaten Banyuwangi adalah daerah yang paling luas di Pulau Jawa. Untuk itu, pembangunan yang hanya mengandalkan program-program dari pemerintah dirasa kurang maksimal. Hal ini tidak lain karena tanggung jawab dan pendanaan untuk membangun daerah tidak semata-mata dibebankan kepada pemerintah, tetapi ada beberapa

stakeholder (perusahaan-perusahaan swasta dan BUMN/BUMD) yang turut andil dalam mengatasi permasalahan tersebut melalui CSR (pembeayaan dari non-APBD).

Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2014 menyebutkan bahwasannya dalam membangun utamanya memberdayakan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan merupakan aktivitas yang sinergis antara pemerintah dengan dunia usaha. Maksudnya pemerintah tidak bisa berjalan sendiri dalam memberdayakan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan, sehingga diperlukan adanya sinergisitas antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha sehingga program yang direncanakan dan diimplementasikan bisa terwujud secara maksimal.

Bentuk alternatif pembiayaan pembangunan yang diperoleh dari sumber dana non APBD diantaranya :

1. Usaha Pemerintah dalam memberdayakan masyarakat diantaranya melaksanakan sinergitas dengan Badan Zakat Nasional (BAZNAS) Banyuwangi. BAZNAS Banyuwangi bersinergi dengan Pemkab Banyuwangi mendukung Program Banyuwangi Peduli, Banyuwangi Makmur, Banyuwangi Cerdas, Banyuwangi Sehat dan Banyuwangi Taqwa. Dana yang sudah terkumpul dari BAZNAS Banyuwangi untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat diantaranya :
Tahun 2013 = Rp. 1,78 Milyar
Tahun 2014 = Rp. 1,83 Milyar
Tahun 2015 = Rp. 1,95 Milyar
Tahun 2016 = Rp. 1,95 Milyar
Tahun 2017 = Rp. 2,2 Milyar
Tahun 2018 = Rp. 2,43 Milyar
2. Partisipasi swasta/perusahaan/BUMN/BUMD dalam mendukung program pemerintah terutama penyelenggaraan Banyuwangi Festival dan Program Pemberdayaan Masyarakat.
3. Kemitraan Pemerintah Daerah dengan Lembaga *Internasional National Support For Local Investment Climate / National Support For Regional Economic Development (NSLIC/NSLRED) Responsive Innovation Fund (RIF)* melalui fasilitasi dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / BAPPENAS dalam menyediakan dukungan teknis terhadap Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) di Kawasan Ijen Tourism Cluster (ITC) yang berada di Kecamatan Licin, Kecamatan Glagah dan Kecamatan Kalipuro.

BAB IV: PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

4.1 Permasalahan Pembangunan

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang tidak bisa terlepas dari segala perubahan tata kehidupan nasional dalam berbagai aspek. Tiap aspek didalam tata kehidupan nasional maupun skala daerah relatif berubah menurut waktu, ruang dan lingkungan terutama pada aspek-aspek dinamis. Respon yang efektif terhadap dinamika perubahan terutama untuk menghadapi tantangan potensial dan menangkap peluang sangat penting agar cita-cita dan harapan bersama untuk mewujudkan masa depan lebih baik bagi Kabupaten Banyuwangi kedepannya. Tantangan dan ancaman sebagai permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Oleh karena itu tahap identifikasi masalah sangat berperan penting dalam proses perencanaan sebelum melakukan rangkaian tindakan atau kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dan disepakati bersama dalam rangka penyelesaian masalah tersebut. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari PD.

Penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Banyuwangi waktu beberapa tahun terakhir telah membuahkan hasil yang diharapkan, tetapi untuk pembangunan kedepan masih terdapat permasalahan dan tantangan dari berbagai dimensi pembangunan. Berbagai permasalahan yang dihadapi Kabupaten Banyuwangi dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal yang terjadi sebagai dampak interaksi dan dinamika perkembangan berbagai sektor baik pada skala lokal kabupaten, provinsi maupun nasional. Permasalahan–permasalahan tersebut timbul karena kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, adanya kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Hal utama yang menjadi pertimbangan mendasar adalah hasil pengendalian dan evaluasi yang menunjukkan beberapa isu-isu yang ditemukan pada saat penyusunan Perubahan RPJMD tahun 2016-2021 yang semula mendesak untuk diselesaikan, telah tuntas pada tahun sebelumnya. Namun ada pula temuan dari hasil evaluasi yang menunjukkan munculnya isu-isu baru yang mendesak untuk dituntaskan hingga akhir periode RPJMD 2021. Dengan memperhatikan analisis kinerja, dan telaah-telaah pada bab sebelumnya, sehingga memunculkan beberapa permasalahan pembangunan daerah yang menjadi prioritas pembangunan jangka menengah pada Perubahan RPJMD ini. Permasalahan pembangunan daerah yang ada di Kabupaten Banyuwangi dapat dijabarkan sebagai berikut:

4.1.1 Permasalahan Pembangunan Sumber Daya Manusia

Pendidikan dan Kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kecenderungan rendahnya kebutuhan dasar ini dapat dilihat dari bidang pendidikan yaitu masih rendahnya akses dan kualitas masyarakat terhadap layanan pendidikan. Pendidikan merupakan proses mencetak generasi penerus bangsa yang berkualitas. Indonesia adalah salah satu Negara berkembang di dunia yang masih mempunyai masalah besar dalam dunia pendidikan. Kita mempunyai tujuan bernegara "mencerdaskan kehidupan bangsa" yang seharusnya jadi sumbu perkembangan pembangunan kesejahteraan dan kebudayaan bangsa. Yang kita rasakan sekarang adalah adanya ketertinggalan didalam akses dan mutu pendidikan. Rendahnya akses dan mutu pendidikan menghambat penyediaan sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dan keterampilan untuk memenuhi pembangunan bangsa di berbagai bidang.

Banyak faktor dan masalah yang menyebabkan pendidikan di Kabupaten Banyuwangi belum berkembang optimal, diantaranya: Pendidikan menjadi sulit bagi mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan. Mayoritas penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan mengakibatkan terbengkalainya mereka dalam hal pendidikan. Selain kemauan mereka yang tidak pernah tumbuh dan sadar akan pendidikan, faktor ekonomi menjadi alasan utama mereka untuk tidak menyentuh dunia pendidikan. Disisi lain yang menjadi permasalahan pendidikan adalah fasilitas pendidikan yang masih kurang memadai. Banyak sekolah-sekolah yang bangunannya sudah hampir rubuh, tidak memiliki fasilitas penunjang seperti meja belajar, buku, perlengkapan teknologi, dan alat-alat penunjang lainnya.

Sedangkan pada bidang kesehatan dapat dilihat juga pada belum optimalnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar, masih banyak ditemukan fasilitas-fasilitas kesehatan yang belum terakreditasi, kualitas layanan kesehatan rumah sakit masih rendah serta akses dan kualitas lingkungan sehat juga masih dikategorikan rendah. Fasilitas kesehatan masih menjadi isu yang perlu perhatian terus oleh Kabupaten Banyuwangi karena fasilitas kesehatan primer terakreditasi dan persentase fasilitas kesehatan rujukan terakreditasi belum mencapai target yang ditetapkan. Akreditasi kesehatan sangat penting mengingat cerminan dari mutu pelayanan dari kesehatan. Sehingga akreditasi perlu ditingkatkan dan pemerataan untuk seluruh fasilitas kesehatan di Kabupaten Banyuwangi.

4.1.2 Permasalahan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

Sebagai upaya dalam melihat kinerja perekonomian sebuah daerah terdapat dua perspektif yang berbeda yang meliputi pertumbuhan ekonomi yang direpresentasikan melalui pertumbuhan PDRB Kabupaten Banyuwangi dan perspektif pemerataan. Dalam hal ini pertumbuhan perekonomian Banyuwangi selama kurun waktu 2016-2017 yakni dimana pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi tumbuh diangka 6,01%, namun capaian tersebut melambat jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang tumbuh mencapai 6,13%. Pelambatan pertumbuhan ekonomi juga terjadi pada tahun 2017, bahkan pertumbuhan ekonomi melambat pada angka 5,6%. Permasalahan melambatnya pertumbuhan ekonomi ini tentu melibatkan berbagai sektor yang perlu diprioritaskan intervensinya. Sedangkan dalam PDRB terdapat subsector yang mengalami perlambatan yaitu subsector pertanian. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam penanganan program pertanian kedepan.

Untuk konteks infrastruktur di suatu wilayah terdapat Aspek Daya Saing Daerah yang meningkat tentunya dapat menarik pelaku ekonomi atau investor dalam menginvestasikannya di Kabupaten Banyuwangi. Tetapi di Kabupaten Banyuwangi khususnya dalam pelayanan infrastruktur jalan dan sarana-Prasarana masih perlu ditingkatkan. Namun yang perlu diperhatikan dan tentunya ditelaah realisasi capaiannya adalah dari total Panjang jalan kabupaten tersebut, berapa persen jalan dengan kualitas baik dan buruk. Dimana Kabupaten Banyuwangi ini adalah salah satu wilayah yang merupakan gerbang masuknya wisatawan ke pulau Bali dengan pelabuhan Ketapang merupakan salah satunya jadi pemerintah harus bisa memanfaatkan hal tersebut.

Kabupaten Banyuwangi merupakan wilayah yang di kelilingi oleh pegunungan dan pantai juga merupakan wilayah rawan bencana gunung meletus, puting beliung maupun bencana kebakaran maka dari itu pemerintah harus memperhatikan hal tersebut dengan melakukan pembangunan sistem dalam penanggulangan bencana alam. Maka demikian dengan adanya sistem manajemen pelayanan penanggulangan bencana dapat mempermudah dalam penanganan korban jiwa bencana alam yang harus di dukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dapat menjadikan sistem yang maksimal.

4.1.3 Permasalahan Kesejahteraan Masyarakat

Pada Urusan Sosial dan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dengan luas wilayah Kabupaten Banyuwangi 5782 km² dan dikategorikan sangat luas oleh karena itu dapat terjadi potensi kesalahan dalam pendataan PMKS. Selain itu dengan luasnya luas wilayah Banyuwangi disbanding dengan jumlah sarana prasarana social yang tersedia dirasa akan tidak memadai apabila tidak dikelola dengan baik. Belum lagi permasalahan PMKS yang berasal dari luar daerah Kabupaten Banyuwangi juga perlu penanganan serius dan sinergi yang baik antara Kabupaten Banyuwangi dengan daerah lain. Seperti pada bidang ketertiban umum masih ditemukannya kekurangan kesiagaan dan ketanggapan akan bahaya serta adanya potensi gangguan tantribum yang dikategorikan tinggi. Hal ini dapat mengakibatkan penanganan PMKS yang semakin meluas yang akhirnya dapat memperburuk ketertiban umum. Pada Urusan Tenaga Kerja terdapat permasalahan karena terdapat peningkatan pada angka angka Pengangguran Terbuka pada tahun 2018. Dan tentunya ini menjadi prioritas yang harus diselesaikan pada sisa pembangunan daerah periode RPJMD ini.

4.1.4 Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Selain infrastruktur dalam pencapaian Daya Saing Daerah Kabupaten Banyuwangi juga harus mengoptimalkan penyediaan fasilitas publik dan infrastruktur sebagai pendukung perekonomian daerah Kabupaten Banyuwangi, seperti pembangunan hotel dan juga pengoptimalan Mall Pelayanan Publik yang sudah di terapkan di Kabupaten Banyuwangi. Dimana Kabupaten Banyuwangi mempunyai banyak potensi agar dapat meningkatkan perekonomian di daerah tersebut seperti salah satunya yaitu potensi pariwisata yang dapat meningkatkan APBD Kabupaten Banyuwangi jadi pemerintah perlu mengoptimalisasi pembangunan pariwisata seperti pembangunan akses jalan, fasilitas mck, dan peningkatan kebersihan lingkungan. Dengan adanya penyediaan pembangunan tersebut dapat mendukung

perekonomian dan daya saing daerah terhadap proses pengoptimalan Kabupaten Banyuwangi agar menjadi lebih baik lagi.

Wilayah perdesaan menjadi isu yang sangat penting untuk diakomodir terutama dalam segi SDM yang berada di pedesaan. Dikarenakan wilayah Kabupaten Banyuwangi yang sangat luas dan sebagian besar masyarakat berada di wilayah perdesaan, maka dari itu pengembangan SDM di pedesaan sangat penting dalam peningkatan daya saing daerah, Disamping peran strategis pembangunan desa tetapi pelayanan yang bersentuhan dengan masyarakat desa sangat penting, sehingga permasalahan yang ada di wilayah perdesaan perlu diprioritaskan penyelesaiannya mulai dari kapasitas SDM di desa menjadi sangat penting untuk ditingkatkan di Kabupaten Banyuwangi serta peningkatan pemberdayaan masyarakat di perdesaan masih belum berjalan optimal. Hal ini dapat disebabkan oleh minimnya kapasitas kelembagaan di desa sehingga kualitas pengelolaan desa menjadi tidak begitu efektif dan efisien. Oleh karena itu, perluasan jangkauan pelayanan melalui peningkatan pelayanan dasar, terutama juga pengembangan pelayanan berbasis IT perlu untuk diupayakan pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi dalam rangka mengoptimalkan berjalannya pengembangan potensi di desa.

4.2 Isu Strategis

4.2.1 Isu Internasional

Melenium Development Goals atau biasa kita kenal dengan MDG`s merupakan komitmen dari 189 negara untuk tujuan pembangunan yang lebih baik, yang dicanangkan mulai September 2000 hingga 2015 telah dianggap gagal. Melalui deklarasi MDGs isu yang dibangun dan harus dicapai pada tahun 2015 adalah kesejahteraan masyarakat dan pembangunan masyarakat. Menindak lanjuti hal tersebut, munculah *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang merupakan komitmen baru oleh berbagai negara dengan menargetkan 3 tujuan mulia yang dicapai ditahun 2030 yakni mengakhiri kemiskinan, mengatasi dan menekan kesenjangan, serta mengatasi perubahan iklim.



Gambar 4.1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

- a) Tanpa Kemiskinan: Pengentasan segala bentuk kemiskinan di semua tempat
- b) Tanpa Kelaparan: Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan
- c) Kehidupan sehat dan sejahtera: Menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia
- d) Pendidikan Berkualitas: Memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang
- e) Kesenjangan Gender: Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan
- f) Air Bersih dan Sanitasi Layak: Menjamin akses atas air dan sanitasi untuk semua
- g) Energi Bersih dan Terjangkau: Memastikan akses pada energi yang terjangkau, bisa diandalkan, berkelanjutan dan modern untuk semua
- h) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi: Mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, lapangan pekerjaan dan pekerjaan yang layak untuk semua

- i) Industri, Inoveasi, dan Infrastruktur: Membangun infrastruktur kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan dan mendorong inovasi
- j) Berkurangnya Kesenjangan: Membangun infrastruktur kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan dan mendorong inovasi
- k) Kota dan Komunitas Berkelanjutan: Membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan
- l) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab: Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan
- m) Penanganan Perubahan Iklim: Mengambil langkah penting untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya
- n) Ekosistem Laut: Pelindungan dan penggunaan samudera, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan
- o) Ekosistem Darat: Mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi gurun, menghentikan dan merehabilitasi kerusakan lahan, menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati.
- p) Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh: Mendorong masyarakat adil, damai, dan inklusif
- q) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan: Menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan

Berikut merupakan konektivitas antara pilar dan tujuan pembangunan berkelanjutan menurut Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia:



Gambar 4. 2. Konektivitas Antar Pilar dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Sebagai upaya dalam mencapai 17 tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut, maka selanjutnya DNA SDGs harus diintegrasikan terhadap setiap arah pembangunan baik Kabupaten / Kota, Provinsi, dan Nasional. Untuk itu diamanatkan dalam Permendagri 86 Tahun 2017, bahwa sebagai upaya untuk memastikan SDGs telah menjadi dasar dan isu yang harus diperhatikan dalam pembangunan, maka penelaahan KLHS RPJMD sebagai bagian penting dalam tahapan penyusunan isu-isu strategis.

Revolusi industri merupakan titik tolak perubahan industry secara fundamental dikenal dengan revolusi industry 1.0, 2.0, 3.0, dan 4.0.

Revolusi 1.0 atau revolusi pertama dimulai pada akhir abad ke 18 dengan ditandai ditemukannya alat tenun mekanis pertama pada tahun 1784. Kala itu, industry diperkenalkan dengan fasilitas produksi mekanis menggunakan tenaga air dan uap. Pada revolusi industry pertama, proses industry yang awalnya membutuhkan tenaga manusia dan hewan, digantikan dengan mesin uap tersebut. Revolusi industri 2.0 terjadi pada awal abad 20 dimana pada tahap

ini listrik menggantikan peran tenaga uap dan air menjadi sumber utama industri. Pada tahap ini berkembangnya jumlah program manajemen yang memungkinkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Selain itu dikembangkan juga produksi massal berdasarkan pembagian kerja. Lini produksi pertama melibatkan rumah potong hewan di Cincinnati pada 1870.

Revolusi industri 3.0 ditengarai muncul perdana pada awal tahun 1970. Dimulai dengan penggunaan elektronik dan teknologi informasi guna otomatisasi produksi. Revolusi industri generasi ketiga ini ditandai dengan kemunculan pengontrol logika terprogram pertama (PLC), yakni model 084-969. Sistem otomatisasi berbasis computer ini membuat mesin industri tidak lagi dikendalikan manusia. Dampaknya adalah biaya produksi menjadi lebih murah, namun isu tenaga kerja tentunya masih menjadi masalah pada tahap ini.

Sedangkan revolusi industri 4.0 yang terakhir dan sekaligus yang kita alami saat ini diprakarsai oleh Prof. Klaus Schwab, ekonom terkenal dari Jerman yang mengenalkan konsep Revolusi Industri 4.0 dalam bukunya "The Fourth Industrial Revolution". Beliau menegaskan bahwa revolusi industri 4.0 telah mengubah kerja manusia secara fundamental. Pada saat ini industri telah menyentuh virtual, konektivitas manusia, mesin, dan data. Berdasarkan analisis McKinsey Global Institute, Industri 4.0 memberikan dampak yang sangat besar dan luas, terutama pada sektor lapangan kerja, di mana robot dan mesin akan menghilangkan banyak lapangan kerja di dunia. Untuk itu era revolusi industri ini harus disikapi oleh pelaku industri dengan bijak dan hati-hati. Sebagai contoh berikut merupakan bidang-bidang yang memperoleh terobosan berkat kemajuan teknologi 1) Robot Kecerdasan Buatan; 2) Teknologi Nano, 3) Bioteknologi; 4) Teknologi Kuantum, 5) Blockchain; 6) Teknologi Berbasis Internet; dan 7) Printer 3D.

Di satu sisi, era industri ini melalui konektivitas dan digitalisasinya mampu meningkatkan efisiensi rantai manufaktur dan kualitas produk. Namun demikian, di sisi lain, revolusi industri ini juga akan menghilangkan 800 juta lapangan kerja di seluruh dunia hingga tahun 2030 karena diambil-alih oleh robot. Hal ini bisa menjadi ancaman bagi Indonesia sebagai negara yang memiliki angkatan kerja dan angka pengangguran yang cukup tinggi. Untuk itu pemerintah perlu menyikapi perubahan ini dengan tepat melalui penyusunan strategi yang mampu meningkatkan daya saing industri nasional sekaligus menciptakan lapangan yang lebih luas. Pemerintah Indonesia saat ini tengah melaksanakan langkah-langkah

strategis yang ditetapkan berdasarkan peta jalan Making Indonesia 4.0. Upaya ini dilakukan untuk mempercepat terwujudnya visi nasional yang telah ditetapkan untuk memanfaatkan peluang di era revolusi industri keempat. Salah satu visi penyusunan Making Indonesia 4.0 adalah menjadikan Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang memiliki perekonomian terkuat di dunia pada tahun 2030.

4.2.2 Isu Regional

Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN Economic Community (AEC) pada tahun 2016, yang mana bagi Indonesia, keberadaan MEA menjadi babak awal untuk mengembangkan berbagai kualitas perekonomian di kawasan Asia Tenggara dalam perkembangan pasar bebas di akhir 2015. MEA menjadi dua sisi mata uang bagi Indonesia: satu sisi menjadi kesempatan yang baik untuk menunjukkan kualitas dan kuantitas produk dan sumber daya manusia (SDM) Indonesia kepada negara-negara lain dengan terbuka, tetapi pada sisi yang lain dapat menjadi bumerang untuk Indonesia apabila Indonesia tidak dapat memanfaatkannya dengan baik.

MEA akan menjadi kesempatan yang baik karena hambatan perdagangan akan cenderung berkurang bahkan menjadi tidak ada. Hal tersebut akan berdampak pada peningkatan ekspor yang pada akhirnya akan meningkatkan GDP Indonesia. Pada sisi investasi, kondisi ini dapat menciptakan iklim yang mendukung masuknya Foreign Direct Investment (FDI) atau Investasi Langsung Luar Negeri yang dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi melalui perkembangan teknologi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan sumber daya manusia (human capital) dan akses yang lebih mudah kepada pasar dunia.

Berdasarkan aspek ketenagakerjaan, terdapat kesempatan yang sangat besar bagi para pencari kerja karena dapat banyak tersedia lapangan kerja dengan berbagai kebutuhan akan keahlian yang beraneka ragam. Selain itu, akses untuk pergi keluar negeri dalam rangka mencari pekerjaan menjadi lebih mudah bahkan bisa jadi tanpa ada hambatan tertentu. MEA juga menjadi kesempatan yang bagus bagi para wirausahawan untuk mencari pekerja terbaik sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Namun demikian hal ini dapat memunculkan risiko ketenagakerjaan bagi Indonesia. Oleh karena itu diperlukan suatu uji kompetensi bagi setiap calon tenaga kerja yang akan bersaing. Bagi mereka yang lulus uji kompetensi diberikan sertifikat sesuai tingkat ketrampilan dan keahliannya.

4.2.3 Isu Kebijakan Nasional

A. RPJPN 2005-2025 (Pelaksanaan RPJMN ke-3)

Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 menetapkan bahwa visi pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan “INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR”. RPJPN 2005-2025 dilaksanakan dalam empat tahapan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dengan rumusan arahan prioritas kebijakan. Sesuai dengan tahapan tersebut, pembangunan dalam RPJMN ke-3 (2015-2019) diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat. Kebijakan RPJPN 2005-2025 tersebut memberikan tantangan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan daya saing daerah berbasis potensi lokal melalui keunggulan kompetitif perekonomian, SDA, SDM dan kemampuan IPTEK yang tinggi.

B. RPJMN 2015-2019

Kebijakan pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019 diarahkan untuk mencapai visi pembangunan nasional tahun 2015-2019 yaitu “TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG”, yang dilakukan melalui 7 misi pembangunan antara lain:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjagakedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkankepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratisberlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jatidiri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju,dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri,maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunannasional jangka menengah tersebut, dirumuskan sembilan agendaprioritas pembangunan nasional. Kesembilan agenda prioritas itudisebut “NAWA CITA”, yaitu:

- 1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsadan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
- 2) Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelolapemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
- 3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerahdan desa dalam kerangka negara kesatuan.
- 4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi system dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
- 5) Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
- 6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasarInternasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkitbersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
- 7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sector-sektorstrategis ekonomi domestik.
- 8) Melakukan revolusi karakter bangsa.
- 9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi social Indonesia.

Implementasi “NAWA CITA” tersebut dijabarkan dalam strategi pembangunan nasional dalam 3 (tiga) dimensi pembangunan yaitu:

1. Dimensi pembangunan manusia dan masyarakat

Pembangunan dilakukan untuk meningkatkan kualitas manusiadan masyarakat melalui pendidikan, kesehatan dan perbaikan gizi,mental dan karakter yang tangguh, perilaku yang positif dankonstruktif, kreatif, inovatif, punya etos bisnis dan beranimengambil risiko, berdedikasi, disiplin, kerja keras, taat aturan;tertib dan terbuka sebagai modal sosial yang positif bagi pembangunan, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi sesama.

2. Dimensi pembangunan sektor unggulan dengan prioritas

- a. Kedaulatan pangan.
- b. Kedaulatan energi dan ketenagalistrikan.

- c. Kemaritiman dan kelautan.
 - d. Pariwisata dan industri
3. Dimensi pemerataan dan kewilayahan
- Pembangunan bukan hanya untuk kelompok tertentu, tetapi untuk seluruh masyarakat di seluruh wilayah, dengan prioritas:
- a. Wilayah desa, untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, karena penduduk miskin sebagian besar tinggal di desa;
 - b. Wilayah pinggiran;
 - c. Luar Jawa;
 - d. Kawasan Timur.

4.2.4 Isu Strategis Pembangunan Jawa Timur 2019 – 2024

Nawa Bhakti Satya merupakan 9 (Sembilan) Bhakti pasangan Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak Jawa Timur Periode 2019-2023 yang merupakan Sembilan pengabdian tulus dan penuh keikhlasan bersama-sama masyarakat untuk membanagun Provinsi Jawa Timur menjadi lebih sejahtera dan penuh kemuliaan selama lima tahun mendatang.

Nawa Bhakti Satya merupakan komitmen dan sekaligus rencana aksi untuk mewujudkan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, yang selanjutnya menjadi Visi pembangunan dalam Rerncana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2023 yaitu “Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong-Royang”. Kesembilan Bhakti tersebut selanjutnya menjadi pijakan dalam menyusun Program Prioritas pembangunan daerah sesuai dengan nomenklatur program dan kegiatan di tingkat rencana strategis (renstra) Perangkat Daerah. Penjelasan lebih detil mengenai sembilan bhakti tersebut sebagaimana berikut.

1. **Bhakti – 1: Jatim Sejahtera**
Mengentaskan kemiskinan Menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial
2. **Bhakti – 2: Jatim Kerja**
Memperluas Lapangan Pekerjaan dan Membangun keunggulan Ekonomi
3. **Bhakti – 3: Jatim Cerdas dan Sehat**

Jawa Timur Cerdas dan Sehat, Pelayanan Dasar berkualitas

4. Bhakti – 4: Jatim Akses

Jatim Akses, yang akan menjawab tantangan pengembangan wilayah di Jawa Timur. Ketimpangan akses menyebabkan Jawa Timur belum dapat mengoptimalkan potensinya

5. Bhakti – 5: Jatim Berkah

Membangun Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas

6. Bhakti – 6: Jatim Agro

Memajukan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan

7. Bhakti – 7: Jatim Berdaya

Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUMDesa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa

8. Bhakti – 8: Jatim Amanah

Menyelenggarakan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi

9. Bhakti – 9: Jatim Sejahtera

Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup

4.2.5 Isu Strategis Kabupaten Banyuwangi 2016 – 2021

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Perumusan isu strategis didapatkan berdasarkan rumusan permasalahan pembangunan yang disinkronkan dengan visi-misi dan program unggulan Kepala Daerah terpilih. Hasil perumusan isu strategis akan menghasilkan alternatif isu strategis dalam pembangunan Kabupaten Banyuwangi. Adapun alternatif isu strategis Kabupaten Banyuwangi antara lain:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia
2. Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan
3. Kesejahteraan Masyarakat
4. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Memperhatikan *list* isu-isu strategis tersebut, berikut deskripsi dan justifikasi terkait isu-isu tersebut.

a. Pembangunan Sumber Daya Manusia

Perwujudan kesejahteraan masyarakat salah satunya ditandai dengan kemampuan masyarakat mengakses kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Akses masyarakat terhadap pelayanan dasar dapat didefinisikan melalui perspektif jarak maupun keterjangkauan layanan. Kabupaten Banyuwangi sendiri sampai pada tahun terakhir teridentifikasi bahwa beberapa layanan pendidikan dan kesehatan belum sepenuhnya terpenuhi dengan optimal. Pada bidang pendidikan misalnya, mengingat capaian pada area pendidikan wajib 12 tahun telah menunjukkan progress yang relative signifikan, maka orientasi perbaikan pendidikan Kabupaten Banyuwangi kini diarahkan pada level lebih lanjut yaitu perguruan tinggi. Akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi dan pendidikan inklusif di Kabupaten Banyuwangi juga masih rendah. Tidak hanya pada urusan pendidikan, pada urusan kesehatan beberapa permasalahan juga masih perlu untuk diperhatikan. Seperti halnya pelayanan kesehatan dasar misalnya yang masih belum mampu terjangkau oleh keseluruhan masyarakat di Kabupaten Banyuwangi khususnya daerah perdesaan. Sebagai tambahan, fasilitas kesehatan yang belum terakreditasi juga tidak sedikit. Selain kualitas layanan dan standarisasi infrastruktur kesehatan seperti rumah sakit masih belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat Kabupaten Banyuwangi secara optimal, akses masyarakat terhadap lingkungan sehat juga masih terbatas.

Kondisi-kondisi tersebut tentu memberikan *pressure* tersendiri terhadap pengembangan sumberdaya manusia di Kabupaten Banyuwangi. Perlu digaris bawahi bahwa, pencapaian progresif IPM Kabupaten Banyuwangi yang positif dapat saja melesat secara signifikan kedepannya jika catatan permasalahan yang telah disebutkan dapat diakomodir secara maksimal. Dengan demikian maka, perwujudan aksesibilitas serta kualitas pelayanan baik itu di bidang kesehatan, pendidikan maupun kebutuhan dasar

lainnya perlu untuk dikedepankan dan dianggap strategis mengingat sumberdaya manusia yang baik merupakan wujud nyata dari cita-cita UUD 1945 yaitu kesejahteraan masyarakat.

b. Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

Sampai dengan tahun 2018, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi sangat fluktuatif. Bahkan, jika diamati dari tahun dasar kecenderungan pergerakan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi terbilang melamban. Kecenderungan melambat juga bukan saja dikarenakan murni dari kondisi Kabupaten Banyuwangi, tetapi karena faktor ekonomi global dan nasional. Seiring dengan deselerasi pertumbuhan ekonomi nasional maupun Jawa Timur. Pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi mencapai angka 5,7% yang artinya belum mencapai target. BPS menyebutkan terjadi perlambatan pertumbuhan PDRB lapangan usaha sektor pertanian, sebaliknya industri pengolahan dan perdagangan mengalami pertumbuhan dari segi distribusinya. Sektor pertanian mengalami perlambatan dimungkinkan karena faktor kondisi cuaca yang tidak menentu dan lahan aktif pertanian mulai menyusut, serta tenaga kerja sektor pertanian mengalami penurunan.

Dengan memperhatikan kekuatan dan peluang yang dimiliki Kabupaten Banyuwangi maka tidak berlebihan jika menyatakan optimism terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi. Hal ini kemudian perlu ditelaah letak *lverage* isu sehingga dapat mengintervensi isu dengan bijak dan optimal. Merujuk pada data hasil evaluasi bab sebelumnya, tercatat tren kontribusi sektor pertanian cenderung melemah. Nampaknya, kondisi ini yang mempengaruhi melambatnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi. Padahal, dengan memanfaatkan kekuatan SDM serta potensi SDA yang ada, sangat mungkin Banyuwangi dapat meningkatkan kinerja sektor pertanian. Sehingga, dengan melihat serta menelaah dengan seksama faktor penyebab isu ini, diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi.

Fasilitas di Kabupaten Banyuwangi belum sepenuhnya terpenuhi secara optimal baik kuantitas maupun kualitasnya. Selain itu, kondisi infrastruktur perhubungan masih perlu ditingkatkan kualitasnya. Panjang jalan dan jembatan masih perlu ditingkatkan, hal ini dalam rangka mengakomodir penyediaan pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Banyuwangi.

Tercatat hingga tahun 2018, panjang jalan dengan kondisi baik masih relative minim, atau tidak memenuhi target secara maksimal. Hal ini berimplikasi pada tingginya angka kecelakaan lalu lintas. Selain mempengaruhi tingkat keselamatan berkendara, kondisi ini tentu juga memiliki efek terhadap arus distribusi barang dan jasa dari dan untuk Kabupaten Banyuwangi.

Selain itu, Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu daerah rawan bencana tsunami berdasarkan pada RPJMN. Namun pada faktanya, Kabupaten Banyuwangi juga merupakan wilayah rawan bencana gunung meletus, puting beliung maupun bencana kebakaran. Meskipun demikian, Kabupaten Banyuwangi masih belum memiliki sistem manajemen pelayanan korban bencana alam dan bencana sosial serta kesiagaan bahaya kebakaran. Sistem ini dapat didukung salah satunya dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas.

c. Kesejahteraan Masyarakat

Pengentasan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Banyuwangi menunjukkan tren kinerja positif. Namun, jika melihat dilapangan, sebenarnya jangkauan pelayanan masih belum luas. Hal ini terbukti melalui masih dapat teridentifikasi PMKS di beberapa wilayah meskipun tidak sebanyak sebelumnya. Hal ini sangat dapat diterima mengingat wilayah Kabupaten Banyuwangi yang terbilang luas, maka tentu saja memungkinkan untuk *miss* dalam mendata PMKS.

Selain itu indeks gini di Kabupaten Banyuwangi masih cenderung tinggi. Gap antara pendapatan kelas atas dan bawah terlalu jauh. Hal ini mengindikasikan bahwa sebaran SDM pada tiap kelas masih belum merata pula. Kondisi tersebut sangat memungkinkan terjadinya kesenjangan pendapatan antar wilayah satu dengan wilayah lainnya. Pada level nasional maupun regional provinsi, isu kesenjangan atau disparitas masih menjadi perhatian utama dalam pembangunan. Sehingga, disamping perlu adanya pengupayaan kerjasama antar wilayah di Kabupaten Banyuwangi, perlu pula peningkatan kerjasama antar daerah sekitar Banyuwangi demi mengurangi indeks gini.

d. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan

terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya manusia aparatur.

Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperharui. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematis, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi di sini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.

Delapan area perubahan reformasi birokrasi, meliputi mental aparatur (terciptanya budaya kerja yang positif bagi birokrasi yang melayani, bersih, dan akuntabel); Organisasi (organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran); Tata laksana (sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*); Peraturan perundang-undangan (regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif); Sumber daya manusia aparatur (SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi, dan sejahtera); Pengawasan (meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang bebas KKN); Akuntabilitas (meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi); Pelayanan publik (pelayanan yang prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat).

Saat ini pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam delapan area perubahan sudah berjalan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan berbagai penghargaan yang telah dicapai atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Yang menjadi pekerjaan rumah adalah mempertahankan kondisi ini atau bahkan semakin meningkat.

BAB V

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

5.1 Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Secara politis, visi merupakan manifestasi dari cita-cita kepala daerah dalam membangun sebuah daerah. Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2016-2021 tidak dapat disusun tanpa terlepas dari kesesuaian terhadap sasaran pokok sesuai dengan arah kebijakan pembangunan RPJPD periode ke 3.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Banyuwangi untuk periode RPJMD 2016-2021 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Masyarakat Banyuwangi Yang Semakin Sejahtera, Mandiri, Dan Berakhlak Mulia Melalui Peningkatan Perekonomian Dan Kualitas Sumber Daya Manusia”

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Banyuwangi dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional, nasional maupun global. Perumusan dan penjelasan terhadap visi dimaksud, menghasilkan pilar-pilar visi yang diterjemahkan pengertiannya, sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 5.1. Perwujudan Visi RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2016-2021

Visi	Pilar-Pilar Visi	Penjelasan Pilar-Pilar Visi
<p>Terwujudnya Masyarakat Banyuwangi Yang Semakin Sejahtera, Mandiri, Dan Berakhlak Mulia Melalui Peningkatan Perekonomian Dan Kualitas Sumber Daya Manusia</p>	<p>Meningkatnya kualitas SDM Banyuwangi</p>	<p>Peningkatan kapasitas dan kualitas suatu daerah melalui pembangunan SDM yang unggul merupakan tugas bersama dalam menciptakan bangsa yang kuat dan Negara yang makmur. Melalui SDM yang unggul, tangguh dan berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian suatu daerah, namun juga dalam mendukung pembangunan nasional. Peningkatan kualitas SDM terutama diupayakan melalui : 1) pendidikan yang berkualitas, berkarakter, bermoral dan berakhlak mulia, 2) layanan kesehatan yang terjangkau, merata dan berkualitas.</p>
	<p>Meningkatnya perekonomian Daerah</p>	<p>Modal untuk melakukan pembangunan ekonomi adalah adanya pertumbuhan ekonomi, sehingga pembangunan ekonomi akan tercapai dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Partisipasi masyarakat memiliki peran yang penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pendapatan perkapita, sehingga melalui tercapainya pembangunan ekonomi maka akan berdampak kepada peningkatan perekonomian Kabupaten Banyuwangi. Basis ekonomi Banyuwangi diletakkan pada 3 komponen utama yaitu 1) pertanian dalam skala luas yang meliputi pertanian tanaman pangan, perikanan dan kelautan, kehutanan, perkebunan, dan hortikultura, 2) Pariwisata alam dan budaya dengan segala kekhasannya di Banyuwangi, 3) UKM dan perdagangan tradisional yang menjadi mata pencaharian sebagian besar masyarakat.</p>
	<p>Masyarakat Banyuwangi yang semakin sejahtera berlandaskan semangat gotong royong</p>	<p>Semangat gotong royong yang melandasi pergerakan perekonomian dimana didalamnya terkandung nilai moral yaitu adanya rasa ikhlas untuk berpartisipasi, kebersamaan dan saling membantu antar sesama karena lebih mengutamakan kepentingan bersama yang akan berdampak meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.</p>

Visi	Pilar-Pilar Visi	Penjelasan Pilar-Pilar Visi
	Kemandirian Masyarakat & Daerah	Mandiri dan majunya suatu daerah tentu bersumber dari kemandirian dan kemajuan rakyatnya dan oleh sebab itu kemandirian masyarakat adalah gerbang utama menuju kemajuan dan kesejahteraan. Kemandirian daerah akan memacu kemampuan produktif guna memenuhi kebutuhan dasar dan mekanisme untuk tetap dapat bertahan dalam situasi krisis.

5.2 Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi tahun 2016 - 2021 berorientasi pada pembangunan dan peningkatan kompetensi segenap sumber daya yang terdapat di Kabupaten Banyuwangi dalam segala bidang, guna menyiapkan kesejahteraan melalui peningkatan perekonomian Kabupaten Banyuwangi.

Dalam rangka mewujudkan Visi Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi yang telah ditetapkan diatas, maka berikut merupakan Misi Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021:

- a. Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya;
- b. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam dan kearifan lokal;
- c. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik, ekonomi, dan social;
- d. Optimalisasi sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- e. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (*Good And Clean Governance*) serta layanan publik yang berkualitas berbasis Teknologi Informasi.

Lima butir misi diatas merupakan janji politis Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi terpilih kepada masyarakat Kabupaten Banyuwangi. Merujuk terhadap revisi RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2016-2021, selain berorientasi terhadap penyempurnaan RPJMD dikarenakan perubahan regulasi dari Permendagri 54 Tahun 2010 ke Permendagri 86 Tahun 2017 terdapat perubahan perspektif atau sudut pandang terhadap pencapaian Visi Kabupaten Banyuwangi tahun 2021.

Misi ke 3 Bupati Kabupaten Banyuwangi yakni “Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Fisik, Ekonomi, dan Sosial” yang sebelumnya diorientasikan sebagai sebuah tujuan

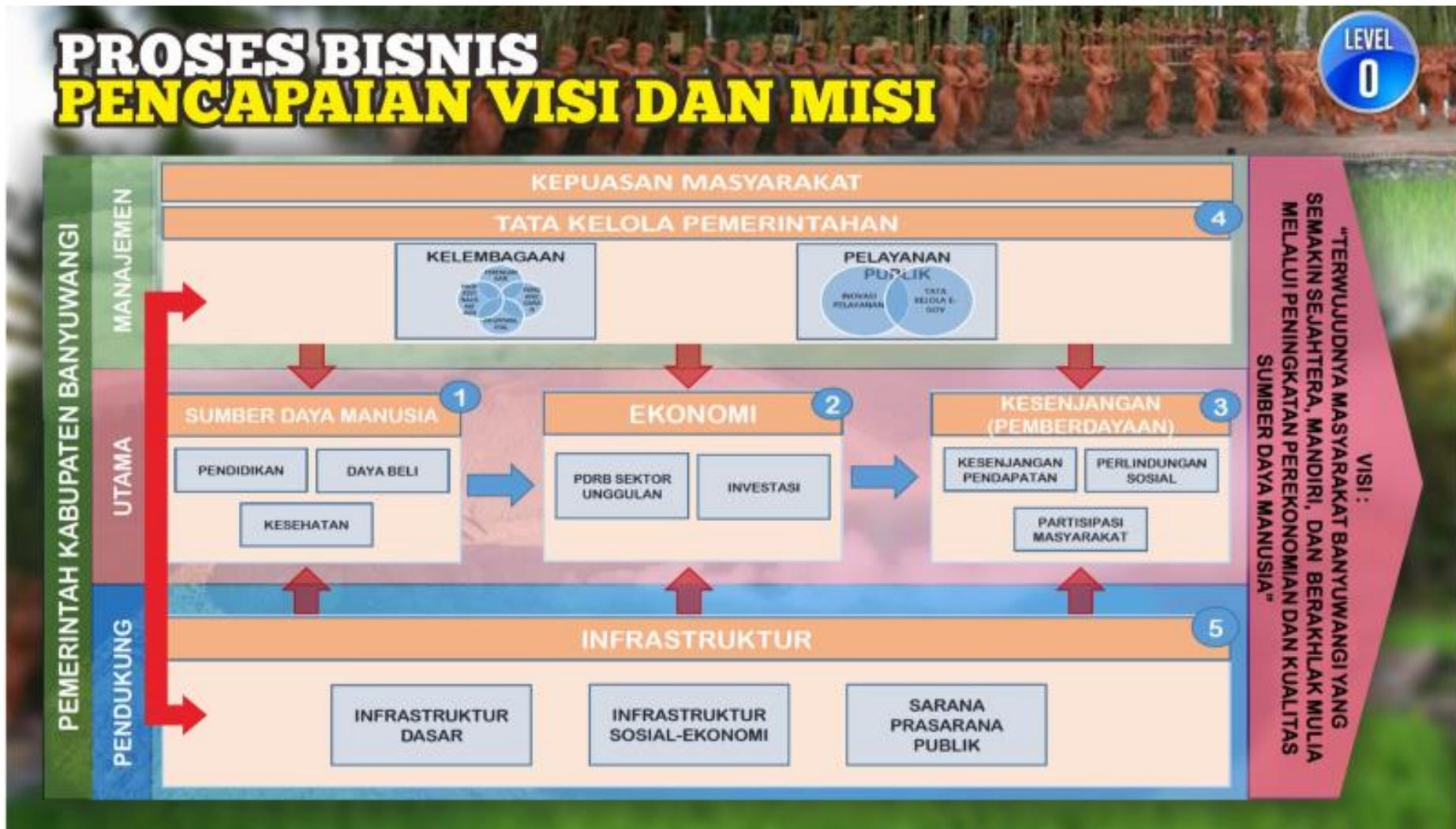
utama, dalam perubahan RPJMD Kabupaten Banyuwangi berubah perspektifnya sebagai sebuah alat untuk mencapai tujuan tersebut. Sehingga 5 Misi politik Bupati Kabupaten Banyuwangi mengalami rekonstruksi kedalam Misi Pembangunan. Berikut merupakan linieritas Misi Politik dan Misi Pembangunan Kabupaten Banyuwangi.



Gambar 5.1. Linieritas Misi dan Tujuan

Tiga butir Misi Pembangunan di atas didasarkan kepada kebutuhan pembangunan yang telah ditemukan dalam bentuk Visi pembangunan daerah. Dalam upaya penyamaan persepsi terhadap misi tersebut serta mengurangi potensi ambiguitas dalam memahami butir misi. Berikut digambarkan konstruksi substansi misi Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021

Hal ini didasarkan pada ketentuan ayat (1), (2) dan (3) pada Pasal 166 Permendagri 86 Tahun 2017 sebagai berikut: (1) Visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan (RPJMD) merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Daerah, (2) Visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan (RPJMD) menjadi dasar keselarasan dan pencapaian kinerja pembangunan Daerah melalui program dan kegiatan Perangkat Daerah secara langsung maupun tidak langsung, (3) Visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan (RPJMD) sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah yang telah disampaikan dalam masa kampanye.



Gambar 5.2. Proses Bisnis Pencapaian Visi dan Misi

5.2.1 Misi 1

“Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya”



Gambar 5.3: Logframe Perencanaan Terintegrasi Misi 1

Salah satu variabel yang sangat menentukan tercapainya upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah luasnya jangkauan akses pelayanan dasar yang didukung oleh infrastruktur yang memadai. Ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar seperti pelayanan pendidikan dan kesehatan menjadi prasyarat terwujudnya pelayanan dasar yang optimal. Dalam upaya pencapaian Misi 1 maka dirumuskan **Perencanaan Terintegrasi** dalam Langkah Pencapaian **Misi 1** sebagaimana ditunjukkan dalam gambar 5.1.

5.2.2 Misi 2

“Optimalisasi sumber daya untuk mewujudkan daya saing ekonomi daerah yang berkelanjutan”

Kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah di Banyuwangi baik yang tersimpan didalam maupun di permukaan bumi serta potensi di lautan mampu menambah nilai guna ekonomi bagi kehidupan Masyarakat. Nilai guna tersebut diperoleh melalui pengembangan inovasi dan teknologi serta membuka peluang investasi bagi pihak swasta baik dalam maupun luar negeri. Peningkatan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan SDA tidak hanya berhenti di dalam proses perencanaan, akan tetapi dalam proses pelaksanaan hingga pengawasan masyarakat harus mampu bersinergi dengan Pemerintah. Pemberdayaan masyarakat turut serta berperan aktif dalam mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Pemberdayaan masyarakat sangat besar

pengaruhnya terhadap pembangunan di daerah terutama jika diarahkan kepada pengelolaan sumber daya strategis Kabupaten Banyuwangi. Dalam upaya pencapaian Misi 2 maka dirumuskan **Perencanaan Terintegrasi** dalam Langkah Pencapaian **Misi 2** sebagai berikut :

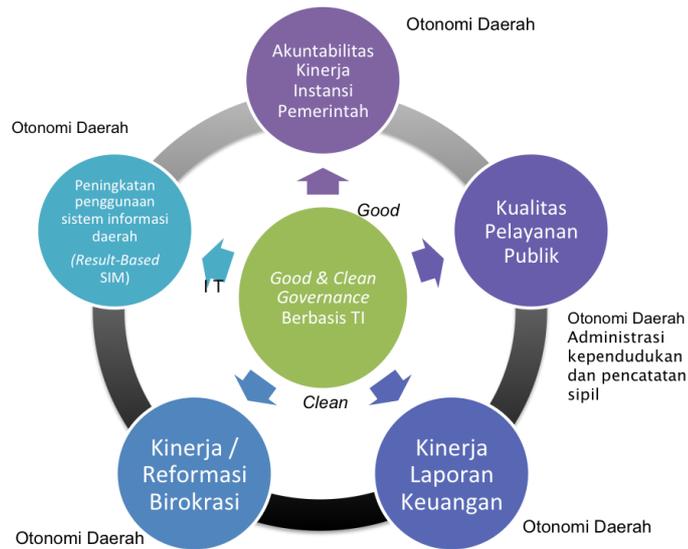


Gambar 5.4: Logframe Perencanaan Terintegrasi Misi 2

5.2.3 Misi 3

“Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih (Good And Clean Governance) Serta Layanan Publik Yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi”

Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang semakin variatif kebutuhannya maka dibutuhkan kinerja aparatur pemerintah yang profesional termasuk penataan kelembagaannya yang efektif dan efisien, serta bentuk pemerintahan yang berlandaskan pada prinsip *Good And Clean Governance*. Dalam upaya pencapaian Misi 3 maka dirumuskan **Perencanaan Terintegrasi** dalam Langkah Pencapaian **Misi 3** sebagai berikut :



Gambar 5.5: Logframe Perencanaan Terintegrasi Misi 3

Prioritas pembangunan daerah merupakan penjabaran Visi dan Misi, yang kemudian dituangkan kedalam 9 butir prioritas pembangunan daerah berikut:

Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui **2 prioritas wajib**

1. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan yang berakhlak mulia;
2. Peningkatan akses dan kualitas kesehatan;

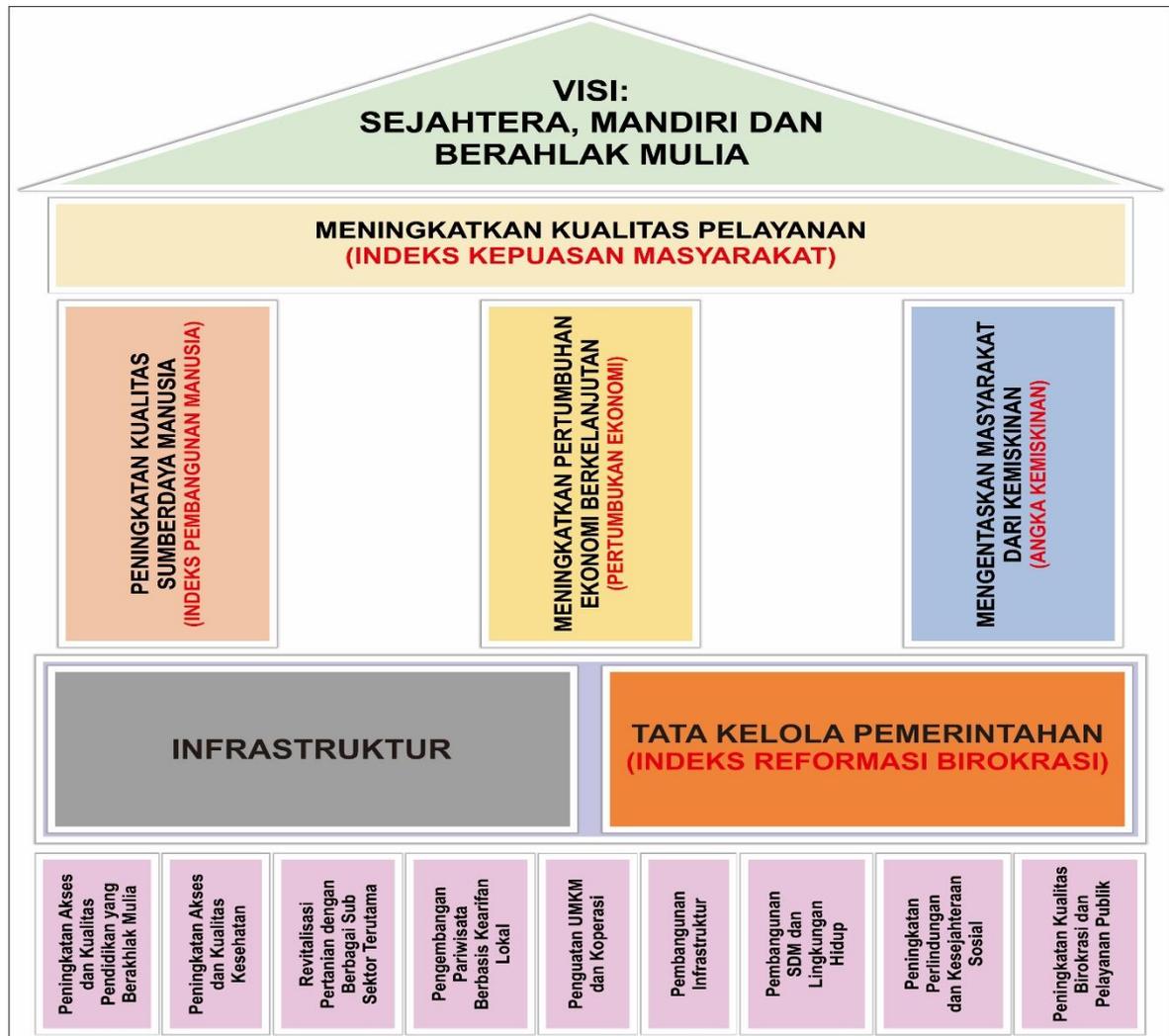
Peningkatan perekonomian melalui **3 prioritas unggulan**

3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai subsektornya terutama perikanan dan kelautan, tanaman pangan, serta perkebunan;
4. Pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal;
5. Penguatan UMKM dan koperasi;

4 Prioritas penunjang peningkatan kualitas SDM dan perekonomian

6. Pembangunan infrastruktur;
7. Pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
8. Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial;
9. Peningkatan kualitas birokrasi dan pelayanan publik.

Berikut digambarkan pilar pembangunan Kabupaten Banyuwangi yang dianalogikan dan dikonstruksikan menyesuaikan dengan *goals* Visi Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021:



Gambar 5.6: Pilar Pembangunan Kabupaten Banyuwangi

5.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran RPJMD merupakan hasil dari perumusan capaian strategis Kabupaten Banyuwangi yang merepresentasikan atau menjadi tolok ukur keberhasilan atau kegagalan pemerintah. Sehingga, syarat utama penentuan tujuan dan sasaran adalah dapat diukur yang direpresentasikan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) atau indikator tujuan sebagai indikator keberhasilan bupati dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) atau indikator kinerja sasaran RPJMD. Berikut merupakan linieritas Misi terhadap Tujuan Pembangunan Kabupaten Banyuwangi.

Berikut merupakan penjabaran Tujuan dan Sasaran pembangunan Perubahan RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021:

5.3.1. Tujuan 1 dan Sasaran Misi I

Tujuan pembangunan pertama Kabupaten Banyuwangi merupakan penjabaran dari Misi I yakni Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia. Secara umum beberapa catatan terhadap Misi I Kabupaten Banyuwangi yang menjadi pertimbangan dalam penentuan rekonstruksi perubahan adalah Pembangunan Manusia yang direpresentasikan melalui IKU Indeks Pembangunan Manusia mencapai kinerja yang sangat baik dengan capaian 213,19%. Capaian tersebut tidak mengindikasikan capaian yang sangat baik kinerja Pemkab Kabupaten Banyuwangi secara penuh, hal yang perlu menjadi perhatian adalah lemahnya penetapan target IPM sehingga capaian kinerja pada tahun 2021 telah terlampaui kinerja tahun 2017. Tujuan 1 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia masih menempatkan Indeks Pembangunan Manusia sebagai Indikator Kinerja Utama dari tujuan pertama.

Dalam rangka pencapaian Misi I, tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

a. **Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia**, dengan sasaran pembangunan:

- 1) Meningkatnya kualitas dan akses Pendidikan
- 2) Meningkatnya kualitas dan akses kesehatan
- 3) Meningkatnya daya beli masyarakat terhadap komoditas pangan dan non-pangan

Dalam upaya penyamaan persepsi terhadap tujuan dan sasaran sebelum maupun sesudah rekonstruksi misi yang dilakukan, maka pemahaman terhadap linieritas Misi, Tujuan hingga Sasaran disajikan dalam desain yang mudah dipahami melalui Desain *Logical Framework* Pencapaian Misi I disajikan sebagai berikut:



Gambar 5.7: Desain *Logical Framework* Pencapaian Misi 1 Tujuan 1

5.3.2. Tujuan 2 dan Sasaran Misi 2

Tujuan pembangunan selanjutnya berorientasi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan yang merupakan mandatori dari Misi II Kabupaten Banyuwangi. Misi II Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021 fokus terhadap pembangunan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Beberapa catatan penting tujuan 2 terhadap evaluasi pembangunan RPJMD sebelum perubahan adalah kinerja Pertumbuhan Ekonomi yang kontra produktif dengan persentase kinerja mencapai -209,80%. Sedangkan IKLH yang merepresentasikan kualitas pembangunan berkelanjutan mencapai capaian kinerja 49,03% dengan kategori normal. Pada Tujuan 2 ini, Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan menjadikan indikator Pertumbuhan Ekonomi sebagai Indikator Kinerja Utama Tujuan 2. Sedangkan pada konteks “Berkelanjutan” yakni Lingkungan Hidup, menjadi Indikator Kinerja Daerah / Indikator Sasaran tujuan 2.

Dalam rangka pencapaian Misi II maka tujuan 2 ditetapkan sebagai berikut:

- a. **Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan**, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut:
 1. Meningkatnya PDRB sektor unggulan
 2. Bertambahnya nilai investasi
 3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Dalam upaya penyamaan persepsi terhadap tujuan dan sasaran sebelum maupun sesudah rekonstruksi misi yang dilakukan, maka pemahaman terhadap linieritas Misi, Tujuan hingga Sasaran disajikan dalam desain yang mudah dipahami melalui Desain *Logical Framework* Pencapaian Misi II yang disajikan sebagai berikut:



Gambar 5.8: Desain *Logical Framework* Pencapaian Misi 2 Tujuan 2

5.3.3. Tujuan 3 dan Sasaran Misi 2

Tujuan 3 Perubahan RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2016-2021 berorientasi terhadap kesejahteraan sosial masyarakat, yang merupakan mandatori dari Misi II. Beberapa catatan penting dari kinerja sebelum Perubahan RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2016-2021 ialah capaian kinerja Tingkat Kemiskinan yang telah mencapai 53,36%. Tujuan 3 Mengentaskan Masyarakat Dari Kemiskinan menjadikan Indikator Angka Kemiskinan sebagai Indikator Kinerja Utama atau representasi dari kinerja Tujuan 3.

Dalam rangka pencapaian Misi II maka tujuan 3 pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

a. **Mengentaskan masyarakat dari kemiskinan**, dengan sasaran pembangunan yaitu

- 1) Mengurangi kesenjangan tingkat pendapatan
- 2) Menjamin Perlindungan Sosial
- 3) Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Dalam upaya penyamaan persepsi terhadap tujuan dan sasaran sebelum maupun sesudah rekonstruksi misi yang dilakukan, maka pemahaman terhadap linieritas Misi, Tujuan hingga Sasaran disajikan dalam desain yang mudah dipahami melalui Desain *Logical Framework* Pencapaian Misi II yang disajikan sebagai berikut:



Gambar 5.9: Desain Logical Framework Pencapaian Misi 2 Tujuan 3

5.3.4. Tujuan 4 dan Sasaran Misi 3

Tujuan terakhir Perubahan RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021 merupakan pengelolaan tata kelola pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Tujuan 4 Meningkatkan Kualitas Pelayanan menempatkan Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai Indikator Kinerja Utama atau representasi logis dari kinerja Tujuan 4. Dalam rangka pencapaian Misi III, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

- a. **Meningkatkan Nilai Kepuasan Masyarakat atas Layanan** , dengan sasaran pembangunan sebagai berikut:
 1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
 2. Terciptanya Inovasi Layanan Publik

Dalam upaya penyamaan persepsi terhadap tujuan dan sasaran sebelum maupun sesudah rekonstruksi misi yang dilakukan, maka pemahaman terhadap linieritas Misi, Tujuan hingga Sasaran disajikan dalam desai yang mudah dipahami melalui Desain *Logical Framework* Pencapaian Misi III yang disajikan sebagai berikut:



Gambar 5.10: Desain *Logical Framework* Pencapaian Misi 3 Tujuan 4

Berdasarkan penjelasan diatas tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD perubahan, maka dengan melihat proses konsistensi penjabaran Visi dan Misi ke dalam Tujuan dan Sasaran menentukan efektivitas pembangunan daerah sesuai dengan amanat pembangunan yang tertuang dalam Visi dan Misi Bupati terpilih. Berangkat dari tuntutan tersebut, maka dapat dijabarkan konsistensi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut ke dalam matriks berikut ini.

Tabel: 5.2 Matriks Konsistensi Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

No	VISI : Terwujudnya Masyarakat Banyuwangi Yang Semakin Sejahtera, Mandiri, Dan Berakhlak Mulia Melalui Peningkatan Perekonomian Dan Kualitas Sumber Daya Manusia				Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2021
	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	2019	2020	
1	Mewujudkan Aksesibilitas Dan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Kebutuhan Dasar Lainnya	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		Indeks Pembangunan Manusia	71,25	72,10	72,95
			Meningkatnya kualitas dan akses Pendidikan	Indeks Pendidikan	0,61	0,62	0,63
			Meningkatnya kualitas dan akses kesehatan	Indeks Kesehatan	0,79	0,80	0,81
			Meningkatnya daya beli masyarakat terhadap komoditas pangan dan non-pangan	Indeks Purchasing Power Parity (PPP)	0,76	0,77	0,78
2	Optimalisasi Sumber Daya Untuk Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan	2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan		Pertumbuhan Ekonomi	5,86	5,90	5,94
			Meningkatnya PDRB sektor unggulan yang berkelanjutan	Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan	6,04	6,45	7,02
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67,76	68,39	68,39
			Bertambahnya nilai investasi	Pertumbuhan Nilai Investasi	68%	69%	70%

VISI : Terwujudnya Masyarakat Banyuwangi Yang Semakin Sejahtera, Mandiri, Dan Berakhlak Mulia Melalui Peningkatan Perekonomian Dan Kualitas Sumber Daya Manusia

No	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2021
					2019	2020	
				Tingkat Pengangguran Terbuka	3,28	3,08	2,98
		3. Mengentaskan Masyarakat dari Kemiskinan		Angka Kemiskinan	7,475	7,013	6,551
			Mengurangi kesenjangan tingkat pendapatan	Indeks Gini	0,278	0,277	0,275
			Menjamin Perlindungan Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	12,5	12,3	12,1
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Ipmas (Indes Pembangunan Masyarakat)	0.68	0.69	0.70
				IPG (Indeks Pemberdayaan Gender)	86.04	86.20	86.34
				IDM (Indeks Desa Membangun)	0.80	0.81	0.82
3	Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih (<i>Good And Clean</i>)	4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan		Indeks Kepuasan Masyarakat	88.38	90.76	93.14
			Meningkatnya Kualitas Tata	Nilai SAKIP	A	A	AA
			Kelola Pemerintahan Daerah	Indeks RB	76	77	78

No	VISI : Terwujudnya Masyarakat Banyuwangi Yang Semakin Sejahtera, Mandiri, Dan Berakhlak Mulia Melalui Peningkatan Perekonomian Dan Kualitas Sumber Daya Manusia				Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2021
	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	2019	2020	
	Governance) Serta Layanan Publik Yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi			Opini WTP BPK Terhadap LKPD	WTP	WTP	WTP
			Terciptanya Inovasi Layanan Publik	Indeks Inovasi Pemerintah Daerah	15500	15750	16000

BAB VI: STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai metode atau pendekatan Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan dan khususnya sasaran RPJMD sebagai upaya mewujudkan efektifitas dan efisiensi pembangunan daerah. Hal ini dalam rangka menjamin proses pembangunan yang terukur dan proporsional. Melalui pendekatan yang komprehensif tersebut, strategi juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan manajemen kinerja birokrasi secara menyeluruh sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi setiap program pembangunan.

Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah disusun dari serangkaian proses perencanaan strategis, yang dirumuskan dengan mempertimbangan isu-isu strategis pembangunan daerah yang harus dihadapi selama 5 tahun kedepan. Perumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah merupakan *consecutive process* dan saling berhubungan satu dengan lainnya. Strategi diawali dengan perumusan alternatif strategi yang memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal yang berada di dalam lingkup ekologi (lingkungan) pembangunan di Kabupaten Banyuwangi. Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan alternatif strategi adalah analisis SWOT, sehingga rumusan alternatif strategi berikut ini merupakan hubungan yang saling berpengaruh antara Kekuatan, Kelemahan dan Peluang dan Ancaman. Pada akhirnya rumusan alternatif tersebut ditetapkan menjadi strategi melalui aktivitas FGD, *scoring*, analisis *balanced scorecard*. Berikut penetapan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah Kabupaten Banyuwangi.

6.1 STRATEGI

Strategi merupakan serangkaian upaya yang berisikan gambaran proses pencapaian sasaran strategis pembangunan. Strategi memperhatikan faktor internal dan eksternal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Untuk itu strategi menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah berupaya menciptakan nilai tambah bagi stakeholder pembangunan daerah untuk meningkatkan

kontribusi secara aktif dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Hal ini penting mengingat peran dan fungsi pemerintah yang semakin bergeser kearah fasilitator, regulator, dan pembinaan seluruh stakeholder pembangunan daerah.

Pemerintah daerah mempunyai peran strategis dalam fungsinya sebagai fasilitator yang mengupayakan akses modal, promosi dan pasar bagi swasta dan masyarakat; regulator yang menekankan pada fungsi regulasi dan administratif perizinan, dokumen/akta, kartu identitas; serta fungsi konsultatif yang memberikan bimbingan teknis, pembinaan dan advis aktivitas yang dilakukan oleh seluruh *stakeholder*.

Secara konseptual, suatu strategi secara spesifik dikaitkan dengan satu sasaran atau sekelompok sasaran dengan kerangka logis. Perumusan strategi membutuhkan kesatuan tujuan untuk mendapatkan kesatuan tindak. Satu strategi juga dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Beberapa sasaran bersifat inherent dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran. Penentuan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran atau kumpulan sasaran yang inherent adalah dengan terlebih dahulu melakukan analisis SWOT (*strength, weakness, opportunity, dan threat*). Adapun Analisis dan formulasi strategi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 6. 1: Analisis SWOT dan Perumusan Strategi Misi 1

Misi 1: Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya			
ANALISIS SWOT SASARAN: Meningkatnya Kualitas Dan Akses Pendidikan			
Strenghts	<ul style="list-style-type: none"> Adanya progres relatif signifikan terhadap akses pendidikan wajib belajar 12 tahun 	Build on Strengths	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan cakupan akses pendidikan wajib belajar 12 tahun
Weakness	<ul style="list-style-type: none"> Kurang optimalnya layanan pendidikan inklusif 	Overcome Weakness	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas layanan pendidikan inklusif
Oportunities	<ul style="list-style-type: none"> Intensi Masyarakat terhadap pendidikan sangat baik 	Expolit Opportunities	<ul style="list-style-type: none"> Menguatkan stimulasi, motivasi, dan diseminasi dikalangan masyarakat terkait pentingnya pendidikan melalui berbagai jenis media
Threats	<ul style="list-style-type: none"> Rendahnya akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi 	Block Threats	<ul style="list-style-type: none"> Mengintensifkan jalinan kerjasama dengan perguruan-perguruan tinggi
Masalah	<i>Belum optimalnya akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar yang berkualitas</i>	Strategi	<i>Meningkatkan kualitas pendidikan Kabupaten Banyuwangi yang berdaya saing yang tidak hanya bertumpu terhadap pendidikan formal melalui penanaman dan penguatan pendidikan karakter dan berfokus terhadap menciptakan sumber daya manusia yang kreatif</i>

Misi 1: Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya

ANALISIS SWOT SASARAN: Meningkatnya Kualitas Dan Akses Kesehatan

Strengths	<ul style="list-style-type: none"> Menguatnya kinerja cakupan layanan kesehatan Kabupaten Banyuwangi 	Build on Strengths	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan dan Menguatkan Kinerja Cakupan Layanan Kesehatan Kabupaten Banyuwangi
Weakness	<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar Masih terdapat banyak fasilitas kesehatan yang belum terakreditasi Masih kurangnya kualitas layanan kesehatan di Rumah Sakit 	Overcome Weakness	<ul style="list-style-type: none"> Mengoptimalkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar Meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan Meningkatkan kualitas layanan kesehatan rumah sakit
Oportunities	-	Expolit Opportunities	-
Threats	<ul style="list-style-type: none"> Masih kurangnya akses dan kualitas lingkungan sehat Tipologi Kabupaten Banyuwangi sebagai daerah perkotaan, sangat rentan dengan penyakit menular yang dipengaruhi kehidupan sosial masyarakat yang cenderung terbuka 	Block Threats	<ul style="list-style-type: none"> Menyemarakkan gerakan Go Green dan meningkatkan afirmasi pemerintah terhadap upaya lingkungan sehat
Masalah	<i>Belum optimalnya akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar yang berkualitas</i>	Strategi	<i>Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Banyuwangi baik dalam Prefentif , Represif, maupun Kuratif melalui Penyediaan Sarana, Prasarana dan Tenaga Medis Berkualitas</i>

Misi 1: Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya

ANALISIS SWOT SASARAN: Meningkatnya Daya Beli Masyarakat Terhadap Komoditas Pangan Dan Non Pangan

Strengths	<ul style="list-style-type: none"> • Infrastruktur perkotaan yang baik dan mendukung berjalannya distribusi logistik 	Build on Strengths	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas infrastruktur dikawasan strategis perdagangan dan jasa
Weakness	<ul style="list-style-type: none"> • Beberapa fasilitas pelayanan umum dan perdagangan dan jasa masih mengumpul di pusat kota yang menyebabkan disparitas pembangunan. 	Overcome Weakness	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong kualitas pangan masyarakat meningkat melalui pengendalian harga pangan • Pemerataan pusat-pusat atau cluster perdagangan dan jasa termasuk diantaranya pusat perkantoran yang mendukung sebagai sektor jasa
Oportunities	<ul style="list-style-type: none"> • Akan fungsionalnya Tol Trans Jawa menjadikan arus distribusi barang kebutuhan pangan dan non pangan dapat terkendali 	Expolit Opportunities	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong pihak swasta untuk mengembangkan usaha dan berinvestasi di Kabupaten Banyuwangi
	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi ekonomi makro yang sulit diprediksi 	Block Threats	<ul style="list-style-type: none"> • Menguatkan potensi unggulan Kabupaten Banyuwangi dalam meningkatkan proporsi PAD terhadap Total Pendapatan
Masalah	<i>Belum tegasnya komitmen untuk menjaga stabilitas harga pasar pada komoditas pangan maupun non-pangan</i>	Strategi	<i>Meningkatkan kualitas belanja masyarakat baik pada sektor pangan dan non pangan melalui stabilisasi perekonomian Kabupaten Banyuwangi dan penguatan sektor strategis Kabupaten Banyuwangi</i>

Tabel 6. 2: Analisis SWOT dan Perumusan Strategi Misi 2

Misi 2: Optimalisasi sumber daya untuk mewujudkan daya saing ekonomi daerah yang berkelanjutan			
ANALISIS SWOT SASARAN: Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan yang Berkelanjutan			
Strengths	<ul style="list-style-type: none"> ● Daya tarik investasi asing maupun dalam negeri yang cukup besar di Kabupaten Banyuwangi ● Spending of Money representasi dari perputaran uang wisatawan di Kabupaten Banyuwangi cukup tinggi ● Letak Kabupaten Banyuwangi yang cukup strategis yang juga didukung dengan sumber daya yang suportif dalam pengembangan ekonomi lokal 	Build on Strengths	<ul style="list-style-type: none"> ● Mendorong investasi dan perputaran ekonomi Kabupaten Banyuwangi pada sektor unggulan pertanian, industri, dan perdagangan berbasis kearifan lokal
Weakness	<ul style="list-style-type: none"> ● Belum optimalnya kualitas dan daya saing sektor UMKM ● Kurangnya kemampuan dan kapasitas pelaku usaha ● Belum optimalnya pemasaran produksi pertanian ● Belum efektif dan efisiennya sarana dan sarana pertanian dalam menunjang produktivitas ● Belum intensifnya pemasaran pariwisata berbasis IT ● Perlunya perluasan jaringan kemitraan pariwisata ● Lemahnya daya dukung infrastruktur dan SDM lokal pariwisata ● Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan ● Rendahnya kualitas lingkungan hidup khususnya air di beberapa wilayah Belum optimalnya penyediaan akses sanitasi dan air bersih 	Overcome Weakness	<ul style="list-style-type: none"> ● Fasilitasi pelatihan, akses modal, dan mentoring pelaku usaha dalam mengembangkan dan meningkatkan skala usahanya ● Integrasi sektor pertanian melalui sektor pariwisata dan meningkatkan akses pemasaran produk melalui toko online ● Meningkatkan sasaran pemasaran melalui media online yang lebih efisien terhadap jaringan pasar nasional maupun internasional ● Fasilitasi dan sosialisasi pelayanan persampahan hingga pelosok Kabupaten Banyuwangi, khususnya wilayah perdesaan dan pesisir dengan dominasi nelayan

Misi 2: Optimalisasi sumber daya untuk mewujudkan daya saing ekonomi daerah yang berkelanjutan

ANALISIS SWOT SASARAN: Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan yang Berkelanjutan

	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya pencemaran lingkungan dan sumber daya alam 		
Oportunities	<ul style="list-style-type: none"> Konsern Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Timur terhadap pariwisata Indonesia secara umum Rencana pemerintah pusat dalam membangun tol trans jawa mulai dari ujung timur Kabupaten Banyuwangi hingga ujung barat Banten 	Expolit Opportunities	<ul style="list-style-type: none"> Supporting terhadap kebutuhan pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Timur sebagai peluang Kabupaten Banyuwangi dalam mengembangkan pembangunan ekonominya
Threats	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan potensi ancaman budaya asing terhadap budaya lokal Komitmen segenap elemen masyarakat dan pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam mempertahankan pembangunan ekonomi Kabupaten Banyuwangi berbasis kearifan lokal 	Block Threats	<ul style="list-style-type: none"> Menyelenggarakan dengan masif event-event budaya lokal sebagai daya tarik wisata dan juga menegaskan komitmen pembangunan pariwisata Kabupaten Banyuwangi yang berbasis kearifan lokal
Masalah	<ul style="list-style-type: none"> <i>Perlemahan Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri terhadap Total PDRB</i> <i>Melambatnya Pertumbuhan Ekonomi</i> 	Strategi	<i>Integrasi Pengembangan Potensi Unggulan Sebagai Daya tarik Investasi Melalui Pengembangan Sektor Pariwisata Sebagai Poros Pembangunan Kabupaten Banyuwangi yang Berkelanjutan</i>

Misi 2: Optimalisasi sumber daya untuk mewujudkan daya saing ekonomi daerah yang berkelanjutan

ANALISIS SWOT SASARAN: Bertambahnya Nilai Investasi

<p>Strengths</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Daya tarik investasi asing maupun dalam negeri yang cukup besar di Kabupaten Banyuwangi • Spending of Money representasi dari perputaran uang wisatawan di Kabupaten Banyuwangi cukup tinggi • Letak Kabupaten Banyuwangi yang cukup strategis yang juga didukung dengan sumber daya yang suportif dalam pengembangan ekonomi lokal 	<p>Build on Strengths</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong arah investasi yang padat karya yang menjadikan masyarakat partisipatif dalam pembangunan Kabupaten Banyuwangi
<p>Weakness</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Struktur pelaku usaha didominasi usaha mikro yang informal dengan produktivitas terbatas • Belum terciptanya kondisifitas dan dominasi afirmasi terhadap Usaha Kecil Menengah • Belum optimalnya peran koperasi sebagai pelaku sektor riil • Kurangnya pertumbuhan wirausaha baru yang berkualitas • Konsistensi peningkatan investasi belum mampu menjawab tingginya permintaan • Tingkat Pengangguran Terbuka meningkat pada tahun 2017 	<p>Overcome Weakness</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menjadikan koperasi sebagai tumpuan mendasar pelaku usaha dalam penyediaan akses modal
<p>Oportunities</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tingginya perhatian pemerintah terhadap perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia pada umumnya 	<p>Expolit Opportunities</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menjadikan ekonomi kreatif sebagai konsern baru terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi

Misi 2: Optimalisasi sumber daya untuk mewujudkan daya saing ekonomi daerah yang berkelanjutan

ANALISIS SWOT SASARAN: Bertambahnya Nilai Investasi

Threats	<ul style="list-style-type: none"> Investor di Kabupaten Banyuwangi yang mayoritas membawa atau memanfaatkan tenaga kerja dari luar Kabupaten Banyuwangi 	Block Threats	<ul style="list-style-type: none"> Regulator terhadap investor maupun calon investor yang menjadikan masyarakat Kabupaten Banyuwangi sebagai penggerak motor pembangunan
Masalah	<i>Peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka</i>	Strategi	<i>Efektivitas modal investasi masuk di Kabupaten Banyuwangi melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi padat karya sebagai tumpuan utama pembangunan</i>

Misi 2: Optimalisasi sumber daya untuk mewujudkan daya saing ekonomi daerah yang berkelanjutan

ANALISIS SWOT SASARAN: Mengurangi Kesenjangan Tingkat Pendapatan

Strengths	<ul style="list-style-type: none"> Adanya intensi besar dari pemerintah untuk mereduksi tingginya kesenjangan 	Build on Strengths	<ul style="list-style-type: none"> Menguatkan afirmasi pemerintah dengan melibatkan stakeholder untuk menurunkan disparitas
Weakness	<ul style="list-style-type: none"> Pengentasan kesenjangan antara kelas pendapatan (Indeks Gini) masih stagnan 	Overcome Weakness	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi dan Inovasi pendekatan dalam pengentasan disparitas
Oportunities	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan daya tarik wisata di Kabupaten Banyuwangi membuka lapangan pekerjaan yang luas dan peluang usaha LPPD Kabupaten Banyuwangi Pernah 5 besar 	Expolit Opportunities	<ul style="list-style-type: none"> Mengoptimalkan Peluang Lapangan Kerja dan Peluang usaha melalui stimulasi-stimulasi seperti akses dan pelatihanmembangun penyelenggaraan pemerintah daerah yang berintegritas
Threats	<ul style="list-style-type: none"> Belum meratanya sebaran penduduk Kabupaten Banyuwangi 	Block Threats	<ul style="list-style-type: none"> Membangun/Menginisiasi Pusat Pertumbuhan baru diwilayah-wilayah remote

Misi 2: Optimalisasi sumber daya untuk mewujudkan daya saing ekonomi daerah yang berkelanjutan			
ANALISIS SWOT SASARAN: Mengurangi Kesenjangan Tingkat Pendapatan			
	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat Pengangguran Terbuka meningkat pada tahun 2017 		<ul style="list-style-type: none"> Menurunkan Pengangguran Terbuka melalui momentum lonjakan daya tarik kepariwisataan yang ada
Masalah	<i>Upaya Penurunan Disparitas belum menunjukkan progres optimal</i>	Strategi	<i>Meningkatkan Intensifikasi dan Atensi Terhadap Penurunan Disparitas</i>
Misi 2: Optimalisasi sumber daya untuk mewujudkan daya saing ekonomi daerah yang berkelanjutan			
ANALISIS SWOT SASARAN: Menjamin Perlindungan Sosial			
Strenghts	<ul style="list-style-type: none"> Optimalnya kinerja pengentasan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 	Build on Strengths	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan dan penguatan pengentasan PMKS
Weakness	<ul style="list-style-type: none"> Jangkauan cakupan pelayanan sosial dasar bagi PMKS Belum Menjangkau Secara Luas 	Overcome Weakness	<ul style="list-style-type: none"> Perluasan jangkauan cakupan pengentasan PMKS baik dari aspek wilayah maupun jeni
Oportunities	-	Expolit Opportunities	-
Threats	-	Block Threats	-
Masalah	<i>Belum optimalnya perluasan cakupan penanganan PMKS</i>	Strategi	<i>Perluasan cakupan bantuan dan penanganan PMKS</i>

Misi 2: Optimalisasi sumber daya untuk mewujudkan daya saing ekonomi daerah yang berkelanjutan

ANALISIS SWOT SASARAN: Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

<p>Strenghts</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya peningkatan penegakan peraturan daerah dan kepala daerah • Meningkatnya penyelesaian pengaduan perempuan dan anak dari tindak kekerasan • Efektifnya penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak, serta trafficking 	<p>Build on Strengths</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan penegakan peraturan perda • Penguatan Penyelesaian dan Penanganan Kekerasan Terhadap perempuan, anak dan trafficking
<p>Weakness</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya manajemen pelayanan korban bencana alam dan bencana sosial • Kurangnya kualitas infrastruktur pedesaan • Belum terbangunnya optimalisasi peningkatan pemberdayaan masyarakat di pedesaan • Terbatasnya kapasitas pemerintahan pemerintah desa • Masih kurangnya keberpihakan pembangunan terhadap anak 	<p>Overcome Weakness</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Inisiasi Sistem Mitigasi dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial • Peningkatan Kualitas infrastruktur Pedesaan • Peningkatan optimalisasi pemberdayaan masyarakat desa • Peningkatan Kapasitas Pemerintah desa melalui pelatihan-pelatihan • Peningkatan afirmasi pembangunan terhadap anak
<p>Oportunities</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya peran perempuan dalam organisasi dan pembangunan • Kesadaran dan keteguhan terhadap niali budaya lokal kuat 	<p>Expolit Opportunities</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi peran perempuan dalam pembangunan • Penguatan dan preservasi nilai Budaya lokal • Penguatan kesetaraan gender pada hak pendidikan dan kesehatan

Misi 2: Optimalisasi sumber daya untuk mewujudkan daya saing ekonomi daerah yang berkelanjutan

ANALISIS SWOT SASARAN: Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

	<ul style="list-style-type: none"> • Telah optimalnya kesetaraan gender khususnya hak pendidikan dan kesehatan yang direpresentasikan melalui IPG • Meningkatnya jumlah desa maju di Kabupaten Banyuwangi 		<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Desa Maju di Kabupaten Banyuwangi
Threats	<ul style="list-style-type: none"> • Masih kurangnya kesiagaan bahaya kebakaran • Penguatan Peran Tokoh Masyarakat dan Pemuka Agama belum signifikan • Besarnya tuntutan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa • Belum kuatnya karakter dan pondasi perekonomian perdesaan 	Block Threats	<ul style="list-style-type: none"> • Diseminasi urgensi kesiagaan bencana • Meningkatkan peran tokoh masyarakat dan pemuka agama dalam pembangunan • Peningkatan Kapasitas Pemerintah desa melalui pelatihan-pelatihan
Masalah	<i>Belum optimalnya penguatan modal sosial</i>	Strategi	<i>Optimalisasi Penguatan Modal Sosial</i>

Tabel 6. 3 Analisis SWOT dan Perumusan Strategi Misi 3

Misi 3: Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih (Good And Clean Governance) Serta Layanan Publik Yang Berkualitas Berbis Teknologi Informasi			
ANALISIS SWOT SASARAN: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			
Strenghts	<ul style="list-style-type: none"> Komitmen pemerintah Daerah banyuwangi untuk meningkatkan Nilai SAKIP 	Build on Strengths	<ul style="list-style-type: none"> Memastikan kelembagaan perangkat daerah sesuai dengan tujuan pembangunan
Weakness	<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya bisnis proses birokrasi pelayanan publik Belum optimalnya akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah daerah 	Overcome Weakness	<ul style="list-style-type: none"> mendorong bisnis proses pemerintah daerah yang berorientasi hasil dari core bisnis Meningkatkan kualitas perencanaan yang disesuaikan dengan kelembagaan perangkat daerah serta penganggaran dan pengendalian
Oportunities	<ul style="list-style-type: none"> Rekonstruksi Kelembagaan organisasi Perangkat Daerah Besarnya afirmasi dan atensi pemerintah pusat terhadap reformasi birokrasi 	Expolit Opportunities	<ul style="list-style-type: none"> Right sizing kelembagaan pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi Meningkatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business proses) dan sumber daya manusia aparatur.
Threats	<ul style="list-style-type: none"> regulasi pusat yang diskresi 	Block Threats	<ul style="list-style-type: none"> meningkatkan kapasitas SDM apatur
Masalah	<i>Reformasi Birokrasi yang belum optimal</i>	Strategi	<i>Mengembangkan sistem pemerintahan yang integratif melalui Institusionalisasi reformasi birokrasi dalam proses bisnis di semua level Pemerintahan</i>

Misi 3: Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih (Good And Clean Governance) Serta Layanan Publik Yang Berkualitas Berbis Teknologi Informasi

ANALISIS SWOT SASARAN: Terciptanya Inovasi Layanan Publik

Strengths	<ul style="list-style-type: none"> • sistem e-government yang sudah terbangun 	Build on Strengths	<ul style="list-style-type: none"> • pengembangan e-government dalam penyelenggaraan pelayanan publik
Weakness	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi informasi • Belum Optimalnya pelayanan Publik 	Overcome Weakness	<ul style="list-style-type: none"> • menciptakan inovasi layanan di segala bidang • meningkatkan kualitas layanan publik melalui teknologi informasi
Oportunities	<ul style="list-style-type: none"> • Tuntutan Revolusi Industri 4.0 kepada masyarakat 	Expolit Opportunities	<ul style="list-style-type: none"> • memanfaatkan teknologi informasi untuk memberikan pelayanan publik
Threats	<ul style="list-style-type: none"> • Masih rendahnya melek teknologi masyarakat untuk mengakses layanan e-government kurang kesadaran akan kebersihan lingkungan. 	Block Threats	<ul style="list-style-type: none"> • memberikan edukasi teknologi informasi ke masyarakat
Masalah	<i>Efektif dan efisien layanan pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi</i>	Strategi	<i>Meningkatkan akses masyarakat dalam layanan publik melalui penciptaan inovasi layanan di segala bidang</i>

Berdasarkan analisis di atas, berikut daftar strategi pembangunan Kabupaten Banyuwangi:

- St.1. Meningkatkan kualitas pendidikan Kabupaten Banyuwangi yang berdaya saing yang tidak hanya bertumpu terhadap pendidikan formal melalui penanaman dan penguatan pendidikan karakter dan berfokus terhadap menciptakan sumber daya manusia yang kreatif
- St.2. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Banyuwangi baik dalam Preventif, Represif, maupun Kuratif melalui Penyediaan Sarana, Prasarana dan Tenaga Medis Berkualitas
- St.3. Meningkatkan kualitas belanja masyarakat baik pada sektor pangan dan non pangan melalui stabilisasi perekonomian Kabupaten Banyuwangi dan penguatan sektor strategis Kabupaten Banyuwangi
- St.4. Intergrasi Pengembangan Potensi Unggulan Sebagai Daya tarik Investasi Melalui Pengembangan Sektor Pariwisata Sebagai Poros Pembangunan Kabupaten Banyuwangi yang Berkelanjutan
- St.5. Efektivitas modal investasi masuk di Kabupaten Banyuwangi melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi padat karya sebagai tumpuan utama pembangunan
- St.6. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Melalui Peningkatan Kualitas Aksesibilitas, Akses Barang-Jasa Hulu ke Hilir, Dan Stimulasi Pusat-Pusat Pertumbuhan Baru Dengan Memperhatikan Prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan
- St.7. Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dan Keadilan Sosial Dengan Menjamin Perluasan Cakupan Layanan Bagi PMKS
- St.8. Optimalisasi Penguatan Modal Sosial Pengarusutamaan Gender
- St.9. mengembangkan sistem pemerintahan yang integratif melalui Institusionalisasi reformasi birokrasi dalam proses bisnis di semua level Pemerintahan
- St.10. Meningkatkan akses masyarakat dalam layanan publik melalui penciptaan inovasi layanan di segala bidang

Tabel 6. 4 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi

VISI: “Terwujudnya Masyarakat Banyuwangi Yang Semakin Sejahtera, Mandiri, Dan Berakhlak Mulia Melalui Peningkatan Perekonomian Dan Kualitas Sumber Daya Manusia”		
Misi 1: Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Dan Akses Pendidikan	Meningkatkan kualitas pendidikan Kabupaten Banyuwangi yang berdaya saing yang tidak hanya bertumpu terhadap pendidikan formal melalui penanaman dan penguatan pendidikan karakter dan berfokus terhadap menciptakan sumber daya manusia yang kreatif
	Meningkatnya Kualitas Dan Akses Kesehatan	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Banyuwangi baik dalam Preventif , Represif, maupun Kuratif melalui Penyediaan Sarana, Prasarana dan Tenaga Medis Berkualitas
	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat Terhadap Komoditas Pangan Dan Non Pangan	Meningkatkan kualitas belanja masyarakat baik pada sektor pangan dan non pangan melalui stabilisasi perekonomian Kabupaten Banyuwangi dan penguatan sektor strategis Kabupaten Banyuwangi

VISI: “Terwujudnya Masyarakat Banyuwangi Yang Semakin Sejahtera, Mandiri, Dan Berakhlak Mulia Melalui Peningkatan Perekonomian Dan Kualitas Sumber Daya Manusia”

Misi 2: Optimalisasi sumber daya untuk mewujudkan daya saing ekonomi daerah yang berkelanjutan

Tujuan			Sasaran				Strategi
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan			Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan yang				Integrasi Pengembangan Potensi Unggulan Sebagai Daya tarik Investasi Melalui Pengembangan Sektor Pariwisata Sebagai Poros Pembangunan Kabupaten Banyuwangi yang Berkelanjutan, sebagai stimulasi upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat
			Berkelanjutan				

Misi 2: Optimalisasi sumber daya untuk mewujudkan daya saing ekonomi daerah yang berkelanjutan

Tujuan			Sasaran				Strategi
Mengentaskan Masyarakat dari Kemiskinan			Mengurangi Kesenjangan Tingkat Pendapatan				Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Melalui Peningkatan Kualitas Aksesibilitas, Akses Barang-Jasa Hulu ke Hilir, Dan Stimulasi Pusat-Pusat Pertumbuhan Baru Dengan Memperhatikan Prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan
			Menjamin Perlindungan Sosial				Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dan Keadilan Sosial Dengan Menjamin Perluasan Cakupan Layanan Bagi PMKS
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam				
Pembangunan							

VISI: “Terwujudnya Masyarakat Banyuwangi Yang Semakin Sejahtera, Mandiri, Dan Berakhlak Mulia Melalui Peningkatan Perekonomian Dan Kualitas Sumber Daya Manusia”

Misi 3: Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih (Good And Clean Governance) Serta Layanan Publik Yang Berkualitas Berbis Teknologi Informasi

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan Kualitas Pelayanan	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	mengembangkan sistem pemerintahan yang integratif melalui Institusionalisasi reformasi birokrasi dalam proses bisnis di semua level Pemerintahan
	Terciptanya Inovasi Layanan Publik	Meningkatkan akses masyarakat dalam layanan publik melalui penciptaan inovasi layanan di segala bidang

6.2 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap untuk penyusunan dokumen RPJMD.

Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Antisipasi terhadap segala kemungkinan yang muncul baik positif maupun negatif pada masa periode pemerintahan perlu dipersiapkan baik terkait permasalahan maupun isu strategis pada pembangunan kewilayahan. Oleh karena itu, arah kebijakan yang diambil harus melihat berbagai proyeksi pembangunan maupun analisis dan kajian dari evaluasi hasil pembangunan periode sebelumnya agar dapat diperoleh gambaran awal tentang profil daerah pada masa depan.

Arah kebijakan merupakan keputusan dari stakeholder sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Perumusan arah kebijakan didasarkan pada alternatif kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya, dari alternatif kebijakan yang inherent tersebut kemudian dirumuskan arah kebijakan yang lebih umum. Perumusan arah kebijakan juga memperhatikan strategi sebagai dasar perumusannya, setiap arah kebijakan dirumuskan untuk mendukung strategi.

Berdasarkan deskripsi tersebut, arah kebijakan sebagaimana dimaksud diterangkan dalam bentuk tabel berikut ini:

Tabel 6. 5 Arah Kebijakan Pembangunan Tahunan Kabupaten Banyuwangi

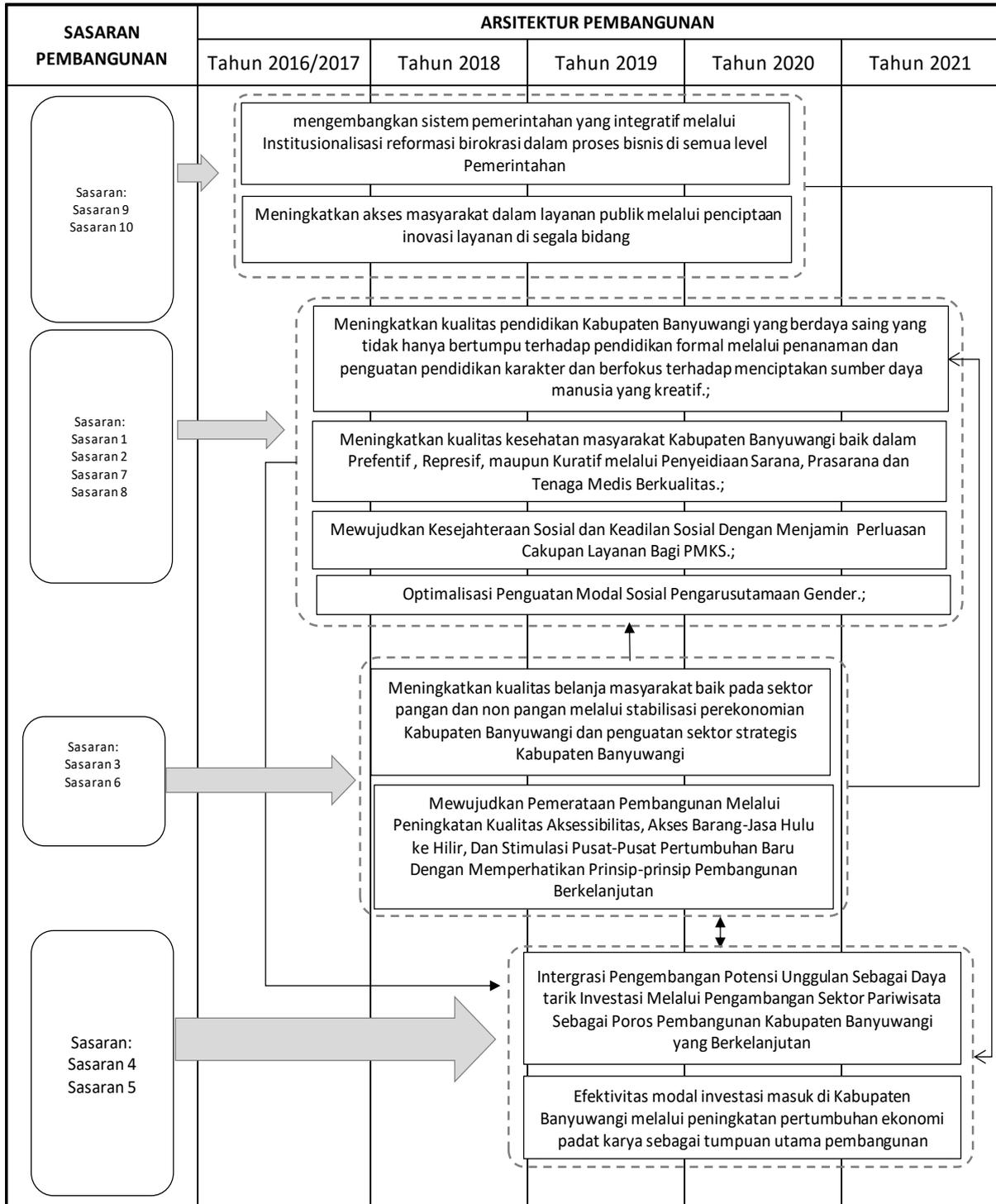
Arah Kebijakan				
Tahun 2016/2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Meningkatkan cakupan akses pendidikan wajib belajar 12 tahun				
Meningkatkan kualitas layanan pendidikan inklusif				
Menguatkan stimulasi, motivasi, dan diseminasi dikalangan masyarakat terkait pentingnya pendidikan melalui berbagai jenis media				
Mengintensifkan jalinan kerjasama dengan perguruan-perguruan tinggi				
Mendorong dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengembangkan serta menjaga keberlangsungan penyelenggaraan proses pendidikan				
Meningkatkan dan Menguatkan Kinerja Cakupan Layanan Kesehatan Kabupaten Banyuwangi				
Mengoptimalkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar				
Meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan				
Meningkatkan kualitas layanan kesehatan rumah sakit				
Meningkatkan bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan				
Menyemarakkan gerakan <i>Go Green</i> dan meningkatkan afirmasi pemerintah terhadap upaya lingkungan sehat				
		Peningkatan kualitas infrastruktur di kawasan strategis perdagangan dan jasa		
		Mendorong kualitas pangan masyarakat meningkat melalui pengendalian harga pangan		
		Pemerataan pusat-pusat atau cluster perdagangan dan jasa termasuk diantaranya pusat perkantoran yang mendukung sebagai sektor jasa		
		Mendorong pihak swasta untuk mengembangkan usaha dan berinvestasi di Kabupaten Banyuwangi		
		Mendorong BUMD dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagai stimulasi upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat		
		Menguatkan potensi unggulan Kabupaten Banyuwangi dalam meningkatkan proporsi PAD terhadap Total Pendapatan		
		Mendorong investasi dan perputaran ekonomi Kabupaten Banyuwangi pada sektor unggulan pertanian, industri, dan perdagangan berbasis kearifan lokal		

Arah Kebijakan				
Tahun 2016/2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
		Fasilitasi pelatihan, akses modal, dan mentoring pelaku usaha dalam mengembangkan dan meningkatkan skala usahanya		
		Integrasi sektor pertanian melalui sektor pariwisata dan meningkatkan akses pemasaran produk melalui toko online		
		Meningkatkan sasaran pemasaran melalui media online yang lebih efisien terhadap jaringan pasar nasional maupun internasional		
		Fasilitasi dan sosialisasi pelayanan persampahan hingga pelosok Kabupaten Banyuwangi, khususnya wilayah perdesaan dan pesisir dengan dominasi nelayan		
		Mendorong arah investasi yang padat karya yang menjadikan masyarakat partisipatif dalam pembangunan Kabupaten Banyuwangi		
		Menjadikan koperasi sebagai tumpuan mendasar pelaku usaha dalam penyediaan akses modal		
		Menjadikan ekonomi kreatif sebagai konsern baru terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi		
		Regulator terhadap investor maupun calon investor yang menjadikan masyarakat Kabupaten Banyuwangi sebagai penggerak motor pembangunan		
	Menguatkan afirmasi pemerintah dengan melibatkan stakeholder untuk menurunkan disparitas			
	Evaluasi dan Inovasi pendekatan dalam pengentasan disparitas			
	Mengoptimalkan Peluang Lapangan Kerja dan Peluang usaha melalui stimulasi-stimulasi seperti akses dan pelatihan			
	Membangun/Menginisiasi Pusat Pertumbuhan baru di wilayah-wilayah remote			
	Menurunkan Pengangguran Terbuka melalui momentum lonjakan daya tarik kepariwisataan yang ada			
Peningkatan dan penguatan pengentasan PMKS				
Perluasan jangkauan cakupan pengentasan PMKS baik dari aspek wilayah maupun jenis				
Penguatan penegakan peraturan perda				
Penguatan Penyelesaian dan Penanganan Kekerasan Terhadap perempuan, anak dan trafficking				
Inisiasi Sistem Mitigasi dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial				

Arah Kebijakan				
Tahun 2016/2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Peningkatan Kualitas infrastruktur Pedesaan				
Peningkatan optimalisasi pemberdayaan masyarakat desa				
Peningkatan Kapasitas Pemerintah desa melalui pelatihan-pelatihan				
Peningkatan afirmasi pembangunan terhadap anak				
Optimalisasi peran perempuan dalam pembangunan				
Penguatan dan preservasi nilai Budaya lokal				
Penguatan kesetaraan gender pada hak pendidikan dan kesehatan				
Peningkatan Desa Maju di Kabupaten Banyuwangi				
Diseminasi urgensi kesiagaan bencana				
Meningkatkan peran tokoh masyarakat dan pemuka agama dalam pembangunan				
Peningkatan Kapasitas Pemerintah desa melalui pelatihan-pelatihan				
Memastikan kelembagaan perangkat daerah sesuai dengan tujuan pembangunan				
mendorong bisnis proses pemerintah daerah yang berorientasi hasil dari core bisnis				
Meningkatkan kualitas perencanaan yang disesuaikan dengan kelembagaan perangkat daerah serta penganggaran dan pengendalian				
Right sizing kelembagaan pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi				
Meningkatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business proses) dan sumber daya manusia aparatur.				
meningkatkan kapasitas SDM aparatur				
Pengembangan e-government dalam penyelenggaraan pelayanan publik				
menciptakan inovasi layanan di segala bidang				
meningkatkan kualitas layanan publik melalui teknologi informasi				
memanfaatkan teknologi informasi untuk memberikan pelayanan publik				
memberikan edukasi teknologi informasi ke masyarakat				

Arah kebijakan dapat dijalankan dalam 1 (satu) tahun periode. Namun, dapat pula membutuhkan lebih dari satu tahun. Namun, yang terpenting keseluruhan arah kebijakan harus menjadi prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang padu dan mampu memberdayakan segenap potensi daerah dan pemerintah daerah sekaligus memanfaatkan segala peluang yang ada. Mengingat tiap-tiap arah kebijakan melekat pada masing-masing strategi, maka secara tidak

langsung perumusan horizon waktu berdasarkan strategi sama saja dengan menggunakan perspektif arah kebijakan. Disamping itu pula, pada lampiran Permendagri No 86 Tahun 2017 Tabel T-B.49 tertulis penyesuaian horizon pengerjaan arah kebijakan terhadap tujuan, sasaran dan strategi, sehingga akan lebih sederhana dan efektif jika menggunakan perspektif strategi. Berikut arsitektur horizon atau timeline pembangunan Kabupaten Banyuwangi pada periode RPJMD ini sebelum dan setelah perubahan.



Gambar 6. 1: Arsitektur Arah Kebijakan Kabupaten Banyuwangi

Dari gambar di atas, strategi dirumuskan secara spesifik terhadap horizon waktu. Dengan arah kebijakan, strategi dapat diterangkan secara logis kapan suatu strategi dijalankan mendahului atau menjadi prasyarat bagi strategi lainnya. Urut-urutan strategi dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun dipandu dan dijelaskan dengan arah kebijakan. Merujuk

pada strategi pelaksanaan arah kebijakan diatas, berikut arah kebijakan tahunan yang dituangkan tema pembangunan dan prioritas pembangunan ditetapkan kami sajikan dengan membandingkan Tematik sebelum perubahan RPJMD Kabupaten Banyuwangi:

Tabel 6. 6: Arah Kebijakan Pembangunan Tahunan Kabupaten Banyuwangi

TAHUN 0/TRANSISI (2016)	TAHUN 1 (2017)	TAHUN 2 (2018)	TAHUN 3 (2019)	TAHUN 4 (2020)	TAHUN 5 (2021)
Mewujudkan Pemangunan Daerah Berkelanjutan Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan	Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan	Memantapkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif Melalui Peningkatan Sektor Unggulan Pertanian & Pariwisata yang Berkelanjutan	Akselerasi Pertumbuhan dan Pemerataan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan	Menguatkan Pembangunan Manusia dan Kemandirian Ekonomi di Seluruh Wilayah yang Terintegrasi dan Berkelanjutan	Menstabilisasi Kemandirian Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan disertai dengan Penurunan Kesenjangan Kabupaten Banyuwangi

Pengembangan dan Kelembagaan Geopark Banyuwangi Indonesia

Taman Bumi atau yang selanjutnya disebut Geopark adalah sebuah wilayah geografi tunggal atau gabungan, yang memiliki Situs Warisan Geologi (Geosite) dan bentang alam yang bernilai, terkait aspek Warisan Geologi (Geoheritage), Keragaman Geologi (Geodiversity), Keanekaragaman Hayati (Biodiversity), dan Keragaman Budaya (Cultural Diversity), serta dikelola untuk untuk keperluan konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan dengan keterlibatan aktif dari masyarakat dan Pemerintah Daerah. Sehingga dapat digunakan untuk menumbuhkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap bumi dan lingkungan sekitar kawasan. Masa depan bangsa Indonesia bukan pada kegiatan ekstraktif. Guna menjamin eksistensi umat manusia di muka bumi dan kehidupan yang lebih baik, sudah saatnya merubah mindset pengelolaan Sumber Daya Alam dari ekstraksi ke konservasi dan Peningkatan Nilai Tambah.

Penyelenggaraan kegiatan pariwisata Geopark secara berkelanjutan dimaknai sebagai kegiatan dan upaya penyeimbangan antara pembangunan ekonomi dengan usaha konservasi.

Objek-objek warisan bumi di dalam Geopark berpeluang menciptakan nilai ekonomi. Pengembangan ekonomi lokal melalui kegiatan pariwisata berbasis alam (geologi) atau geowisata merupakan salah satu pilihan. Pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan mendorong pengembangan destinasi pariwisata. Pariwisata merupakan prioritas utama pemerintah dan penyumbang PDB, devisa dan lapangan kerja yang paling murah dan mudah. Pengembangan Geopark mendorong terciptanya ekonomi kreatif dan tumbuhnya sektor-sektor ekonomi baru. Status Geopark dari sebuah kawasan Geologi berpotensi meningkatkan daya tarik suatu destinasi wisata. Dalam konteks perkembangan daerah, laju sektor pariwisata terbukti menjadi penggerak ekonomi paling cepat ketimbang sektor-sektor lain. Faktanya, konsep Geopark memang berpotensi menghadirkan pendapatan yang signifikan. Tiongkok misalnya, dari pendapatan wisata sekitar 6 miliar dollar AS atau Rp 80 Triliun, sekitar 62% di antaranya atau mencapai Rp 49 Triliun, disumbangkan dari pengelolaan 33 kawasan Geopark dunia.

Perlu dibangun township yang nyaman untuk memwadhahi wisatawan. Unsur perkotaan tersebut tidak perlu mewah dan mahal, namun bersih rapi dan teratur saja akan mampu mendatangkan wisatawan dan menjadi transit activity seperti berjalan-jalan menikmati keindahan kota kecil, menikmati restoran-restoran ataupun berbelanja pada toko souvenir kecil. Konsep terintegrasi antara pembangunan kota dan pembangunan obyek wisata geopark haruslah dirancang secara baik. Terbukti, banyak kota kecil yang nyaman dengan pemandangan alam yang indah dapat menjadi tujuan wisata dunia.

Dalam konsep pengembangan Geopark, SDGs adalah sebagai framework yang melibatkan pemerintah dan aktor non pemerintah (OMS, Filantropy, akademisi, media, dll), integrasi sumber pembiayaan (Pemerintah dan non pemerintah, pusat-daerah, dll), serta menerapkan prinsip kemitraan (trust, equal partnership, mutual benefit, akuntabilitas dan transparansi). Adapun peran Geopark untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (9 dari 17 goals) adalah sebagai berikut:

1. Geopark melakukan kemitraan dan kerja sama, tidak hanya antara pemangku kepentingan lokal, tetapi juga secara internasional.
2. Pengembangan Geopark turut melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan.
3. Masyarakat diberikan pengetahuan untuk mengurangi dan beradaptasi dengan efek perubahan iklim.
4. Geopark mendidik dan menciptakan kesadaran tentang pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup.

5. Geopark mengurangi kerentanan masyarakat terhadap dampak bencana.
6. Geopark merupakan ruang kelas terbuka dan inkubator.
7. Geopark sangat menekankan pemberdayaan perempuan.
8. Promosi geowisata berkelanjutan merupakan salah satu pilar utama Geopark.
9. Melindungi, menjaga dan merayakan warisan

Berdasarkan Perpres No. 9 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengembangkan Geopark sesuai dengan kewenangannya. Dalam pelaksanaan Pengembangan Geopark, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melibatkan pemangku kepentingan. Pengembangan Geopark utamanya dilakukan melalui pengembangan destinasi pariwisata. Pemerintah Daerah melakukan alur perencanaan sesuai dalam Perpres. Peran Pemerintah Pusat melakukan koordinasi dan sinkronisasi program lintas sektor dalam mendukung pengembangan geopark sesuai dengan prioritas dan strategi yang tercantum dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) Geopark.

Tujuan dan substansi RAN Geopark antara lain: memberikan prinsip dasar pengembangan Geopark yang baik dan berkelanjutan; menetapkan jenis dan standar pelayanan nasional bagi Geopark tertentu (perencanaan, infrastruktur, konservasi, pemeliharaan); melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka memberikan layanan nasional; penyusunan target, indikator, dan tahun guna mendukung peningkatan target nasional jumlah kunjungan wisata mancanegara; meningkatkan kuantitas dan kualitas Geopark Nasional dan UNESCO Global Geopark; serta kerangka pendanaan dan kelembagaan.

Dukungan Pemerintah Pusat dalam penyusunan rencana induk dalam rangka penetapan Geopark, antara lain:

1. Penentuan batas atau deliniasi kawasan;
2. Program konservasi Geoheritage, Geodiversity, Biodiversity dan Cultural
3. Diversity;
4. Program pengembangan pendidikan dan Litbang;
5. Program pelestarian sosial budaya
6. Program pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi kreatif;
7. Pengembangan destinasi pariwisata;
8. Inventarisasi amenities dan infrastruktur pendukung;
9. Promosi nilai ilmiah Geopark;
10. Pengembangan kerjasama dan kemitraan Geopark Nasional, Regional dan Global.

Berdasarkan uraian tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi memegang peran penting (kunci) dalam proses pengembangan geopark di Banyuwangi karena Geopark menganut asas *bottom up*.

6.3 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Desain *Logical Framework* Pencapaian Misi 1 (Tujuan 1) disajikan sebagai berikut:



Gambar 6.2: Desain *Logical Framework* Pencapaian Misi 1 Tujuan 1 (Program)

Tabel 6. 7: Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif

Kabupaten Banyuwangi Misi 1 (Tujuan 1)

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	2020		2021		Kinerja Akhir RPJMD		OPD	KET.
				Kinerja Target	Rp (Miliar)	Kinerja Target	Rp (Miliar)	Kinerja Target	Rp (Miliar)		
				1	2	3	4	5	6		
Misi 1: Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya											
	Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	IPM	Skala	72,10	341,82	72,95	378,99	72,95	378,99	Dinas Pendidikan, DisPora, Dinas Perpustakaan dan Arsip, Dinas Kesehatan, Dinsos Pemberdayaan Perempuan dan KB, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Perdagangan dan UM	
	Sasaran 1.1 Meningkatkan Kualitas dan Akses Pendidikan	Indeks Pendidikan	Skala	0,62	182,87	0,63	217,15	0,63	217,15	Dinas Pendidikan, DisPora, Dinas Perpustakaan dan Arsip	
01.01.15	Program Peningkatan Akses PAUD	APK PAUD formal (usia 5-6 tahun)	%	100	0,53	100	0,52	100	0,52	Dinas Pendidikan	*
		APM PAUD formal (usia 5-6 tahun)	%	73,76		74,76		74,76			*
		Rasio ketersediaan lembaga terhadap anak usia Paud 5-6 tahun	Rasio	-		-		-			*
		Persentase ketersediaan ruang kelas terhadap kelas rombel	%	100		100		100			*
		Persentase penduduk miskin usia 5-6 tahun terlayani PAUD Formal	Skala	30		40		40			***
01.01.16	Program Peningkatan Kualitas PAUD	Persentase Lembaga PAUD formal terakreditasi	%	65,25	2,48	66,25	2,22	66,25	2,22	Dinas Pendidikan	***
		Persentase nilai rata-rata pengetahuan dan keterampilan PENDIDIK dan Tenaga Kependidikan TK	%	64,6		64,6		64,6			***
		Persentase Tenaga Pendidik PAUD	%	51,43		51,48		51,48			***

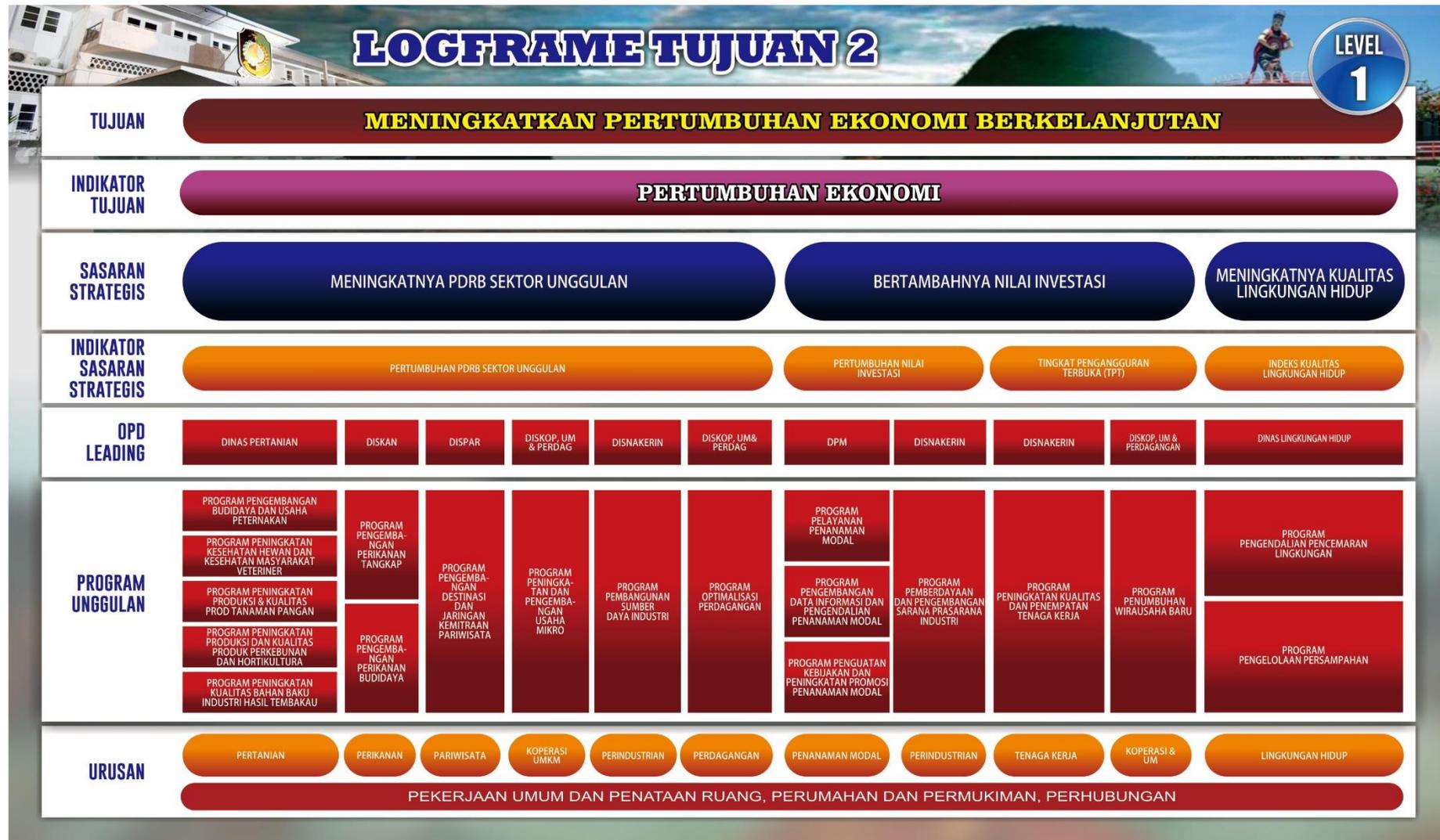
KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	2020		2021		Kinerja Akhir RPJMD		OPD	KET.	
				Kinerja Target	Rp (Miliar)	Kinerja Target	Rp (Miliar)	Kinerja Target	Rp (Miliar)			
				4	5	6	7	8	9			
1	2	3	Misi 1: Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya								10	11
		<i>berkualifikasi S-1 dan bersertifikasi</i>										
01.01.21	Program Peningkatan Akses Pendidikan Masyarakat	<i>Jumlah Lembaga kursus dan pelatihan/PKBM berizin</i>	%	49	0,32	50	0,41	50	0,41			
		<i>Angka melek aksara penduduk usia 15 tahun keatas (Persentase)</i>	%	98,01		98,02		98,02				
		<i>Persentase penduduk usia 7-21 tahun yang putus/tidak sekolah yang tertangani PNF</i>	%	73,29		73,39		73,39				
		<i>Persentase warga belajar miskin yang terlayani PNF</i>	%	25		30		30				
01.01.17	Program Peningkatan Akses Pendidikan SD	<i>APK SD/MI/Paket A</i>	%	101,33	21,71	100,33	21,96	100,33	21,96		**	
		<i>APM SD/MI/Paket A</i>	%	99,98		99,99		99,99		**		
		<i>Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs</i>	%	100		100		100		**		
		<i>Perbedaan Gender Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs</i>	%	1		1		1		**		
		<i>Rasio ketersediaan lembaga terhadap penduduk usia SD (10.000)</i>		1:73		1:74		1:74				
		<i>Persentase penduduk miskin usia 7-12 tahun terlayani pendidikan SD</i>	%	45		50		50				
01.01.18	Program Peningkatan Kualitas Pendidikan SD	<i>Jumlah SD terakreditasi A</i>	Sekolah	314	99,45	315	129,28	315	129,28		***	
		<i>Persentase nilai rata-rata pengetahuan dan keterampilan</i>	%								***	

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	2020		2021		Kinerja Akhir RPJMD		OPD	KET.
				Kinerja Target	Rp (Miliar)	Kinerja Target	Rp (Miliar)	Kinerja Target	Rp (Miliar)		
				4	5	6	7	8	9		
1	2	3	Misi 1: Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya						10	11	
		<i>Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD (nilai UKG)</i>									
		<i>Angka Putus Sekolah SD</i>	%	0,02		0,02		0,02			***
		<i>Persentase Tenaga Pendidik SD berkualifikasi S-1 dan bersertifikasi</i>	%	60,49		61,49		61,49			***
01.01.19	Program Peningkatan Akses Pendidikan SMP	<i>APK SMP/Mts/Paket B</i>	%	100,64	3,48	100	3,69	100	3,69		**
		<i>APM SMP/MTs/Paket B</i>	%	89,23		89,24		89,24		**	
		<i>Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs/Paket ke SMA/SMK/MA/Paket C</i>	%	99,31		99,39		99,39		**	
		<i>Perbedaan gender angka Melanjutkan (AM) Gender SMP/MTs/Paket B ke SMA/SMK/MA/Paket C</i>	%	1		1		1		**	
		<i>Rasio ketersediaan lembaga terhadap penduduk usia SMP (10.000)</i>		1:42		1:43		1:43			
		<i>Persentase penduduk miskin usia 13-15 tahun terlayani pendidikan SMP</i>	%	45		50		50			
		<i>Jumlah SMP terakreditasi A</i>	Sekolah	94		104		104		***	
01.01.20	Program Peningkatan Kualitas Pendidikan SMP	<i>Angka Putus Sekolah SMP</i>	%	0,23	44,86	0,21	48,32	0,21	48,32		***
		<i>Persentase nilai rata-rata</i>	%							***	

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	2020		2021		Kinerja Akhir RPJMD		OPD	KET.
				Kinerja Target	Rp (Miliar)	Kinerja Target	Rp (Miliar)	Kinerja Target	Rp (Miliar)		
				4	5	6	7	8	9		
1	2	3	Misi 1: Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya						10	11	
		pengetahuan dan keterampilan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP									
		Persentase Tenaga Pendidik SMP berkualifikasi S-1 dan bersertifikasi	%	62,41		62,91		62,91			***
02.13.22	Program Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah event	Kegiatan	11	8,05	11	8,49	11	8,49		***
02.13.21	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Jumlah insan olahraga yang berprestasi	Orang	1000	0,65	1000	0,65	1000	0,65	Dinas Pemuda dan Olahraga	**
02.17.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase jumlah pengunjung perpustakaan	%	90	1,23	91	1,84	91	2,04	Dinas Perpustakaan dan Arsip	**
	Sasaran 1.2 Meningkatkan Kualitas dan Akses Kesehatan	Indeks Kesehatan	Skala	0,79	155,52	0,80	157,38	0,81	157,38	Dinas Kesehatan, Dinsos Pemberdayaan Perempuan dan KB	
01.02.15	Program Kesehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan	Persentase Akses Penduduk Terhadap Jamban Sehat	%	98	5,93	100	5,98	100	5,98		*
01.02.17	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Persentase Penemuan dan Penanganan Kasus	%	100	2	100	2	100	2	Dinas Kesehatan	
01.02.16	Program Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	Prevalensi balita stunting	%	24	1,83	23	1,98	23	1,98		*
01.02.19	Program Sumber Daya Kesehatan	Cakupan Anggaran Kesehatan	%	11	116,23	12	116,72	12	116,72		*
01.02.18	Program Pelayanan Kesehatan	Utility Rate	%	27,81	30,72	28,71	31,64	28,71	31,64		*
02.08.15	Program Keluarga Berencana	Persentase cakupan KB Aktif	%	70	1,07	70	3,45	70	3,45	Dinsos Pemberdayaan Perempuan dan KB	***
	Sasaran 1.3 Meningkatnya Daya Beli Masyarakat terhadap Komoditas Pangan dan Non Pangan	Indeks Purchasing Power Parity	Skala	0,77	3,43	0,78	4,46	0,78	4,46	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan dan UM	
02.03.15	Program Peningkatan Ketahanan dan Diversifikasi Pangan	Skor PPH Ketersediaan	Nilai/Angka	95	3,08	95	4	95	4	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	***
		Persentase penurunan	%	0,3		0,3		0,3			***

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	2020		2021		Kinerja Akhir RPJMD		OPD	KET.
				Kinerja Target	Rp (Miliar)	Kinerja Target	Rp (Miliar)	Kinerja Target	Rp (Miliar)		
				4	5	6	7	8	9		
1	2	3	Misi 1: Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya						10	11	
		<i>penduduk rawan pangan</i>									
		<i>Koefisien variasi harga pangan (beras) di tingkat produsen</i>	%	≤ 5%		≤ 5%		≤ 5%			***
		<i>Kondisi Harga GKP di Tingkat Produsen ≥ HPP</i>	hpp	HPP = Rp. 3750/kg		HPP = Rp. 3750/kg		HPP = Rp. 3750/kg			***
		<i>Skor PPH Konsumsi</i>	skor	90,5		90,5		90,5			***
		<i>Persentase Keamanan pangan segar</i>	%	≥ 80%		≥ 80%		≥ 80%			***
03.06.16	Program Stabilisasi Harga Komoditas Perdagangan	<i>Rata-rata persentase kenaikan harga komoditas</i>	%	10,72	0,35	10,72	0,46	10,72	0,46	Dinas Perdagangan dan UM	*

Desain *Logical Framework* Pencapaian Misi 2 (Tujuan 2) beserta Program Prioritas disajikan sebagai berikut:



Gambar 6.3: Desain *Logical Framework* Pencapaian Misi 2 Tujuan 2 (Program)

Tabel 6. 8: Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif

Kabupaten Banyuwangi Misi 2 (Tujuan 2)

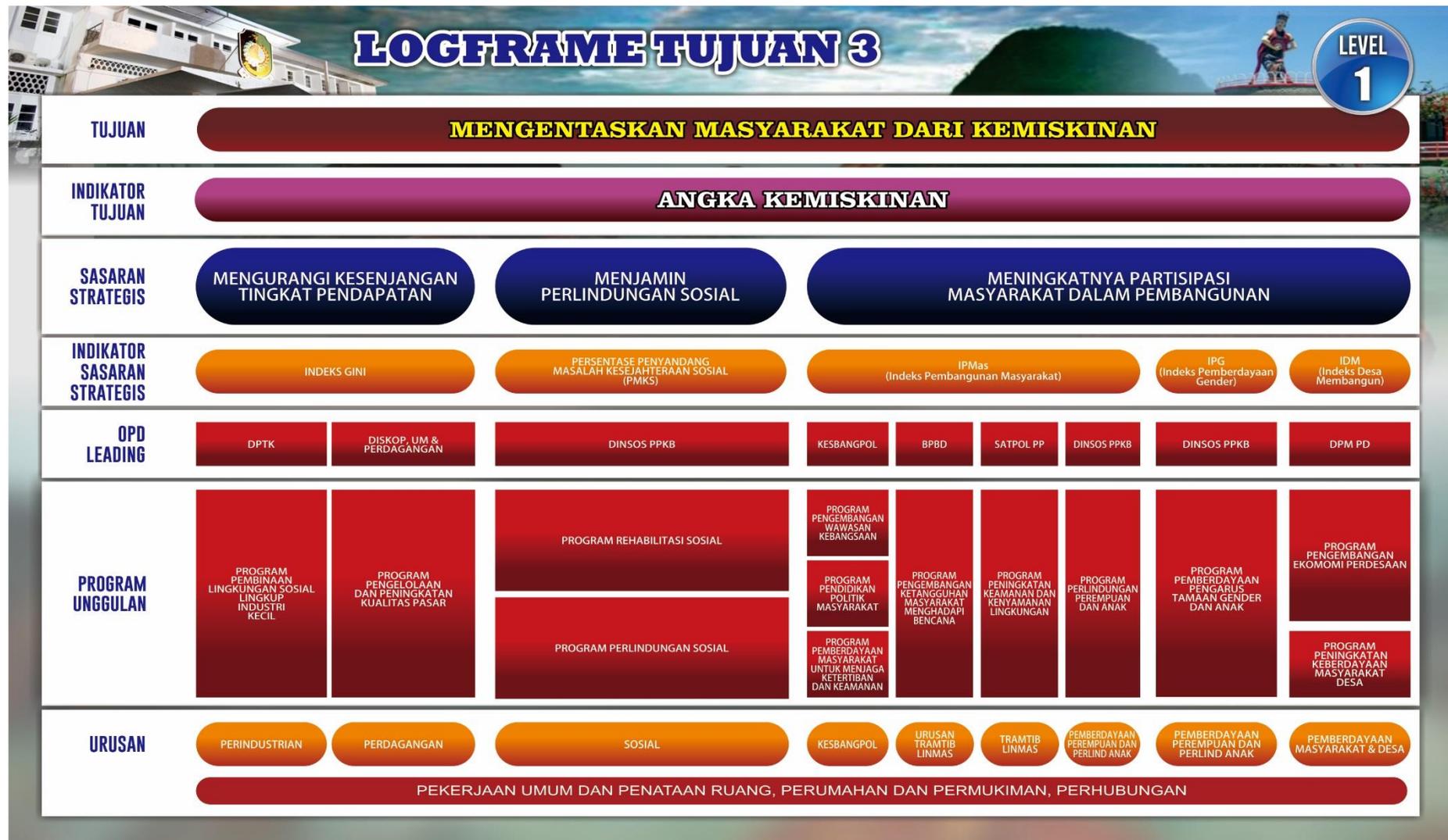
KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	2020		2021		Kinerja Akhir RPJMD		OPD	KET.
				Kinerja Target	Rp (Miliar)	Kinerja Target	Rp (Miliar)	Kinerja Target	Rp (Miliar)		
				4	5	6	7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Misi 2: Optimalisasi Sumber Daya Untuk Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan											
	Tujuan 2 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,90	95,27	5,94	105,55	5,94	105,55	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan, Dinas Perdagangan dan UM, Disbudpar, DLH, DPMPSTP, Disnakertrans dan Perindustrian	
	Sasaran 2.1 Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan yang Berkelanjutan	Pertumbuhan PDRB sektor Unggulan	%	6,45	65,46	7,02	67,38	7,02	67,38	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan, Dinas Perdagangan dan UM, Disbudpar	
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Skala	68,39	16,62	68,39	20,91	68,39	20,91	DLH	
03.03.15	Program Pengembangan Budidaya dan Usaha Peternakan	Persentase kelompok yang memanfaatkan teknologi peternakan tepat guna	%	14	1,87	15	2,06	15	2,06	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	***
		Produksi daging	Ton	11		12		12			***
		Produksi telur	Ton	13		14		14			***
		Produksi susu	Ton	1		2		2			***
		Rata-rata prosentase peningkatan produksi hasil peternakan (%)	(%)	14		15		15			**
		Jumlah Keompo dan Usaha peternakan yang tumbuh		6,30	1,87	6,30	2,43	630			
03.03.16	Program Peningkatan Kesehatan Hewan dan Kesehatan masyarakat Veteriner	Angka kejadian penyakit	%	4	3,7	4	4,46	4	4,46	*	
		Angka kematian temak	%	-		-		-		***	
		Usaha produk hewan yang bersertifikasi PRA/NKV	Unit	7		8		8		**	
03.03.17	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Angka kejadian penyakit								*	
		Angka kematian temak								*	

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	2020		2021		Kinerja Akhir RPJMD		OPD	KET.		
				Kinerja Target	Rp (Miliar)	Kinerja Target	Rp (Miliar)	Kinerja Target	Rp (Miliar)				
				4	5	6	7	8	9				
1	2	3	Misi 2: Optimalisasi Sumber Daya Untuk Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan									10	11
		Usaha produk hewan yang bersertifikai PR/NKF	Dokumen								*		
03.03.18	Program Peningkatan Produksi dan Kualitas Produk Perkebunan dan Hortikultura	Persentase peningkatan produksi tanaman hortikultura unggulan daerah	%	3,57	11,34	3,57	11,42	3,57	11,42	Dinas Perikanan	*		
		Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan unggulan daerah	%	3,57		3,57		3,57			*		
		Jumlah sertifikasi produk perkebunan dan hortikultura	Dokumen	6	6	6	*						
03.03.19	Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku Industri Hasil Tembakau	Persentase peningkatan produksi tembakau	%	3,57	2,7	3,57	2,6	3,57	2,6	*			
		Jumlah sertifikasi tembakau	Dokumen	3		3		3		***			
03.01.15	Program Pengembangan Perikanan Budidaya	Volume produksi perikanan budidaya	Ton	30863	373	30863	5,17	30863	6,86	*			
		Jumlah luas pemanfaatan lahan budidaya	Ha	1566,9		1566,9		*					
		Jumlah produksi benih ikan air tawar di kabupaten	Juta ekor	33,7		33,7		*					
		Persentase jumlah pokdakan yang meningkat kelasnya	%	57%		57%		*					
03.01.16	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Volume produksi perikanan tangkap	Ton	75429	3,18	75429	3,18	75429	3,18	*			
		Nilai produksi perikanan tangkap	Rp.Trilyun	2,01		2,01		*					
		Persentase peningkatan PNBP sektor perikanan tangkap	%	10		10		*					
		Persentase jumlah KUB yang meningkat kelasnya	%	45%		45		*					

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	2020		2021		Kinerja Akhir RPJMD		OPD	KET.	
				Kinerja Target	Rp (Miliar)	Kinerja Target	Rp (Miliar)	Kinerja Target	Rp (Miliar)			
				4	5	6	7	8	9			
1	2	3	Misi 2: Optimalisasi Sumber Daya Untuk Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan								10	11
02.11.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Usaha Mikro	Persentase usaha mikro yang mengalami perkembangan usaha	%	20	2,67	20	2,72	20	3,4	Dinas Perdagangan dan UM		
03.02.15	Program Pengembangan Destinasi dan Jaringan Kemitraan Pariwisata	Length of stay	Hari	4	10,53	4	12,69	4	12,69	Disbudpar	*	
03.07.15	Program Pembangunan Sumber Daya Industri	Persentase peningkatan nilai penjualan (omset) IKM	Rp.Trilyun	7.86	4.13	7.86	4.13	7.86	4.13	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		
03.06.15	Program Optimalisasi Perdagangan	Jumlah realisasi ekspor		US\$ 140 Jt	0,75	US\$ 140 Jt	0,84	US\$ 140 Jt	0,84	Dinas Perdagangan dan UM		
		Persentase pertumbuhan sub sektor perdagangan besar dan eceran	%	10,92	0,95	10,92	1,11	10,92	1,11			
		Persentase peningkatan pelaku usaha yang tertib niaga	%	12,66	1,7	12,66	2,2	12,66	2,2			
02.05.15	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang dikelola	%	61	18,57	61	18,57	61	18,57	DLH	*	
02.05.16	Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan	Indeks kualitas air	Skala	59,4	2,34	59,4	2,34	59,4	2,34			
		Indeks kualitas udara	Skala	87,5		87,5		87,5				
	Sasaran 2.2 Bertambahnya Nilai Investasi	Pertumbuhan Nilai Investasi	%	69	8,26	70	10,72	70	10,72	DPMPTSP; Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian		
		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,08	4,925	2,98	6,5405	2,98	6,5405	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian; Dinas Perdagangan dan UM		
02.12.15	Program Pengembangan Data, Informasi dan Pengendalian Penanaman Modal	Persentase pemenuhan kebutuhan data dan informasi penanaman modal	%	95	0,62	95	0,62	95	0,62	DPMPTSP	*	
		Persentase peningkatan LKPM	%	17		17		17			*	
02.12.16	Program Penguatan Kebijakan dan Peningkatan Promosi Penanaman Modal	Jumlah minat Penanaman Modal	Rp.Trilyun	3	0,74	3	0,84	3	0,94		*	

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	2020		2021		Kinerja Akhir RPJMD		OPD	KET.
				Kinerja Target	Rp (Miliar)	Kinerja Target	Rp (Miliar)	Kinerja Target	Rp (Miliar)		
				4	5	6	7	8	9		
1	2	3	Misi 2: Optimalisasi Sumber Daya Untuk Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan						10	11	
02.12.17	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase kesesuaian penyelesaian perizinan sesuai dengan SOP	%	95	0,53	95	0,68	95	0,68		*
02.01.15	Program Peningkatan Kualitas, Penempatan, dan Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang bersertifikat	%	50,2	0,82	50,2	1,14	50,2	1,25		***
		Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang memiliki kompetensi	%	60	0,82	60	0,94	60	1,06		***
		Persentase Permasalahan PMI yang terselesaikan	%	70	0,71	70	0,92	70	0,92		
02.01.16	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase perselisihan hubungan industrial yang terselesaikan	%	90	0,85	90	1,11	90	1,11		***
		Persentase Permasalahan PMI yang terselesaikan	%	40	0,71	45	0,92	45	0,92		***
02.11.16	Program Penumbuhan Wirausaha Baru	Persentase wirausaha mikro baru yang tumbuh	%	0,5	1,15	0,5	1,41	0,5	1,51	Dinas Perdagangan dan UM	*
		Rasio pemerataan unit usaha mikro kecil dan menengah	%	22	0,5	22	0,5	22	0,5		
03.07.17	Program Pemberdayaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Industri	Persentase cakupan pengembangan sentra industri	%	70	1,16	70	1,51	70	1,51	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian	

Desain *Logical Framework* Pencapaian Misi 2 (Tujuan 3) beserta Program Prioritas disajikan sebagai berikut:



Gambar 6.4: Desain *Logical Framework* Pencapaian Misi 2 Tujuan 3 (Program)

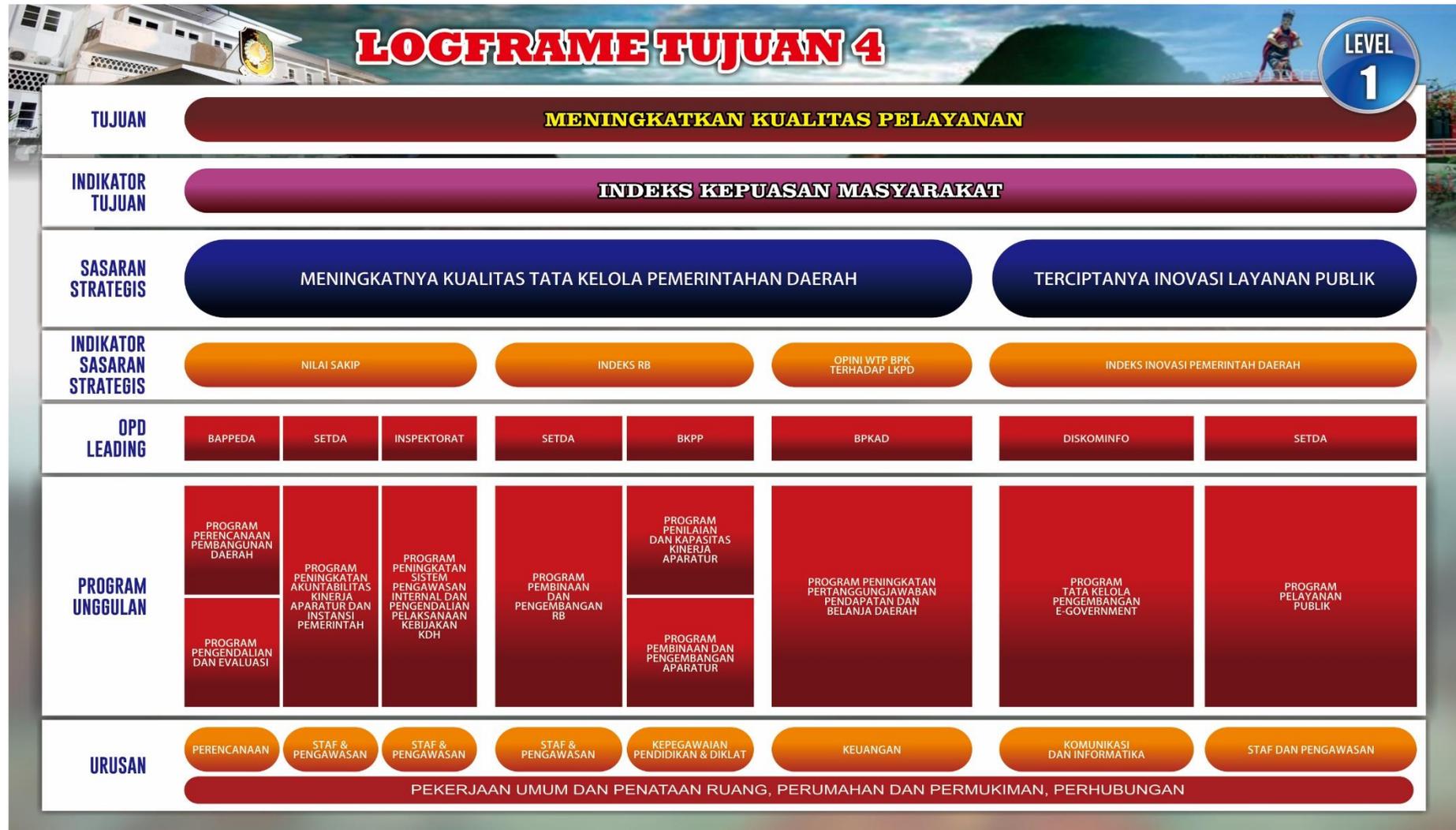
Tabel 6. 9: Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif

Kabupaten Banyuwangi Misi 2 (Tujuan 3)

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	2020		2021		Kinerja Akhir RPJMD		OPD	KET.
				Kinerja Target	Rp (Miliar)	Kinerja Target	Rp (Miliar)	Kinerja Target	Rp (Miliar)		
				1	2	3	4	5	6		
Misi 2: Optimalisasi Sumber Daya Untuk Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan											
	Tujuan 3 : Mengentaskan Masyarakat dari Kemiskinan	Angka Kemiskinan	%	7.013	24,1	6.551	27,84	6.551	27,84	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Dinas perdagangan dan UM, Dinsos Pemberdayaan Perempuan dan KB, Satpol PP, BPBD, DPMD	
	Sasaran 3.1 Mengurangi Kesenjangan Tingkat Pendapatan	Indeks gini	Skala	0,277	9,98	0,275	11,67	0,275	11,67	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Dinas perdagangan dan UM	
03.07.16	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Industri Kecil	Rasio ketimpangan pendapatan IKM wilayah kecamatan (ketimpangan versi bank dunia)	%	16,75	3,5	16,75	4,55	16,75	4,55	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	*
03.06.18	Program Pengelolaan dan Peningkatan Kualitas Pasar	Persentase pasar rakyat yang mengalami peningkatan standar sesuai SNI	%	11,22	6,48	11,22	7,12	11,22	7,12	Dinas Perdagangan dan UM	***
	Sasaran 3.2 Menjamin Perlindungan Sosial	Persentase PMKS	%	12,3	5,12	12,1	6	12,1	6	Dinsos Pemberdayaan Perempuan dan KB	
01.06.15	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase pelayanan bagi PMKS	%	3,2	1,47	3,4	1,5	3,4	1,5	Dinsos Pemberdayaan Perempuan dan KB	**
01.06.16	Program Perlindungan Sosial	Persentase PMKS prioritas yang mendapat jaminan hidup dasar meningkat	%	10,11	1,18	10,11	1,24	10,11	1,29		*
		Persentase korban bencana yang ditangani	%	94	1,18	96	1,4	96	1,53		*
		Persentase Perintis Kemerdekaan, Janda Perintis Kemerdekaan dan Veteran yang diberi bantuan	%	75	0,13	75	0,15	75	0,15	*	
	Sasaran 3.3 Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	IPMas	Skala	0,69	4,9	0,70	5,07	0,70	5,07	Satpol PP,BPBD	
		IPG	skala	86,2	0,97	86,34	1,26	86,34	1,26	Dinsos Pemberdayaan Perempuan dan KB	
		IDM	skala	0,81	3,13	0,82	3,84	0,82	3,84	DPMD	
04.02.15	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Potensi angka konflik suku, agama, ras dan antar golongan	Kasus	1	1,69	1	1,35	1	1,35	Kesbangpol	

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	2020		2021		Kinerja Akhir RPJMD		OPD	KET.
				Kinerja Target	Rp (Miliar)	Kinerja Target	Rp (Miliar)	Kinerja Target	Rp (Miliar)		
				4	5	6	7	8	9		
1	2	3	Misi 2: Optimalisasi Sumber Daya Untuk Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan						10		
04.02.16	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase angka masyarakat yang menggunakan hak politiknya	%	67,00	1,55	72,00	3,92	72,00	3,92		
04.02.17	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Angka potensi gangguan ideologi, politik, ekonomi pertahanan dan keamanan	Kasus	12,00	3,03	12,00	3,21	12,00	3,21		
01.05.20	Program Pengembangan Ketangguhan Masyarakat Menghadapi Bencana	Persentase peningkatan ketangguhan masyarakat terhadap ancaman bencana	%	90	0,99	90	1,09	90	1,29	BPBD	
		Desa tangguh yang telah terbentuk	Desa	2		2		2			
01.05.19	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase patroli ketertiban	%	98	4,08	98	4	98	4	Satpol PP	*
02.01.15	Program Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase penyelesaian pengaduan dari tindak kekerasan dan trafficking	%	50	0,82	50	0,92	50	0,92	Dinsos Pemberdayaan Perempuan dan KB	***
02.01.16	Program Pemberdayaan, Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Persentase kelompok perempuan mandiri	%	85	0,81	85	0,81	85	0,81		**
02.07.16	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Indeks Ketahanan Sosial	Skala	0,79	1,47	0,79	1,47	0,79	1,47	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	*
02.07.15	Program Pengembangan Ekonomi Pedesaan	Indeks Ketahanan Ekonomi	Skala	0,74	1,67	0,74	1,67	0,74	1,67		*
		Indeks Ketahanan Lingkungan / Ekologi	Skala	0,71		0,71		0,71			

Desain *Logical Framework* Pencapaian Misi 3 (Tujuan 4) beserta Program Prioritas disajikan sebagai berikut:



Gambar 6.5: Desain *Logical Framework* Pencapaian Misi 3 Tujuan 4 (Program)

Tabel 6. 10: Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif

Kabupaten Banyuwangi Misi 3 (Tujuan 4)

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	2.020		2.021		Kinerja Akhir RPJMD		OPD	KET.
				Kinerja Target	Rp (Miliar)	Kinerja Target	Rp (Miliar)	Kinerja Target	Rp (Miliar)		
				1	2	3	4	5	6		
Misi 3: Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih (Good and Clean Governance) serta Layanan Publik yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi											
	Tujuan 4: meningkatkan Kualitas Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	skala	90.7	20.85	93.14	20.85	93.14	20.85	Bappeda, Setda, Inspektorat, BKD, BPKAD, Diskominfo	
	Sasaran 4.1 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	status	A	43.474,00	AA	43.474,00	AA	43.474,00	Bappeda, Setda, Inspektorat	
		Indeks RB	%	77,00	3.61	78,00	3.61	78,00	3.61	Setda, BKD	
		Opini WTP BPK terhadap LKPD	status	WTP	4.98	WTP	4.98	WTP	4.98	BPKAD	
05.01.16	Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase SKPD yang tercapai target programnya	%	90,00	0,43	90,00	0,56	90,00	0,56	Bappeda	**
05.01.15	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase terpenuhinya aspek kualitas dalam dokumen perencanaan	%	90,00	1,91	90,00	2,48	90,00	2,48	Bappeda	**
05.05.40	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur dan Instansi Pemerintah	Persentase SKPD yang nilai AKIPnya Baik/B hasil evaluasi Inspektorat (TIM) dari SKPD yang dievaluasi	%	85,00	0,63	85,00	0,74	85,00	0,74	Setda	*
05.05.15	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH pada Wilayah IRBAN I	Persentase laporan keuangan SKPD yang sesuai SAP dalam mendukung tercapainya WTP pada wilayah Irban I	%	100,00	1,22	100,00	1,30	100,00	1,30	Inspektorat	*
		Persentase rekomendasi temuan yang selesai ditindaklanjuti : Keuangan negara/daerah dan administrasi pada wilayah Irban I	%	70,00		70,00		70,00			*
		Persentase hasil evaluasi SAKIP	%	80,00	80,00	80,00	*				

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	2.020		2.021		Kinerja Akhir RPJMD		OPD	KET.
				Kinerja Target	Rp (Miliar)	Kinerja Target	Rp (Miliar)	Kinerja Target	Rp (Miliar)		
				1	3	5	7	8	9		
Misi 3: Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih (Good and Clean Governance) serta Layanan Publik yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi											
		dengan nilai minimal A pada wilayah Irban I									
05.05.16	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH pada Wilayah IRBAN II	Persentase laporan keuangan SKPD yang sesuai SAP dalam mendukung tercapainya WTP pada wilayah Irban II	%	100,00	1,05	100,00	1,47	100,00	1,47	Inspektorat	*
		Persentase rekomendasi yang selesai ditindak lanjuti : keuangan negara/ daerah dan administrasi pada wilayah Irban II	%	70,00		70,00		70,00			*
		Persentase hasil evaluasi SAKIP dengan nilai minimal A pada wilayah Irban II	%	80,00		80,00		80,00			*
05.05.17	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH pada Wilayah IRBAN III	Persentase Laporan Keuangan SKPD yang sesuai SAP dalam mendukung tercapainya WTP pada wilayah Irban III	%	100,00	1,03	100,00	1,28	100,00	1,28	Inspektorat	*
		Persentase rekomendasi yang selesai ditindak lanjuti : keuangan negara/ daerah dan administrasi pada wilayah Irban III	%	70,00		70,00		70,00			*
		Persentase hasil evaluasi SAKIP dengan nilai minimal A pada wilayah Irban III	%	80,00		80,00		80,00			*
05.05.35	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH pada Wilayah IRBAN IV	Persentase Laporan Keuangan SKPD yang sesuai SAP dalam mendukung tercapainya WTP pada wilayah Irban IV	%	100,00	0,98	100,00	1,18	100,00	1,18	Inspektorat	*

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	2.020		2.021		Kinerja Akhir RPJMD		OPD	KET.
				Kinerja Target	Rp (Miliar)	Kinerja Target	Rp (Miliar)	Kinerja Target	Rp (Miliar)		
				1	2	3	4	5	6		
Misi 3: Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih (Good and Clean Governance) serta Layanan Publik yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi											
		Persentase rekam temuan yang selesai ditindak lanjuti : keuangan negara/ daerah dan administrasi pada wilayah Irbn IV	%	70,00		70,00		70,00			*
		Persentase hasil evaluasi SAKIP dengan nilai minimal A pada wilayah Irbn IV	%	80,00		80,00		80,00			*
05.05.41	Program Pembinaan dan Pengembangan Reformasi Birokrasi	Persentase implementasi agenda reformasi birokrasi sesuai road map reformasi birokrasi	%	60,00	0,63	60,00	0,69	60,00	0,69	Setda	*
05.03.16	Program Pengadaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase pelaksanaan seleksi CPNS daerah	%	60,00	1,40	60,00	1,82	60,00	1,82	BKPP	**
		Persentase pelaksanaan ujian dinas dan seleksi kompetensi jabatan	%	60,00		60,00		60,00			**
		Persentase penempatan PNS sesuai dengan analisis jabatan	%	70,00		70,00		70,00			**
		Persentase ketepatan waktu kenaikan pangkat PNS	%	70,00		70,00		70,00			**
		Persentase pelaksanaan pembinaan karier PNS	%	80,00		80,00		80,00			**
05.03.19	Program Penilaian dan Kapasitas Kinerja Aparatur	Persentase penilaian dan	%	80,00	0,85	80,00	1,11	80,00	1,11	BKPP	*

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	2.020		2.021		Kinerja Akhir RPJMD		OPD	KET.
				Kinerja Target	Rp (Miliar)	Kinerja Target	Rp (Miliar)	Kinerja Target	Rp (Miliar)		
				1	2	3	4	5	6		
Misi 3: Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih (Good and Clean Governance) serta Layanan Publik yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi											
		kapasitas kinerja aparatur									
05.02.17	Program Peningkatan Pertanggungjawaban Pendapatan dan Belanja Daerah	Persentase pemenuhan laporan keuangan yang tepat waktu	%	95,00	3,83	97,00	4,98	97,00	4,98	BPKAD	**
	Sasaran 4.2 Terciptanya Inovasi Layanan Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Skor	15.750,00		16.000,00	3.24	16.000,00	3.24	Setda, Diskominfo	
05.05.44	Program Perumusan Kebijakan Pelayanan Publik	Nilai rata-rata indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan SKPD	%	80,00	0,50	80,00	0,65	80,00	0,65	Setda	*
02.10.18	Program Tatakelola Pengembangan e-Government	Persentase aplikasi e-government yang berfungsi baik	%	100,00	2,42	100,00	2,51	100,00	2,59	Diskominfo	*

Keterangan : *** mengalami perubahan program dan/atau indikator

** mengalami perubahan target indikator

* tidak mengalami perubahan



BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa hubungan urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah secara eksplisit dituangkan dalam program yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah serta target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.

Dalam hal suatu urusan atau program bersifat strategis, maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional. Begitu pula dalam penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu. Yang demikian karena suatu urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanya karena pengaruhnya yang sangat luas dan urgent untuk diselenggarakannya sangat tinggi. Suatu urusan menjadi strategis tergantung tujuan dan sasaran pembangunan dan bagaimana strategi pencapaiannya. Suatu urusan pemerintahan daerah dapat menjadi strategis di satu tahun atau periode dan sebaliknya, menjadi operasional di periode berikutnya.

Suatu program prioritas, baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Namun, bagi program prioritas yang dikategorikan strategis, menjadi tanggung jawab bersama Kepala OPD dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan. Berbeda dengan penyelenggaraan aspek strategik, program prioritas bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan agar setiap urusan (wajib) dapat diselenggarakan setiap tahun, tidak langsung dipengaruhi oleh visi dan misi kepala daerah terpilih. Artinya, suatu prioritas pada beberapa urusan untuk mendukung visi dan misi serta program kepala daerah terpilih, tidak berarti bahwa urusan lain ditinggalkan atau diterlantarkan.

Indikasi rencana program prioritas Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berisi program-program, baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan OPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, serta mengakomodir program unggulan dari Kepala Daerah Terpilih. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk

penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi OPD dalam penyusunan Renstra OPD, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Setelah program prioritas diketahui baik berasal dari perumusan strategis maupun dari rumusan permasalahan pembangunan daerah, dibuatlah alokasi pagu untuk setiap program. Pagu indikatif program merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program prioritas tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, perhitungan pagu indikatif masing-masing program dipisahkan menjadi pagu indikatif untuk program prioritas yang berhubungan dengan program pembangunan daerah (strategik) dan pagu indikatif untuk program-program yang berhubungan dengan pemenuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Berikut disajikan program pembangunan daerah dan program penyelenggaraan pemerintah beserta kerangka pendanaan Kabupaten Banyuwangi:

Tabel 7. 1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019-2021

Kode			Kapabilitas Riil / Belanja	TAHUN		
				2019	2020	2021
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)
			Kapasitas riil keuangan	1,526,364,099,520.16	1.356.873.138.919,06	1.397.143.243.114,45
			Belanja	3,277,230,931,860.80	3.177.067.116.526,79	3.282.672.395.026,06
5	1		Belanja Tidak Langsung	1,750,866,922,340.64	1.820.193.977.607,73	1.885.529.151.911,62
5	1	1	Belanja Pegawai	1,251,109,285,557.60	1.315.724.361.706,99	1.348.617.470.749,67
5	1	2	Belanja Bunga	-	-	-
5	1	3	Belanja Subsidi	-	-	-
5	1	4	Belanja Hibah	76,140,650,000.00	52.371.908.839,54	37.975.520.822,55
5	1	5	Belanja Bantuan Sosial	14,537,200,000.00	12.058.146.558,80	13.472.614.001,40
5	1	6	Belanja Bagi Hasil	25,938,110,953.03	17.805.642.517,40	21.189.181.858,00
5	1	7	Belanja Bantuan Keuangan	378,141,675,830.00	417.738.154.085,00	458.872.386.880,00
5	1	8	Belanja Tidak Terduga	5,000,000,000.00	4.495.763.900,00	5.401.977.600,00
5	2		Belanja Langsung	1,526,364,009,520.16	1.356.873.138.919,06	1.397.143.243.114,45
5	2	1	Belanja Pegawai	103,525,462,553.36	112.711.508.423,81	118.445.473.746,43
5	2	2	Belanja Modal	843,271,348,033.01	795.320.200.168,10	840.375.866.605,15
5	2	3	Belanja Barang dan Jasa	579,567,198,933.79	448.841.430.327,15	438.321.902.762,86

Tabel 7. 2: Indikasi Rencana Program Prioritas I yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019-2021

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kinerja Akhir RPJMD		OPD	KET.				
					Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja	Rp (Miliar)	Kinerja	Rp (Miliar)	Kinerja			Rp (Miliar)	Kinerja	Rp (Miliar)	
					Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi				Target	Realisasi	
					1	2		3	4		5	6		7	8		9	10				11	12	
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																								
1.01 PENDIDIKAN																								
01.01.15	Program Peningkatan Akses PAUD	APK PAUD formal (usia 5-6 tahun)	%	0,22	80,68	106,54	0,22	80,68	106,54	0,22	81,93	105,44	0,01	100	3,07	100	0,53	100	0,52	100	0,52	*		
		APM PAUD formal (usia 5-6 tahun)	%		68,1	79,73		68,1	79,73		70,6	71,76		73,1		73,76		74,76		74,76		*		
		Rasio ketersediaan lembaga terhadap penduduk usia 5-6 tahun	Rasio		1:56	1:58		1:56	1:58		1:52	1:55		1:46									***	
		Persentase ketersediaan ruang kelas terhadap kelas rombel	%		98,8	113,51		98,8	113,51		99,3	99,3*		99,8		100		100		100		100	*	
		Persentase penduduk miskin usia 5-6 tahun terlayani PAUD Formal	%													30		40		40		40	40	40
01.01.16	Program Peningkatan Kualitas PAUD	Persentase Lembaga PAUD formal terakreditasi	%	0,5	64,32	51,5	0,5	64,32	51,5	0,5	84,01	63,25	1,77	88,51	2,46	65,25	2,48	66,25	2,22	66,25	2,22	Dinas Pendidikan	***	

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kinerja Akhir RPJMD		OPD	KET.						
					Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja	Rp (Miliar)	Kinerja	Rp (Miliar)	Kinerja			Rp (Miliar)	Kinerja	Rp (Miliar)			
					Target	Realisasi	Rp (Miliar)	Target	Realisasi	Rp (Miliar)	Target	Realisasi	Rp (Miliar)	Target	Realisasi	Rp (Miliar)	Target	Realisasi			Rp (Miliar)	Target	Realisasi			
					1	2		3	4		5	6		7	8		9	10				11	12	13	14	15
		Persentase nilai rata-rata pengetahuan dan keterampilan PENDIDIK dan Tenaga Kependidikan TK	%		61,6	61,6		61,6	61,6		62,6	62,6*		63,6		64,6		64,6		64,6		***				
		Persentasi Tenaga Pendidik PAUD berkualifikasi S-1 dan bersertifikasi	%												51,43		51,48		51,48		51,48		***			
01.01.17	Program Peningkatan Akses Pendidikan SD	APK SD/MI/Paket A	%	17,24	104	106,57		104	106,57		103	103,33		102,33		101,33		100,33		100,33		100,33		**		
		APM SD/MI/Paket A	%		99,95	99,96		99,95	99,96		99,96	99,97		99,97		99,98		99,99		99,99		99,99		**		
		Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs	%		101,86	107,13	12,24	101,86	107,13	12,24	101,91	104,25	20,43	100	33,02	100		100		100		100		100		**
		Perbedaan Gender Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs	%		1,02	1,09		1,02	1,09		1,01	0,99		1		1		1	21,71	1	21,96		1	21,96		**
		Rasio ketersediaan lembaga terhadap penduduk usia SD (10.000)	Rasio														1:73		1:74		1:74		1:74		***	
		Persentase penduduk miskin usia 7-12 tahun terlayani pendidikan SD	%														45		50		50		50		***	
01.01.18	Program Peningkatan Kualitas Pendidikan SD	Jumlah SD terakreditasi A	Sekolah	96,51	233	278	96,51	233	278	96,51	263	312	100,02	313	100,03	314	99,45	315	129,28	315	129,28	315	129,28	***		

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kinerja Akhir RPJMD		OPD	KET.				
					Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja	Rp (Miliar)	Kinerja	Rp (Miliar)	Kinerja			Rp (Miliar)	Kinerja	Rp (Miliar)	
					Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi				Target	Realisasi	
					1	2		3	4		5	6		7	8		9	10				11	12	
		Persentase nilai rata-rata pengetahuan dan keterampilan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD (nilai UKG)	%		61,5	58,14		61,5	58,14		62,5	64,98		63,5								***		
		Angka Putus Sekolah SD	%		0,03	0,02		0,03	0,02		0,03	0,01		0,02		0,02		0,02		0,02		***		
		Persentase Tenaga Pendidik SD berkualifikasi S-1 dan bersertifikasi	%											59,49		60,49		61,49		61,49		***		
01.01.19	Program Peningkatan Akses Pendidikan SMP	APK SMP/Mts/Paket B	%	2,57	101,21	107,15	2,57	101,21	107,15	2,57	101,25	104,64	2,7	102,14	10,00	100,64	3,48	100	3,69	100	3,69	100	**	
		APM SMP/MTs/Paket B	%		88,84	93,01		88,84	93,01		88,88	89,21		89,22		89,23		89,24		89,24				
		Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs/Paket ke SMA/SMK/MA/Paket C	%		99,07	96,96		99,07	96,96		99,15	100,62		99,23		99,31		99,39		99,39				
		Perbedaan gender angka Melanjutkan (AM) Gender SMP/MTs/Paket B ke SMA/SMK/MA/Paket C	%		1,01	1,06		1,01	1,06		1	1,12		1		1		1		1				
		Rasio ketersediaan lembaga terhadap penduduk usia SMP (10.000)	Rasio																	1:42		1:43	1:43	
		Persentase penduduk miskin usia 13-15 tahun terlayani pendidikan SMP	%																			45	50	50
01.01.20	Program Peningkatan	Jumlah SMP terakreditasi A	sekolah		64	106	35,34	64	106	35,34	69	80	40,1	84	45,73	94	44,86	104	48,32	104	48,32	***		

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kinerja Akhir RPJMD		OPD	KET.			
					Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja	Rp (Miliar)	Kinerja	Rp (Miliar)	Kinerja			Rp (Miliar)	Kinerja	Rp (Miliar)
					Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target		Target		Target				Target	
					1	2		3	4		5	6		7		8		9				10	
01.01.21	Kualitas Pendidikan SMP	Angka Putus Sekolah SMP	%	41,34	0,29	0,22		0,29	0,22		0,27	0,17		0,25		0,23		0,21		0,21		***	
		Persentase nilai rata-rata pengetahuan dan keterampilan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP	%		60,01	60,78		60,01	60,78		61,01	61,01*		62,01									***
		Persentase Tenaga Pendidik SMP berkualitas S-1 dan bersertifikasi	%												62,41		62,91		62,91		62,91		***
01.01.21	Program Peningkatan Akses Pendidikan Masyarakat	Jumlah Lembaga kursus dan pelatihan/PKBM berizin	%		28	48		28	48		30	52		32		49		50		50		***	
		Angka melek aksara penduduk usia 15 tahun keatas (Persentase)	%	1,51	97,5	99,3	1,51	97,5	99,3	1,51	97,9	99,31	2,33	98		98,01		98,02	0,41	98,02		**	
		Persentase penduduk usia 7-21 tahun yang putus/tidak sekolah yang tertangani PNF	%		35	55,59		35	55,59		45	73,09		73,19	1,56	73,29	0,32	73,39		73,39		0,41	**
		Persentase warga belajar miskin yang terlayani PNF	%													25		30		30			**
01.01.22	Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat	Persentase Lembaga Kursus dan Pelatihan/PKBM berakreditasi	%	1,36	15,32	18,75	1,36	15,32	18,75	1,36	18,32	27,08	0,24	27,09	4,59	27,1	0,5	27,11	0,55	27,11	0,65	**	
1.02		KESEHATAN																					
01.02.15	Program Upaya Peningkatan Kesehatan Perorangan	Contact Rate (Angka Kunjungan Baru)	kali	2,38	1,26	1,27	2,38	1,26	1,27	2,38	1,23	1,13	2,4	1,2	10,03							Dinas Kesehatan	***
		Cakupan pelayanan rujukan	%		4,1	2,41		4,1	2,41		4,03	4,6		3,96									***

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kinerja Akhir RPJMD		OPD	KET.			
					Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja	Rp (Miliar)	Kinerja	Rp (Miliar)	Kinerja			Rp (Miliar)	Kinerja	Rp (Miliar)
					Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi				Target	Realisasi
					1	2		3	4		5	6		7	8		9	10				11	12
		Cakupan parameter pemeriksaan Laboratorium sesuai standar	%		65	75,6		65	75,6		77,5	83		86,3								***	
01.02.18	Program Pelayanan Kesehatan	Utility Rate	%											27,81	30,72	28,71	31,64	28,71	31,64		***		
01.02.16	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	Persentase sekolah tidak ditemukan jajanan mengandung bahan berbahaya	%	0,12	55	65,4		55	65,4		60	83,56		65		0,15						***	
		Persentase Industri Rumah Tangga Pangan (IRT-P) bersertifikat	%		75	89		75	89		80	90		85									***
01.02.17	Program Upaya Peningkatan Kesehatan Berbasis Masyarakat	Persentase Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri	%		26	21,66		26	21,66		30	25,8		32								***	
		Persentase Posyandu PURI yang menjadi Taman Posyandu	%	0,78	13	13,54		13	13,54		17	13,24		19		1,01							***
		Persentase pengembangan UKBM PURI (Purnama Mandiri)	%		18	42,55		18	42,55		22	32,2		24									***
01.02.22	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Prevalensi gizi buruk	%	0,64	2	0,55		2	0,55		1,9	0,55		1,8								***	
		Persentase bayi usia 6 bulan mendapat ASI Eksklusif	%		44	81,5		44	81,5		47	86		47		0,63							***
		Persentase ibu hamil yang mendapatkan tablet tambah	%		87	93,1		87	93,1		91,5	94,2		95									***

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2016		2017			2018			2019		2020		2021		Kinerja Akhir RPJMD		OPD	KET.					
					Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja	Rp (Miliar)	Kinerja	Rp (Miliar)	Kinerja	Rp (Miliar)	Kinerja			Rp (Miliar)				
					Target	Realisasi	Target	Target	Realisasi	Target	Target	Realisasi	Target	Target	Realisasi	Target	Target	Realisasi	Target	Target			Realisasi				
					1	2		3	4		5	6		7	8		9	10		11			12	13	14	15	16
		darah minimal 90 tablet selama kehamilan																									
01.02.26	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Hamil, Melahirkan dan Nifas	Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan	%	0,45	81	91,1	0,45	81	91,1	0,45	82	98,3	0,32	83	0,65								***				
		Cakupan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (cakupan kunjungan kehamilan ke empat (K4))	%		81	96		81	96		82	94,2		83													***
		Cakupan Peserta KB Aktif	%		69	68,55		69	68,55		69	69,36		70													
01.02.16	Program Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	Prevalensi balita stunting	%											24	1,83	23	1,98	23	1,98			***					
01.02.19	Program Promosi Kesehatan	Persentase Rumah Tangga Sehat (Ber PHBS)	%	0,14	56	46,59	0,14	56	46,59	0,14	59	43,73	0,18	62	1,55							***					
01.02.23	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Jumlah Desa STBM (Sanitasi Total berbasis Masyarakat)	desa	3,17	5	1	3,17	5	1	3,17	10	2	2,15	15	3,77								***				
		Persentase desa ODF	%		60	65,4		60	65,4		70	192		75												***	
		Persentase TTU memenuhi syarat	%		77,5	89		77,5	89		80,5	80		83,3													***
01.02.15	Program Kesehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan	Persentase Akses Penduduk Terhadap Jamban Sehat	%											98	5,93	100	5,98	100	5,98			***					
01.02.21	Program Pengendalian dan Pencegahan Penyakit	Angka kejadian kasus penyakit menular (Angka Kesakitan per 1,000 Penduduk)	Per 1000 penduduk	2,17	98	90	2,17	98	90	2,17	97,5	23,2	1,17	97	1,36							***					

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2016		2017			2018			2019		2020		2021		Kinerja Akhir RPJMD		OPD	KET.				
					Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja	Rp (Miliar)	Kinerja	Rp (Miliar)	Kinerja	Rp (Miliar)	Kinerja			Rp (Miliar)			
					Target	Realisasi	Rp (Miliar)	Target	Realisasi	Rp (Miliar)	Target	Realisasi	Rp (Miliar)	Target	Realisasi	Kinerja	Rp (Miliar)	Target	Realisasi	Kinerja			Rp (Miliar)			
					1	2		3	4		5	6		7	8			9	10					11	12	13
		Persentase penyakit tidak menular	%		5	5,5		5	5,5		6	6		7								***				
		Persentase Desa UCI	%		91	100		91	100		91	98,6		92								***				
		Penanggulangan KLB < 24 jam	%		100	100		100	100		100	100		100								***				
		Cakupan deteksi dini kesehatan jiwa oleh Puskesmas	%		20	22,9		20	22,9		30	30		40								***				
01.02.17	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Persentase Penemuan dan Penanganan Kasus	%												100	2	100	2	100	2		***				
01.02.18	Program Pembiayaan Kesehatan	Cakupan pembiayaan kesehatan	%	79,48	7,2	10,5	59,48	7,2	10,5	59,48	7,8	7	82,83	8,4	122,23							***				
01.02.27	Program Sumber Daya Kesehatan	Cakupan ketersediaan obat sesuai kebutuhan, baik obat esensial maupun generik	%	21,33	87	88,49	21,33	87	88,49	21,33	88	98	6,42	89	10,49							***				
		Cakupan alkes faskes dasar Sesuai standart	%		33	51,93		33	51,93		38	48		43												***
		Persentase SDM kesehatan dengan kompetensi sesuai standar	%		40	91		40	91		45	96,5		50												
01.02.28	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Puskesmas bernilai minimal cukup dalam penilaian kinerja Puskesmas	%	1,51	73	84,44	1,51	73	84,44	1,51	83	57,77	3,47	91	1,71							***				
		Persentase fasilitas kesehatan primer terakreditasi	%		35	29,66		35	29,66		55	53,57		55												***
		Persentase fasilitas kesehatan rujukan terakreditasi	%		92	85,7		92	85,7		92	86		100												
01.02.29	Program Pengadaan,	Persentase bangunan	%	6,91	40	75,55	6,91	40	75,55	6,91	50	80	16,89	60	9,94							***				

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2016			2017			2018			2019		2020		2021		Kinerja Akhir RPJMD		OPD	KET.
					Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja	Rp (Miliar)	Kinerja	Rp (Miliar)	Kinerja	Rp (Miliar)	Kinerja	Rp (Miliar)		
					Target	Realisasi	Rp (Miliar)	Target	Realisasi	Rp (Miliar)	Target	Realisasi	Rp (Miliar)	Target	Realisasi	Rp (Miliar)	Target	Realisasi	Rp (Miliar)	Target	Realisasi		
					1	2		3	4		5	6		7	8		9	10		11	12		
	Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya	Puskesmas sesuai standar	%																				
		Persentase bangunan Puskesmas pembantu dalam kondisi baik			50	75,47	50	75,47	60	83,96	70												
01.02.19	Program Sumber Daya Kesehatan	Cakupan Anggaran Kesehatan	%												11	116,23	12	116,72	12	116,72		***	
01.02.20	Program Peningkatan Kesehatan Lansia	Cakupan pelayanan usia lanjut	%	0,03	55	62	0,03	55	62	0,03	56	64	0,03	57	0,19							***	
01.02.24	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Kesehatan Kerja	Persentase Puskesmas melaksanakan upaya kesehatan kerja	%	0,03	26	100	0,03	26	100	0,03	32	100	0,03	38	0,04							***	
01.02.25	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Kesehatan Olahraga	Persentase Puskesmas melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga	%	0,03	20	100	0,03	20	100	0,03	25	100	0,03	30	0,14							***	
01.02.30	Program Peningkatan Kesehatan Bayi dan Balita	Cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1)	%	0,15	86	100,7	0,15	86	100,7	0,15	87	99,6	0,15	88	0,18							***	
		Cakupan pelayanan kesehatan bayi (K By)	%		96	96,8		96	96,8		96	96,2		97									
01.02.20	Program Pembinaan Lingkungan Sosial (Bidang Kesehatan)	Persentase Pembiayaan Penanganan Penyakit Akibat Rokok	%												50	13,5	50	15	50	15		***	
01.02.21	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan RSUD Blambangan	Tingkat Kesehatan RS Blambangan	skala	95,21	72	76,2	85,21	72	76,2	85,21	74	76,45	87,09	77	117,96	79	108,32	80	92,54	80	92,54	RSUD Blambangan	*

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2016			2017			2018			2019		2020		2021		Kinerja Akhir RPJMD		OPD	KET.
					Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja	Rp (Miliar)								
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
01.02.22	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan RSUD Genteng	Tingkat Kesehatan RS Genteng	skala	48,67	74	78	38,67	74	78	38,67	75	78,25	45,8	78,5	68,86	78,75	53	79	50,28	79	50,28	RSU D Genteng	*
01.02.23	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Kesehatan RSUD Blambangan	IKM RS Blambangan	%	0,08	76	76,91	0,08	76	76,91	0,08	77	79,47	4,58	80	6,41	81	10	82	11	82	11	RSU DBlambangan	*
01.02.24	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Kesehatan RSUD Genteng	IKM RS Genteng	%	33,52	78	76,91	13,52	78	76,91	13,52	80	82,83	5,32	83	13,50	84	14,5	84	14,92	84	14,92	RSU D Genteng	*
1.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																						
01.03.15	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Panjang jalan perdesaan yang dibangun dalam kondisi baik (km)	km	48,03	40	94	28,03	40	94	28,03	40	81,3	20,94	50	60,02	50	19,74	50	20,66	50	25,66	Dinas PUA Karya, Perumahan dan Perumahan	**
01.03.16	Program Pembangunan Fasilitas Publik	Jumlah fasilitas publik dan aparatur yang terbangun berfungsi baik (unit)	unit	18,91	50	26	8,91	50	26	8,91	50	12	8,28	26	17,10	26	12,8	26	14,94	26	14,94		**
01.03.17	Program Rehabilitasi/P emeliharaan Fasilitas Publik	Jumlah fasilitas publik yang direhabilitasi (unit)	unit	3,27	25	36	3,27	25	36	3,27	25	16	3,41	20	18,60	20	7,35	25	1,39	25	1,39		*
01.03.18	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Panjang saluran drainase / gorong-gorong yang dibangun dalam kondisi baik (m)	m	16,21	15000	28000	6,21	15000	28000	6,21	15000	8200	6,8	15000	8,73	15000	13,6	15000	0,34	15000	0,34		*
01.03.19	Program Rehabilitasi/P emeliharaan Saluran	Panjang saluran drainase / gorong-gorong yang	m	3,99	300	4900	3,99	300	4900	3,99	300	900	0,44	500	4,55	500	0,61	500	0,67	500	0,67		*

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2016			2017			2018			2019		2020		2021		Kinerja Akhir RPJMD		OPD	KET.		
					Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja	Rp (Miliar)			Kinerja	Rp (Miliar)						
					Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target		Target		Target		Target				Target	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18	17
	Drainase/Gorong-gorong	direhabilitasi dalam kondisi baik (m)																							
01.03.20	Program Pembangunan Jalan	Persentase panjang jalan yang dibangun dalam kondisi baik	%	64,48	6	6,85	34,48	6	6,85	34,48	80	23,74	38,98	50	57,50	50	48,82	50	48,82	50	48,82	*			
01.03.21	Program Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang dibangun dalam kondisi baik	unit	2,81	15	23	2,81	15	23	2,81	15	28	4,83	25	7,54	25	5,21	25	5,08	25	5,08	*			
01.03.22	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Panjang jalan yang direhabilitasi dalam kondisi baik	km	86,22	400	668	36,22	400	668	36,22	400	848	38,36	400	38,34	400	53,73	400	54,41	400	54,41	*			
01.03.23	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	Jumlah jembatan yang direhabilitasi dalam kondisi baik	unit	0,51	5	195	0,51	5	195	0,51	5	1	0,37	5	3,69	5	2,25	5	2,48	5	2,48	*			
01.03.24	Program Pembangunan Sistem Informasi/DATABASE Jalan dan Jembatan	Sistem informasi/database jalan dan jembatan yang berfungsi baik	Aplikasi IT		4	4		4	4		4	4		4	0,55	4	0,48	4	0,53	4	0,53	*			
01.03.25	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinarmagaan	Jumlah sarana dan prasarana kebinarmagaan yang berfungsi baik	unit	3,11	6	15	3,11	6	15	3,11	6	10	4,81	10	5,38	10	6,04	10	6,04	10	6,04	*			
01.03.26	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase wilayah yang telah tersusun perencanaan tata ruang	%	0,95	25,33	53,33	0,95	25,33	53,33	0,95	58,67	62,67	2,1	68	1,94	74,67	3	86,67	3,5	86,67	3,5	*			
01.03.27	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase bangunan yang dapat diberikan rekomendasi IMB (%)	%	0,2	95	95,09	0,2	95	95,09	0,2	96	88,45	0,33	90	0,45	90	0,4	90	0,44	90	0,44	*			
01.03.28	Program Pengembangan Wilayah	Jumlah fasilitas publik strategis yang dibangun berfungsi baik	unit		2			2			2			2								*			

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2016			2017			2018			2019		2020		2021		Kinerja Akhir RPJMD		OPD	KET.			
					Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja	Rp (Miliar)	Kinerja	Rp (Miliar)	Kinerja	Rp (Miliar)	Kinerja	Rp (Miliar)			Kinerja	Rp (Miliar)	
					Target	Realisasi	0,32	Target	Realisasi	0,32	Target	Realisasi	0,36	Target	Realisasi	0,95	Target	Realisasi	0,31	Target	Realisasi			0,34	Target	Realisasi
					1	2		3	4		5	6		7	8		9	10		11	12				13	14
	Strategis dan Cepat Tumbuh																									
01.03.28	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Jumlah tenaga terampil konstruksi yang sesuai standar	orang	0,32	20	38	0,32	20	38	0,32	20	98	0,36	70	0,95	70	0,31	70	0,34	70	0,34		*			
		Jumlah penyedia jasa konstruksi yang sesuai kualifikasi	perusahaan		200	300		200	300		200	260		200		200		200		200			200	200	200	200
01.03.33	Program Pembangunan Trotoar	Panjang trotoar berfungsi baik	m	5,28	8000	5098	5,28	8000	5098	5,28	8000	11,671	5,17	8000	5,12	8000	6,44	8000	5,08	8000	5,08		*			
01.03.34	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase RTH publik kawasan perkotaan	%	10,29	16	15,75	10,29	16	15,75	10,29	16	16	13,41	16,25	14,21	17,5	16,85	17,5	13,79	17,5	13,79		*			
01.03.35	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Persentase areal pemakaman yang berfungsi baik	%	5,65	1,5	1,5	5,65	1,5	1,5	5,65	1,5	1,5	4,52	1,5	9,23	1,5	5,47	1,5	6,02	1,5	6,02		*			
01.03.40	Program Penataan Lingkungan	Persentase sanitasi lingkungan perumahan yang berfungsi baik	%	0,08	15,8	17	0,08	15,8	17	0,08	17	0	0,02	17	-	18	2,9	18	2,77	18	2,77		*			
01.03.29	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Persentase ketersediaan Air Baku	%	16,3	80	81	16,3	80	81	16,3	82	84	6,71	84	6,59	88	18,45	88	18,45	88	18,45	Dinas PU Pengairan	*			

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2016			2017			2018			2019		2020		2021		Kinerja Akhir RPJMD		OPD	KET.		
					Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja	Rp (Miliar)			Kinerja	Rp (Miliar)						
					Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			Target	Realisasi
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18	17
01.03.31	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Persentase sumber air / mata Air yang dalam kondisi baik/kondisi debit air stabil	%	5,17	60,8	60,8	5,17	60,8	60,8	5,17	61,5	63	13,78	62,3	8,48	63	14,12	63	14,42	63	14,42		*		
01.03.30	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi, Rawa, Jaringan Pengairan Lainnya	Panjang jaringan irigasi diperbaiki	km	112,05	35	37	73,05	35	37	73,05	39	40	27,39	43	31,34	47	36,22	47	37,02	47	37,02		*		
01.03.36	Program Pembangunan Sistem Informasi/data Base Sumber Daya Air	Ketersediaan dokumen data base sumber daya air	%	0,16	50	55	0,16	50	55	0,16	55	50	0,93	60	1,11	65	0,16	65	0,21	65	0,21		*		
01.03.37	Program Pembangunan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik dan teknis	%	26,47	60	65	16,47	60	65	16,47	61	65	17,31	62	29,56	63	0,66	63	0,86	63	0,86		*		
01.03.38	Program Pengendalian Banjir	Persentase daerah bebas banjir	%		90	90		90	90		91	127	6,68	92	15,32	93	3,5	93	3,74	93	3,74		*		
01.03.39	Program Pemberdayaan Masyarakat	Persentase partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air	%	5,23	60	53	5,23	60	53	5,23	70	70	3,08	75	0,81	80	1,08	80	1,41	80	1,41		*		
01.03.32	Program Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi dan	Persentase ketersediaan air pada musim hujan dan kemarau (Degradasi DAS)	%	31,65	65	65	31,65	65	65	31,65	70	85	1,18	75	-	80	2,07	80	2,65	80	2,65		*		

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2016			2017			2018			2019		2020		2021		Kinerja Akhir RPJMD		OPD	KET.
					Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja	Rp (Miliar)	Kinerja	Rp (Miliar)	Kinerja	Rp (Miliar)	Kinerja	Rp (Miliar)		
					Target	Realisasi	0,04	Target	Realisasi	0,04	Target	Realisasi	0	Target	Realisasi	0,24	Target	Realisasi	0,39	Target	Realisasi		
					1	2		3	4		5	6		7	8		9	10		11	12		
	Pembangunan Sumber Daya Air Lainnya																						
1.04	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN																						
01.04.15	Program Lingkungan Perumahan dan Pemukiman Sehat	Jumlah Rumah Layak Huni (Unit)	unit		100	938		100	938		100	700	0,05	100	-							*	
01.04.15	Program Penataan Perumahan	Jumlah perumahan sesuai ketentuan	lokasi	0,04	20	21	0,04	20	21	0,04	20	20	0	20	0,24	20	0,3	20	0,39	20	0,39	Dinas PU Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman	*
		Jumlah kasiba yang berijin	lokasi		5	15		5	15		5	8		5		5		5		5			5
01.04.16	Program Pengendalian Kawasan Kumuh	Luas kawasan kumuh yang tertangani	Ha	0,25	10	17,09	0,25	10	17,09	0,25	10	20,63	0,72	10	1,25	10	1,5	10	1,85	10	1,85	*	
01.04.17	Program Pengembangan Rusun dan PSU	Jumlah rusun dan PSU berfungsi baik	lokasi	0,1	1	1	0,1	1	1	0,1	1	1	0,18	1	0,25	1	0,63	1	0,82	1	0,82	*	
01.04.19	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Jumlah sarana dan prasarana sanitasi dasar yang dibangun berfungsi baik	unit	0,13	5	7	0,13	5	7	0,13	5	12	0,04	5	0,09							*	
1.05	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT																						
01.05.15	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Tingkat waktu tanggap (response rate time) penanggulangan bahaya kebakaran	%	0,03	76	65	0,03	76	65	0,03	77	100	0	100	0,08	100	1,09	100	1,06	100	1,06	**	
01.05.16	Program Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah	Persentase pelanggaran Perda yang tertangani	%	0,72	95	100	0,72	95	100	0,72	96	91	0,34	97	0,51	98	1,4	98	1,72	98	1,82	Satp ol PP	*
01.05.17	Program Pemeliharaan Ketentraman	Persentase penanganan gangguan	%	0,18	93	99,8	0,18	93	99,8	0,18	94	100	0,2	100	0,38	100	1,13	100	1,47	100	1,47	**	

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2016			2017			2018			2019		2020		2021		Kinerja Akhir RPJMD		OPD	KET.
					Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja	Rp (Miliar)								
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	dan Keindahan dan Ketertiban Umum	<i>ketertaman dan ketertiban umum</i>																					
01.05.18	Program Pemberdayaan dan Pengembangan Potensi Satuan Linmas	<i>Rasio Linmas Per desa</i>	Linmas /desa	0,41	38	33	0,41	38	33	0,41	39	38	1,5	40	0,99	41	1,76	41	1,66	41	1,76	*	
01.05.19	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	<i>Persentase patroli ketertiban</i>	%	3,57	95	77	3,57	95	77	3,57	96	70	4,45	97	5,65	98	4,08	98	4	98	4	*	
01.05.20	Program Pengembangan Ketangguhan Masyarakat Menghadapi Bencana	<i>Persentase peningkatan ketangguhan masyarakat terhadap ancaman bencana</i>	%	0,49	61,4	97,11	0,49	61,4	97,11	0,49	71,7	71,6	0,18	82	0,30	90	0,99	90	1,09	90	1,29	*	
		<i>Desa tangguh yang telah terbentuk</i>	desa		2	2		2	2		2	0		2		2		2		2		2	2
01.05.21	Program Peningkatan Efektifitas Penanganan Darurat Bencana	<i>Persentase penanganan darurat bencana</i>	%	0,82	70	96,57	0,82	70	96,57	0,82	75	99	1,01	80	1,20	85	0,99	85	1,19	85	1,19	*	
		<i>Persentase pemenuhan kebutuhan dasar</i>	%		60	96,57		60	96,57		65	65		70		75		75		75		75	*
01.05.22	Program Pemulihan Pasca Bencana	<i>Persentase pemulihan dampak bencana</i>	%	0,68	45	98,17	0,68	45	98,17	0,68	55	54	0,35	65	0,75	70	0,92	70	1,1	70	1,1	*	
1.06	SOSIAL																						
01.06.15	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	<i>Persentase pelayanan bagi PMKS</i>	%	0,45	0,36	0,85	0,45	0,36	0,85	0,45	0,41	3,76	0,61	3,09	0,68							Dinsos Pemberdayaan Perempuan	***
01.06.15	Program Rehabilitasi Sosial	<i>Persentase PMKS penerima manfaat pelayanan dan rehabilitasi sosial</i>	%												3,2	1,47	3,4	1,5	3,4	1,5		***	

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2016		2017			2018			2019		2020		2021		Kinerja Akhir RPJMD		OPD	KET.	
					Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja	Rp (Miliar)	Kinerja	Rp (Miliar)	Kinerja	Rp (Miliar)	Kinerja			Rp (Miliar)
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17
		<i>yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkat kemampuan fungsi sosialnya</i>																			dan KB		
01.06.16	Program Peningkatan Kemampuan (Capacity Building)	<i>Persentase PSKS yang tersertifikasi</i>	%	0,4	1,79	0,92	0,4	1,79	0,92	0,4	2,11	93,17	0,31	93,11	0,88							***	
01.06.16	Program Pemberdayaan Sosial	<i>Persentase PSKS yang tersertifikasi</i>	%												93,2	0,73	93,75	0,94	93,75	0,94		***	
01.06.17	Program Perlindungan Sosial	<i>Persentase PMKS prioritas yang mendapat jaminan hidup dasar meningkat</i>	%	2,41	9,82	5,25	2,41	9,82	5,25	2,41	9,82	1,56	1,02	10,03	0,90	10,11	1,18	10,11	1,24	10,11	1,29	*	
		<i>Persentase korban bencana yang ditangani</i>	%	0,37	9,82	93,07	0,37	9,82	93,07	0,37	93,1	93,07	0,27	94		94	1,18	96	1,4	96	1,53	*	
		<i>Persentase Perintis Kemerdekaan, Janda Perintis Kemerdekaan dan Verteran yang diberi bantuan</i>	%											50		75	0,13	75	0,15	75	0,15	*	
01.06.18	Program Penanganan Bencana	<i>Persentase korban bencana yang ditangani</i>	%	0,37	9,11	80,36	0,37	9,11	80,36	0,37	9,82	93,07	0,27	93,1	0,32							***	
01.06.19	Program Nilai-nilai Kepahlawanan dan Pemeliharaan	<i>Jumlah pahlawan yang diusulkan menjadi pahlawan nasional</i>	orang	0,11	5	0	0,11	5	0	0,11	10	0	0,09	15	0,07							***	

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2016			2017			2018			2019		2020		2021		Kinerja Akhir RPJMD		OPD	KET.		
					Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja	Rp (Miliar)			Kinerja	Rp (Miliar)						
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target			Realisasi	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18	17
00.00	RUTIN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH																								
00.00.01	Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%	90,45	100	100	63,92	100	100	67,03	87,5		73,92	90	165,23	92,5	91,82	92,5	84,34	92,5	84,34	Seluruh Perangkat Daerah	*		
00.00.02	Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang tepat waktu	%	21,93	87,5	87,5	21,93	87,5	87,5	21,93	90		65,32	92,5	82,68	95	73,19	95	70,41	95	70,41	Seluruh Perangkat Daerah	*		
TOTAL							782,77			785,88			803,79		1.180,80		996,11		991,40						

Tabel 7. 3: Indikasi Rencana Program Prioritas II yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019-2021

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2016			2017			2018			2019		2020		2021		Kinerja Akhir RPJMD		OPD	KE T
					Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja	Rp (Miliar)	Kinerja	Rp (Miliar)	Kine rja Targ et	Rp (Miliar)	Kine rja Targ et	Rp (Miliar)		
					Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target		Target		Target		Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	17	18	19	20	20	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB																							
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																							
02.02	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																						
02.01.15	Program Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase penyelesaian pengaduan dari tindak kekerasan dan trafficking	%													50	0,82	50	0,92	50	0,92	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana	**
		Persentase penanganan kasus tindak kekerasan dan trafficking	%	0,32	72	91,84	0,32	72	91,84	0,32	75	97,22	0,49	40	0,81								**
02.01.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase perangkat daerah memiliki focal point aktif	%	0,03	67	65	0,03	67	65	0,03	68	73,43	0,71	85	0,55								**
02.01.17	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pemberdayaan	Persentase kelompok usaha perempuan mandiri	%	0,08	20	21,21	0,08	20	21,21	0,08	25	52	0,08	55	0,22								**
02.01.16	Program Pemberdayaan, Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Persentase kelompok perempuan berdaya	%													85	0,81	85	0,81	85	0,81		**
02.08	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																						
02.08.15	Program Keluarga Berencana	Persentase KB Aktif	%	1,37	69	73,74	1,37	69	73,74	1,37	69	75,38	1,59	70	2,45	70	1,07	70	3,45	70	3,45	Dinsos Pemberdayaan Perempuan dan KB	*

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2016			2017			2018			2019		2020		2021		Kinerja Akhir RPJMD		OPD	KE T	
					Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja	Rp (Miliar)	Kinerja	Rp (Miliar)	Kine rja	Rp (Miliar)	Kine rja	Rp (Miliar)			
					Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target		Target		Targ et		Targ et				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18
2.03	PANGAN																							
02.03.15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Skor PPH Ketersediaan	Nilai/ Angka	91	91	91,1	0,56	91	91,1	0,56	93	91,1	0,53	94	0,56								**	
02.03.16	Program Peningkatan Diversifikasi Pangan	Skor PPH Konsumsi	Nilai/ Angka	1,15	70	87,21	1,15	70	87,21	1,15	71	87,21	1,07	88	1,26								**	
02.03.15	Program Peningkatan Ketahanan dan Diversifikasi Pangan	Skor PPH Ketersediaan	Nilai/ Angka													95		95		95			**	
		Persentase penurunan penduduk rawan pangan	%														0,3		0,3		0,3			**
		Koefisien variasi harga pangan (beras) di tingkat produsen	%														≤ 5%		≤ 5%		≤ 5%			**
		Kondisi Harga GKP di Tingkat Produsen ≥ HPP	Rp./kg														HPP = Rp, 3750/kg	4,00	HPP = Rp, 3750/kg	4,00	HPP = Rp, 3750/kg	4,00		**
		Skor PPH Konsumsi	Nilai/ Angka														90,5		90,5		90,5			**
		Persentase Keamanan pangan segar	%														≥ 80%		≥ 80%		≥ 80%			**
2.07	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																							
02.07.15	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Indeks Ketahanan Ekonomi	Skala	0,15	0,64	0,79	0,15	0,64	0,79	0,15	0,68	0,756	0,28	0,71	0,29								**	
02.07.17	Program Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna	Indeks Ketahanan Lingkungan / Ekologi	Skala	0,3	0,7	0,79	0,3	0,7	0,79	0,3	0,71	0,804	0,17	0,71	0,30								**	
02.07.15	Program Pengembangan Ekonomi Pedesaan	Indeks Ketahanan Ekonomi	Skala													0,74	1,67	0,74	1,67	0,74	1,67		**	
		Indeks Ketahanan	Skala													0,71		0,71		0,71		**		

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2016			2017			2018			2019		2020		2021		Kinerja Akhir RPJMD		OPD	KE T
					Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja	Rp (Miliar)	Kinerja	Rp (Miliar)	Kine rja Targ et	Rp (Miliar)	Kine rja Targ et	Rp (Miliar)		
					Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		Lingkungan / Ekologi																					
02.07.16	Program Peningkatan Keberdayaan Lembaga dan Masyarakat Perdesaan	Indeks Ketahanan Sosial	Skala	3,17	0,78	0,79	3,17	0,78	0,79	3,17	0,79	0,798	2,67	0,79	1,43								**
02.07.16	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Indeks Ketahanan Sosial	Skala													0,79	1,47	0,79	1,47	0,79	1,47		**
2.05	LINGKUNGAN HIDUP																						
02.05.15	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang dikelola	%	46	50	53	9,24	53	53	9,24	56	56	15,33	59	16,03	61	18,57	61	18,57	61	18,57		*
02.05.16	Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan	Indeks kualitas air	Skala	53,65	53,75	54,17	1,07	54,95	54,17	1,07	56,9	54,17	0,64	58,3	2,34	59,4	2,34	59,4	2,34	59,4	2,34		**
		Indeks kualitas udara	Skala	85,2	85,44	86,46		85,9	86,51		85,75	86,46		87,5		87,5		87,5		87,5		87,5	87,5
2.1	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																						
02.10.18	Program Tatakelola Pengembangan e-Government	Persentase aplikasi e-government yang berfungsi baik	%	0,25	50	65	0,35	50	65	0,45	55	100	0,27	100	1,90	100	2,42	100	2,51	100	2,59	Diskomi nfo	**
			%																				**
2.11	KOPERASI DAN USAHA MIKRO																						
02.11.16	Program Penumbuhan Wirausaha Baru	Persentase wirausaha mikro baru yang tumbuh	%	0,17	0,27	0,3	0,17	0,27	0,3	0,17	0,35	0,38	0,04	0,42	0,06	0,5	1,15	0,5	1,41	0,5	1,51		**
02.11.18	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Usaha Mikro	Rasio pemerataan unit usaha mikro kecil dan menengah	%	0,75	20,5	20,5	0,75	20,5	20,5	0,75	21	21	0,83	21,5	1,95	22	0,5	22	0,5	22	0,5		**
02.11.19	Program Peningkatan dan Pengembangan Usaha Mikro	Persentase usaha mikro yang mengalami perkembangan usaha	%	1,19	12,5	12,7	1,19	12,5	12,7	1,39	15	15,1	1,45	17,5	2,56								**

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2016			2017			2018			2019		2020		2021		Kinerja Akhir RPJMD		OPD	KE T
					Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja	Rp (Miliar)	Kinerja	Rp (Miliar)	Kine rja	Rp (Miliar)	Kine rja	Rp (Miliar)		
					Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target		Target		Target					
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
02.11.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Usaha Mikro	Persentase usaha mikro yang mengalami perkembangan usaha	%													20	2,67	20	2,72	20	3,4		**
2.12	PENANAMAN MODAL																						
02.12.15	Program Pengembangan Data, Informasi dan Pengendalian Penanaman Modal	Persentase pemenuhan kebutuhan data dan informasi penanaman modal	%	0,09	81,5	83	0,07	81,5	83	0,09	86	86	0,13	90,5	0,63	95	0,62	95	0,62	95	0,62	DPMPT SP	*
		Persentase peningkatan LKPM	%		13	15		13	15		16	19		17		17		17		17			
02.12.16	Program Penguatan Kebijakan dan Peningkatan Promosi Penanaman Modal	Jumlah minat Penanaman Modal	Rp.Trilyun	0,28	2	2,3	0,24	2	2,3	0,26	3	3,82	0,28	3	0,50	3	0,74	3	0,84	3	0,94		*
02.12.17	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase kesesuaian penyelesaian perizinan sesuai dengan SOP	%	0,5	80	83	0,5	80	83	0,5	85	88	0,93	90	4,11	95	0,53	95	0,68	95	0,68		*
2.17	PERPUSTAKAAN																						
02.17.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase jumlah pengunjung perpustakaan	%	1,06	87	87	1,06	87	87	1,06	89	89	0,95	90	0,91	90	1,23	91	1,84	91	2,04	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	**
2.13	PEMUDA DAN OLAH RAGA																						
02.13.21	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Jumlah insan olahraga yang berprestasi	Orang	0,35	55	14	0,35	55	14	0,35	60	60	0,15	1000	0,15	1000	0,65	1000	0,65	1000	0,65	Dinas Pendidikan	**
02.13.22	Program Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah event	Event	7,88	10	10	7,88	10	10	6,32	11	9	6,32004	11	7,35	11	8,05	11	8,49	11	8,49	**	

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2016			2017			2018			2019		2020		2021		Kinerja Akhir RPJMD		OPD	KE T
					Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja	Rp (Miliar)	Kinerja	Rp (Miliar)	Kine rja Targ et	Rp (Miliar)	Kine rja Targ et	Rp (Miliar)		
					Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																							
03.01	PERIKANAN																						
03.01.15	Program Pengembangan Perikanan Budidaya	Volume produksi perikanan budidaya	Ton	3,79	27197	23512	3,79	27197	23512	3,29	28469	28415	2,72	29666	3,35	30863	2,83	30863	3,93	30863	3,93	Dinas Perikanan	*
		Jumlah luas pemanfaatan lahan budidaya	Ha		1462	1462		1462	1462		1497	1462		1532		1566,9		1566,9		1566,9			
		Jumlah produksi benih ikan air tawar di kabupaten	Juta Ekor		29985	28696		29985	28696		31	33,21		32		33,7		33,7		33,7			
		Persentase jumlah pokdakan yang meningkat kelasnya	%		7	28,6		7	28,6		7	47,7		10									
03.01.16	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Volume produksi perikanan tangkap	Ton	2,4	63791	44840,8	2,4	63791	44840,8	2,04	65120	74	2,12	66408	2,10	75429	2,21	75429	2,55	75429	2,55	Dinas Perikanan	*
		Nilai produksi perikanan tangkap	Rp.Trilyun		1,51	0,65		1,51	0,65		1,65	1,36		1,82		2,01		2,01		2,01			
		Persentase peningkatan PNB sektor perikanan tangkap	%		10	0,05		10	0,05		10	76		10		10		10		10			
		Persentase jumlah KUB yang meningkat kelasnya	%		5	11,5		5	11,5		8	22,7		8									
03.01.17	Program Pemberdayaan Masyarakat Pelaku Usaha Perikanan	Persentase jumlah pokdakan yang meningkat kelasnya	%												57	1,87	67	1,87	67	3,56	Dinas Perikanan	**	
		Persentase jumlah KUB yang meningkat kelasnya	%											45	55		55		**				

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2016			2017			2018			2019		2020		2021		Kinerja Akhir RPJMD		OPD	KE T		
					Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja	Rp (Miliar)	Kinerja	Rp (Miliar)	Kine rja Targ et	Rp (Miliar)	Kine rja Targ et	Rp (Miliar)				
					Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi												Target	Realisasi
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18	17
		Persentase jumlah poklansar yang meningkat kelasnya	%													10		25		25					
3.02	PARIWISATA																								
03.02.15	Program Pengembangan Destinasi dan Jaringan Kemitraan Pariwisata	Length of stay	Hari	2,65	3	2,5	2,15	3	2,5	2,25	4	2,85	2,43	4	10,36	4	10,53	4	12,69	4	12,69	Disbudpar	*		
3.03	PERTANIAN																								
03.03.15	Program Peningkatan Produksi Ternak dan Hasil Peternakan	Persentase kelompok yang memanfaatkan teknologi peternakan tepat guna	%	1,54	9	9,5	1,04	9	9,5	114	11	11	0,58	13	2,41								Dinas Pertanian dan Pangan	**	
		Produksi daging	Ton		9352	9264		9352	9264		9620	10914		9889										**	
		Produksi telur	Ton		11687	12466		11687	12466		12062	13199		12438											**
		Produksi susu	Ton		818	1680		818	1680		829	1404		839											**
		Rata-rata prosentase peningkatan produksi hasil peternakan (%)	%													14									
03.03.16	Program Peningkatan Produksi Ternak	Jumlah kelompok dan usaha peternakan yang tumbuh	Kelompok	0,89	605	606	0,53	605	606	0,89	615	615	1,39	625	1,84							**			
03.03.15	Program Pengembangan Budidaya dan Usaha Peternakan	Persentase kelompok yang memanfaatkan teknologi peternakan tepat guna	%													14	1,87	15	2,06	15	2,06		**		
		Produksi daging	Ton												11	12		12		**					
		Produksi telur	Ton												13	14		14		**					

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2016			2017			2018			2019		2020		2021		Kinerja Akhir RPJMD		OPD	KE T					
					Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja	Rp (Miliar)	Kinerja	Rp (Miliar)	Kine rja Targ et	Rp (Miliar)	Kine rja Targ et	Rp (Miliar)							
					Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi												Target	Realisasi			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18	17	18	19	20
		Produksi susu	Ton													1		2		2		**						
		Rata-rata prosentase peningkatan produksi hasil peternakan (%)	%													14		15		15		**						
		Jumlah kelompok dan usaha peternakan yang tumbuh	Kelompok													630	1,87	630	2,43	630	2,43	**						
03.03.17	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Angka kejadian penyakit	%	1,95	4,5	3,9	1,95	4,5	3,9	1,71	4,25	4,22	1,83	4	4,67							**						
		Angka kematian ternak	%		0,3	0,42		0,3	0,42		0,3	0,3		0,3												**		
		Usaha produk hewan yang bersertifikasi PRA/NKV	Unit		4	4		4	4		5	5		6													**	
03.03.16	Program Peningkatan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Angka kejadian penyakit	%												3,7	4	4	4,46	4	4	4,46	**						
		Angka kematian ternak	%																				-	-		-		**
		Usaha produk hewan yang bersertifikasi PRA/NKV	Unit																				7	8		8		
03.03.18	Program Peningkatan Produksi dan Kualitas Produk Tanaman Pangan	Produktifitas padi atau bahan pangan utama lainnya per Hektar	Kw/Ha	12,97	65,3	65,5	12,97	65,3	65,5	11,26	65,87	65,88	15,4	66,15	30,91							**						
		Persentase sarana dan prasarana tanaman pangan yang dimanfaatkan	%		100	100		100	100		100	100		100													**	
		Jumlah sertifikasi produk tanaman pangan	Dokumen		2	2		2	2		3	3		4													**	
03.03.17	Program Peningkatan	Produktifitas padi atau bahan	Kw/Ha													66,23	23,86	66,23	27,13	66,23	27,13	**						

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2016			2017			2018			2019		2020		2021		Kinerja Akhir RPJMD		OPD	KE T	
					Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja	Rp (Miliar)	Kinerja	Rp (Miliar)	Kine rja	Rp (Miliar)	Kine rja	Rp (Miliar)			
					Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target		Target		Target						
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18
	Produksi dan Kualitas Produk Tanaman Pangan	<i>pangan utama lainnya per Hektar</i>																						
		<i>Persentase sarana dan prasarana tanaman pangan yang dimanfaatkan</i>	%													100		100			100			**
		<i>Jumlah sertifikasi produk tanaman pangan</i>	Dokumen													5		5			5			**
03.03.19	Program Peningkatan Produksi dan Kualitas Produk Perkebunan dan Hortikultura	<i>Persentase peningkatan produksi tanaman hortikultura unggulan daerah</i>	%		3,33	3,35		3,33	3,35		3,41	3,41		3,49									**	
		<i>Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan unggulan daerah</i>	%	6,06	3,33	3,35	6,06	3,33	3,35	6,06	3,41	3,41	9	3,49	26,09								**	
		<i>Jumlah sertifikasi produk perkebunan dan hortikultura</i>	Dokumen		3	5		3	5		4	4		5									**	
03.03.18	Program Peningkatan Produksi dan Kualitas Produk Perkebunan dan Hortikultura	<i>Persentase peningkatan produksi tanaman hortikultura unggulan daerah</i>	%												3,57		3,57			3,57			**	
		<i>Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan unggulan daerah</i>	%												3,57	11,34	3,57	11,42		3,57	11,42		**	
		<i>Jumlah sertifikasi produk perkebunan dan hortikultura</i>	Dokumen												6		6			6			**	

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2016			2017			2018			2019		2020		2021		Kinerja Akhir RPJMD		OPD	KET
					Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja	Rp (Miliar)	Kinerja	Rp (Miliar)	Kine rja Targ et	Rp (Miliar)	Kine rja Targ et	Rp (Miliar)		
					Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target		Realisasi							
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
03.03.20	Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku Industri Hasil Tembakau	Persentase peningkatan produksi tembakau	%	2,12	3,33	3,25	2,12	3,33	3,25	2,12	3,41	3,41	2,31	3,49	1,00								**
		Jumlah sertifikasi tembakau	Dokumen		1	0		1	0		2	0		3									**
03.03.19	Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku Industri Hasil Tembakau	Persentase peningkatan produksi tembakau	%													3,57	2,7	3,57	2,6	3,57	2,6		**
		Jumlah sertifikasi tembakau	Dokumen													3		3		3			**
3.06	PERDAGANGAN																						
03.06.15	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Jumlah realisasi ekspor	US\$	1,07	105 juta	101,55 juta	1,07	105 juta	101,55 juta	1,07	115 juta	112,93 juta	0,33	126 juta	0,50								*
03.06.16	Program Optimalisasi Perdagangan Dalam Negeri	Persentase pertumbuhan sub sektor perdagangan besar dan eceran	%		8,52	7,4	0,47	8,52	7,4	0,47	9,32	7,17	0,46	10,12	0,74								*
03.06.18	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase peningkatan pelaku usaha yang tertib niaga	%	1,88	10,91	8,4	0,89	10,91	8,4	1,88	11,48	11,25	0,84	12,25	2,07								*
03.06.15	Program Optimalisasi Perdagangan	Jumlah realisasi ekspor	US\$													US\$ 140 Jt	0,75	US\$ 140 Jt	0,84	US\$ 140 Jt	0,84		**
		Persentase pertumbuhan sub sektor perdagangan besar dan eceran	%														10,92	0,95	10,92	1,11	10,92	1,11	**
		Persentase peningkatan pelaku usaha yang tertib niaga	%														12,66	1,7	12,66	2,2	12,66	2,2	**
03.06.17	Program Stabilisasi Harga Komoditas Perdagangan	Rata-rata persentase kenaikan harga komoditas	%	0,2	12,82	5,63	0,2	12,82	5,63	0,2	12,12	3,79	0,17	11,42	0,25								**

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2016			2017			2018			2019		2020		2021		Kinerja Akhir RPJMD		OPD	KE T
					Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja	Rp (Miliar)	Kinerja	Rp (Miliar)	Kine rja Targ et	Rp (Miliar)	Kine rja Targ et	Rp (Miliar)		
					Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
03.06.16	Program Stabilisasi Harga Komoditas Perdagangan	Rata-rata persentase kenaikan harga komoditas	%													10,72	0,35	10,72	0,46	10,72	0,46		**
03.06.20	Program Pembinaan dan Pengelolaan Pasar	Persentase pasar rakyat yang mengalami peningkatan standar sesuai SNI	%		2,04	3,7	2,5	2,04	3,7	2,5	5,1	8,16	7,37	8,16	6,01								**
03.06.18	Program Pengelolaan dan Peningkatan Kualitas Pasar	Persentase pasar rakyat yang mengalami peningkatan standar sesuai SNI	%													11,22	6,48	11,22	7,12	11,22	7,12		**
3.07	PERINDUSTRIAN																						
03.07.15	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Persentase peningkatan nilai penjualan (omset) IKM	%	3,53	43714	43652	3,53	43714	43652	3,53	6,62	1,67	1,23	7,21	2,45								**
03.07.15	Program Pembangunan Sumber Daya Industri	Persentase peningkatan nilai penjualan (omset) IKM	%	3,53												7,86	4,13	7,86	4,13	7,86	4,13		**
03.07.17	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Industri Kecil	Rasio ketimpangan pendapatan IKM wilayah kecamatan (ketimpangan versi bank dunia)	%	3,51	16	15	3,51	16	15	3,51	16,25	15,19	2,82	16,5	2,37								**
03.07.16	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Industri Kecil	Rasio ketimpangan pendapatan IKM wilayah kecamatan (ketimpangan versi bank dunia)	%													16,75	3,5	16,75	4,55	16,75	4,55		**

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2016			2017			2018			2019		2020		2021		Kinerja Akhir RPJMD		OPD	KE T	
					Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja	Rp (Miliar)	Kinerja	Rp (Miliar)	Kine rja Targ et	Rp (Miliar)	Kine rja Targ et	Rp (Miliar)			
					Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi												Target
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18
03.07.16	Program Pengembangan Sentra dan Klaster Industri	Persentase cakupan pengembangan sentra industri	%	0,23	55	53,75	0,23	55	53,75	0,23	60	57,89	0,79	65	0,67									*
		Persentase peningkatan jumlah IKM yang bermitra dalam klaster	%		5	0		5	0		7,5	17,14		10		15	15	15						
03.07.17	Program Pemberdayaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Industri	Persentase cakupan pengembangan sentra io industri	%													70	1,16	70	1,51	70	1,51		**	
		Persentase peningkatan sertifikasi standarisasi dan HKI	%													50	0,36	50	0,47	50	0,47		**	
3.08	TRANSMIGRASI																							
	Program Pengembangan Wilayah dan Penempatan Transmigrasi	Persentase penempatan transmigran	%	0,017	0,041	13	0,17	0,041	13	0,17	0,042	25	0,09	0,043	0,16								Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian	*
02.01	TENAGA KERJA																							
02.01.15	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	%	0,37	76	73	0,37	76	73	0,37	77,4	62,6	0,53	78,9	0,68								Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian	**
02.01.16	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang bersertifikat	%	0,39	48,3	43,9	0,39	48,3	43,9	0,39	49	39,91	0,1	49,6	0,00								Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian	**
02.01.15	Program Peningkatan	Persentase pencari kerja	%													80,4	0,82	80,4	1,14	80,4	1,25		**	

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2016			2017			2018			2019		2020		2021		Kinerja Akhir RPJMD		OPD	KET		
					Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja	Rp (Miliar)			Kinerja	Rp (Miliar)						
					Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi													
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18	17
	Kualitas, Penempatan, dan Perlindungan Tenaga Kerja	yang ditempatkan																							
Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang memiliki kompetensi		%													60	0,82	60	0,94	60	1,06		**			
Persentase Permasalahan PMI yang terselesaikan		%													70	0,71	70	0,92	70	0,92		*			
4.02	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																								
04.02.15	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Potensi angka konflik suku, agama, ras dan antar golongan	%	0,33		0	0,33		0	0,92		0	1,01	0	1,81	1	1,69	1	1,35	1	1,35		*		
04.02.16	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase angka masyarakat yang menggunakan hak politiknya	%	0,44		63,00	0,44		63,00	3,20		65,00	4,20	67,00	1,55	67,00	1,55	72,00	3,92	72,00	3,92		*		
04.02.17	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Angka potensi gangguan ideologi, politik, ekonomi pertahanan dan keamanan	Kejadian	1,80	12	12	1,80	12	12	2,26	12	12	2,63	12	2,66	12	3,03	12	3,21	12	3,21		*		
04.02.18	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	Angka potensi gangguan sosial budaya	Kejadian	0,05	12	12	0,05	12	12	0,15	12	12	0,16	12	0,14	12	0,14	12	0,19	12	0,19		*		
	UNSUR STAFF																								
5.05	SEKRETARIAT DAERAH																								
05.05.40	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur dan Instansi Pemerintah	Persentase SKPD yang nilai AKIPnya Baik/B hasil evaluasi Inspektorat (TIM) dari SKPD yang dievaluasi	%	0,8	72	70	0,8	72	70	0,8	78,6	75	0,64	82,1	1,01	85	0,63	85	0,74	85	0,74	Setda	*		

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2016			2017			2018			2019		2020		2021		Kinerja Akhir RPJMD		OPD	KE T
					Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja	Rp (Miliar)	Kinerja	Rp (Miliar)	Kine rja	Rp (Miliar)	Kine rja	Rp (Miliar)		
					Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target		Target		Target					
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
05.05.41	Program Pembinaan dan Pengembangan Reformasi Birokrasi	Persentase implementasi agenda reformasi birokrasi sesuai road map reformasi birokrasi	%	0,47	41,3	35	0,47	41,3	35	0,47	47,5	25	0,36	53,8	0,44	60	0,63	60	0,69	60	0,69		*
05.05.44	Program Perumusan Kebijakan Pelayanan Publik	Nilai rata-rata indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan SKPD	%	0,37	80	80	0,37	80	80	0,37	80	80	0,31	80	0,62	80	0,5	80	0,65	80	0,65		*
5.05	FUNGSI PENGAWASAN																						
05.05.15	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH pada Wilayah IRBAN I	Persentase laporan keuangan SKPD yang sesuai SAP dalam mendukung tercapainya WTP pada wilayah Irbani I	%	2,01	100	100	2,01	100	100	2,01	100	100	0,73	100	0,95	100	1,22	100	1,3	100	1,3	Inspekt orat	*
		Persentase rekomendasi temuan yang selesai ditindaklanjuti : Keuangan negara/daerah dan administrasi pada wilayah Irbani I	%		58,8	55		58,8	55		62,5	40		66,3		70		70		70			70
		Persentase hasil evaluasi SAKIP dengan nilai minimal A pada wilayah Irbani I	%		50	50		50	50		60	56		70		80		80		80			80
05.05.16	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan	Persentase laporan keuangan SKPD yang sesuai SAP dalam	%	1,47	100	100	1,47	100	100	1,47	100	100	0,77	100	0,96	100	1,05	100	1,47	100	1,47		*

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2016			2017			2018			2019		2020		2021		Kinerja Akhir RPJMD		OPD	KE T	
					Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja	Rp (Miliar)	Kinerja	Rp (Miliar)	Kine rja Targ et	Rp (Miliar)	Kine rja Targ et	Rp (Miliar)			
					Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi												Target
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18
	Kebijakan KDH pada Wilayah IRBAN II	<i>mendukung tercapainya WTP pada wilayah Irban II</i>																						
		<i>Persentase rekom temuan yang selesai ditindak lanjuti : keuangan negara/ daerah dan administrasi pada wilayah Irban II</i>	%		58,8	55		58,8	55		62,5	40		66,3	70		70		70				*	
		<i>Persentase hasil evaluasi SAKIP dengan nilai minimal A pada wilayah Irban II</i>	%		50	50		50	50		60	56		70	80		80		80					*
05.05.17	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH pada Wilayah IRBAN III	<i>Persentase Laporan Keuangan SKPD yang sesuai SAP dalam mendukung tercapainya WTP pada wilayah Irban III</i>	%		100	100		100	100		100	100		100	100		100		100				*	
		<i>Persentase rekom temuan yang selesai ditindak lanjuti : keuangan negara/ daerah dan administrasi pada wilayah Irban III</i>	%	2,11	58,8	55	2,11	58,8	55	2,11	62,5	40	0,83	66,3	70	0,97	70	1,03	70	1,28	70	1,28		*
		<i>Persentase hasil evaluasi SAKIP dengan nilai minimal A pada wilayah Irban III</i>	%		50	50		50	50		60	56		70	80		80		80					*

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2016			2017			2018			2019		2020		2021		Kinerja Akhir RPJMD		OPD	KE T
					Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja	Rp (Miliar)	Kinerja	Rp (Miliar)	Kine rja Targ et	Rp (Miliar)	Kine rja Targ et	Rp (Miliar)		
					Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	17	18	19	20	20	
FUNGSI PENUNJANG																							
5.01	PERENCANAAN																						
05.01.15	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase terpenuhinya aspek kualitas dalam dokumen perencanaan	%	1,13	80	82	1,13	80	82	1,13	85	83	0,92	90	1,49	90	1,91	90	2,48	90	2,48	Bappeda	*
05.01.16	Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase SKPD yang tercapai target programnya	%	0,76	90	90	0,76	90	90	0,76	90	90	0,81	90	0,44	90	0,43	90	0,56	90	0,56	Bappeda	**
5.02	KEUANGAN																						
05.02.17	Program Peningkatan Pertanggungjawaban Pendapatan dan Belanja Daerah	Persentase pemenuhan laporan keuangan yang tepat waktu	%	3,16	89	89	3,16	89	89	3,16	91	91	3,1	93	3,09	95	3,83	97	4,98	97	4,98	BPKAD	**
5.03	KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN																						
05.03.16	Program Pengadaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase pelaksanaan seleksi CPNS daerah	%	0,9	50	0	0,9	50	0	0,9	50	100	1	50	2,39	50	1,4	50	1,82	50	1,82	BKPP	**
		Persentase pelaksanaan ujian dinas dan seleksi kompetensi jabatan	%		50	100		50	100		50	66,67		50		60		60		60		**	
		Persentase penempatan PNS sesuai dengan analisis jabatan	%		70	100		70	100		70	100		70		70		70		70		**	
		Persentase ketepatan waktu kenaikan pangkat PNS	%		70	46,68		70	46,68		70	62		70		80		80		80		**	

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2016			2017			2018			2019		2020		2021		Kinerja Akhir RPJMD		OPD	KE T
					Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja	Rp (Miliar)	Kinerja	Rp (Miliar)	Kine rja Targ et	Rp (Miliar)	Kine rja Targ et	Rp (Miliar)		
					Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		Prosentase pelaksanaan pembinaan karier PNS	%		76,3	100		76,3	100		77,5	100		80		80		80		80			**
05.03.19	Program Penilaian dan Kapasitas Kinerja Aparatur	Persentase penilaian dan kapasitas kinerja aparatur	%	0,24	70	110	0,24	70	110	0,24	80	100	0,1	80	0,91	80	0,85	80	1,11	80	1,11		*
TOTAL							85,33			85,7735			100,73		164,39		142,2		163,36				

Tabel 7. 4: Indikasi Rencana Program Prioritas III yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019-2021

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2016		2017			2018			2019		2020		2021		Kinerja Akhir RPJMD		OPD	KE T.		
					Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja			Rp (Miliar)													
					Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target				Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	17	18	19	20	20		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB																								
2.01	TENAGA KERJA																							
02.01.17	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja	Persentase perselisihan hubungan industrial yang terselesaikan	%	0,48	76,19	95,5	0,48	76,19	95,5	0,48	77,51	100	0,59	90	0,70							**		
02.01.18	Program Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase TKI bermasalah	%	0,32	0,96	1,07	0,32	0,96	1,07	0,32	0,96	2,28	0,16	0,96	0,08							**		
02.01.16	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja Perusahaan	Persentase perselisihan hubungan industrial yang terselesaikan	%													90	0,85	90	1,11	90	1,11	**		
		Persentase kepesertaan pekerja penerima upah pada perusahaan dalam BPJS ketenagakerjaan	%														40	0,71	45	0,92	45	0,92	**	
2.08	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																							
02.08.16	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Persentase layanan informasi dan KRR	%		85	62,5	0,09	85	62,5	0,09	85	59,94	0,07	85	0,36							**		
02.08.17	Program Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS	Persentase remaja yang bermasalah dengan sex bebas, Napza termasuk HIV/AIDS	%	0,27	0,24	0,27	0,06	0,24	0,27	0,06	0,23	0,25	0,09									**		
02.08.16	Program Ketahanan Keluarga Sejahtera	Persentase kelompok tribina dan UPPKS	%													85	0,72	85	0,81	85	0,81	**		
02.08.18	Program Pengendalian Penduduk	Angka laju pertumbuhan penduduk	%	0,07	0,36	0,44	0,07	0,36	0,44	0,07	0,35	0,24	0,12									**		

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2016			2017			2018			2019		2020		2021		Kinerja Akhir RPJMD		OPD	KE T.	
					Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja	Rp (Miliar)	Kinerja	Rp (Miliar)	Kinerja	Rp (Miliar)	Kinerja	Rp (Miliar)			
					Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18
02.08.19	Program Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	Persentase peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR Mandiri	%	0,37	70	77,8	0,37	70	77,8	0,37	72	79,99	1,23										**	
02.08.17	Program Pengendalian Penduduk	Angka laju pertumbuhan penduduk	%	0,07	0,36	0,44	0,07	0,36	0,44	0,07	0,35	0,24	0,12	0,34	0,22	0,33	0,35	0,32	0,46	0,32	0,46		**	
		Persentase peran serta institusi masyarakat	%												80	0,54	80	0,29	80	0,38	80	0,38		**
2.03	PANGAN																							
02.03.15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Skor PPH Ketersediaan	Nilai/Angka	91	91	91,1	0,56	91	91,1	0,56	93	91,1	0,53	94	0,56								**	
02.03.16	Program Peningkatan Diversifikasi Pangan	Skor PPH Konsumsi	Nilai/Angka	1,15	70	87,21	1,15	70	87,21	1,15	71	87,21	1,07	88	1,27								**	
02.03.15	Program Peningkatan Ketahanan dan Diversifikasi Pangan	Skor PPH Ketersediaan	Nilai/Angka													95		95		95			**	
		Persentase penurunan penduduk rawan pangan	%														0,3		0,3		0,3			**
		Koefisien variasi harga pangan (beras) di tingkat produsen	%														≤ 5%		≤ 5%		≤ 5%			**
		Kondisi Harga GKP di Tingkat Produsen ≥ HPP	Rp./Kg														HPP = Rp, 3750/kg	3,08	HPP = Rp, 3750/kg	4,00	HPP = Rp, 3750/kg	4,00		Dinas Pertanian dan Pangan
		Skor PPH Konsumsi	Nilai/Angka														90,5		90,5		90,5			**
		Persentase Keamanan pangan segar	%														≥ 80%		≥ 80%		≥ 80%			**
2.06	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																							
02.06.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase pelayanan KTP-el kurang dari 2 jam	%	2,54	80	89	1,54	80	89	2,54	85	95	4,35	90	3,76	95	3,85	95	3,9	95	4,04	Dispend ukcapil	*	

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2016			2017			2018			2019		2020		2021		Kinerja Akhir RPJMD		OPD	KE T.
					Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja	Rp (Miliar)								
					Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
02.06.16	Program Pendataan dan Informasi Kependudukan	Persentase database kependudukan yang valid dan update	%	0,38	87	91	0,38	87	91	0,38	89	93	0,84	91	1,04	93	0,08	93	0,1	93	0,1		*
02.06.17	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Bayi lahir procoot pulang bawa akta	%		0	75	0,2	0	75	0,2	0,4	82	1,27	0,45	1,91	0,5	0,59	0,5	0,42	0,5	0,77		*
02.06.18	Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Persentase data kependudukan yang dimanfaatkan	%		87	88	1,35	87	88	1,35	89	100	5,04	91	0,45	93	0,08	93	0,1	93	0,1		*
		Jumlah inovasi pelayanan kependudukan yang dikembangkan	Inovasi		1	1		1	1		1	1		1	1	1	1	1	1	1	1		*
2.07	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																						
02.07.17	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan pemerintahan desa	Skala	1,14	77	76	0,79	77	76	1,14	78,5	78	0,96	80	1,43	90	3,37	90	3,39	90	4,39	DPMD	*
2.05	LINGKUNGAN HIDUP																						
02.05.17	Program Perlindungan dan Konservasi Lingkungan	Persentase peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi lingkungan	Skala	0,95	40	40	0,95	40	40	0,95	60	60	1,58	80	1,50	100	1,13	100	1,21	100	1,21		*
02.05.18	Program Rehabilitasi Hutan/Lahan	Indeks tutupan hutan/lahan	Skala	0,37	60,8	61,59	0,37	60,8	61,59	0,37	60,8	61,59	0,27	60,8	0,30	60,8		60,8		60,8		DLH	*
02.05.19	Program Pengembangan Laboratorium Lingkungan	Akreditasi laboratorium lingkungan	Parameter		12	19	0,6	12	19	0,6	16	27	1,65	19	0,75	22	0,93	22	0,97	22	1,21		**

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2016			2017			2018			2019		2020		2021		Kinerja Akhir RPJMD		OPD	KE T.
					Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja	Rp (Miliar)								
					Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
2.09	PERHUBUNGAN																						
02.09.15	Program Pengembangan Transportasi Laut	Persentase peningkatan aksesibilitas transportasi laut	%	0,09	12	12	0,09	12	12	0,09	14	14*	0,05	16	0,03								
02.09.16	Program Pengembangan Transportasi Udara dan Perkeretaapian	Persentase peningkatan aksesibilitas transportasi udara dan perkeretaapian	%	31,3	31,3	31,3	0,6	31,3	31,3	0,6	37,5	37,5*	0,07	43,8	0,00								
02.09.15	Program Pengembangan Angkutan	Persentase peningkatan aksesibilitas transportasi laut	%													18	0,35	18	0,38	18	0,38		
		Persentase peningkatan aksesibilitas transportasi udara dan perkeretaapian	%														50	0,85	50	1,11	50	1,11	
02.09.17	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase pengembangan prasarana dan fasilitas perhubungan	%	0,34	77,5	77,5	0,34	77,5	77,5	0,34	80	80*	0,35	82,5	0,15								
02.09.16	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase pengembangan prasarana dan fasilitas perhubungan	%													85	0,45	85	0,84	85	0,84		
02.09.18	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase pengguna jasa angkutan penumpang umum di bidang transportasi darat	%	82	82	82	0,82	82	82	0,82	84	84*	1,37	86	1,53								

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2016			2017			2018			2019		2020		2021		Kinerja Akhir RPJMD		OPD	KE T.
					Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja	Rp (Miliar)								
					Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
02.09.17	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase pengguna jasa angkutan penumpang umum di bidang transportasi darat	%													88	0,86	88	0,97	88	1,11		**
02.09.19	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Persentase kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	%	77,5	84	84	0,96	84	84	0,96	86	85*	0,66	88	0,83								**
02.09.18	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Persentase kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	%													90	1,2	90	1,03	90	1,31		**
02.09.20	Program Pengawasan dan Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Persentase potensi lokasi kemacetan dan kepadatan lalu lintas angkutan jalan	%	2,57	77,5	77,5	2,57	77,5	77,5	2,57	80	80*	3,65	82,5	3,74								**
02.09.19	Program Pengawasan dan Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Persentase potensi lokasi kemacetan dan kepadatan lalu lintas angkutan jalan	%													85	3,7	85	3,81	85	3,81		**
02.09.21	Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan	Persentase peningkatan sarana prasarana transportasi Darat	%	0,31	67,8	67,8	0,31	67,8	67,8	0,31	71,5	71,5*	0,1	79	0,07								**
02.09.20	Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan	Persentase peningkatan sarana prasarana transportasi Darat	%													79	7,78	79	10,11	79	10,11		**
02.09.22	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Indeks angka kecelakaan transportasi darat	%	1,44	40,38	39,73	1,44	40,38	39,73	1,44	37,61	37,61*	1,55	35,03	0,78								**
02.09.21	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Indeks angka kecelakaan transportasi darat	%													32,62	3,68	32,62	4,78	32,62	4,78		**

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2016			2017			2018			2019		2020		2021		Kinerja Akhir RPJMD		OPD	KE T.
					Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja	Rp (Miliar)								
					Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
02.09.23	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Kualitas prasarana dan fasilitas transportasi Darat	%	0,27	100	100	0,27	100	100	0,27	100	100*	0,33	100	0,53								**
02.09.22	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Kualitas prasarana dan fasilitas transportasi Darat	%												100	0,83	100	0,92	100	0,92		**	
02.09.24	Program Pengelolaan LPJU	Persentase panjang jalan terlayani LPJU	%	31	31	31,2	37,74	31	31,2	38,54	37	37*	51,6	43	40,15							**	
02.09.23	Program Pengelolaan LPJU	Persentase panjang jalan terlayani LPJU	%												49	31,13	49	30,5	49	40,5		**	
2.1	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																					**	
02.10.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa	Persentase infrastruktur IT yang berfungsi baik	%		62	65	0,47	62	65	0,47	65	92	1,11	94	1,18	95	1,35	95	1,42	95	3,67	Diskominfo	**
02.10.16	Program Pengembangan dan Penyebaran Informasi Pemerintah Daerah	Jumlah informasi pemerintah daerah yang tersebarluaskan	Informasi	0,31	250	273	0,31	250	273	0,31	275	261	0,75	300	2,28	325	0,68	325	0,88	325	0,88	Diskominfo	*
02.10.17	Program Pengembangan dan Pengelolaan Teknologi Informatika	Persentase aplikasi IT yang mendukung city branding dan layanan publik yang berfungsi baik	%	5,61	50	60	5,61	50	60	5,61	55	100	4,95	100	9,35	100	8,11	100	8,9	100	8,9	Diskominfo	**
2.14	STATISTIK																						
02.14.15	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Persentase data informasi dan statistik daerah yang tersusun dengan baik	%	0,4	100	100	0,3	100	100	0,6	100	100	0,59	100	1,44	100	0,67	100	0,73	100	1,39	Diskominfo	*

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2016			2017			2018			2019		2020		2021		Kinerja Akhir RPJMD		OPD	KE T.
					Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja	Rp (Miliar)								
					Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	18	19	20	20	
2.15	PERSANDIAN																						
02.15.15	Program Pengamanan Informasi Daerah	Persentase pengamanan informasi daerah yang terselenggara baik	%		100	100	0,25	100	100	0,25	100	100	0,3	100	1,15	100	0,4	100	0,51	100	0,51	Diskominfo	*
2.11	KOPERASI DAN USAHA MIKRO																						
02.11.15	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	%	81	81			82			83			84									
		Persentase pertumbuhan jumlah anggota koperasi	%	0,40	0,40		1,4	0,5		1,94	0,6		1,53	0,7	1,30								
02.11.16	Program Pengembangan Usaha Koperasi	Persentase koperasi sehat	%	81,3	81	81,3		81	81,3		82	83		83									
		Persentase peningkatan volume usaha koperasi	%	14,85	13,22	14,85	1,6	13,22	14,85	1,6	15,5	15,6	0,93	15,69	1,14								Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
02.11.15	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi	Persentase koperasi aktif	%													84		84		84			**
		Persentase peningkatan volume usaha koperasi	%													16,04	1,21	16,04	1,48	16,04	2,48		**
		Persentase peningkatan volume usaha koperasi	%		13,22	14,85		13,22	14,85		15,5	15,6		15,69									**
2.16	KEBUDAYAAN																						
02.16.15	Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya	Persentase budaya lokal yang dikembangkan	%		22	24	2,49	22	24	3,49	24	32	3,19	26	4,26								
		Jumlah budaya lokal yang dikembangkan	Event														28	3,53	28	3,59	28	6,59	Disbudpar
2.18	KEARSIPAN																						
02.18.15	Program Pengelolaan Arsip Statis dan Dinamis	Persentase arsip statis dan dinamis yang dikelola	%	0,25	80	80	0,25	80	80	0,25	80	80	0,14	90	0,14	90	0,92	91	1,14	91	1,14	Dinas Perpustakaan	**

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2016			2017			2018			2019		2020		2021		Kinerja Akhir RPJMD		OPD	KE T.
					Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja	Rp (Miliar)								
					Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
02.18.16	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah	Persentase arsip/dokumen daerah dalam kondisi baik	%	0,43	87	87	0,43	87	87	0,43	89	89	0,33	90	0,58	90	0,9	91	1,17	91	1,17	dan Kearsipan	**
02.18.17	Program Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Persentase sarpras kearsipan dalam kondisi baik	%	0,05	87	87	0,05	87	87	0,05	89	89	0,07	90	0,41	90	0,18	91	0,23	91	0,23		**
2.13	PEMUDA DAN OLAH RAGA																						
02.13.15	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Persentase pemuda terampil	%		40	6,35	1,09	40	6,35	1,09	30	40	0,29	40	0,70	50	0,6	52	0,78	52	0,78	Dinas Pemuda dan Olahraga	**
02.13.20	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	Jumlah atlet yang berprestasi	Orang	0,2	500	588	0,2	500	588	0,45	100	135	0,36	125	1,03	150	0,74	150	0,75	150	9,75		**
02.13.16	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Kepemudaan	Persentase pemuda terlatih	%	2,51	40	6,35	2,51	40	6,35	2,51	30	38	2,4	40	2,34	70	1,83	75	2,02	75	2,02		**
02.13.17	Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Jumlah duta anti narkoba meningkat	Orang		70	0		70	0		100	31	0,04	150	0,00	180	0,35	180	0,46	180	0,46		*
02.13.18	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Jumlah pemuda pelopor meningkat	Orang		23	9	1,22	23	9		28	14		33		38		38		38			*
		Persentase organisasi pemuda yang memenuhi ketentuan	%		80	80		80	80	1,52	85	80	1,45	90	1,34	95	1,59	95	1,67	95	1,67		*
02.13.19	Program Pembinaan Kepramukaan	Persentase anggota pramuka yang terfasilitasi kegiatannya	%	0,2	80	10,34	0,2	80	10,34	0,2	85	60	0,07	90	0,09	95	0,5	95	0,65	95	0,65		*
02.13.23	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase sarana dan prasarana yang memenuhi standart	%		3	0,8		3	0,8	7,88	3	100	0,82	3	3,18	3	1,77	3	1,84	3	1,84	*	

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2016			2017			2018			2019		2020		2021		Kinerja Akhir RPJMD		OPD	KE T.
					Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja	Rp (Miliar)	Kinerja	Rp (Miliar)	Kinerja	Rp (Miliar)	Kinerja	Rp (Miliar)		
					Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	18	19	20	20	
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																							
3.02	PARIWISATA																						
03.02.16	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	%	4,5	20	86,8	3,2	20	86,8	4,5	30	2,85	0	40	6,53							Disbudpar	*
		Persentase Peningkatan kunjungan wisatawan	%												10	2,71	10	2,94	10	7			
3.06	PERDAGANGAN																						
03.06.17	Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal	Persentase tertib niaga barang kena cukai	%	0,08	92	96,9	0,08	92	96,9	0,08	96	97,14	0,07	100	0,09	100	0,1	100	0,13	100	0,13	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	*
3.07	PERINDUSTRIAN																						
03.07.16	Program Pengembangan Sentra dan Kluster Industri	Persentase cakupan pengembangan sentra industri	%		55	53,75	0,23	55	53,75		60	57,89		65								Diinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian	*
		Persentase peningkatan jumlah IKM yang bermitra dalam kluster	%	0,23	5	0		5	0		0,23	7,5	17,14		10	0,67	15		15		15		
03.07.18	Program Perlindungan HKI dan Standardisasi Industri	Persentase peningkatan sertifikasi standardisasi dan HKI	%	0,29	50	26,52	0,29	50	26,52	0,29	50	10,05	0,1	50	0,20	50	0,36	50	0,47	50	0,47		*
03.07.18	Program Pembinaan Industri	Persentase produk industri hasil tembakau yang sesuai ketentuan	%															100		100			

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2016			2017			2018			2019		2020		2021		Kinerja Akhir RPJMD		OPD	KE T.
					Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja	Rp (Miliar)	Kinerja	Rp (Miliar)	Kinerja	Rp (Miliar)	Kinerja	Rp (Miliar)		
					Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
UNSUR STAFF																							
SEKRETARIAT DAERAH																							
05.05.18	Program Peningkatan Pelayanan dan Pengelolaan Surat Menyurat	Persentase Pelayanan dan Pengelolaan Surat Menyurat yang Tepat Waktu	%		100	100	0,26	100	100	0,26	100	100	0,26	100	0,26	100	0,26	100	0,26	100	0,26		
05.05.19	Program Dukungan Kelengkapan Penyelenggaraan Upacara dan Hari-hari Besar Nasional	Persentase penyelenggaraan upacara dan hari hari besar nasional yang terselenggara dengan baik	%		90	90	1,09	90	90	1,09	90	90	1,09	90	1,09	90	1,09	90	1,09	90	1,09		
05.05.20	Program Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	Peringkat LPPD	Peringkat		10	10	0,34	10	10	0,54	10		0,31	10	1,20	10	0,5	10	0,62	10	1,17		*
05.05.21	Program Kerjasama Pembangunan	Persentase kerjasama antar wilayah yang terlaksana dengan baik	%		86,3	85	0,29	86,3	85	0,49	90	100	0,6	90	1,38	90	0,83	90	1,26	90	1,26	Setda	*
05.05.22	Program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Persentase peningkatan aset tanah pemkab bersertikat	%		70	70	0,59	70	70	0,59	75	100	17,24	80	6,00	85	26,5	85	32,77	85	32,77		*
05.05.23	Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Persentase konflik pertanahan yang terfasilitasi	%		85	85	0,05	85	85	0,05	90	100	0,09	90	0,38	90	0,2	90	0,26	90	0,26		*
05.05.24	Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa	Persentase desa yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal Desa	%		15	15	0,83	15	15	1,12	31,6	25	1,36	48,3	2,73	65	0,87	65	1,12	65	1,12		*
05.05.25	Program Pembentukan Produk Hukum	Persentase produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	%		100	100	0,54	100	100	0,54	100	100	0,73	100	0,54	100	0,6	100	0,78	100	0,78		*
05.05.26	Program Peningkatan Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum	Persentase produk hukum yang terpublikasi	%		100	100	0,3	100	100	1,96	100	100	0,24	100	0,43	100	0,25	100	0,33	100	0,33	Setda	*
05.05.27	Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Penyelesaian Masalah Hukum	Persentase penyelesaian masalah hukum	%		87,5	100	1,24	87,5	100	3,2	90	100	1,5	92,5	1,58	95	1,52	95	1,63	95	3,5	Setda	*

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2016			2017			2018			2019		2020		2021		Kinerja Akhir RPJMD		OPD	KE T.	
					Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja				Rp (Miliar)												
					Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18
05.05 .28	Program Fasilitas Keagamaan dan Masyarakat	Persentase kajian keagamaan dan kemasyarakatan yang dimanfaatkan	%		100	100	2,3	100	100	2,8	100	25	3,3	100	6,47	100	2,77	100	2,91	100	3,6		*	
		Persentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang terfasilitasi	%		100	100		100	100		100	100		100		100	100		100		100			*
05.05 .29	Program Dukungan Pelayanan Administrasi Kesejahteraan Rakyat	Persentase kesesuaian dokumen pengajuan pelayanan administrasi kesejahteraan rakyat	%		100	100	0,09	100	100	0,09	100	100	0,3	100	0,15	100	0,15	100	0,2	100	0,2		*	
05.05 .30	Program Penyusunan Kebijakan Pembangunan Daerah	Persentase rumusan kebijakan bidang pembangunan yang dimanfaatkan	%		85	85	0,23	85	85	0,23	85	85	0,18	85	0,08	85	0,08	85	0,1	85	0,1		*	
05.05 .31	Program Fasilitas Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pengadaan barang dan jasa yang akuntabel, efektif dan efisien	%		100	100	0	100	100	0	100	100	1,36	100	1,22	100	1,61	100	2,1	100	2,1		*	
05.05 .32	Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase informasi dan dokumen pelaksanaan pembangunan daerah yang memenuhi aspek kualitas	%		85	85	0,45	85	85	0,45	85	85	0,46	85	0,24	85	0,46	85	0,6	85	0,6		*	
05.05 .33	Program Peningkatan Pelayanan Kehumasan	Persentase kebijakan pemerintah daerah yang terpublikasikan	%		100	106	8,82	100	106	10,82	100	85	8,17	100	11,26	100	10,23	100	11,71	100	11,71		*	

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2016			2017			2018			2019		2020		2021		Kinerja Akhir RPJMD		OPD	KE T.
					Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja	Rp (Miliar)								
					Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target		Target		Target					
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	20			
05.05.34	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/ Wakil KDH	Persentase pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang terlaksana baik	%		90	97,55	6,85	90	97,55	6,85	90	90	8,1	90	11,13	90	6,85	90	8,91	90	8,91		*
05.05.35	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pelaksanaan Kebijakan KDH pada Wilayah IRBAN IV	Persentase Laporan Keuangan SKPD yang sesuai SAP dalam mendukung tercapainya WTP pada wilayah Irban IV	%	2,11	100	100		100	100		100	100		100		100		100		100			
		Persentase rekam temuan yang selesai ditindak lanjuti : keuangan negara/ daerah dan administrasi pada wilayah Irban IV	%		58,8	55	2,11	58,8	55	2,11	62,5	40	0,83	66,3	0,97	70	0,98	70	1,18	70	1,18		
		Persentase hasil evaluasi SAKIP dengan nilai minimal A pada wilayah Irban IV	%		50	50		50	50		60	56		70		80		80		80		80	
05.05.36	Program Peningkatan dan Pengelolaan Aset Kesekretariatan Daerah	Persentase aset Sekretariat Daerah yang dikelola dengan baik	%		100	90	0,91	100	90	0,91	100	100	1,82	100	2,15	100	0,88	100	1,15	100	1,15		*
05.05.37	Program Pengembangan dan Pengendalian Perekonomian Daerah	Persentase data dan informasi perekonomian daerah yang digunakan untuk policy brief	%		100	80	1,17	100	80	1,69	100	100	1,69	100	1,40	100	3	100	3,9	100	3,9		*
05.05.38	Program Pembinaan dan Penataan Kelembagaan	Persentase SKPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran	%		100	95	0,18	100	95	0,18	100	100	0,33	100	0,31	100	0,3	100	0,39	100	0,39		*
05.05.39	Program Peningkatan Standar Kompetensi dan Disiplin Aparatur	Persentase PNS yang kompetensinya sesuai standar kebutuhan organisasi	%		32,5	48	0,49	32,5	48	0,49	50	40	0,15	60	0,65	70	0,5	70	0,65	70	0,65		*
		Persentase tingkat disiplin PNS	%		80			80			85			90		95		95		95			*
05.05.42	Program Pengembangan Ekinerja	Persentase pegawai yang berkinerja baik	%		65	82	0,56	65	82	0,56	70	75	0,42	75	0,62	80	0,4	80	0,52	80	0,52		*
05.05.43	Program Pembinaan dan Penataan Ketatalaksanaan	Persentase SKPD yang telah menyusun SOP pelayanan sesuai per- UU-an	%		55	45	0,07	55	45	0,07	60	70	0,06	65	0,00	70	0,1	70	0,13	70	0,13		*
05.05.45	Program Pembinaan Inovasi Daerah	Persentase SKPD yang mempunyai inovasi kategori baik	%		15	15	0,27	15	15	0,27	20	25	1,04	25	0,76	30	0,15	30	0,2	30	0,2		*

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2016			2017			2018			2019		2020		2021		Kinerja Akhir RPJMD		OPD	KE T.							
					Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja	Rp (Miliar)															
					Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi												Target	Realisasi					
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18	17	18	19	20	20	
05.05.46	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Bupati/Wakil Bupati	Persentase tingkat kepuasan aparatur terhadap persediaan administrasi perkantoran	%		90	88	12,3	90	88	14,3	90	90	14,6	90	21,74	90	15,1	90	15,1	90	15,1		*							
05.05.48	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bupati/Wakil Bupati	Persentase tingkat kepuasan terhadap tersedianya sarana dan prasarana aparatur	%		90	115,2	8,68	90	115,2	9,68	90	90	9,68	90	9,10	90	9,68	90	9,68	90	9,68		*							
05.05.49	Program Dukungan Penyelenggaraan Upacara dan Hari-hari Besar Nasional	Persentase penyelenggaraan upacara dan hari-hari besar nasional yang terselenggara dengan baik	%	90	90	90	0,5	90	90	0,5	90	90	0,6	90	0,70	90	0,75	90	0,75	90	0,75		*							
5.05	SEKRETARIAT DPRD																													
05.05.47	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase Raperda yang disahkan menjadi perda tepat waktu sesuai prolegda	%	19,03	62	70	17,25	62	70	19,03	63	76	5,52	76	23,71	77	17,72	78	18,54	78	18,54	Sekwan	**							
	Persentase bimtek penyusunan UU yang berkualitas	%	100		0	100	100	100	100		100	100		100		100		100		100			100	100	100	100	100	100	**	
	Persentase penyebaran perda	%	100		100	100	100	100	100		100	100		100		100		100		100			100	100	100	100	100	100	100	**
	Persentase perda yang disosialisasikan	%	100		0	100	100	100	100		100	100		100		100		100		100			100	100	100	100	100	100	100	**

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2016			2017			2018			2019		2020		2021		Kinerja Akhir RPJMD		OPD	KE T.		
					Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja	Rp (Miliar)										
					Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi												Target	Realisasi
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18	19
		<i>Persentase terselenggaranya rapat dan risalah persidangan yang berkualitas</i>	%		83	100		83	100		83	100		100		100		100		100		100		**	
		<i>Presentase konsultasi, koordinasi dan studybanding oleh alat kelengkapan dewan</i>	%													100		100		100		100		**	
		<i>Presentase aspirasi yang ditindaklanjuti</i>	%													100		100		100		100		**	
		<i>Presentase pemahaman pimpinan & anggota DPRD ttg subttansi, hasil mengikuti bimtek</i>	%													100		100		100		100		**	
		<i>Presentase daftar inventarisasi masalah yg ditindaklanjuti dan disusun berdasarkan hasil kunker</i>	%													100		100		100		100		**	
05.05.50	Program Peningkatan Tata Kelola Kesekretariatan DPRD	Presentase publikasi kegiatan DPRD	%	1,95	85	100	0,15	85	100	1,95	85	100	0,15	100	2,51	100	0,2	100	0,26	100	0,26	100	0,26	**	
FUNGSI PENUNJANG																									
5.04	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																								
05.04.15	Program Penelitian dan Pengembangan	<i>Persentase data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai policy brief</i>	%		80	80		80	80		80	80		80	-	80	3,5	80	3,89	80	3,89	80	3,89	Bappeda	*

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2016			2017			2018			2019		2020		2021		Kinerja Akhir RPJMD		OPD	KE T.
					Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja	Rp (Miliar)	Kinerja	Rp (Miliar)	Kinerja	Rp (Miliar)	Kinerja	Rp (Miliar)		
					Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
5.01	PERENCANAAN																						
05.01.17	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase data dan informasi perencanaan pembangunan ekonomi yang dimanfaatkan sebagai policy brief	%	2,26	80	80	0,64	80	80	2,26	80	80	0,72	80	2,54	80	1,33	80	1,74	80	1,97		*
05.01.18	Program Perencanaan Pembangunan Kesra dan Pemerintahan	Persentase data dan informasi perencanaan pembangunan kesra dan pemerintah yang dimanfaatkan sebagai policy brief	%		80	80	0,93	80	80	1,68	80	80	0,85	80	1,38	80	1,3	80	1,42	80	1,53	Bappeda Bappeda Bappeda	*
05.01.19	Program Perencanaan Pembangunan Sarpras Wilayah dan Lingkungan Hidup	Persentase data dan informasi perencanaan pembangunan sarana dan prasarana wilayah dan lingkungan hidup yang dimanfaatkan sebagai policy brief	%	2,21	80	80	2,21	80	80	2,21	80	80	1,24	80	2,71	80	1,75	80	1,79	80	1,79		*
5.02	KEUANGAN																						
05.02.15	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pelayanan Kepada masyarakat dalam pencairan SP2D	%		89	89		89	89	1,4	91	91	1,55	95	1,88	95	1,39	97	1,71	97	1,71		**
05.02.16	Program Peningkatan dan Pengembangan Perencanaan dan Evaluasi Anggaran Daerah	Persentase SKPD dalam menyusun RKA, DPA dan DPPA tepat waktu	%		89	89	4	89	89	4,8	91	91	4,01	100	6,45	100	4,15	100	4,23	100	5,64	BPKAD	**

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2016			2017			2018			2019		2020		2021		Kinerja Akhir RPJMD		OPD	KE T.	
					Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja	Rp (Miliar)									
					Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi												Target
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18
05.02.18	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Persentase peningkatan kinerja Aset Daerah	%		87	87	1,5	87	87	1,5	89	89	1,52	90	2,31	92	1,73	95	1,8	95	2,03		**	
05.02.19	Program Perumusan Kebijakan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan potensi pendapatan daerah	%	1	13	23,2	1	13	23,2	1	14	26,3	0,94	15	1,48								**	
		Persentase pengendalian administrasi dinas penghasil berbasis IT	%		17	83,17	17	83,17	18		72,11	19												**
		Persentase peningkatan pelaporan realisasi pendapatan yang tepat waktu	%		70	83,33	70	83,33	75		91,67	80												
05.02.19	Program Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Daerah	Persentase pengujian kepatuhan wajib pajak	%													60		70		70		BAPEND A	**	
		Persentase peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi	%													70	1,07	80	1,08	80	1,08		**	
		Persentase peningkatan pelaporan realisasi pendapatan yang tepat waktu	%													12		12		12			**	
05.02.20	Program Validasi, Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah	Persentase kesesuaian obyek dan subyek pajak / retribusi daerah	%	0,49	90	100	0,49	90	100	0,49	92	100	0,48	94	0,76								**	

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2016			2017			2018			2019		2020		2021		Kinerja Akhir RPJMD		OPD	KE T.
					Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja	Rp (Miliar)								
					Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		Persentase penetapan pajak dan retribusi yang ditagih	%		100	100		100	100		100	100		100									**
05.02.21	Program Intensiifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah	Persentase realisasi PBB	%	1,56	74	76,26	1,56	74	76,26	1,56	74	75,05	1,1	75	3,08								**
		Persentase realisasi BPHTB	%		45	158,68		45	158,68		45,5	117,46		46,3									
05.02.20	Program Intensiifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah	Persentase kesadaran wajib pajak meningkat	%													65	1,57	70	1,69	70	1,69		**
		Peningkatan jumlah wajib pajak	Objek Pajak													1500		2000		2000			**
		Persentase peningkatan pengelolaan pendapatan berbasis teknologi informasi	%													50	1,29	60	1,3	60	1,3		**
5.03	KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN																						
05.03.15	Program Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan SDM aparatur melalui pelaksanaan Diklat	%	1,56	80	140,61	1,56	80	140,61	1,56	80	100	0,98	80	5,33	80	3,03	85	2,12	85	2,12		*
05.03.17	Program Pengendalian Sumber Daya Aparatur	Persentase penyelesaian kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	%	0,33	80	100	0,22	80	100	0,33	80	100	0,28	80	0,58	90	0,25	100	0,32	100	0,48		**
05.03.18	Program Peningkatan Kualitas Data dan Informasi	Persentase pelaksanaan updating data kepegawaian	%	0,26	81,3	330	0,26	81,3	330	0,26	82,5	77,73	0,11	85	0,39	85	0,15	85	0,2	85	0,2		*

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2016			2017			2018			2019		2020		2021		Kinerja Akhir RPJMD		OPD	KE T.
					Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja	Rp (Miliar)								
					Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
4.01	Penunjang Lain																						
04.01.15	Program Penyusunan RKPD Kabupaten di Kecamatan	Jumlah dokumen Rancangan RKPD hasil Musrenbang Kecamatan	Dokumen	1	1	1	0,37	1	1	0,37	1	1	0,69	1	0,37								
04.01.16	Program Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	%	2,46	20	20	2,46	20	20	2,46	20	21	4,85	22	0,37								**
04.01.17	Program Pemasarakatan Minat dan Budaya Baca di Kecamatan	Persentase pengunjung perpustakaan di Kecamatan	%	0,14	1	1	0,14	1	1	0,14	1	1,2	0,02	1,5	0,01								**
04.01.18	Program Penegakan Perda dan Perbup di Kecamatan	Jumlah pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan	Kasus	0,55	5	5	0,55	5	5	0,55	5	3,11	0,57	3	0,08								**
04.01.19	Program Fasilitas Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan	%	0,41	20	20	0,41	20	20	0,41	20	21	0,43	22	0,24								**
04.01.20	Program Fasilitas Penyelenggaraan Kecamatan Sehat	Persentase desa/kelurahan sehat	%	70	75	75	0,37	75	75	0,37	80	80	0,37	85	0,04								**

Kecamatan

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2016			2017			2018			2019		2020		2021		Kinerja Akhir RPJMD		OPD	KE T.	
					Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja		Rp (Miliar)	Kinerja	Rp (Miliar)									
					Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi												Target
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18
04.01 .15	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah dokumen Rancangan RKPD hasil Musrenbang Kecamatan	Dokumen													1	0,38	1	0,38	1	0,38		** *	
		Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	%														23	1,91	23	1,99	23	1,99		** *
		Persentase pengunjung perpustakaan di Kecamatan	%														1,7	0,15	1,7	0,16	1,7	0,16		** *
		Jumlah pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan	Kasus														2	0,6	2	0,62	2	0,62		** *
		Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan	%														23	0,45	23	0,47	23	0,47		** *
		Persentase desa/kelurahan sehat	%														90	0,37	90	0,37	90	0,37		** *
		Persentase kondisi sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik	%														72,5	0,77	75	0,78	75	0,78		** *
TOTAL						150,07			202,11				204,02		240,46		218,56		242,38					

Keterangan :

*** mengalami perubahan program datau indikator

** mengalami perubahan target indikator

* tidak mengalami perubahan



BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Berdasarkan Program Prioritas dan Pendanaan Program Bab VII, selanjutnya menetapkan indikator kinerja daerah. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pembangunan daerah, khususnya dalam pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, dan program pembangunan daerah, yang meliputi aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau komposisinya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan.

Sebagai sebuah daerah otonom, Kabupaten Banyuwangi diwajibkan menetapkan target-target capaian dari indikator-indikator yang disepakati bersama antara pemerintah Kabupaten dengan para pemangku kepentingan di Kabupaten Banyuwangi. Target pencapaian ini adalah sebuah kunci kinerja yang pada akhirnya menjadi ukuran efektivitas dan efisiensi sebuah tata kelola pemerintahan secara umum yang sasaran utamanya adalah pemenuhan kebutuhan

masyarakat melalui ketersediaan pelayanan publik. Target capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah disajikan sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 8. 1: Realisasi Capaian IKU Tahun 2016-2018 dan Proyeksi Capaian IKU Tahun 2019-2021
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi**

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Realisasi			Target			Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Indeks Pembangunan Manusia	skala	67,70	69,00	69,64	70,06	71,25	72,10	72,95	72,95
2	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,01	5,38	5,45	5,84	5,86	5,90	5,94	5,94
3	Angka Kemiskinan	%	9,29	8,79	8,64	7,80	7,48	7,01	6,55	6,55
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	77,95	82,05	84,71	86,77	88,38	90,76	93,14	93,14

Perumusan indikator kinerja sasaran (*Impact*) dituangkan tabel sebagai berikut:

Tabel 8.2: Realisasi Capaian Indikator Sasaran Tahun 2016-2018 dan Proyeksi Capaian Indikator Sasaran Tahun 2019-2021 Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

No.	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2015	Realisasi			Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8		9
1	Aspek Kesejahteraan								
1.1	Indeks Pendidikan	0,56	0,58	0,58	0,58	0,60	0,61	0,62	0,62
1.2	Indeks Kesehatan	0,77	0,77	0,77	0,78	0,79	0,80	0,81	0,81
1.3	Indeks PPP	0,72	0,74	0,74	0,75	0,76	0,77	0,78	0,78
1.4	Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan	-	-	5,48	6,02	6,04	6,45	7,02	7,02
2	Aspek Pelayanan Umum								
2.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	65,31	66,82	66,84	66,82	67,76	68,39	68,39	68,39
2.2	Tingkat pengangguran terbuka	2,55	2,55	3,07	3,67	3,28	3,08	2,98	2,98
2.3	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	13,5	14	11,73	1,62	12,5	12,3	12,1	12,1

No.	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2015	Realisasi			Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
2.4	Indeks Pembangunan Masyarakat	-	-	0,66	0,67	0,68	0,69	0,70	0,70
2.5	Indeks Pembangunan Gender	86,01	-	86,20	86,44	86,50	86,55	86,60	86,60
2.6	Indeks Desa Membangun	-	-	0,69	0,77	0,80	0,81	0,82	0,82
2.7	Predikat SAKIP	B	A	A	A	A	A	AA	AA
2.8	Indeks Reformasi Birokrasi	-	69	73,5	75	76	77	78	78
2.9	Opini WTP BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Aspek Daya Saing								
3.1	Pertumbuhan Nilai Investasi	-48,77%	74,54%	-21,39%	54%	68%	69%	70%	70%
3.2	Indeks Gini	0,34	0,29	0,34	0,34	0,28	0,28	0,27	0,27
3.3	Indeks Inovasi Daerah	NA	NA	NA	15.370	15.500	15.750	16.000	16.000

BAB IX

PENUTUP



Landasan utama dilakukannya perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021 yang meliputi penyesuaian regulasi dalam penyusunan RPJMD, dari Permendagri 54 tahun 2010 menjadi Permendagri 86 Tahun 2017, hasil evaluasi RPJMD yang menunjukkan terdapat isu-isu yang telah selesai dan urgen untuk memperoleh treatment dalam penyelesaiannya, peningkatan efektifitas dan efisiensi pembangunan daerah seiring dengan perubahan dinamika situasi dan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menjalankan urusannya, serta adanya perubahan kebijakan nasional menjadi Perubahan RPJMD dimaksud merupakan dokumen strategis bagi pembangunan Kabupaten Banyuwangi lima tahun ke depan dan merupakan dokumen yang menerjemahkan cita-cita Kepala Daerah Terpilih yang dielaborasi dalam visi dan misi. Keterpaduan langkah dalam mencapai tujuan, upaya-upaya yang akan dilakukan serta penentuan keterlibatan berbagai pihak serta pemangku kepentingan dijabarkan dalam dokumen Perubahan RPJMD ini.

9.1. Pedoman Transisi

Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Banyuwangi untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun sesuai dengan kewenangan kabupaten dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2005-2025 dan RTRW Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032 serta memperhatikan RPJMN 2015-2019.

Dokumen Perubahan RPJMD selanjutnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah. RKPD merupakan perencanaan tahunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya. Sebagaimana amanat Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dinyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Oleh karenanya RPJMD Kabupaten Banyuwangi dapat dikatakan sebagai muara seluruh pelaksanaan pembangunan lima tahun diwilayah Kabupaten Banyuwangi yang perlu diacu oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Banyuwangi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang diharapkan.

Dalam konteks Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi, terdapat 3 alasan utama Perubahan RPJMD Kabupaten Banyuwangi yang meliputi: 1) Penyesuaian regulasi dalam penyusunan RPJMD, dari Permendagri 54 tahun 2010 menjadi Permendagri 86 Tahun 2017; 2) Hasil evaluasi RPJMD yang menunjukkan terdapat isu-isu yang telah selesai dan urgen untuk memperoleh treatment dalam penyelesaiannya; dan 3) Peningkatan efektifitas dan efisiensi pembangunan daerah seiring dengan perubahan dinamika situasi dan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menjalankan urusannya.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir, maka ditetapkan pedoman transisi sebagai berikut :

1. RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD masa transisi yaitu tahun pertama dibawah kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) pada periode berikutnya.
2. RPJMD sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa pemerintahan baru.

3. Selanjutnya RKPd masa transisi merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil pemilukada pada periode berikutnya, yang kemudian akan disesuaikan dengan RPJMD yang baru.

9.2. Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021 disusun dengan memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Timur serta RPJM Nasional dalam kerangka sinkronisasi pembangunan regional dan nasional. Dengan adanya Dokumen Perubahan RPJMD ini, maka ditetapkan kaidah–kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perubahan RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Perubahan Renstra PD. Oleh karena itu seluruh PD di lingkup Pemerintah Kabupaten Banyuwangi wajib menyusun Perubahan Renstra Tahun 2016 – 2021 yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan prioritas, dan unggulan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman kepada Perubahan RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016–2021 untuk menjamin konsistensi dan kontinuitas program, kegiatan beserta pendanaan yang ditetapkan oleh kepala PD dan disahkan oleh Bupati.
2. Perubahan Renstra PD sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja tahunan (Renja PD) yang selanjutnya dilaksanakan melalui program dan kegiatan.
3. Sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 - 2021 adalah merupakan sasaran dan indikator kinerja Kabupaten, Perangkat Daerah sebagai instansi pelaksana wajib mendukung tercapainya sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen tersebut, disamping merumuskan sasaran dan indikator kinerja bagi kepentingan masing-masing Perangkat Daerah.
4. Dalam hal program prioritas pemerintah daerah yang mempunyai hubungan dengan prioritas provinsi dan prioritas nasional dimana dimungkinkan pemerintah daerah tidak mampu membiayai, dapat dilaksanakan melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (*Public Private Partnership*) maupun melalui pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dari pelaku usaha daerah yang tersebar di berbagai daerah di Kabupaten Banyuwangi atau di Jawa

Timur, serta kerjasama kemitraan dengan Lembaga Non Pemerintah dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

5. Terhadap SOTKD baru yang dibentuk setelah Perubahan RPJMD ditetapkan, dapat dilakukan penyesuaian terhadap dokumen Perubahan RPJMD ini.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perubahan RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 - 2021, Bappeda Kabupaten Banyuwangi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penjabaran Perubahan RPJMD beserta indikatornya kedalam Perubahan Renstra PD serta ketercapaian dalam pelaksanaannya.

Perubahan RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021, menjadi pedoman penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Perubahan Renstra-PD) lingkup Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, dan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyuwangi.